GERBANG KEBANGKITAN
Revolusi Islam dan Khomeini dalam Perbincangan

Kalim Siddiqui
Hamid Algar,
dkk.

Gerbang Kebangkitan Revolusi Islam Dan Komeini
Dalam Perbincangan

GERBANG KEBANGKITAN
Revolusi Islam dan Khomeini dalam Perbincangan

Kalim Siddiqui
Hamid Algar,
dkk.

GERBANG KEBANGKITAN
Revolusi Islam dan
Khomeini
dalam Perbincangan

Diterjemahkan dari beberapa
kelompok artikel dalam beberapa
judul buku terpisah berbahasa
Inggris, dari berbagai penerbit.

SP. 84. 113
Cetakan Pertama, Maulud 1405 – November 1984
Penerbit • Shalahuddin Press
Lembaga Pengembangan Informasi
Da'wah Islam
Jl. Candrakirana 23 Yogyakarta.
Penterjemah • Team Naskah Shalahuddin Press,
AE Priyono, AH Fauzan, Eddy S, Iswalaono,
Sayid Umar.
Penyunting • Mustofa W. Hasyim
Disiapkan oleh Bengkel Grafis Gelanggang
Disain sampul • Ari Widjaja
Tata Letak • Buldanul Khuri Ch dan
S. Eko Purwati

PENGANTAR

FENOMENA kebangkitan Islam di dunia makin terasa. Indikatornya cukup banyak. Kebangkitan meraih supremasi di bidang sains misalnya telah dirintis oleh Prof. Dr. Abdus Salam, pemegang hadiah Nobel untuk Fisika 1979. Di bidang ekonomi muncul rintisan-rintisan baru, mulai dari penataan konsep sampai ke pembentukan lembaga-lembaga operasionalnya. Di bidang kemasyarakatan, seperti yang terjadi di Indonesia, fenomena kebangkitan muncul dalam berbagai bentuk kegiatan kalangan muda, antara lain misalnya, pengembangan masyarakat dengan kampus sebagai pusatnya yang ini digerakkan oleh intelektual muda Islam bersama mahasiswanya. Atau fenomena ramai-ramai kembali mengikat diri dan mencari identitas Islam, di mana yang sangat menonjol adalah fenomena Jilbab.

Indikator paling kuat adalah munculnya revolusi Islam di Iran yang berlangsung pada tahun 1978–1979. Revolusi yang mampu mengubah orientasi dan peta masyarakat Iran yang semula sekularistik menjadi masyarakat yang berjuang menghidupkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Revolusi ini di samping membangkitkan simpati umat di bagian dunia yang lain tak urung juga membangkitkan kembali problem domestik kuno yang sebenarnya sudah tidak relevan dengan tuntutan zaman; yaitu problem

Sunni-Syiah. Dengan demikian muncul reaksi pro dan kontra.

Sangat langkanya informasi yang sampai pada kita menyebabkan gambaran tentang apa sesungguhnya revolusi Islam menjadi kabur, situasi pro dan kontra di atas menambah keruhnya gambaran tersebut. Kehadiran buku ini jelas tidak untuk menambah keruhnya gambaran. Justru sebaliknya, dari para penulis yang punya otoritas dan telah melihat keadaan di Iran dengan mata kepala sendiri kami menyajikan informasi yang cukup bernilai. Kami bermaksud menyajikan informasi yang cukup lengkap di mana perbincangan tentang apa dan bagaimananya Revolusi Islam, tentang bagaimana peranan ulama sebagai kekuatan alternatif yang menggerakkan revolusi dan perbincangan tentang Khomeini sebagai Imam dirangkum menjadi satu kesatuan perbincangan yang menyeluruh.

Fakta-fakta dan pemikiran yang terkandung dalam buku ini dengan demikian bisa menjernihkan dan membebaskan kita dari prasangka. Gerbang kebangkitan pun makin terbuka, buat kita melangkah lewat di tengahnya ●

Penerbit

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN

REVOLUSI ISLAM Iran merupakan suatu pengalaman baru dalam sejarah modern. Revolusi ini juga merupakan sesuatu yang 'baru' bagi orang-orang Islam – kaum revolusioner yang asli. Hasilnya menimbulkan kebingungan di kalangan orang-orang yang memandang rendah Islam dan di kalangan banyak orang Islam sendiri. Proses-proses suatu revolusi yang digerakkan oleh Islam tidak banyak dipahami. Reaksi awal terhadap Revolusi Islam di Iran berkisar antara harapan yang diperbaharui di kalangan massa dan remaja Islam di mana-mana sampai ke ketakutan di kalangan golongan orang-orang Islam yang berkuasa serta rezim-rezim mereka.

Bahkan orang-orang dalam pergerakan yang secara luas berdasarkan Islam yang dahulunya berusaha mendirikan 'Negara Islam' melalui jalan nonrevolusioner, setelah memberikan dukungan yang menggebu-gebu pada awal mulanya, sekarang terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang membantu kekuatan-kekuatan kontrarevolusi.

Di luar dunia Islam, Amerika Serikat dan Uni Sovyet – dengan tanpa menyebut sekutu-sekutu mereka masing-masing dari Eropa dan 'Dunia Ketiga'– telah memutuskan untuk bekerja sama dalam suatu kampanye bersama untuk menentang Revolusi Islam. Tujuan pertama mereka adalah

mengucilkan dan 'mengekang' Iran, dan akhirnya menghancurkannya sebagaimana telah mereka lakukan terhadap rezim nasionalis Muhammad Mossadeq pada tahun 1953.

Tetapi Negara Islam Iran adalah berbeda dengan Chilinya Allande, Cekoslowakianya Dubcek, Hongarianya Nage, atau Pakistannya Yahya Khan. Negara Islam Iran adalah suatu kenyataan baru yang tak bisa ditangkal oleh senjata imperialisme. Perlawanan Iran terhadap Amerika Serikat kekuatan kolonial yang menguasai Iran sebelum Revolusi adalah intisari dari semangat Islam. Iran telah berhasil menahan mata-mata Amerika Serikat dan staf-staf yang lain selama beberapa bulan demi menuntut keadilan – pengembalian bekas penguasa M. Reza Khan dari pengembalian kekayaan Iran yang telah dicuri dan yang sekarang disimpan di Amerika Serikat. Tak ada protes maupun pamer 'kekuatan' dan 'senjata' bisa membelokkan kepemimpinan Revolusioner dari tujuannya atau membujuk rakyat Iran agar berpikir kembali tentang Revolusi mereka.

Setiap orang harus belajar untuk hidup dengan suatu kenyataan baru. Dunia telah mengalami suatu perubahan mendasar. Tak ada sesuatu pun, bahkan tidak juga invasi yang berhasil terhadap Iran oleh kekuatan gabungan Amerika Serikat – Uni Sovyet, akan mengembalikan dunia ke bentuknya semula seperti sebelum Revolusi Islam. Banyak revolusi Islamis yang baru dewasa ini sedang dibina di berbagai penjuru dunia. Semua orang tertindas di dunia – Islam dan non-Islam – telah menemukan suatu juara baru dan suatu alternatif baru.

Semua tema ini diajukan dalam suatu seminar khusus di London pada tanggal 1 Maret 1980. Seminar tersebut diadakan oleh the Muslim Institute untuk memperingati ulang tahun pertama Revolusi Islam. Tiga di antara keempat makalah yang tercantum dalam buku ini diajukan dalam seminar tersebut. Makalah oleh Iqbal Asaria tentang latar belakang Revolusi diajukan dalam suatu seminar dalam lingkungan the Muslim Institute sendiri. Buku ini, bersama

dengan penerbitan suatu diskusi tentang empat makalah yang diadakan di London pada musim panas pada tahun 1979, kami harapkan akan memberikan bahan pendahuluan untuk studi dan pemahaman terhadap Revolusi Islam.

KS

The Muslim Institute
London
10 Mei 1980

I
PERBINCANGAN TENTANG REVOLUSI

* *Diterjemahkan dari ISLAMIC REVOLUTION: ACHIEVEMENTS, OBSTACLES AND GOALS, karangan Kalim Siddiqui, dkk. Terbitan Islamic Research Institute, Malaysia.*

Bab 1. Revolusi Islam: Pencapaian, Rintangan dan tujuan

Oleh • Kalim Siddiqui

BARU-BARU ini saya beruntung bisa berkunjung ke Iran selama dua minggu. Saya adalah salah seorang dari ketiga ratus tamu dari seluruh bagian Umat yang diundang ke Iran untuk bersama-sama merayakan Tahun Baru 1400 Hijriah, dan ulang tahun pertama Revolusi Islam. Dalam perayaan tersebut hadir juga seorang wartawan dari Polandia. Saya tanyakan kepadanya apakah pendapatnya tentang Revolusi Islam dan dia menjawab bahwa revolusi tersebut bukan merupakan suatu revolusi kelas. Itulah keberatannya terhadap Revolusi Islam. Karena itu, perlulah bagi kita untuk mencoba membedakan Revolusi Islam dari semua revolusi lain. Kita harus benar-benar mengerti apa saja yang terlibat dalam suatu revolusi Islamis. Jadi, pada sore ini saya akan mencoba mendefinisikan suatu revolusi Islamis. Saya juga akan berusaha mengidentifikasikan dan menjelaskan unsur-unsur yang telah menyebabkan timbulnya Revolusi Islam.

Pertama-tama kita harus melepaskan pikiran kita dari penggunaan umum kata 'revolusi'. Kata ini juga digunakan dalam istilah-istilah revolusi istana, kudeta, revolusi konsumen, revolusi transistor, revolusi teknologi, revolusi peningkatan harapan, dan sebagainya. Revolusi merupakan suatu istilah yang digunakan secara bebas. Saya kira saya tak perlu bersikeras di hadapan hadirin bahwa Revolusi

Islam tidaklah sejenis dengan revolusi tersebut. Revolusi Islam juga tidak bisa dimasukkan dalam definisi suatu pemberontakan atau perlawanan terhadap suatu tatanan yang sedang berkuasa atau terhadap suatu tirani. Revolusi Perancis yang dimaksud oleh Saudara kita, Dr. Ali Afrous, merupakan perlawanan terhadap tirani, keborosan, kemewahan monarki di Perancis. Revolusi ini terbatas pada kaum borjuis. Revolusi ini bukan merupakan suatu revolusi sebagaimana Revolusi Islam disebut suatu revolusi.

Dua peristiwa besar dalam abad ini yang telah memperoleh julukan 'revolusi' adalah kedua revolusi Marxis, yang satu di Rusia pada tahun 1917 dan yang lain di Cina pada tahun 1949. Perbedaan mendasar antara kedua peristiwa ini dengan Revolusi Islam adalah sebagai berikut: dalam kedua kasus ini ideologi yang menyebabkan terjadinya revolusi-revolusi tersebut telah dilahirkan dan dibentuk bersama di Eropa Barat. Marxisme sejak dahulu bukan, dan sampai sekarang tetap bukan, milik asli rakyat Sovyet maupun rakyat Cina. Lenin, setelah memimpin golongan Bolshevik Partai Komunis, merebut kekuasaan bukan dengan mengalahkan tentara Rusia dan bukan dengan mengalahkan penguasa Rusia. Baik tentara Rusia maupun Tsar Rusia telah terlebih dahulu dikalahkan dan dilemahkan dalam Perang Dunia Pertama. Apa yang harus dilakukan oleh Lenin hanyalah merebut kekuasaan di suatu negara yang telah tidak mempunyai kekuatan dan yang berada dalam situasi kacau. Begitu pula, Cina telah dilemahkan oleh Perang Dunia Kedua dan Partai Kuo Min Tang tidak menjalankan kontrol yang efektif terhadap daerah-daerah di sekitar Peking. Mao harus menciptakan versi lain dari Marxisme untuk diterapkan di Cina. Harus kita ingat pula bahwa kondisi-kondisi yang bercorak Marxis klasik yang diperlukan untuk revolusi tidak ada di Rusia maupun di Cina. Di kedua tempat itu kondisi-kondisinya diciptakan oleh kepemimpinan lokal, dalam kasus Rusia oleh Lenin dan dalam kasus Cina oleh Mao. Dengan kata lain, Marxisme harus 'dinasionalisasikan'

agar sesuai dengan kedua negara tersebut untuk mencipta-kan apa yang disebut revolusi. Agar revolusi-revolusi itu diterima oleh rakyat kedua negara tersebut, berjuta-juta di antara mereka harus dilenyapkan dan suatu tindakan penin-dasan, yang sebelumnya tidak dikenal dalam sejarah, harus dijalankan.

Revolusi Islam di Iran sangat berbeda. Di sini Revolusi telah diciptakan oleh rakyat sebagai suatu kesatuan. Di sini sistem nilai yang membawa rakyat ke dalam suatu situasi revolusioner adalah Islam, yang telah berada di Iran hampir selama 1400 tahun. Dengan kata lain, kedua revolusi yang lain mengimpor ideologi asing dan menjejalkannya ke teng-gorokan rakyat setempat. Di Iran sistem nilai setempat, yaitu Islam, yang telah dipegang oleh rakyat selama 1400 tahun, menempatkan diri secara meyakinkan di antara kekuatan-kekuatan yang ada. Kekaisaran Iran pada saat itu paling keras dan diperlengkapi dengan pasukan yang sangat modern. Kekaisaran Iran didukung oleh superpower paling besar yang pernah ada di dunia ini.

Hal lain yang sangat penting adalah bahwa iklim dunia di mana Revolusi Islam telah terjadi adalah benar-benar ber-beda. Iklim dunia pada saat itu ditentukan oleh sistem im-perialis yang universal dan global. Sistem imperialis ter-sebut merupakan sistem yang padu. Sistem ini adalah sistem kapitalis, sistem eksploitatif, dan sistem yang mempunyai kesatuan global. Dengan kata lain, semua rejim lain di dunia dewasa ini berhubungan erat dengan kekuatan-kekuatan imperialis internasional. Yang mendukung mereka adalah golongan kaya di negara-negara kaya yang bersekutu dengan golongan kaya di negara-negara miskin. Ini merupakan per-sekutuan dari sistem imperialis di dunia. Dengan latar bela-kang inilah maka satu bagian dari Umat di Iran bangkit dalam suatu revolusi menentang tirani dalam negeri yang didukung oleh suatu tirani global. Ini adalah satu hal penting yang saya harap akan ada pikiran.

Sekarang saya ingin menyampaikan kepada anda secara

singkat apa yang saya namakan argumen terhadap dua peradaban. Islam sebagai agama kesalehan pribadi telah dan akan selalu menarik bagi sejumlah besar orang. Tetapi Islam juga merupakan suatu peradaban yang dimulai dengan Hijrah Rasulullah s.a.w. dari Mekkah ke Medinah. Apa yang didirikan di Medinah oleh Rasulullah s.a.w. adalah suatu peradaban. Tetapi peradaban Islam bukan merupakan suatu peradaban rendahan, peradaban hiasan, kegiatan yang dijalankan oleh orang-orang yang menganutnya di suatu sudut-sudut rumah mereka sendiri, yang jauh dari perjuangan sejarah utama. Sebagaimana ditunjukkan oleh Sirah Rasulullah s.a.w., Islam menjadi peradaban yang dominan di semenanjung Arabia pada saat kehidupan Rasulullah s.a.w. Segera sesudah itu Islam bangkit untuk menaklukkan kekuatan-kekuatan dunia pada saat itu, yaitu Kekaisaran Persia dan Kekaisaran Bizantium, dan untuk mendirikan peradaban yang paling tersebar luas dalam sejarah. Peradaban Islam ini tetap menjadi peradaban dominan di dunia selama lebih dari seribu tahun. Sebelum peradaban Islam lahir telah ada peradaban-peradaban lokal, seperti peradaban Cina kuno, peradaban India, dan peradaban Mesir. Ada juga peradaban Yunani yang sangat terkenal. Barangkali peradaban Yunani boleh berseru telah berusaha, melalui penaklukan-penaklukan Alexander, untuk menjadi suatu peradaban global, tetapi satu-satunya peradaban yang mencapai dimensi global adalah peradaban Islam. Tak ada satu peradaban pun sebelum Islam yang telah bertahan sangat lama; sekali didirikan, peradaban Islam tetap dominan, dinamis, dan berkembang selama lebih dari seribu tahun.

Selama dua sampai tiga ratus tahun terakhir, peradaban Islam telah menjadi lemah. Ini merupakan, bila anda tidak berkeberatan, kemunduran dalam sejarah. Pada saat yang sama kenaikan dalam sejarah adalah peradaban Eropa. Peradaban ini juga merupakan suatu peradaban yang dinamis. Peradaban ini juga merupakan suatu peradaban yang

kasar, kejam, mementingkan diri sendiri, dan merendahkan umat manusia. Peradaban ini adalah suatu peradaban yang mempunyai nilai-nilai negatif. Tetapi, sayangnya, karena peradaban Barat muncul dari Eropa, dan Eropa telah menjadi suatu benua yang benar-benar Kristen, para pemikir Islam terjerumus ke dalam pemikiran bahwa peradaban tersebut adalah suatu peradaban Kristen. Sebenarnya, apa yang telah terjadi adalah bahwa sebelum peradaban Barat meninggalkan Eropa dalam misi penggarongan dunia, Eropa telah mengalami Reformasi, Renaisans, dan apa yang dinamakan Pencerahan. Agama Kristen telah dinasionalisasikan, dipecah-pecah menjadi bagian-bagian kecil dan dijadikan Gereja yang terpisah-pisah dengan uskup-uskup yang berbeda untuk setiap Gereja. Agama Kristen telah dijinakkan, dikekang dan disisihkan. Jadi, di Eropa agama tidak mempunyai peranan pada waktu itu. Peradaban Barat dan perkembangannya adalah terlepas dari sistem nilai Kristen.

Sementara itu, Eropa Barat juga telah mengalami semacam revolusi lain, yang dikenal sebagai Revolusi Industri, yakni suatu revolusi dalam bentuk produksi barang-barang dan pelayanan. Gabungan antara kolonialisme dan tradisi merchantilis memberi Eropa kekayaan dan kekuasaan yang mahabesar untuk membawa orang Barat pada misi penggarongan globalnya.

Para pemikir Islam, setelah membuat kesalahan awal dengan menganggap peradaban Barat sebagai suatu peradaban Kristen, juga berpikir: bukankah agama Kristen merupakan bentuk yang belum selesai dari agama Islam? Bukankah Yesus adalah seorang Nabi Islam? Bukankah orang-orang Kristen ini adalah juga saudara-saudara kita? Semua ini meyakinkan mereka untuk menganggap peradaban Barat sebagai suatu bentuk yang menyimpang dari peradaban Islam, dan untuk menganggap bahwa bagaimanapun juga mereka dapat menerima peradaban Barat, mempelajari bahasanya, mempelajari kebudayaannya,

mempelajari ilmu pengetahuan dan filsafatnya. Dengan kata lain, mereka menjadi lebih Inggris daripada orang Inggris, lebih Eropa daripada orang Eropa. Dalam hal ini mereka berpendapat bahwa bagaimanapun juga mereka akan mampu mengendalikannya, dan mereka akan mampu 'mengislamkan' peradaban Barat. Kuman Islamisasi ini masih belum hilang dari pikiran orang Islam. Sementara kita tengah berusaha mencapai kata sepakat dengan peradaban Barat, apakah yang dilakukan oleh peradaban Barat terhadap kita? Peradaban Barat telah mulai memproyeksikan kebudayaan kita sebagai kebudayaan yang menjijikkan. Pandangan hidup dan kebudayaan kita dicacimaki. Kita dikuasai. Mereka berusaha membinasakan bahasa, pengetahuan, ilmu, filsafat, dan pandangan hidup kita. Dengan menggunakan kekuatan dan dominansi politis mereka, mereka berusaha menghancurkan masyarakat kita dan berusaha menjajah kita secara permanen melalui suatu elite kolonial yang mereka ciptakan di negara-negara kita. Dewasa ini, saya berpendapat bahwa mereka menyadari, dan kita menyadari, dan kita menyadari bahwa mereka menyadari, dan mereka mengetahui bahwa kita menyadari, bahwa hanya ada dua peradaban yang bersaingan untuk menarik perhatian umat manusia. Kedua peradaban tersebut adalah peradaban Barat dan peradaban Islam. Karena itu, perjuangannya bukanlah menyangkut suatu revolusi di Iran. Perjuangannya adalah demi suatu peradaban global yang sedang dicoba untuk dicapai baik oleh peradaban Islam maupun oleh peradaban Barat. Seandainya saja tidak demikian, saya benar-benar yakin bahwa Paman Sam dan lain-lainnya akan sangat bergembira bila kita hidup di sudut dunia kita sesuai dengan ritus Islam.

Dalam pandangan saya, Revolusi Islam di Iran merupakan kekalahan pertama peradaban Barat di tangan Islam, dan hal ini bisa anda lihat dalam reaksi peradaban Barat terhadap kemenangan Revolusi Islam di Iran. Revolusi ini merupakan langkah pertama Islam dan seluruh orang Islam ke

arah penataan kembali Islam dalam peranannya sebagai suatu peradaban besar dan terakhir di dunia. Islam telah mengambil langkah ini, yang merupakan langkah pertama dalam perjalanannya yang panjang menuju panggung sejarah, di tempat yang rasa-rasanya paling tidak mungkin, yaitu di Iran. Di Iran dominansi Barat pada waktu itu berada pada tingkatnya yang paling imperialis, total dan lengkap. Saya katakan bahwa Iran adalah suatu tempat yang rasa-rasanya tidak mungkin bagi revolusi ini, bukan karena Islam tidak ada di sana, melainkan karena kita yang di luar Iran tidak mengetahui kekuatan pergerakan Islam di Iran. Iran juga merupakan suatu masyarakat yang hampir seluruhnya didominasi oleh Islam. Barangkali tak ada masyarakat lain, kecuali mungkin Saudi Arabia sekarang, yang benar-benar telah didominasi dan dikuasai sebagaimana Iran di bawah Shah. Jadi, menurut pendapat saya, Revolusi Islam harus dipandang dalam konteks global ini, yakni dalam konteks untuk memerangi hegemoni yang terjadi di dunia. Ini adalah apa yang dikatakan oleh Saudara Ali Afrouz sebagai perjuangan antara hal yang *haq* dan *bathil*.

Perjuangan ini sebenarnya tak akan pernah berhenti. Tetapi dalam satu segi, dalam fasenya yang baru, perjuangan ini baru saja dimulai. Perjuangan ini sekarang sedang memasuki fase di mana kita juga mulai mencetak beberapa hasil penting. Sampai saat ini segala hasil dicapai oleh mereka di pihak mereka sendiri, karena kita mencoba bermain sesuai dengan aturan-aturan permainan mereka. Dan jika anda memainkan permainan orang lain, pihak yang lain selalu menang. Jalan dalam perjuangan ini adalah suatu jalan yang benar-benar sulit. Di pihak Islam kita mempunyai seribu juta orang Islam yang terbagi dalam 40 negara atau lebih dan sebagai golongan minoritas di seluruh penjuru dunia. Kita telah menyingkirkan satu Shah tetapi masih ada kira-kira 39/40 Shah-Shah lain yang masih bercokol di singgasana mereka. Kita mempunyai suatu motivasi paling kuat yang didasari oleh pengalaman kita dalam sejarah. Kita

mempunyai suatu ingatan yang kuat dan suatu pengharapan yang sama kuatnya terhadap suatu masa depan yang agung. Kita mempunyai suatu misi, tetapi bukanlah suatu misi oleh kita sendiri. Misi ini adalah suatu misi yang telah dititahkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Misi ini adalah suatu misi yang benar-benar merupakan contoh dari Rasulullah s.a.w.. Dan yang merupakan pandangan dunia adalah bahwa misi kita adalah untuk menanamkan kebaikan dan melarang kejahatan di atas bumi Tuhan. Yang berdiri menentang kita adalah peradaban Barat dan sistem imperialis. Dalam pertarungan ini kita adalah orang-orang yang tergeletak di lantai dan berusaha untuk bangkit, dan mereka adalah orang-orang jahat yang berdiri di atas kita, yang berusaha mencegah kita untuk bangkit. Karena itu, perjuangan-perjuangan kita harus dilakukan dengan usaha yang lebih besar karena kita ingin bangkit dari suatu situasi jatuh dan mereka sudah berdiri dan harus dijatuhkan.

Beginilah situasi yang kita hadapi. Kita tidak akan keluar dari situasi ini dengan satu loncatan. Adalah penting bahwa kita menghargai kesulitan-kesulitan yang terbentang di hadapan kita. Peradaban kita telah mengalami kemacetan selama 300 tahun. Selama abad-abad tersebut kita tidak memegang kemudi sejarah. Sejarah kita diciptakan untuk kita oleh suatu sistem kolonial-imperialis. Kita hanyalah korban sejarah. Setelah kemacetan ini, bilamana kita membangun suatu model masyarakat, bila suatu model baru masyarakat Islam tercipta, maka dalam termin historis dan statistik model pertama yang kita ciptakan akan menjadi suatu model primitif. Dengan kata lain, model pertama yang kita ciptakan mungkin tidak merupakan suatu sukses total. Situasinya adalah agak mirip dengan seseorang yang menderita polio dan kemudian sembuh. Korban polio itu, untuk beberapa saat, benar-benar telah lupa cara berjalan. Dia harus belajar berjalan lagi dari permulaan. Peradaban kita berada dalam situasi yang serupa itu. Dan karena itu, kepada saudara-saudara kita yang menginginkan Iran tiba-tiba menja-

di model utama dari tingkah laku Islamis dalam segala hal saya ingin agar mereka menyadari bahwa model kita hanyalah model pertama. Model ini hanyalah merupakan model eksperimental dan secara fungsional model ini akan jauh kurang efisien dibanding dengan model-model yang ada di dunia dewasa ini. Boleh jadi sistem ekonomi, sistem sosial, serta semua sistem lain yang akan kita dirikan di Iran dan negara-negara lain, akan kurang efisien dibanding dengan sistem-sistem non-Islamis yang ada di dunia dewasa ini. Untuk sementara waktu sistem-sistem Islamis baru terpaksa menjadi kurang efisien karena Islam perlu waktu untuk membina pengalaman dalam menjalankan sistem-sistem tersebut dan untuk membawa mereka ke arah penampilan yang optimal.

Jadi, selama kita membangun sistem-sistem tersebut untuk dibawa ke arah penampilan yang optimal, kita akan mempunyai suatu sistem yang kurang efisien. Penghina-penghina kita, dan beberapa orang di kalangan kita sendiri, akan mengacungkan jari tuduhannya sambil berkata, "ini tidak sebaik di Inggris...atau di Perancis...atau di Jerman...atau di Amerika Serikat...atau di Uni Sovyet...atau di Cina," atau di mana saja. Hal yang paling penting adalah bahwa kita mengidentifikasikan diri kita sendiri dengan model ini secara menyeluruh, dengan tanpa memandang tingkat penampilannya. Hal ini harus kita jalankan karena sekarang kita mempunyai suatu kenyataan yang dapat kita hubungkan dengan cita-cita kita, yang dapat kita hubungkan dengan sejarah kita, yang dapat kita hubungkan dengan aspirasi-aspirasi kita sebagai individual-individual, yang dapat kita hubungkan dengan perkembangan Umat sebagai suatu keseluruhan. Iran adalah model itu, Iran adalah kenyataan yang telah lama sekali dinantikan oleh Umat.

Bukti bahwa Iran adalah kenyataan baru tersebut akan diketemukan dalam tiga hal: dalam pembentuk internal pergerakan Islam di Iran, dalam pandangan dunia terhadap pergerakan itu, dan dalam reaksi peradaban yang menen-

tangnya.

Sekarang saya ingin berbalik kembali untuk mengamati ketiga hal tersebut satu persatu. Pertama-tama, pembentuk internal pergerakan di Iran. Pembentuk ini, seperti yang anda ketahui, benar-benar berakar dalam tradisi Islam Syi'ah. Tradisi ini menganggap segala kekuasaan politik sebagai tidak sah, terutama kekuasaan monarki dan bangsawan. Menurut kepercayaan khusus mereka, selama gaibnya Imam, dengan sendirinya segala kekuasaan adalah tidak sah. Dan hal ini menyebabkan para ulama Syi'ah menuntut perubahan-perubahan konstitusional yang dikenal dengan sebutan Revolusi Konstitusional pada awal abad ini (1906 – 1911). Usaha yang utama bukan untuk mensahkan sistem itu melainkan untuk meminimkan derajat ketidakabsahan sistem politis tersebut. Karena tak mungkin ada keabsahan dengan gaibnya Imam ke-12, usaha tersebut merupakan alat konstitusional untuk menjaga derajat ketidakabsahan dalam batas-batas yang bisa diterima. Beginilah situasi dalam pemikiran politis Syi'ah. Sebaliknya, dalam sejarah pemikiran politis Sunni, dalam formulasi klasiknya sebagaimana dikemukakan oleh Al-Mawardi, adalah bahwa tatanan politis yang sedang berkuasa seharusnya tidak dipertentangkan atau ditentang asalkan Sultan menunaikan sembahyang Jum'at dan melaksanakan peraturan-peraturan Syariat dasar minimum. Di kalangan kaum Syi'ah ada juga keinginan yang kuat untuk mati syahid demi membela Islam. Cita-cita mulia untuk mati syahid bukanlah hanya merupakan faham Syi'ah; cita-cita ini berlaku bagi semua orang Islam. Kita semua ingin mati syahid dalam jalan Allah. Kesadaran Syi'ah benar-benar dipengaruhi oleh penekanannya pada Karbala dan pada perlawanan terhadap pengenalan monarki ke dalam Islam pada taraf-taraf yang paling awal. Perjuangan Imam Husin dan kesyahidannya di Karbala dan pengulangannya dalam bentuk ritual dari tahun ke tahun, telah memelihara semangat yang luar biasa di kalangan orang-orang Islam, dan telah memainkan suatu peran yang

sangat besar dalam Revolusi Islam di Iran. Hal ini telah memberi kaum Syi'ah mata pedang tajam tambahan yang kurang dimiliki oleh sikap politis Sunni. Salah satu semboyan dari Revolusi Islam adalah "setiap hari adalah Asyura, setiap tempat adalah Karbala".

Dimensi ketiga dalam pembentukan Revolusi telah menjadi argumen yang timbul di kalangan kaum Syi'ah kira-kira 200 tahun yang lalu. Argumen itu berpusat pada masalah-masalah seberapa jauhkah ulama Syi'ah dapat melangkah dalam *ijtihad*. Ada orang-orang di kalangan ulama yang mempunyai pandangan bahwa ijtihad tidak lagi diperlukan. Pintu-pintu ijtihad sudah tertutup. Secara kebetulan, posisi kaum Sunni juga demikian. Tetapi ulama Syi'ah menjauhi posisi *akhbari* dan menerima posisi *usuli*. Kaum usuli pada abad ke-18 menang dalam berargumentasi bahwa adalah mungkin bagi ulama untuk mencapai tingkatan ijtihad, dan bahwa lebih dari satu *mujtahid* dapat muncul setiap saat. Posisi ini membagi seluruh umat menjadi mujtahid dan bukan mujtahid. Jadi, bila seseorang bukan mujtahid, dia harus mengikuti mujtahid. Ini dikenal sebagai hukum *taqlid*. Akibatnya adalah bahwa sejumlah mujtahid, yang dikenal orang sebagai *marja' i taqlid,* muncul dan mereka menanamkan pengaruh yang sangat besar dalam pikiran rakyat Iran dan kaum Syi'ah di mana-mana. Hal ini memungkinkan para mujtahid mengorganisir perlawanan-perlawanan yang sukses terhadap para penguasa Iran maupun terhadap dominasi asing, pertama dari Rusia, kemudian Inggris, dan akhirnya Amerika Serikat.

Tetapi pada taraf tertentu para mujtahid terhalang oleh doktrin ketidakabsahan inheren kekuasaan politis selama gaibnya Imam. Posisi usuli tidak memikirkan kemungkinan munculnya salah seorang mujtahid sebagai mujtahid dari para mujtahid, yakni sebagai Imam sendiri. Dan kebingungan ini timbul ketika Imam Khomeini kembali ke Teheran dari Paris selama Revolusi. Selama beberapa waktu dia disebut *'Naibi Imam'* (Pengganti Imam). Hanyalah se-

cara lambat laun kata *'naib'* dihilangkan dan dia menjadi Imam Khomeini. Tentu saja, gelar Imam tidak berarti bahwa dia adalah Imam ke-12. Ini sekedar berarti bahwa dia adalah pemimpin Umat pada saat ini. Dengan kata lain, ini merupakan suatu doktrin baru yang erat dengan 'yang pertama di antara yang sederajat'. Dia bukannya lebih baik daripada para mujtahid lain. Dia adalah salah seorang dari para mujtahid. Tetapi orang yang mengikuti para mujtahid lain juga mengikuti dia. Jadi, sementara mengikuti para mujtahid lain dalam masalah-masalah keagamaan, mereka juga bisa mengikuti Imam Khomeini sebagai pemimpin politik Negara Islam, pemimpin Revolusi, dan tentu saja pemimpin Umat dewasa ini. Karena itu, dalam satu segi Revolusi ini lebih jauh telah mengambil pemikiran politis Syi'ah. Suatu kesulitan praktis yang aktual telah menciptakan suatu situasi yang memungkinkan salah seorang mujtahid menjadi Imam Umat.

Hal ini tentu saja merupakan suatu kemajuan besar dari posisi pemikiran politis Syi'ah sebelumnya.

Sekarang saya akan beralih pada metode Imam Khomeini dalam mencetuskan Revolusi. Saya kira dasar pertama dari metode ini adalah perlawanan total terhadap Shah dan Dinasti Pahlevi. Imam Khomeini dengan teguh menyebut dinasti tersebut 'ilegal'. Dia hanya menggunakan satu kata: 'ilegal'. Dia memperlakukannya sedemikian rupa dan tidak pernah berubah dari posisi tersebut. Dasar yang kedua adalah pengungkapannya yang tanpa belas kasihan bahwa rezim itu adalah boneka Amerika Serikat dan, yang sangat penting, Israel. Peranan Israel di Iran adalah sangat besar, yakni kedua setelah Amerika Serikat. Karena itu, Amerika Serikat dan Israel adalah penguasa-penguasa efektif Iran. Dasar ketiga yang dibuat oleh Ayatullah Khomeini, yang juga tidak bisa berubah, adalah bahwa tidak ada perubahan konstitusional yang dapat membuat Shah bisa diterima. Akhirnya, Ayatullah Khomeini sama sekali menolak pendekatan Front Nasional dan pendekatan kaum

reformis sebagai tak dapat diterima. Front Nasional disiapkan untuk berhubungan dengan Dinasti Pahlevi. Mereka mengira bahwa dinasti tersebut tak dapat disingkirkan, bahwa kemajuan hanya dapat dicapai dengan menerima Dinasti Pahlevi, setidak-tidaknya untuk sementara waktu dan tetap mempertahankan Shah di singgasananya. Jadi, kata mereka, biarkan dia berkuasa tetapi jangan biarkan dia memerintah. Tetapi Ayatullah Khomeini menolak pendekatan ini dan bersikeras bahwa Shah tidak boleh berkuasa ataupun memerintah. Dia harus enyah.

Ini adalah pembentukan internal dari pergerakan yang menimbulkan Revolusi di Iran. Pergerakan tersebut juga telah menyempurnakan suatu pandangan dunianya sendiri dan pandangan dunia inilah yang harus benar-benar kita sadari bersama. Intisari dari pandangan dunia ini adalah bahwa Umat Islam adalah suatu kesatuan tunggal; tak ada pemecahan-pemecahan sama sekali dalam Umat ini dan salah satu dari semboyan-semboyan sangat terkenal yang kami dengar ketika berada di Teheran baru-baru ini adalah "*La Syyi'iah la Sunniyyah - thoura, thoura, Islamiyyah*" (Bukan Syi'ah, maupun Sunni, melainkan Revolusi Islam). Berikut ini adalah sebuah refren baru dalam semboyan lain yang terkenal "*La Syarqiyyah, la Gharbiyyah, thoura, thoura, Islamiyyah*" (Bukan timur maupun barat, melainkan Revolusi Islam). Dengan demikian, kesatuan Umat merupakan intisari pandangan dunia yang dipersembahkan kepada kita oleh Revolusi Islam yang dipimpin oleh Imam Khomeini.

Imam Khomeini, dalam salah satu wawancara pertamanya ketika dia tiba di Paris, ditanya tentang asal mula Revolusi Syi'ah. Dia sangat berterus terang. Dia hanya menyatakan bahwa *isue-isue yang secara tradisional telah memecah kaum Syi'ah dan Sunni tidak lagi relevan. Kita semua adalah orang-orang Islam.* Revolusi ini adalah Revolusi Islam. Kita semua adalah saudara dalam Islam. Dan dia dan semua orang, wanita dan kanak-kanak di Iran dewasa ini benar-benar terikat dalam kesatuan Umat Islam ini. Imam Khomeini

tidak hanya berceramah kepada kaum Sunni saja untuk bergabung dengan kaum Syi'ah.

Ketika orang-orang Syi'ah akan berangkat naik haji, dia memberi suatu fatwa yang ditujukan kepada mereka. Dia berkata kepada kaum Syi'ah Iran dan kaum Syi'ah dunia: "Bila kalian pergi ke *Masjidil Haram,* bila kalian naik haji, kerjakanlah seperti yang dikerjakan kaum Sunni; bahkan seandainya mereka salah dalam mengerjakannya, kalian harus mengikutinya."

Tak ada contoh yang lebih jelas lagi tentang kesetiaannya pada kesatuan Umat. Baiklah saya berikan satu contoh lagi. Ketika kami di Iran, kami diajak ke Qum. Dalam rombongan kami terdapat seorang yang bernama Maulana Mufti Mahmud dari Pakistan. Beberapa di antara anda mungkin sudah pernah mendengar tentang dia. Mufti ini tidak mau masuk ke dalam Masjid untuk sembahyang Dhuhur. Dia tetap di halaman karena dia tidak ingin bersembahyang di belakang seorang Syi'ah. Di dalam masjid ulama Syi'ah meminta seorang alim Sunni untuk memimpin sembahyang!

Dua hari kemudian kami pergi ke Mashhad, sebuah kota suci Syi'ah yang lain. Di sana seorang yang tak lain adalah Mian Tufail Muhammad, yang sekarang bernama Amir dari Jama'ati Islami dari Pakistan, pengganti Maulana Mawdudi, memimpin kaum Sunni bersembahyang secara terpisah dari jemaat utama yang dipimpin oleh seorang Syi'ah. Izinkanlah saya mengatakan bahwa hampir semua kaum Sunni yang hadir benar-benar merasa muak terhadap tingkah laku tersebut.

Dimensi kedua dalam pandangan dunia Imam Khomeini, setelah kesatuan Umat, adalah kesatuan imperialisme. Saya telah menghabiskan banyak waktu dan saya akan meninggalkan masalah ini, kecuali untuk mengatakan bahwa Revolusi Islam menganggap dunia dibagi menjadi dua: kaum penindas dan kaum tertindas. Revolusi Islam benar-benar berpihak pada rakyat dunia yang tertindas.

Dimensi ketiga pandangan dunia yang mengikuti dimensi

kedua di atas adalah bahwa Barat akan mengerahkan segala daya untuk menghancurkan Revolusi Islam di Iran dan untuk mencegah terajadinya hal seperti ini di mana saja.

Saya hanya akan menambah satu hal lain yang baru saja disebut oleh Dr. Abdur Rahim Ali. Dan itu adalah peranan Dr. Ali Shariati. Dr. Ali Shariati, seorang sosiolog, seorang penelaah Marxisme yang mendalam, menulis banyak risalah yang membuktikan tentang kekeliruan Marxisme. Pembuktiannya tentang kekeliruan Marxisme membuat sedikit sekali yang masih bisa diharapkan oleh kaum Marxis dari orang Islam. Dia berceramah secara ekstensif di seluruh Iran dan di kalangan orang-orang Iran yang tinggal di luar negeri. Dia terutama berjasa dalam mengajak para pemuda Iran yang berpendidikan Barat untuk ikut serta dalam pergerakan Islam. Tindakannya ini membantu menciptakan gerakan Islamis sebagai suatu gerakan persatuan dari kaum terpelajar yang berpendidikan Barat dan para ulama tradisional di Iran. Persatuan ini membuat kemenangan Revolusi Islam menjadi tak terelakkan.

Saya sudah berbicara cukup banyak, dan sekarang saya akan mencoba mendefinisikan Revolusi Islam.

> Revolusi Islam adalah keadaan suatu masyarakat di mana; *satu,* seluruh orang Islam dalam suatu daerah menjadi termobilisasi sampai pada tingkat di mana kehendak dan usaha kolektif mereka menjadi tak tertahankan dan tak terkalahkan; *dua,* masyarakat Islam memerlukan suatu kepemimpinan yang benar-benar terikat kepada tujuan-tujuan peradaban Islam dan yang tidak mempunyai kelas ataupun kepentingan-kepentingan lainnya sendiri; *tiga,* kekuatan-kekuatan yang disumbangkan mampu, secara internal, menata kembali masyarakat pada segala tingkatan; dan *empat,* tatanan sosial tersebut memerlukan kepercayaan dan kemampuan untuk berhubungan dengan dunia luar menurut cara-caranya sendiri.

Definisi tentang Revolusi Islam ini berasal dari suatu studi tentang Revolusi Islam di Iran. Tetapi definisi ini juga

memberikan kerangka kerja yang dipakai untuk melanjutkan penilaian terhadap Revolusi di Iran tahun lalu. Bagian pertama definisi bahwa semua orang Islam dalam suatu daerah menjadi termobilisasi sampai pada tingkat di mana kehendak dan usaha kolektif mereka menjadi tak tertahankan dan tak terkalahkan – di Iran, hal ini adalah sedemikian jelas sehingga hampir-hampir tak memerlukan lagi suatu penjelasan lebih jauh dari saya. Anda telah melihatnya di televisi, anda telah membacanya dalam suratkabar-suratkabar anda. Bahkan para penghina kita mengerti tentang hal ini dengan sangat jelas. Mereka tidak berusaha mengatakan orang-orang Islam di Iran terpecah dalam hubungannya dengan Islam.

Sebagai saksi mata baru-baru ini, pada perayaan ulang tahun pertama Revolusi Islam, kami diajak ke pemakaman Behisht-e-Zahra yang kira-kira berjarak 15 kilometer dari Teheran. Sebagian besar syuhada Revolusi dimakamkan di pemakaman ini. Perayaan pertama ulang tahun ini sebenarnya bisa diadakan di tempat terbuka lain, di taman lain, di lapangan kota, tetapi tidaklah demikian. Perayaan ini diadakan di pemakaman di mana para syuhada juga bisa mengambil bagian. Para syuhada bukan sekedar gugur. Para syuhada juga menjadi saksi. Di sana beribu-ribu syuhada terkubur dan di sana pula kami yang masih hidup berada di atasnya, yang mati dan yang hidup semua turut mengambil bagian dalam ulang tahun akbar Revolusi agung ini, sebagai satu kesatuan. Dengan melihat jumlah orang yang pergi ke sana, kita bisa berpendapat bahwa tak ada seorang pun tertinggal di Iran. Paling tidak ada dua juta orang. Dan saya tidak melihat seorang gadis pun yang tidak memakai cadar. Mobilisasi massa yang menyeluruh sampai pada tingkat ini adalah sesuatu yang harus disaksikan untuk dipercayai dan orang-orang yang berpendidikan Barat, berkebudayaan Barat, berhaluan politik Barat yang berusaha keras memecah-belah massa tersebut, tak akan bisa mempercayainya sebelum mereka menyaksikannya sendiri. Dan karena me-

reka tak ingin mempercayainya, mereka menentangnya.

Bagian kedua definisi saya, bahwa masyarakat Islam memerlukan suatu kepemimpinan yang benar-benar terikat kepada tujuan-tujuan peradaban Islam dan yang tidak mempunyai kelas ataupun kepentingan-kepentingan lainnya sendiri – hal ini, sekali lagi, adalah sedemikian jelas sehingga tak memerlukan penjelasan lebih jauh lagi.

Bagian ketiga dari definisi saya menyatakan bahwa kekuatan-kekuatan yang disumbangkan mampu, secara internal, menata kembali masyarakat pada segala tingkatan. Hal ini berhubungan dengan masa yang akan datang karena pekerjaan penataan kembali masyarakat secara internal hampir-hampir belum dimulai. Ini adalah fase berikutnya yang harus dituju oleh Revolusi. Sistem feodal dan sistem kapitalis masih hidup. Birokrasi yang dibentuk di bawah Shah masih hidup. Angkatan bersenjata, meskipun dengan sukses telah dinetralkan oleh rakyat, masih berdiri. Ketika berada di Iran, saya berjumpa dengan lebih dari satu orang yang berceritera kepada saya bahwa baru-baru ini tersiar kabar angin tentang adanya persekongkolan di kalangan perwira angkatan bersenjata yang menentang Revolusi dan banyak di antara mereka telah ditahan dan segera dihukum tembak. Sejumlah pusat-pusat perlawanan masih ada di Iran, yang tentu saja dihembuskan oleh media massa Barat. Semua ini adalah berita-berita tentang penataan internal kembali terhadap masyarakat Iran yang sedang berevolusi, dan fase berikutnya dari Revolusi akan dinilai melalui penampilannya sepanjang jalur-jalur ini. Apabila Revolusi hanya berakhir dengan membuat sistem kapitalis menjadi semakin efisien daripada sebelumnya, Revolusi ini berarti tak akan mencapai hasil apa pun. Apa yang harus dilakukan oleh Revolusi adalah mengubah secara total struktur sosial, ekonomi, dan politis dari masyarakat. Seluruh hubungan sosial dalam metode-metode produksi, perdagangan, distribusi dan konsumsi harus diubah.

Telah saya berikan kepada anda selengkap-lengkapnya

latar belakang pembahasan tentang konstitusionalisme di Iran. Sejak Revolusi, ada dua referendum tentang pembuatan konstitusi dan pemilihan seorang presiden. Satu-satunya kecemasan saya adalah bahwa ada terlalu banyak demokrasi dalam konstitusi baru. Terus terang saja, saya bukan seorang demokrat. Dan di mana saja ada demokrasi, saya merasa bahwa saya mencium bau kesukaran. Saya tahu dari teori yang saya pelajari sendiri dan dari suatu studi tentang perkembangan dan asal-usul demokrasi di Dunia Barat bahwa dalam proses demokratis, kelas-kelas yang dominan tetap memegang kekuasaan dasar mereka dalam masyarakat. Tak mungkin ada revolusi melalui proses demokratis. Presiden baru, menurut *Tehran Times,* dan ini bukan merupakan sumber yang dapat dipercaya, berkeberatan terhadap suatu 'pemerintahan di dalam suatu pemerintahan'. Bani Sadr menunjuk pada mahasiswa-mahasiswa revolusioner yang menduduki kedutaan besar Amerika Serikat.

Penataan kembali suatu masyarakat meliputi suatu kelanjutan dari proses revolusioner dan tindakan revolusioner pada berbagai tingkatan masyarakat. Saya khawatir jika Dewan Revolusioner dibubarkan sesudah pemilihan umum, boleh jadi majelis baru mempunyai atau tidak mempunyai semangat, determinasi, dan kekuatan revolusioner untuk mengadakan perubahan-perubahan yang mendasar. Setiap negara mempunyai suatu pemerintahan, tetapi tidak setiap negara mempunyai suatu Revolusi. Saya yakin bahwa pasti ada suatu Revolusi Islam yang abadi. Negara tak dapat bertindak dengan tanpa suatu revolusi yang berlangsung terus hingga seluruh sistem berubah. Dengan adanya revolusi yang berlangsung bersamaan dengan pemerintah, Revolusi Islam akan memastikan bahwa sistem tersebut akan merupakan suatu sistem yang stabil. Sistem ini akan merupakan suatu sistem di mana bahkan seandainya ada bidang-bidang yang untuk sementara gagal dijalankan pemerintah, maka kegagalan tersebut akan diperbaiki oleh tangan revolusioner rakyat. Tetapi jika hanya ada satu tangan

dan karena suatu sebab tangan itu tidak dapat bekerja, maka ada suatu kegagalan total dari sistem tersebut. Kekuatan revolusioner rakyat Iran, saya yakin, adalah suatu kekuatan positip dan harus tetap dipertahankan dan dikembangkan ke arah proses penataan kembali.

Pokok keempat dalam definisi saya tentang Revolusi Islam – tatanan sosial memerlukan kepercayaan dan kemampuan untuk berhubungan dengan dunia luar menurut cara-caranya sendiri – juga telah ditunjukkan dengan berhasilnya Revolusi itu sendiri. Saya telah menunjukkan kepada anda bahwa rezim di Iran bukanlah suatu rezim lokal; rezim ini adalah suatu rezim kolonial yang didukung oleh kekuatan-kekuatan asing, dan keberhasilan Revolusi telah menunjukkan bahwa pergerakan Islam di Iran bisa berhubungan dengan lingkungan menurut cara-caranya sendiri. Dijaganya hubungan-hubungan luar negeri oleh Pemerintah revolusioner merupakan contoh lain. Saya benar-benar ingat, sesudah Uni Sovyet, berdasarkan alasan-alasannya sendiri, menggunakan vetonya untuk menolak resolusi yang disponsori oleh Amerika Serikat di Dewan Keamanan untuk mengenakan sanksi-sanksi terhadap Iran, beberapa orang berpendapat bahwa Dewan Revolusioner sedang mengadakan permainan dengan Rusia. Sama sekali tak ada yang bisa menutupi kebenaran. Ini adalah usaha-usaha yang dijalankan untuk membingungkan kita. Uni Sovyet, yang juga musuh kita, pergi ke Dewan Keamanan dan menggunakan vetonya, yang kabarnya, untuk menyelamatkan Iran, dan seorang diplomat Sovyet membuat suatu pernyataan bahwa mereka akan membantu Iran melawan sanksi-sanksi Amerika. Tetapi Imam Khomeini memberi suatu hinaan kepada Rusia. Dia berkata: "Anda pikir anda siapa? Anda beranggapan dapat menolong kami. Kami akan hidup dengan kekayaan kami sendiri. Kami tidak memerlukan segala macam bantuan dari Uni Sovyet atau siapa pun juga. Iran adalah suatu negara yang merdeka dan Iran akan tetap merdeka. Bila kami harus melawan sanksi-sanksi

tersebut, maka kami akan melawannya sendiri. Kami tidak membutuhkan sedikit pun bantuan dari Uni Sovyet."

Akhirnya, Revolusi Islam telah menunjukkan kepada pemerintah negara-negara di sekitar Iran tentang siapakah sebenarnya mereka: mereka benar-benar terasing dari asal-usul mereka sendiri, dari rakyat mereka sendiri, dari sistem nilai mereka sendiri, dari sejarah mereka sendiri, tidak mempunyai hak, dan menggantungkan hidup mereka pada bantuan dari luar. Bagi orang-orang Islam di luar Iran, pilihan-pilihannya adalah benar-benar terbatas. Revolusi ini telah memberi harapan kepada kita ketika sama sekali tidak ada harapan. Revolusi ini telah mengembalikan kepercayaan diri kita. Kita juga dapat melakukan apa yang dianggap oleh orang-orang lain tak akan dapat kita lakukan. Dan Revolusi ini telah memberi rasa hormat kepada kita di suatu dunia yang didominasi oleh penghina-penghina kita. Karena sekali kita mempunyai suatu kisah sukses untuk diceriterakan, kita mempunyai suatu kenyataan yang dapat kita pakai untuk mengidentifikasikan diri kita sendiri. Kita dapat menunjuk pada sesuatu dan berseru: "Lihat, ini adalah sesuatu yang dapat kita lakukan dan ini adalah sesuatu yang tak dapat dilakukan oleh orang lain." Tetapi harus kita ingat bahwa Revolusi di Iran, model yang sekarang masih sangat muda, harus berlanjut. Revolusi ini harus dikembangkan atau jika tidak, Umat sebagai satu kesatuan akan menjadi lebih sengsara. Seandainya saja Revolusi ini gagal, sejarah kita sekali lagi akan mengalami kekacauan. Adalah bukan tugas rakyat di Iran saja, melainkan tugas orang-orang Islam di mana sajalah untuk melakukan segala sesuatu yang mungkin dapat mereka kerjakan untuk menyokong revolusi di Iran dan untuk meyakinkan bahwa kesempatan historis ini tidak terlepas dari tangan kita •

Bab 2. Iran, Suatu Studi Kasus tentang Kebangkitan Politis Muslim

Oleh • Iqbal Asaria

KEKUATAN-KEKUATAN imperialis yang sedang berkuasa melengkapi dominasi *de facto* mereka terhadap negara-negara Islam menjelang akhir abad ke-19. Negara-negara imperialis tersebut - Inggris, Prancis, Rusia dan, pada taraf yang lebih rendah, Amerika - yang diperlengkapi dengan kekuatan-kekuatan yang ditunjang oleh Revolusi Industri dan yang telah mengalahkan Gereja serta memastikan kooperasinya, telah berpaling ke arah eksploitasi terhadap negara sisa dunia.

Dunia Islam telah diturunkan derajatnya menjadi suatu Umat yang batasannya tidak tegas, yang diperintah oleh monarki-monarki dan sejenisnya, yang sikap dan aspirasinya makin lama makin jauh dari contoh yang telah diberikan oleh Rasulullah s.a.w. Meskipun demikian, diawali dengan berontaknya Imam Husin terhadap monarki Umayyah, telah timbul serangkaian gerakan-gerakan Islamis yang berdaya upaya untuk mengembalikan Umat ke atas jalan yang lurus *(shiraathal mustaqiim)*. Tetapi ekspansi yang masih di wilayah Islam dan harta kekayaan yang tersedia telah melemahkan kekuatan spiritual dan moral Umat. Jadi ketika konfrontasi dengan peradaban Barat yang menanjak mulai berlangsung secara jujur pada abad ke-17 dan ke-18, Umat Islam merupakan pihak yang defen-

sif. Serangan dahsyat peradaban Barat yang penuh keberhasilan telah melolosi daya emulasi dan imitasi di bumi Islam. Pemakaian peradaban Barat untuk mengobati kondisi Umat yang terganggu ternyata didukung sebagai suatu alternatif serius oleh sangat banyak pelajar Islam dari peradaban yang kuat ini. Barat, pada gilirannya, membantu dan menyokong gerakan ini melalui dominasinya yang semakin bertambah terhadap sistem perekonomian dan pengajaran di negara-negara Islam.

Dalam suasana ketergantungan yang menjadi-jadi terhadap peradaban Barat ini, para ulamalah yang, berdasarkan kebudayaan Islam, menjelaskan bahaya pemakaian sikap dan nilai budaya Barat serta yang memberi peringatan pada Umat akan bahaya-bahaya dominasi asing. Motivasi para ulama dalam mengambil sikap ini adalah berbeda-beda dan dapat diperdebatkan secara panjang lebar, tetapi hal yang tidak bisa diragukan lagi ialah oposisi mereka yang terus menerus dan konsisten terhadap momentum yang semakin menuju ke arah ketaklukan pada imperialisme.

Pada abad ke-18 dan selama sebagian besar dari abad ke-19 para ulama dicap sebagai kaum reaksioner dan penghalang bagi kemajuan dan pembangunan. Meskipun demikian, dengan mulai menjadi jelasnya sifat asli imperialisme bagi massa Islam, dimulailah pembentukan bermacam-macam organisasi yang akhirnya menjadi tulang punggung gerakan-gerakan pembebasan di berbagai negara Islam dengan inspirasi dasar yang berasal dari para ulama.

Sejarah Umat Islam sejak akhir abad ke-19 hingga sekarang ini dapat dipandang sebagai pembeberan dari aliansi antara para ulama dan massa Islam untuk mengatasi imperialisme dan untuk menghindari cengkeraman dominasi asing. Hanya dengan bantuan aliansi inilah kebutuhan bermacam-macam wakil imperialisme – baik kaum kapitalis maupun komunis – untuk mencari landasan kekuasaan mereka di dalam aspirasi-aspirasi Islamis massa dapat diterangkan. Sesungguhnya, beberapa dekade terakhir kita te-

lah menyaksikan massa Islam menyerang langsung kecurangan yang semakin subtil dari kaum imperialis ini.

Selama beberapa waktu, kemunculan komunisme nampaknya memberikan suatu alternatif nonrelijius terhadap masalah-masalah Umat, bagi kaum yang telah terbenam dalam ethos sekuler tentang mundurnya kaum kapitalis. Tetapi, ketika menjadi semakin jelas bahwa komunisme merupakan bentuk imperialisme yang lebih rakus, eksponen-eksponen ini menjadi kehilangan sedikit dukungan umum yang seharusnya telah mereka dapatkan.

Kemunculan gerakan-gerakan Islamis baru di berbagai daerah Islam harus ditinjau dengan bantuan latar belakang ini. Gerakan-gerakan tersebut terus bermunculan berdasarkan fakta bahwa mayoritas massa Islam menghendaki suatu pelaksanaan Islam yang lebih menyeluruh dan bahwa massa tersebut mempunyai rasa yang mendalam bahwa keinginan ini telah ditipu oleh kaum munafik yang menggunakan sangat banyak kedok. Halangan utama realisasi keinginan ini ialah tatanan imperialis yang sangat mapan yang bergantung pada suatu elit yang tidak representatif demi mempertahankan *status quo*. Penelanjangan bertahap karakter asli tatanan imperialis ini membawa ke arah kesadaran yang semakin bertambah di kalangan massa Islam akan masuk akalnya sikap ulama. Jadi, aliansi kuat yang terbentuk merupakan faktor utama di belakang kekuatan gerakan Islamis yang semakin membesar. Islam semakin dipandang sebagai satu kekuatan yang bisa menyelamatkan Umat Islam dari perbudakan abadi oleh kekuatan-kekuatan imperialis.

Makalah ini menjelaskan bagaimana perkembangan gerakan-gerakan Islamis di Iran dan untuk menentukan faktor-faktor apa yang telah memungkinkan pergerakan tersebut dapat mengatasi rintangan-rintangan yang tetap menghalangi jalan dari pergerakan di daerah-daerah Islam lainnya. Meskipun keberhasilan berada di tangan Tuhan, makalah ini diharapkan bisa menunjukkan bagaimana waktu telah mematangkan gerakan tersebut serta bagaimana gera-

kan itu belajar dari kesalahan-kesalahan – baik kesalahannya sendiri maupun kesalahan gerákan-gerakan di negara-negara Islam yang lain.

Latar Belakang

Kurang lebih 98% penduduk Iran adalah orang Islam, dan mayoritas mereka adalah kaum *Syi'ah Itsna'asyari.* Tema dominan teologi Syi'ah ialah *Imamat,* yakni suatu lembaga yang terdiri atas serangkaian tokoh-tokoh karismatis yang memberikan tuntunan yang benar dalam pemahaman cita rasa esoteris dari wahyu kerasulan. Syi'ah Itsna'asyari percaya pada dua belas Imam setelah Rasulullah s.a.w., sehingga juga percaya pada kata Itsna'asyari atau dua belas. Dari kedua belas Imam tersebut yang terakhir ialah Imam Muhammad al-Mahdi, yang oleh para kaum Itsna'asyari dipercayai sedang berada dalam kegaiban atau okultasi sejak tahun 874.

Selama gaibnya Imam, mereka yang percaya harus menjadi *mujtahid* (orang yang melaksanakan *ijtihad* – pencarian pendapat yang benar khususnya dalam pendeduksian ketetapan-ketetapan khusus hukum agama dari prinsip-prinsip dan perintah-perintahnya), atau menjadi *muqallid* (orang yang melaksanakan *taqlid* atau mengikuti mujtahid). Para mujtahid utama, yang muncul melalui suatu prosês konsensus selama jangka waktu yang panjang, dikenali dengan sebutan yang menyegankan, *Ayatullah* (tanda-tanda atau bayang-bayang dari Allah). Pada setiap masa nampaknya terdapat banyak sekali mujtahid, tetapi hanya ada sedikit Ayatullah dengan banyak pengikut, yang dikenal sebagai *marja'*. Dari masa ke masa ternyata seorang mujtahid tertentu mendapatkan pengikut yang hampir menyeluruh. Dia lalu disebut *marja'i taqlid* tunggal (yakni mujtahid yang contoh tindakannya, di atas segalanya, harus dilaksanakan).

Ketika seseorang diangkat sebagai seorang marja', dia diharapkan untuk memberikan fatwa-fatwanya mengenai berbagai macam masalah yang berhubungan dengan masya-

rakat. Oleh karena itu dia biasanya menulis suatu buku (atau buku-buku) mengenai masalah sehari-hari para muqallid; buku semacam itu disebut *risalah-yi-amaliyyah* (ikhtisar tindakan). Fatwa-fatwa tambahan atau *alamiyyah* (keterangan-keterangan) dikeluarkan bila dibutuhkan.

Para ulama yang dikenal sebagai marja'i taqlid sejak pertengahan abad ke-19 dan seterusnya secara tetap akan muncul dalam diskusi ini, dan oleh karena itu kita mencantumkannya dalam urutan kronologis:

1. Haji Syeikh Muhammad Hasan Isfahani Najafi (wafat tahun 1849).
2. Syeikh Murtaza Ansari (wafat tahun 1865).
3. Mirza Hasan Shirazi (wafat 1894).
4. Akhund Mullah Muhammad Kazim Khurasani (wafat tahun 1911).
5. Haji Sayyid Muhammad Kazim Tabatabai Yazdi (wafat tahun 1919)
6. Mirza Muhammad Taqi Ha'iri Shirazi (wafat tahun 1920).
7. Sheikh Fath Allah Shariati Isfahani (wafat tahun 1920).
8. Haji Sayyid Abu al-Hasan Musavi Isfahani (wafat tahun 1945).
9. Haji Aqa Husain Burujirdi (wafat tahun 1961).

Meskipun para ulama ini sangat tepat bagi posisi yang mereka dapatkan, kita seharusnya tidak berpendapat bahwa sejak pertengahan abad ke-19 tidak ada mujtahid lain yang seterpelajar mereka yang tercantum di atas tadi. Tidak dapat diragukan bahwa terdapat sangat banyak mujtahid yang kualifikasinya tidak kalah dari pemimpin-pemimpin tersebut. Ada masa-masa, seperti halnya sekarang ini, ketika terdapat sejumlah pesaing-pesaing utama yang mempunyai banyak pengikut tetapi tidak muncul seorang marja' tunggal pun.

Di antara para ulama utama setelah Aqa Husain Burujirdi ialah Aqa Sayyid Muhsin al-Hakim Tabatabai (wafat ta-

hun 1968) yang memainkan peranan penting dalam membendung pengambilalihan Irak secara menyeluruh oleh komunis, dan Sayyid Hadi Milani (wafat tahun 1973) yang mempunyai banyak pengikut di Iran dalam fase pembentukan perjuangan sekarang ini.

Dewasa ini, marja'-marja' utama adalah:

1. Sayyid Ruhullah al-Musavi al-Khomeini, Qum, Iran.
2. Sayyid Muhammad Kazim Shariatmadari, Qum, Iran
3. Sayyid Abul Qasim al-Musavi al-Khooi, Qum, Iran.
4. Sayyid Muhammad Baqr al-Sadr, Najaf, Irak (baru-baru ini dihukum mati oleh rejim Baath di Irak).

Jadi selama gaibnya Imam, kekuasaan di antara kaum Syi'ah cenderung terpusat di tangan beberapa mujtahid utama, dan dari masa ke masa di tangan seorang marja' tunggal. Faktor utama di belakang keseluruhan pengikut ialah bahwa para ulama dapat memerintah pada masa-masa kacau (seperti yang tergambar dalam dukungan yang diberikan kepada Ayatullah Khomeini). Kekuasaan tak terbantah yang dimiliki oleh para ulama dan sikap mereka yang tanpa kompromi terhadap imperialisme harus menjadi latar belakang dari setiap diskusi tentang gerakan Islamis di Iran.

Sikap Politis Ulama

Teori politis dari pandangan Syi'ah Itsna'asyari, yang pertama-tama merupakan definisi menyeluruhnya tentang Imamat, ialah bahwa hanya Imamlah, yang secara kudus terjaga dari dosa dan kesalahan, yang memiliki segala hukum sah. Jadi dengan gaibnya Imam ke-12 pada tahun 874, bahkan kemungkinan penggunaan hukum yang sah pun telah hilang dari dunia. Terdapat kepercayaan yang implisit bahwa sementara Imam tetap berada dalam kegaiban, penggunaan segala kekuasaan merupakan suatu perampasan. Ulama, sebagai para pelindung agama, dengan demikian diletakkan pada suatu kedudukan oposisi permanen terhadap para perampas kekuasaan Imam.

Bagaimana bermacam-macam mujtahid utama mengin-

terpretasikan peran mereka sebagai para pelindung agama selama masa senjang antara gaibnya Imam Mahdi dan kedatangan akhirnya memberi kita suatu kunci yang tak ternilai harganya tentang pandangan mereka mengenai peran dan lingkup suatu gerakan Islamis.

Pendapat-pendapat dari Rasulullah s.a.w. menyiratkan semakin rusaknya Umat dengan berjalannya waktu serta pembentukan kembali suatu tatanan yang adil oleh Mahdi. Dengan mengambil hal ini sebagai latar belakang mereka, pendapat di kalangan ulama Syi'ah telah terbagi dalam tiga kelompok besar.

Ada satu pendapat yang mendukung bahwa karena situasi terus memburuk dan diramalkan akan terobati dengan kembalinya Mahdi, ulama seharusnya memusatkan perhatian mereka untuk mempertahankan nilai-nilai dan praktek-praktek spiritual Islam serta tidak melibatkan diri pada masalah-masalah penyelenggaraan Negara pada masa ini. Kita dapat menyebut golongan ini sebagai kelompok ulama abstensionis.

Pendapat lain menyarankan bahwa dengan mempertimbangkan tirani yang tersebar luas di daerah-daerah Islam, para ulama wajib turun tangan bila mereka ingin memenuhi peran mereka sebagai para pelindung agama. Kelompok ulama ini lebih jauh dapat dibagi menjadi dua cabang: satu kelompok tidak ingin secara langsung mencampuri penyelenggaraan Negara tetapi lebih senang memaksakan pembatasan-pembatasan konstitusional terhadap para pemimpin untuk menghilangkan kemungkinan jatuh menuju tirani. Kelompok ini kita sebut ulama konstitusionalis.

Kelompok ketiga ialah para mujtahid yang merasa bahwa tanpa suatu bentuk keterlibatan langsung dan kontrol total terhadap Negara, segala macam bentuk usaha pencegahan terhadap kekuasaan tiranis akan tersingkir. Mereka lebih menyukai suatu bentuk badan yang dipilih secara umum untuk menyelenggarakan Negara dengan para ulama mempunyai kekuasaan untuk menentukan kata akhir terhadap ke-

kuasaan legistatif. Kelompok ini bisa kita sebut ulama absolutis.

Dalam banyak segi pembedaan-pembedaan ini menyesatkan dan nampaknya menuju ke arah penyalahtafsiran terhadap posisi mujtahid tertentu. Dalam banyak contoh, sikap setiap mujtahid disebabkan oleh situasi yang sedang terjadi. Meskipun demikian, dengan semakin meningkatnya kekuasaan Negara dan perangkat-perangkatnya dalam memaksakan kepatuhan terhadap kehendaknya, sikap ulama dalam melawan tirani juga menjadi semakin meningkat. Dengan datangnya imperialisme serta ikatannya yang tak terpisahkan dengan tirani, dominasi asing juga dengan sengit ditentang oleh para ulama. Jadi, sejak pertengahan kedua abad ke-19, para ulama abstensionis lambat laun memberikan jalan kepada kaum konstitusionalis, dan hal ini merupakan proses pemberian jalan kepada kaum absolutis karena pengalaman dengan konstitusionalisme belum benar-benar memuaskan.

Bagaimanapun sikap ulama, penggunaan kekuasaan politis mereka adalah suatu hasil langsung dari interpretasi mereka terhadap peran mereka sebagai para pelindung agama. Interpretasi ini pada gilirannya dijelaskan oleh dua faktor yang sangat berbeda; di satu pihak, figur sentral Imam Husin dalam theologi Syi'ah dan sikap tegasnya terhadap dinasti Umayyah memberikan kekuatan yang merangsang kepada pemberontakan terhadap kekuasaan yang dekaden; di pihak lain, fakta bahwa kekuasaan akhir hanyalah milik Imam berarti bahwa masalah ulama ialah untuk menemukan suatu pemerintahan yang paling cukup sempurna selama gaibnya (okultasi) Imam. Dua pilar kembar ini menjelaskan, misalnya, baik pemberontakan tegas Ayatullah Khomeini terhadap tatanan Pahlevi di Iran maupun penolakannya untuk memimpin Negara seperti halnya yang akan dilakukan Imam.

Sketsa Singkat Penggunaan Peran Ulama

Pendirian suatu Negara Syi'ah berhasil dilaksanakan oleh dinasti Safawi (1501 – 1722). Mereka berhasil mendapatkan semacam pengabsahan dengan menyatakan diri sebagai keturunan Imam ketujuh, Musa al-Khadim, dan sebagai wakil dari Imam yang Gaib. Dengan cara ini konflik inheren antara ulama dan Negara dapat terhindari.

Runtuhnya dinasti Safawi setelah invasi Afghanistan menyebabkan pewarisan tahta terbuka bagi para penuntut yang terdiri dari berbagai suku. Pada masa kacau ini para ulama pindah ke tempat suci Syi'ah di Irak (*atabat*) dan mengambil bagian dalam usaha penjelasan dan pengembangan posisi doktrinal. Yang merupakan hal penting ialah menangnya sudut pandang *usuli* atas sudut pandang *akhbari*. Pada hakekatnya, sudut pandang usuli lebih menekankan pada *taqlid* serta perlunya mengikuti mujtahid. Sebagai akibat utamanya ialah munculnya para mujtahid yang mendapatkan kehormatan dan pengikut yang tersebar luas. Jadi, menjelang berakhirnya kekuasaan Aqa Muhammad Khan, yakni Qajar pertama, pada tahun 1797, para ulama telah menempatkan diri mereka lagi di Iran dan mampu menguasai keadaan.

Fatah Ali Shah (1797 – 1834), yang menggantikan Aqa Muhammad Khan, mencoba menanamkan maksud baik ulama dengan mendukung mereka untuk bertempat tinggal di berbagai pelosok negeri, dengan membangun masjid-masjid dan memperbaiki tempat-tempat suci, dengan menyetujui mereka sebagai perantara bagi kepentingan para pangeran yang memberontak atau rakyat suatu propinsi yang tertindas, dan pada umumnya dengan tidak berusaha meninmbulkan konfrontasi. Hal ini merupakan suatu usaha untuk mempertemukan ketidakabsahan Negara dengan kekuasaan yang diberikan kepada para ulama, tetapi Oposisi ulama terhadap aturan-aturan yang dianggap bertentangan dengan agama dan perlawanan mereka terhadap usaha-usaha untuk mengesahkan monarki menunjukkan bahwa ti-

daklah mungkin menghadiri kontradiksi yang inheren tersebut.

Pada masa berkuasanya Muhammad Shah (1834 – 1848) dimensi ketiga ditambahkan pada konflik tradisional antara para ulama dan Negara. Penguasa tertinggi tersebut adalah seorang *murshid* (pengikut) dari sufi Aqa Haji Mirza Aqasi, yang kemudian menjadi wazirnya. Konfrontasi terus menerus timbul antara ulama dan Negara, dan menjelang berakhirnya kekuasaan Muhammad Shah permusuhan terbuka berlangsung antara kedua partai tersebut.

Meskipun demikian, selama masa berkuasanya Nasirud-Din Shah (1848 – 1896) peran oposisional para ulama terlihat semakin meningkat dan efektif. Hal ini terutama karena semangat pembaharuan para wazirnya (Mirza Taqi Khan, Amir Kabir dan Mirza Husain Khan Sipahsalar), dan karena adanya ancaman dominasi asing terhadap perekonomian Iran dan pertumbuhan ide-ide 'liberal' (suatu eufemisme bagi westernofilia) yang ragu-ragu.

Jadi ketika pada tahun 1872 suatu konsesi diberikan pada badan usaha Reuter bagi eksploitasi seluruh tambang mineral dan hutan di Iran serta bagi pembuatan jalan-jalan kereta api, terjadilah suatu ledakan oposisi yang dipimpin oleh para ulama, dan akhirnya konsesi tersebut harus dibatalkan dan wazir Mirza Husain Khan Sipahsalar dipecat.

Pada tahun 1889 Nasirud-Din Shah melakukan perjalanan ketiganya ke Eropa. Terlepas dari rasa suka para penguasa terhadap 'westernisasi', perjalanan ini berakhir dengan pemberian konsesi-konsesi kepada perusahaan-perusahaan asing dan membuka kemungkinan bagi korupsi dan penyuapan terhadap orang-orang seperti Mirza Malkum Khan salah satu dari figur-figur yang paling samar-samar dan yang selalu ada dalam sejarah Iran, sampai-sampai pada biografi teliti karangan Profesor Hamid Algar. Pada perjalanan ketiga tersebut, Malkum Khan membujuk Shah supaya mengizinkan diadakannya lotere Negara. Hal yang lebih penting ialah pemberian hak monopoli bagi distribusi

dan penjualan tembakau di Iran kepada suatu perusahaan Inggris.

Ide tentang lotere dihapuskan setelah munculnya protes-protes dan fatwa-fatwa penuh kemarahan dari para ulama yang menyatakannya sebagai bertentangan dengan *syariah*. Meskipun demikian, gelombang penentangan terhadap konsesi tembakau menghadapi perlawanan yang sengit dari Shah dan menteri-menterinya. Tetapi, untuk melawan mereka para ulama dan pedagang bersatu. (Persatuan antara ulama dan *bazaar* semacam ini merupakan suatu tema yang sering muncul dalam gerakan Islamis di Iran. Dukungan *bazaar* memungkinkan para ulama untuk mengambil suatu sikap bebas tanpa dihalangi oleh lilitan finansial dari Negara). Para mujtahid di pusat-pusat daerah seperti, Isfahan, Tabriz dan Shiraz serta mereka yang berada di ibu kota, khususnya Mirza Hasan Ashtiani, mulai mengutarakan penentangan mereka terhadap konsesi tersebut.

Keadaan menjadi memuncak ketika Sayyid Ali Falasiri diusir dari Shiraz karena berkhotbah dan memimpin suatu pemberontakan melawan monopoli tersebut. Dia kemudian pergi ke Najaf kepada Mirza Hasan Shirazi, yakni marja'itaqlid pada masa itu. Di tengah-tengah perjalanannya dia berjumpa dengan Sayyid Jamaluddin Asabadi (atau yang lebih dikenal sebagai al-Afghani – yakni pelopor anti-kolonialisme dan pan-Islamisme yang paling teguh) yang memberi dia surat yang memberi tahu Mirza Hasan Shirazi tentang konsesi tersebut serta yang mendesak dan menuntut pencabutannya.

Hal ini beserta kabar dari para mujtahid di Iran menyebabkan Mirza Hasan Shirazi mengeluarkan suatu fatwa yang menyatakan bahwa penggunaan tembakau adalah bertentangan dengan harapan Imam yang gaib. Fatwa tersebut disebarluaskan dan diterangkan di setiap mimbar di Iran. Pengaruhnya adalah total: penggunaan tembakau turun secara dramatis (beberapa laporan menyatakan bahwa bahkan keluarga Shah sendiri berhenti menggunakan temba-

kau). Nasirud-Din Shah, setelah dengan sia-sia mencoba mengadakan larangan, dipaksa membatalkan konsesi itu. Kekuasaan laten para ulama dan pengikut mereka yang menyeluruh secara mencolok untuk pertama kalinya diperlihatkan. Konsepsi para ulama yang pasif dalam sekejap diubah menjadi kekuatan yang aktif dan menghancurkan dalam melawan tirani dan dominasi asing melalui fatwa Mirza Hasan Shirazi yang menentukan. Perubahan dari abstensi menuju ke keterlibatan aktif telah mulai berlangsung dan perkembangannya tetap mendominasi perjuangan umat Islam di Iran dewasa ini.

Kebutuhan dana yang amat besar guna membiayai perjalanan-perjalanan yang penuh kebesaran menuju Eropa serta korupsi yang semakin merajalela menyebabkan Nasirud-Din Shah dan penggantinya, Muhammad Shah mencari pinjaman finansial kepada Rusia dan bahkan menggadaikan nasib Negara. Pada tingkatan inilah dimulainya koalisi antara 'kaum liberal' tertentu dan para ulama. Mereka menemukan penyebab umum dalam oposisi mereka terhadap Negara dan tuntutan mereka akan pembaharuan dinyatakan dalam batasan-batasan yang cukup luas supaya memungkinkan suatu aliansi. Oleh karena itu, ketika tirani tetap tak terakhiri, para ulama pun menuntut suatu *adalat-khana.*

Karena tirani yang semakin bertambah serta pelanggaran hak oleh kekuatan asing, jaman tersebut juga menjadi saksi bagi suatu penelitian kembali yang intens terhadap sikap ulama yang secara umum adalah abstensionis. Salah satu dari pernyataan-pernyataan yang paling jelas tentang posisi ulama dan kecenderungan mereka yang semakin menuju konstitusionalisme disampaikan oleh Mirza Husain Naini (seorang mujtahid utama pada masa itu) dalam bukunya yang berjudul *Tanbih al-Ummah wa Tanzih al-Millah* yang terbit pada tahun 1909. (Edisi ketiga buku ini, dengan kata pengantar dari Sayyid Mahmud Taliqani, diterbitkan di Teheran pada tahun 1958).

Dalam bukunya ini, Ayatullah Naini meneliti kembali peran ulama dan dengan penuh semangat mengajukan pendapat bahwa bentuk pemerintahan yang paling cukup sempurna selama gaibnya Imam nampaknya merupakan suatu pemerintahan konstitusionalis. Pemerintahan ini, menurut dia, akan membebaskan Umat dari tirani para penguasa dan cengkeraman setani orang-orang asing. Ayatullah Naini mendapat dukungan dari Mullah Muhammad Kazim Khurasani maupun Abdallah Mazandarani, yakni dua orang mujtahid yang paling penting pada masa itu.

Dengan reformulasi sikap mereka ini, para ulama memulai gerakan konstitusional di Iran pada tahun-tahun permulaan abad ke-20. Ketika gerakan tersebut mendapatkan popularitas dan momentum, para mujtahid utama di Iran beranggapan bahwa Shah Abdal-Azim tidaklah suci dan mengancam untuk beremigrasi dari Iran beserta seluruh massa (dalam tindakan ini tersirat ancaman yang berupa revolusi umum) dalam usaha mengalahkan sikap tanpa kompromi Muzaffarud-Din Shah. Pada tahun 1906, Shah mengabulkan tuntutan akan suatu konstitusi serta pendirian suatu majelis (dewan konsultatif). Sebagai hasilnya ialah Konstitusi Iran 1906 yang sangat memalukan.

Aliansi tak tertulis antara para ulama dan berbagai macam kekuatan 'liberal' mempunyai bahaya inherennya sendiri. Seperti yang telah ditunjukkan Ayatullah Khomeini, para ulama ditipu dengan pencangkokan dua klausa 'relijius' kepada apa yang hakekatnya merupakan suatu versi yang dipalsukan dari konstitusi Belgia pada saat itu. Konstitusi tersebut memberikan hak kontrol terhadap penguasa, yakni suatu majelis, dan hak veto kepada suatu badan yang terdiri dari lima mujtahid utama terhadap setiap hukum yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Sesungguhnya, seperti yang segera menjadi jelas, 'kaum liberal' telah mengambil keuntungan dari popularitas para ulama dan mendapatkan kemenangan dengan membuat beberapa konsesi kecil (tetapi yang bersifat pengulangan) bagi mere-

ka. Hal yang sesuai dengan catatan mereka, tetapi bertentangan dengan mitologi populer di Barat, ialah bahwa bahkan baik Inggris maupun Rusia tidak bisa hidup dengan ancaman sekuler dari gerakan kekuatan umum di Iran ini.

Jadi, pertama-tama mereka bertindak dalam suatu aliansi dengan kaum liberal untuk meyakinkan bahwa apa yang disebut klausa-klausa relijius telah dijadikan tidak operatif, dan kemudian dengan menyerbu Negara serta mengobarkan pemberontakan-pemberontakan lain mereka berhasil dalam menempatkan rezim-rezim yang semakin bersifat otoriter hingga saatnya Reza Khan merampas kekuasaan pada tahun 1925 dengan bantuan dan doa restu mereka serta mencabut Konstitusi 1906 demi tujuan-tujuan praktis.

Bahkan pada saat berlangsungnya gerakan konstitusional terdapat sekelompok ulama yang jumlahnya semakin bertambah yang memandang aliansi dengan 'kaum liberal' dengan skeptisisme yang besar. Kelompok ini, yang dipimpin oleh Syeikh Fadlollah Nuri, sangat mendukung suatu sikap ulama yang lebih absolut dan tanpa kompromi. Nasib gerakan konstitusional tersebut menyebabkan kekuatan kelompok ini menjadi semakin besar, tetapi peristiwa-peristiwa lain membuat kelompok ini tidak dapat berkembang hingga akhir tahun 1950-an.

Dengan munculnya komunisme di Rusia, Perang Dunia I dan penemuan minyak, Reza Khan menjadi berkuasa penuh. Permufakatan jahat dengan sekutunya, Kemal Ataturk di Turki, membuat para ulama khawatir akan risiko dari suatu pemberontakan umum. Jadi, dengan dukungan penuh dari kekuasaan kerajaan, para ulama ditekan dengan keras, para mujtahid utama dihukum cambuk di depan umum, dan para wanita dipaksa melepas *hijab*. Tanah-tanah *wakaf* (sumbangan keagamaan) dinasionalisasi, sehingga dengan demikian sumber keuangan penting dari lembaga-lembaga keagamaan terpotong. Secara umum, sekularisasi mulai digerakkan dengan penjatuhan hukuman-hukuman yang kejam kepada paham yang berbeda.

Perang Dunia II, yakni akhir dari kolonialisme terbuka, dan godaan emas hitam menimbulkan suatu invasi lain terhadap Iran oleh Inggris dan Rusia untuk mendudukkan boneka yang lebih patuh ke atas tahta pada tahun 1941. Jadi, Muhammad Reza Khan didudukkan ke atas tahta dan ayahnya dipaksa pergi ke pembuangan. Citra tentang Barat yang telah rusak menyusul Perang Dunia II serta tantangan Amerika yang mulai muncul kepada hegemoni Inggris dan Rusia terhadap sumber-sumber minyak secara cerdik dieksploitir oleh Muhammad Mossadeq untuk menasionalisasi the Anglo-Iranian Oil Company (sekarang BP) pada tahun 1951 dan lebih lanjut untuk melemahkan kekuasaan Shah. Meskipun demikian, orang-orang Amerika menunjukkan maksud-maksud imperialistis mereka yang sesungguhnya dan menggunakan kesempatan untuk merampas kontrol terhadap ladang-ladang minyak dari Inggris. Ini mereka laksanakan dengan mendudukkan kembali Shah ke atas tahta dengan bantuan CIA pada tahun 1953. Mulai saat itu Amerika Serikat, dan bukannya Inggris atau Rusia, merupakan kekuatan imperialis terhadap siapa rakyat Iran diharapkan mengabdi.

Para ulama yang memainkan bagian pada gerakan nasionalistis yang dipimpin oleh Mossadeq dan Ayatullah Kashani bertindak sebagai alat dalam mengorganisasi dukungan massa pada masa-masa kritis. Meskipun demikian, karena gerakan tersebut tidak dipimpin oleh ulama, dengan segera mereka menjadi cemas tatkala kaum komunis mulai menggunakan pengaruh yang berarti terhadapnya.

Kecenderungan kelompok-kelompok lain untuk mengambil keuntungan dari popularitas ulama ditunjukkan lagi dan telah memberikan sumbangan pada taraf yang tidak kurang dari gerakan Islamis Ayatullah Khomeini yang tanpa kompromi dan tegas untuk tidak mencari aliansi dengan segala kelompok yang lain.

Menyusul desakan dari Mossadeq, Shah mulai mengkonsolidasikan genggamannya terhadap Negara. Savak didiri-

kan untuk menteror rakyat agar tunduk, banyak tokoh komunis dibeli dengan jumlah uang yang besar, kaum nasionalis yang sangat bersemangat dipaksa untuk bersikap tenang, dan oposisi relijius dan intelektual dengan tanpa belas kasihan ditekan.

Meskipun demikian, di bawah perlindungan payung Ayatullah Husin Burujirdi (wafat tahun 1961), para ulama mulai mengorganisir suatu gerakan massa untuk mendudukkan Islam sebagai suatu kekuatan yang selalu bergerak dalam sejarah Iran. Para mujtahid, seperti Ayatullah Khomeini, Teleqani, Muntazari, Milani, Shariatmadari dan Rouhani, mulai menerbitkan karya-karya lama tentang masalah-masalah pemerintahan dan menjelaskan pandangan-pandangan mereka terhadap masalah tersebut. Kekuasaan dan popularitas Burujirdi yang besar menghalangi rezim yang berkuasa untuk dapat memberikan pukulan-pukulan yang bersifat merusak kepada gerakan tersebut.

Di pihak lain, kekecewaan terhadap imperialisme Amerika dan Rusia serta hegemoni dunia mereka semakin membesar di kalangan kaum intelektual. Janji mula-mula komunisme/sosialisme mulai dipandang sebagai ancaman paling kuat terhadap kebebasan dan kemerdekaan. Suasana hati ini ditangkap dan dibesarkan menuju ke kecenderungan-kecenderungan pikiran Islamis oleh sarjana-sarjana seperti Mehdi Bazargan dan Ali Shariati; oleh filsuf-filsuf seperti Muhammad Husain Tabatabai dan Murtaza Mutahari; dan oleh penulis-penulis seperti Sayyid Mahmud Taleghani dan Muhammad Taqi Jaffery.

Jadi, pada awal tahun 1960-an, suatu aliansi antara ulama, kaum intelektual dan massa dimulai lagi – tetapi kali ini aliansi tersebut seluruhnya terdiri dari pergerakan-pergerakan Islam. Dengan meninggalnya Ayatullah Burujirdi pada tahun 1961, Ayatullah Khomeini mengadakan kampanye yang semakin keras melawan sekularisasi tak bermoral di Iran serta dominasi Amerika Serikat yang menelan segalanya. Shah memberi respons dengan Revolusi Putihnya yang

terbukti tidak efektif dalam usaha mengasingkan massa dari ulama. Ketika pada tahun 1963 Ayatullah Khomeini mengadakan suatu kampanye umum yang memprotes Revolusi Putih dan pemberian hak immunitas terhadap Hukum Iran kepada pegawai-pegawai Amerika Serikat, Shah memberi respons dengan serangan brutal dan 15.000 orang mati syahid pada tanggal 5 Juni 1963 di jalan-jalan kota Teheran, Qum, Shiraz dan Tabriz. Kampanye Ayatullah tetap berlangsung dan dia kemudian dibuang pada tahun 1964, mula-mula ke Turki, kemudian ke Irak dan akhirnya ke Perancis.

Menyusul tindakan ini, tekanan tehadap para ulama diperkeras, Savak semakin diperbesar, 'penasehat-penasehat' militer Amerika Serikat dilipatgandakan, usaha-usaha untuk memisahkan rakyat Iran sebagai orang-orang Arya dan dengan demikian berbeda dari orang-orang Arab dipergiat, kurikulum sekolah lebih jauh disekularisasikan dan murid-murid dipaksa mencerna sejumlah besar dosis sejarah Kerajaan, beberapa orang Islam intelek dan Ayatullah dibunuh atau dipenjarakan, dan hubungan dengan Israel ditingkatkan sampai suatu taraf di mana Iran menjadi pensuplai minyak tunggal ke negara Zionis ini. Kekayaan minyak yang meningkat digunakan untuk menenangkan oposisi, untuk mendiamkan kaum muda dengan segala macam permainan pembunuh waktu serta untuk membeli gudang 'senjata' (atau yang oleh Ayatullah Khomeini disebut besi permusuhan) yang amat besar. Taruhan Amerika Serikat diintensifkan hingga mencapai titik di mana 45.000 orang Amerika dipekerjakan sebagai 'penasehat-penasehat' dan Richard Helms, bekas direktur CIA, dikirim sebagai duta besar Amerika Serikat. Rezim yang berkuasa juga mulai merasa semakin aman dan berani secara terang-terangan menghina rakyat dengan merayakan apa yang disebut ulang tahun ke-2500 Monarki Persia dan kemudian perayaan 50 tahun dinasti Pahlevi. Tidak lama kemudian rezim ini berani mengganti kalender Islam menjadi suatu kalender monarkis. Tetapi aliansi Islamis menyatukan langkah dan men-

dung pun menyibak ketika pada bulan Januari 1978 rezim tersebut menyatakan Ayatullah Khomeini sebagai suatu elemen yang tak dikehendaki. Peristiwa-peristiwa yang menyusul telah didokumentasikan dengan baik dan tidak perlu diulangi di sini.

Kesimpulan

Akar gerakan Islamis di Iran tertanam secara kuat dalam sikap tanpa kompromi para ulama melawan tirani dan dominasi asing serta pelaksanaan peran mereka sebagai para pelindung agama selama gaibnya Imam. Gerakan tersebut telah mendapatkan pengalaman seperti apa yang telah disaksikan; pada khususnya gerakan ini telah memiliki cukup kekuatan untuk bertindak tanpa aliansi 'kaum liberal', kaum sekularis dan golongan kiri yang mempunyai bermacam-macam warna. Sikap oportunistis semua golongan ini serta ketidakreliabilitasan mereka yang inheren telah membawa pada suatu formulasi tuntutan akan pendirian suatu Republik Islam yang dipimpin dan dituntun oleh para ulama; semua organisasi lain harus memasukkan tujuan-tujuan mereka ke dalam gerakan Islamis tersebut.

Gerakan Islamis di Iran diwarnai oleh sejarah dan latar belakang orang-orang Islam Iran, tetapi dalam rentangannya yang luas gerakan ini merupakan bagian dari gerakan Islamis dunia dan kekuatannya berasal dari keinginan universal Umat untuk melaksanakan Islam yang tidak terkotori. Dalam hal ini kepemimpinan para ulama merupakan kekuatan yang paling konsisten dan potensial dalam menggerakkan dan mendorong Umat menuju tujuan tersebut; dan gerakan Islamis di Iran telah memberikan suatu contoh agung dari peran vital para ulama •

Bab 3.
Revolusi Islam: Pengaruhnya Terhadap Pergerakan Islam

Oleh • Abdal Rahim Ali

REVOLUSI ISLAM di Iran telah menimbulkan pengaruh yang amat besar terhadap politik dunia. Gemanya masih tetap dirasakan di mana-mana. Strategi-strategi militer disesuaikan, persekutuan-persekutuan politis dicoba dibentuk oleh rezim-rezim yang ketakutan di Timur Tengah, kebijaksanaan-kebijaksanaan ditinjau kembali, dan seluruh susunan hubungan-hubungan internasional melalui suatu fase fluiditas yang, bila semuanya teratur kembali, akan memberi kita suatu dunia yang sangat berbeda dengan dunia pada masa setelah perang. Sejauh ini yang paling terpengaruh ialah negara-negara Islam. Meskipun demikian, sementara mayoritas umat Islam yang acuh tak acuh hanya mengangkat alis mereka, dan sementara pemerintahan-pemerintahan di dunia Islam bukannya merasa senang melainkan merasa cemas, sektor yang memberikan respons secara positif dan yang tampaknya paling menguntungkan ialah gerakan Islamis dalam arti luas. Segera setelah berhasilnya revolusi di Iran, jari-jari pers Barat dengan sendirinya teracung ke arah Saudi Arabia, Mesir dan Pakistan. Kekuasaan terbesar gerakan Islamis di dunia Arab ialah al-Ikhwannal Muslimun, sedangkan di Pakistan yang paling berpengaruh ialah Jama'ati Islami.

Fakta bahwa kedua organisasi ini mempunyai tujuan

yang hampir sama dengan tujuan gerakan yang bertanggung jawab atas revolusi di Iran, membuat mereka tampaknya lebih memberikan respos terhadap dan benar-benar terpengaruh oleh gerakan Islamis di Iran tersebut. Ada tiga prinsip utama yang biasanya terdapat pada organisasi-organisasi ini yang membedakan mereka dari kekuatan-kekuatan lain di dalam dunia Islam:

1. Bahwa Islam adalah suatu pandangan hidup yang komprehensif dan bukannya semata-mata merupakan serangkaian ritual-ritual dan kepercayaan-kepercayaan;
2. Bahwa persatuan umat Islam seharusnya melampaui semua batasan negara; dan
3. Bahwa suatu bentuk tindakan yang terorganisir harus dilakukan dalam usaha untuk tujuan akhir yang berupa penempatan Islam sebagai suatu pandangan hidup, sebagai suatu Negara dan juga sebagai suatu dasar untuk penyatuan umat Islam.

Meskipun demikian, metode-metode yang dipakai oleh organisasi-organisasi ini tidak hanya berkisar dari satu organisasi ke organisasi lain, melainkan juga dalam suatu organisasi yang sama dari waktu ke waktu. Selama berlangsungnya perjuangan mereka telah banyak pertanyaan timbul yang mengalihkan perhatian pergerakan-pergerakan ini ke arah perlunya akan apa yang sekarang dikenal sebagai *fiqh* pergerakan (yang dibedakan dari *fiqh* ibadah dan sebagainya). Kontroversi mengenai pertanyaan-pertanyaan ini kadang-kadang berakhir dengan keluarnya kelompok-kelompok pecahan dari induk organisasi, serta kadang-kadang menghentikan atau bahkan menghalangi kegiatan anggota-anggota penting. Pertimbangan akan pertanyaan-pertanyaan ini kadang-kadang mengalihkan perhatian seluruh pergerakan dari tindakan praktis dan berguna.

Di sini saya bermaksud untuk mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan tersebut serta menunjukkan implikasi-implikasi apa yang dapat dihasilkan oleh keberhasilan Revolusi

terhadap gerakan Islamis.

Pertanyaan pertama ialah tentang kepemimpinan orang-orang Islam. Sama sekali tidak ada halangan yang lebih besar terhadap pergerakan sebagai suatu keseluruhan atau terhadap setiap organisasi khusus selain jurang pemisah yang timbul antara orang-orang Islam didikan Barat dan masyarakat-masyarakat yang mereka perintah dan asingkan. Di dalam setiap negara Islam, pendidikan Barat telah menghasilkan suatu kelas yang lebih menjadi milik Barat daripada masyarakat-masyarakat mereka sendiri. Kepada sektor masyarakat Islam yang kebarat-baratan inilah ditujukan segala usaha awal dari Ikhwannal Muslimun dan Jama'ati Islami. Alasan-alasannya adalah jelas. Tantangan untuk mengembalikan sektor sekuler ini kepada Islam harus dihadapi. Kaum terpelajar tersebut bukan hanya lebih tidak rela untuk menerima Islam sebagai pandangan hidup, melainkan mereka juga mengontrol masa depan mayoritas yang diam serta menikmati kekuasaan yang tanpa tantangan atas nasib negara-negara mereka.

Dalam kasus Ikhwannal Muslimun, Hasan al-Banna memulai pergerakan tersebut sebagai suatu pergerakan yang umum, nonelitis dan terbuka. Juga terdapat bukti bahwa dia pada mulanya merencanakan suatu reformasi sosial berangsur-angsur yang lebih besar serta keterlibatan yang lebih kecil dalam politik, tetapi secara paksa dia kemudian diminta untuk mengambil suatu peran yang lebih aktif, sehingga dengan demikian hal ini mempercepat proses politisasi pergerakannya serta menyebabkan suatu konfrontasi prematur dengan pemerintah-pemerintah berikutnya. Mungkin tampak bahwa keadaan di mana organisasi tersebut harus bekerja, memaksakan suatu taraf kerahasiaan kepada organisasi itu, dan lambat laun memaksanya menjadi suatu pergerakan yang semakin kurang bersifat umum dan yang semakin tertutup yang tindakan-tindakannya dipengaruhi dan ditentukan oleh elit terpelajar.

Meskipun demikian, haruslah diingat bahwa di Mesir, pa-

ling tidak, tetap selalu terdapat banyak pemimpin yang berasal dari kategori orang biasa atau orang jalanan. [1] Namun faktanya adalah tetap, yakni bahwa Ikhwannal Muslimun dipaksa berkembang dari suatu gerakan yang bersifat meluas menjadi suatu gerakan yang tertutup. Dewasa ini, setelah suksesnya revolusi yang paling luas dalam sejarah modern, kita harus meninjau kembali seluruh perkembangan historisnya.

Nampak oleh saya bahwa hal yang paling penting dalam Revolusi Islam Iran ialah bahwa revolusi tersebut membawa setiap pria, wanita maupun anak-anak ke jalan-jalan – bahwa revolusi tersebut dalam segala segi benar-benar adalah suatu revolusi. Tetapi masalah sesungguhnya ialah bagaimana sesungguhnya terjadinya revolusi ini. Bagaimana mungkin pesan-pesan lewat kaset dari seorang yang berumur 78 tahun dapat meyakinkan berjuta-juta orang di Iran bahwa mereka perlu mengorbankan jiwa mereka demi Tuhan? Ini bahkan merupakan pertanyaan yang terlalu besar untuk dicoba diajukan. Meskipun demikian, segala jawaban akan benar-benar membawa implikasi-implikasi besar baik bagi Ikhwannal Muslimun maupun bagi Jama'ati Islami. Di satu pihak, Ikhwannal Muslimun telah siap menggunakan perjuangan bersenjata dan mereka memang tidak merahasiakan hal ini; di pihak lain, Jama'ati Islami secara mutlak memilih suatu perjuangan konstitusional dengan tanpa menggunakan kekerasan. Sampai sejauh ini tak satu pun dari kedua organisasi tersebut telah mencapai, maupun mendekati, hasil seperti yang didapatkan oleh pergerakan saudara mereka di Iran. Orang-orang Mesir memang menaruh simpati terhadap penderitaan Ikhwannal Muslimun selama berada di bawah Nasser, tetapi mereka tidak pernah turun ke jalan-jalan. Pemerintah Pakistan juga tidak rela memberi Jama'ati Islami dukungan demokratis yang perlu dalam setiap pemilihan umum – pada kenyataannya mereka bahkan hampir tidak mendapatkan dukungan massa. [2]

Lalu mengapa Ayatullah Khomeini bisa berhasil hanya

dengan meminta kepercayaan dan pengabdian Umat terhadap Islam?

Hal yang harus dicatat ialah bahwa baik Hasan al-Banna maupun Maududi muncul pada masa krisis dengan sama sekali tidak mempunyai tradisi kuat untuk berpijak, sedangkan Khomeini tidak lain adalah kulminasi suatu tradisi menyeluruh dari tidak hanya kepemimpinan relijius melainkan juga kegiatan politis yang dilaksanakan oleh para ulama Syi'ah.

Menurut Profesor Algar, revolusi tersebut merupakan suatu "kelanjutan dan hasil dari perkembangan politis, spiritual dan intelektual yang berlangsung selama bertahun-tahun." Dia juga menerangkan betapa ulama "muncul sebagai suatu kelas yang tidak hanya memberikan kepemimpinan relijius dalam arti sempit dan bersifat teknis, tetapi kepemimpinan yang bersifat nasional dan politis juga semakin banyak diberikan untuk menandingi lembaga monarki." (3)

Jelaslah bahwa Khomeini muncul dari kelas ini, dan dia menggunakan segala kekuatan dan rasa hormat yang didapatkan oleh para ulama. Oleh karena itu, akan sukar bagi dirinya sendiri untuk mendapatkan dukungan dari kelas-kelas terpelajar tidak ada pengaruh pikiran Shariati yang membuat kelas ini mudah dilarutkan ke dalam arus umum Revolusi. Profesor Algar menyatakan, "Seandainya revolusi tersebut secara umum dipimpin oleh para ulama Syi'ah, terutama oleh Ayatullah Khomeini, yang menggunakan tradisi yang panjang, tetaplah merupakan suatu kenyataan bahwa hasil kerja Dr. Shariatilah yang terutama telah membuat sangat banyak golongan muda terpelajar di Iran siap menerima dan mengikuti kepemimpinan yang diberikan oleh Ayatullah Khomeini dengan penuh pengabdian dan keberanian." (4)

Pergerakan sebelum Revolusi nampaknya berkembang di atas dua jalur yang terpisah dengan tanpa adanya usaha untuk menyatukannya. Publik dipersiapkan oleh para ulama, kaum terpelajar oleh seorang intelek revolusioner yang dapat berbicara dalam bahasa mereka serta memahami ma-

salah-masalah mereka.

Baik di Mesir maupun Pakistan, tidak adanya sumbangan jelas dari para ulama bagi sasaran pergerakan Islam telah membuat kedua organisasi tersebut mencoba untuk seolah-olah terbang dengan hanya menggunakan satu sayap. Sebagai akibatnya, respons dari publik tidak pernah memuaskan, dan elit tersebut juga tidak pernah dapat memenangkan perjuangan politis mereka melawan musuh-musuh sekuler mereka. Nampaknya publik seolah-olah tidak yakin bahwa perjuangan tersebut benar-benar berlangsung antara Islam dan sekularisme, atau seandainya pun mereka yakin mungkin secara spritiual dan moral mereka belum siap untuk memberikan pengorbanan dalam perjuangan ini – bahkan juga tidak pengorbanan yang paling kecil pun.

Sebagai kesimpulan dari perbandingan ini nampaknya mencukupi untuk menekankan hal-hal berikut ini:

1. Peran para ulama bisa merupakan hal yang vital dalam setiap revolusi atau gerakan yag radikal. Ajaran masjid haruslah bersifat komprehensif bila Islam ingin dipandang sebagai agama yang komprehensif.
2. Suatu gerakan yang dimulai dengan mendapatkan dukungan massa nampaknya lebih mungkin untuk mendapatkan dukungan dari kelas terpelajar – dibanding gerakan yang dimulai dari kaum elit dan baru kemudian mencoba menarik massa.
3. Tidak ada alasan untuk mengasumsikan bahwa keterlibatan religius dalam masyarakat Sunni adalah lebih lemah dibanding keterlibatan religius dalam masyarakat Syi'ah, tetapi pengekangan terhadap banyak ulama oleh Negara telah membuat orang-orang Islam Sunni kehilangan bimbingan relijius yang memadai mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari mereka.
4. Telah terbukti bahwa jurang pemisah ini tidak mudah untuk ditutup oleh usaha-usaha terencana orang-orang Islam terpelajar yang tidak mampu menghargai masalah-masalah nyata masyarakat maupun menam-

pi'kan Islam dalam suatu cara yang menarik bagi para pengikut mereka.

5. Dengan acuh tak acuhnya masyarakat terhadap Islam seperti yang diwakili oleh kaum elit, proses demokratis tidaklah mempunyai harapan, revolusi tidaklah mungkin, dan alternatif kudeta yang menakutkan tetap selalu ada. Oleh karena itu, pilihan yang tersedia berkisar antara, seolah-olah, tindakan mencabuti rumput dengan sabar dan santai atau menggunakan teknik mutakhir dalam usaha mengalahkan beberapa perwira angkatan bersenjata.
6. Dapatlah dikatakan, dengan menggunakan paralel-paralel terhadap Iran, bahwa di banyak negara Islam pekerjaan seperti yang dilakukan oleh Ali Shariati telah pernah dilaksanakan, mungkin dalam bentuk yang lebih baik dan efisien, tetapi peran yang dimainkan oleh para ulama hanya sedikit disinggung.

Pertanyaan penting lain yang mengundang perhatian dengan adanya Revolusi ialah di mana titik berat harus diletakkan. Meskipun hal ini mungkin merupakan suatu generalisasi, tetapi saya dapati bahwa generalisasi ini merupakan suatu generalisasi yang berguna untuk menyatakan bahwa Ikhwannal Muslimun meletakkan titik berat pada *tarbiyyah* (pendidikan perseorangan), Jama'ati Islami pada tantangan intelektual, sedangkan pergerakan di Iran terutama berhubungan dengan *jihad.* Mungkin alasannya lebih bersifat historis dan *environmental.* Hal yang harus diingat ialah bahwa jihad adalah suatu istilah komprehensif dan mencakup tantangan-tantangan edukasional dan intelektual.

Hal yang juga menarik untuk dicatat ialah baik Ikhwannal Muslimun maupun Jama'ati Islami lebih mewakili langkah-langkah yang bertahap serta dipertimbangkan dengan cermat, sedangkan pergerakan di Iran nampaknya seolah-olah tidak mempunyai strategi. Profesor Algar menulis:

Salah seorang kenalan saya yang bepergian ke Paris un-

tuk menjumpai Ayatullah Khomeini bertanya kepada-
nya, "Apakah menurut pendapat anda tindakan kita se-
karang ini bijaksana? Apa yang akan terjadi bila Angkat-
an bersenjata terus membantai rakyat? Tidakkah cepat
atau lambat rakyat akan merasa bosan dan kehilangan
keberanian?" Dengan sangat sederhana dia menjawab
bahwa merupakan tugas kita untuk berjuang dengan cara
ini, dan hasil yang dicapai adalah urusan Allah. Dia (Pro-
fesor Algar) berkomentar: Tepatnya, kurangnya strategi
yang nampak jelas inilah, penolakan untuk memikirkan
pertimbangan-pertimbangan strategi politis normal yang
tepat inilah yang membangun bentuk strategi revolusio-
ner yang paling tinggi dan penuh keberhasilan dalam
suatu konteks Islamis. [5]

Dengan kata lain, terlalu banyak pertimbangan dalam
pelaksanaan suatu pergerakan adalah berbahaya, tetapi,
untuk mengimbangi pernyataan ini, adalah juga benar bah-
wa seorang pemimpin harus mempunyai pertimbangan ten-
tang apa yang harus dia minta dan kapan dia harus memin-
tanya.

Pertanyaan terakhir yang perlu dipertimbangkan di sini
ialah apakah Gerakan Islamis seharusnya mempunyai suatu
program sosial atau seharusnya didasarkan atas prinsip-
prinsip umum. Di sini kita juga telah mengetahui pengalam-
an Jama'ati Islami yang cenderung untuk lebih menyempur-
nakan program-program sosial dan edukasionalnya. Hal ini
berbeda dengan metode yang digunakan Ikhwannal Musli-
mun yang lebih cenderung pada prinsip-prinsip fundamen-
tal. Pergerakan di Iran cenderung untuk menggabungkan
keduanya. Ide-ide Ali Shariati bersifat intelektual dan bisa
dibandingkan dengan jalur awal yang diikuti beberapa
orang anggota Ikhwannal Muslimun, sedangkan pesan-
pesan Ayatullah Khomeini kepada rakyat masih tetap se-
derhana dan tajam. Khomeini tetap mengajukan beberapa
masalah mendasar yang mewarnai dan membumbui Revo-
lusi.

Meskipun di wilayah-wilayah dunia Arab tertentu (misalnya Sudan), pergerakan cenderung berhubungan dengan pengembangan-pengembangan program pembaharuan yang mendetil, kecenderungan umum di tempat-tempat lain ialah selalu menghindari metode-metode semacam itu. Sayyid Qutb telah bertindak secara ekstrim dengan mencela segala usaha yang ditujukan pada perencanaan program-program ekonomi atau sosial bagi suatu masyarakat yang benar-benar tidak ingin mendengarkannya. Teori Qutb tampaknya, dengan beberapa perubahan, mungkin bisa bekerja pada masyarakat tak terpelajar yang memerlukan suatu seruan yang penuh semangat dan ketulusan bagi prinsip-prinsip fundamental Islam. Tetapi, di mana pun juga tempatnya, kelas-kelas terpelajar tidak akan rela untuk membuang segala sistem buatan manusia bila suatu sistem yang lain belum digariskan bagi kepentingan mereka.

Akhirnya, masih tetap harus ditunggu akibat semacam apa yang akan ditimbulkan oleh Revolusi terhadap pergerakan Islam dalam hubungan dengan metode dan ide-ide. Meskipun demikian, nilai-nilai tertentu memang telah sangat terpengaruh. Hal ini bukan berarti bahwa nilai-nilai tersebut telah dilupakan, tetapi Revolusi, yang dipimpin oleh seorang Imam, telah membawa ideal-ideal pengorbanan, ketabahan serta solidaritas ke dalam kehidupan dengan menyatakan dalam suatu konteks modern ●

Catatan Kaki:

(1) Hal yang menarik untuk dicatat ialah bahwa di antara orang-orang yang dihukum mati pada tahun 1954 ialah Y. Talat, dan pada tahun 1967 ialah Abdal Fattah Ismail.

(2) Ghayasuddin Siddiqui, *An Approach to the Study of Jama't-e-Islami Experiment in Pakistan*, London: The Muslim Institute, 1976.

(3) Kalim Siddiqui (ed)., *The Islamic Revolution in Iran*, London: The Open Press and the Muslim Institute, 1980.

(4) Ibid.

Bab 4. Tentang Kekuatan-kekuatan Kontrarevolusi

Oleh • Ali Afrouz

"Dan perangilah mereka, supaya tidak ada (lagi) fitnah, dan supaya agama itu semata-mata bagi Allah."
(Al-Anfaal 39)

REVOLUSI ISLAM Iran merupakan lanjutan yang sah dari peperangan antara Kebenaran dan Kejahatan. Konflik-konflik antara kekuatan-kekuatan Kudus dan Jahat, antara Habil dan Qabil, Musa Dan Firaun, Yesus dan Kaisar. Muhammad dan keluarga-keluarga Abu Jahil/Abu Sufian, Ali dan keluarga Muawiyah, Husin dan keluarga Yazid, Khomeini dan Dinasti Pahlevi serta Carter akan tetap berlanjut hingga Tatanan Kudus dan sistem kehidupan Kudus berdiri dengan kokoh di dunia ini.

Dasar dari Revolusi Islam Iran diletakkan ketika kekuatan-kekuatan asing yang licik mulai menguasai pikiran-pikiran rakyat, ketika kemurnian kepercayaan yang asli diganti dengan kemunafikan dan ketidakadilan, ketika orang-orang Islam dipaksa terlibat dalam banyak pembunuhan terhadap saudara-saudaranya sendiri dan dalam peperangan-peperangan yang tak diinginkan. Kemudian tibalah saatnya ketika Imam Husin dan beberapa pengikutnya yang setia harus mati syahid dalam pertempuran di Karbala pada tahun 61 Hijriah (680 Masehi). Dengan berlalunya waktu,

dan selama 14 abad yang lalu, beratus-ratus ribu orang mengikuti langkah-langkah para syuhada, yang darah sucinya mewarnai dan melempangkan 'jalan yang benar' untuk merintis jalan bagi terbentuknya suatu republik Islam, yakni tujuan mendasar yang tak lain dan tak bukan adalah untuk membentuk citra yang benar dari Islam demi kepentingan seluruh umat manusia. Karena itu, pengikut-pengikut setia keturunan Nabi, meskipun mengalami pengejaran selama berabad-abad, tak akan pernah berhenti berperang demi kepercayaan dan nilai-nilai kemanusiaan terhadap hukum-hukum Islam yang suci; karena, menurut Imam Husin yang mati syahid: "Sesungguhnya aku berkata kepadamu bahwa kehidupan tak lain dan tak bukan adalah kepercayaan kepada Tuhan dan perjuangan demi Tuhan."

Orang-orang Islam Iran telah mengalami hari-hari gelap yang penuh duka dalam abad-abad yang telah lalu. Tetapi dasawarsa-dasawarsa belakangan ini terutama tahun-tahun di bawah dinasti Pahlevi, adalah tahun-tahun yang paling gelap; dan, hanya teror dan perampok-perampok gilalah yang berkuasa di seluruh negeri. Penyiksaan-penyiksaan, eksekusi-eksekusi rahasia, dan hasil-hasil menjijikkan dari egomania yang telah dijalankan oleh Shah yang terguling, serta pencurian besar-besaran bermilyard-milyard dollar oleh korupsi keluarga Pahlevi, dan terutama cara pemerintah Amerika Serikat mendukung tiran tersebut, adalah cacat-cacat memalukan yang mencoreng wajah sejarah modern. Dalam keadaan demikian, demi mengakhiri monarki tiranis dan perampokan-perampokan monarkis di Iran, Imam Ruhullah Al-Moussavi Al-Khomeini menganggap bahwa adalah suatu kewajiban relijius untuk memimpin kaum revolusioner Islam untuk membentuk citra yang benar dari suatu masyarakat Islam, dan untuk memperkenalkan prinsip-prinsip hidup Islam yang mendasar dan untuk berkampanye menentang eksploitasi imperialistis terhadap kaum tertindas demi keuntungan dan kesejahteraan seluruh umat manusia. Jadi, meskipun berpuluh-puluh ribu nyawa yang le-

bih mulia melayang untuk memenangkan Revolusi Islam Iran, hasil historis dari kesatuan sepenuh hati rakyat dan kampanye mereka yang tabah di bawah kepemimpinan Imam Khomeini yang setia merupakan fajar suatu harapan yang membuahkan hasil dan keberanian bagi kaum tertindas di mana saja di dunia ini.

Revolusi Islam Iran, berbeda dengan revolusi-revolusi lain di dunia seperti Revolusi Prancis (1789) dan Revolusi Oktober di Rusia (1917), mempunyai ciri-ciri istimewa yang membuat revolusi ini bisa diterapkan pada segala masyarakat di seluruh dunia.

Ciri-ciri ini bisa diringkaskan sebagai berikut:

a. Baik golongan kaya maupun miskin, alim ulama maupun rakyat jelata, pria maupun wanita, orang-orang kota maupun desa – pendek kata seluruh bangsa memberontak terhadap rezim tersebut dan mengambil bagian aktif dalam Revolusi.
b. Kondisi ekonomi sendiri tidak menimbulkan pemberontakan rakyat. Meskipun situasi ekonomi merupakan salah satu faktor, situasi ini sama sekali bukanlah merupakan penyebab adanya Revolusi.
c. Revolusi Islam Iran secara mendasar didasarkan pada ideologi keagamaan dan keyakinan-keyakinan Islamis serta tujuan-tujuan hidup Islamis dan Quranis, dan didorong oleh alim ulama Islam yang bertanggung jawab di seluruh negara dengan tujuan mendirikan suatu Negara Islam sejati untuk membantu seluruh masyarakat Islam dan sesama manusia di mana saja di dunia ini berdasarkan ajaran-ajaran dan hukum-hukum Quran dan Nabi.
d. Masjid-masjid dan masyarakat-masyarakat Islam merupakan pusat-pusat kampanye yang penting, dan alim ulama, para teolog serta penulis-penulis Islam yang bertanggung jawab, memberi penjelasan kepada rakyat dan merintis jalan menuju ke kemenangan terakhir melawan tirani. Karena itu, antek-antek yang

kejam dan kasar dari penguasa-penguasa boneka yang gila dari dinasti Pahlevi menutup banyak masjid dan pusat-pusat kegiatan Islamis, dan memenjarakan atau mengasingkan banyak pemimpin keagamaan dan intelektual.

e. Meskipun ada kenyataan bahwa banyak kelompok dan organisasi politik dan militan – dalam tahun-tahun belakangan dan pada saat Revolusi Islam Iran berlangsung – mempunyai suatu peranan yang besar dalam kampanye menentang rezim Pahlevi yang korup, tak ada satu pun di antara kelompok-kelompok atau partai-partai politik tersebut menjadi pengatur sesungguhnya atau pelopor dari semua demonstrasi dan perkelahian di jalan-jalan. Dengan kata lain, Revolusi Islam Iran, dengan pertolongan Tuhan dan di bawah pimpinan Imam Khomeini, memperoleh suatu kemenangan melalui suatu cara yang sama sekali tak dapat diangankan oleh pemikiran politis.

f. Revolusi Islam Iran tidak didukung oleh satu pun superpower Barat atau Timur, atau oleh negara-negara boneka mereka, baik secara ekonomis maupun ideologis; mereka bahkan mempunyai bermacam-macam cara yang menolong dan mendorong boneka sewaan megalomaniak wilayah itu dalam merampok rakyat dan membantai banyak orang suci; dan sejak kemenangan besar dari revolusi mulia pada masa kita inilah, telah mereka kerahkan segala kekuatan mereka untuk mencegah keberhasilan dan kesejahteraan bangsa kita.

Kedapatditerapkannya Revolusi Islam Iran ke seluruh dunia, yang sejak awal mulanya telah terlihat, telah menimbulkan berbagai reaksi tidak saja di kalangan orang-orang yang paham tetapi juga di kalangan orang-orang yang tidak paham dengan keyakinan-keyakinan yang mendasar di balik Revolusi Islam sejati ini. Sayangnya, sikap mereka telah terbukti penuh kedengkian. Dengan perkecualian terhadap

pihak-pihak yang telah menderita kerugian keuangan atau pihak-pihak yang tidak lagi mampu merampok bangsa ini untuk memperkaya diri mereka sendiri, pihak-pihak lain sedikit pun tak perlu merasa khawatir. Karena itu, sahabat-sahabat kita di mana saja di dunia harus menyadari kenyataan bahwa semua pihak yang menentang kita tidaklah paham akan nilai-nilai Revolusi Islam atau merasa khawatir karena eksploitasi mereka terhadap rakyat ada dalam bahaya.

Meskipun demikian, haruslah diingat bahwa massa rakyat di berbagai penjuru dunia, terutama dalam masyarakat-masyarakat Islam, mulai bersimpati dan mendukung Revolusi Islam Iran, dan bersedia serta bersiap-siap untuk meruntuhkan tirani dan kediktatoran di setiap negara.

Republik Islam Iran - yang benar-benar percaya pada Allah yang Mahakuasa, dan yang percaya pada kekuatan dan dukungan yang tak terkalahkan dari rakyat -, meskipun menghadapi persekongkolan-persekongkolan, tak akan pernah berhenti bergerak ke arah pencapaian suatu kesejahteraan yang terus meningkat bagi rakyat, dan kesejahteraan bagi umat manusia secara keseluruhan; dan akan mendukung rakyat yang tertindas di mana saja di dunia ini dalam perjuangan dan kampanye mereka menentang penindas-penindas mereka dan imperialisme dunia.

Dalam menganalisis Revolusi Islam Iran, jika kesimpulan yang telah kita tarik membuktikan bahwa Revolusi tersebut merupakan kelanjutan dari kampanye-kampanye berabad-abad menentang ketidakadilan dan tirani, penjajahan dan eksploitasi, serta ketergantungan politis maupun ekonomis pada negara-negara superpower, maka dengan sangat mudah kita bisa mengenali kelakuan dan motif-motif sebenarnya dari pihak-pihak yang menentang Revolusi Islam yang mulia ini. Dengan demikian, sangatlah wajar dan dapat dimengerti bahwa tidak saja kekuatan-kekuatan kolonialis dunia, yakni pemerintah Amerika Serikat, dan penjajah-penjajah dari Sovyet, serta agen-agen mereka yang setia seperti Sadat, pengkhianat terhadap negara dan

rakyatnya sendiri dan terhadap persaudaraan Arab dan Islam, dan Babrak Karmal, boneka lain, yang akan menjadi musuh-musuh Revolusi Islam kita. Dan, sesungguhnya kita akan mempertanyakan kebenaran dan kemuliaan Revolusi kita jika saja mereka tidak menunjukkan sedikit pun tanda permusuhan, yang benar-benar mereka tunjukkan dengan segala macam cara yang mungkin. Jadi, semua pihak yang telah menderita kerugian, atau yang merasa cemas karena mereka mendekati jalan ke keruntuhan, tak peduli di mana dan dalam posisi bagaimana, akan menentang Revolusi Islam kita, dan karena itu kita akan mengetahui faktor-faktor antirevolusioner dan pengkhianat-pengkhianat yang dipengaruhi oleh kekuatan asing. Dan bilamana kita telah mengetahui mereka, kita akan dapat memerangi dan menaklukkan mereka dengan sangat mudah.

Pemerintah Carter, dalam rangka menentang kampanye-kampanye kita melawan imperialisme dunia dan melindungi keuntungan-keuntungan imperialistisnya, mencari permusuhan dengan pemimpin Revolusioner kita. Dan kemudian, dengan hanya karena satu protes, mereka memerintahkan bank-bank Amerika untuk membekukan dana-dana Iran di seluruh dunia, dan mengirimkan banyak sekali satuan-satuan Angkatan Laut, pesawat-pesawat pengangkut pasukan, dan kapal-kapal penjelajah untuk mengancam kita, dan untuk mengecewakan rakyat tertindas di wilayah itu. Tetapi kita orang-orang Islam telah diperintahkan bahwa:

> *"Dan janganlah harta benda dan anak-anak mereka menarik hatimu. Sesungguhnya Allah hendak menyiksa mereka di dunia dengan harta dan anak-anak itu, dan agar melayang nyawa mereka dalam keadaan kafir."*
> *(At-Taubah 85)*

Jadi, posisi menentukan bangsa kita, di bawah kepemimpinan Imam Khomeini, dalam menghadapi dan merendah-

kan muslihat-muslihat diplomatis dan ancaman-ancaman kuno yang sedemikian hina, menyebabkan ancaman-ancaman militer dan sanksi-sanksi ekonomi Amerika menjadi sama sekali tidak berarti.

"Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu, tidak ada kekhawatiran dalam diri mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati." (Yunus 62)

Ketika Imam Khomeini berkata bahwa berkompromi dengan Timur maupun Barat adalah suatu pengkhianatan terhadap Islam dia menunjuk pada segala bentuk kompromi dalam politik luar negeri suatu Negara Islam. Dan, seperti yang dikatakan Rasulullah s.a.w., dia berkata: "Dalam perjuangan demi Tuhan, dalam merintis jalan untuk menegakkan perintah-perintah dan sistem kehidupan-Nya di atas bumi demi kepentingan dan kesejahteraan seluruh umat manusia, saya tidak akan menyerah atau berkompromi, meskipun mereka menawari saya suatu tempat di surga."

Kekuatan-kekuatan jahat dan unsur-unsur imperialistis mereka, yang memusuhi kekuatan iman Islamis, dengan penuh kehinaan telah mulai merongrong dan menodai pemimpin-pemimpin keagamaan kita yang mempunyai kebaikan politis tinggi, yang bisa membahayakan tujuan-tujuan revolusioner kita, apabila kita tidak siap siaga. Karena itu, kita dapati perintah-perintah Tuhan dalam Quran:

"Wahai orang-orang beriman, waspadalah terhadap musuhmu dan bersiap siagalah, dan majulah menghadapi mereka secara berkelompok-kelompok, atau majulah bersama-sama." (An-Nisaa' 71)

"Berangkatlah ke peperangan, baik bersenjata ringan atau berat, kuat atau lemah, dan bertempurlah demi Allah dengan segala harta dan nyawamu. Sesungguhnya, ini lebih

baik bagi kamu, seandainya saja kamu tahu."
(At-Taubah 41)

Sebagai penutup, saya akan menambahkan bahwa melalui Rahmat-Nya Tuhan akan menuntun para pemohon ke arah agama yang benar dan jalan orang-orang yang telah dianugerahi Rahmat oleh Tuhan, dan bahwa Tuhan menginginkan mereka untuk hidup dan berjuang sebagai pengikut-pengikut setia Rasulullah s.a.w., dan untuk merintis jalan demi keadilan dan kesejahteraan sesama mereka yang umumnya telah meninggalkan hukum-hukum Tuhan, dan yang tersesat ke dalam suatu labirin kesalahan. Karena itu, kewajiban kita yang paling penting adalah:

"Katakanlah bahwa apa yang di sisi Allah lebih baik daripada kegembiraan dan perdagangan: dan Allah adalch sebaik-baik Pemberi rejeki." (Al-Jumu'ah 11) •

II
PERBINCANGAN TENTANG PERANAN ULAMA

Bab 5. Posisi Ulama dalam Masyarakat Muslimin

Oleh • Ishtiaq Husain Qureshi

STATUS serta fungsi ulama dalam masyarakat Muslimin jarang sekali dimengerti sebagaimana mestinya oleh para cendekiawan non-Muslim. Tokoh-tokoh pengamat superfisial beranggapan bahwa ulama dapat disamakan dengan pemimpin keagamaan dalam agama-agama di luar Islam. Sangatlah sukar bagi mereka untuk membayangkan suatu agama tanpa gereja; sebab itu mereka menganggap kehadiran priesthood dalam Islam tidak dapat dielakkan lagi. Ulama dihormati karena pengetahuannya serta kesalehannya, sebab itu mereka juga disejajarkan dengan pastur.

Namun demikian, Islam tidak mempunyai semacam badan gerejawi maupun priesthood. Lalu apakah ulama itu, kalau mereka bukan pemimpin keagamaan? Pertanyaan ini nampaknya bahkan lebih sukar lagi untuk dijawab jika diingat bahwa Hinduisme tidak mempunyai semacam badan gerejawi tersebut yang terorganisasi; tentu saja Hinduisme bahkan tidak melaksanakan sembahyang bersama-sama; namun mengenal priesthood. Islam meletakkan tekanannya pada masalah sembahyang berjama'ah; Islam mempunyai masjid-masjid besar untuk keperluan maksud tersebut; seseorang dapat melihat menara-menara masjid dalam kota kaum Muslimin dengan jumlah yang jauh lebih besar jika dibandingkan dengan jumlah puncak-puncak menara gereja

dalam kota-kota orang Nasrani; adzan yang dikumandangkan muadzin untuk memanggil semua orang tawaqal melaksanakan sembahyang dalam dunia Islam lebih sering terdengar dari pada bunyi lonceng gereja. Kewajiban religius Islam membutuhkan usaha masyarakat yang terorganisasi. Bagaimana mungkin usaha ini bisa terorganisasi tanpa adanya semacam badan gerejawi maupun priesthood seperti yang dimiliki kaum Nasrani? Ibadah haji melibatkan beratus-ratus ribu orang dari hampir-hampir seluruh dunia Islam. Bagaimana mungkin bisa mengelola semua upacara besar ini tanpa adanya suatu organisasi semacam badan gerejawi tersebut? Dalam hal ini tidak ada masyarakat yang terlepas dari tata cara kehidupan biara, di mana kehidupan begitu dipusatkan pada masalah keagamaan sebagaimana juga dijalankan oleh kaum Muslimin tetapi kaum Muslimin tidak mengikuti jalan semacam organisasi gerejawi tersebut secara total. Hal yang nampaknya kontradiksi ini membingungkan orang-orang non-Muslim kecuali kalau mereka mau mempelajari secara mendalam mengenai cara kerja masyarakat Muslimin dalam menunaikan semua kewajiban keagamaannya.

Sebelum kita lanjutkan dengan pembahasan yang lebih dalam lagi, alangkah baiknya jika kita coba dulu menjawab beberapa pertanyaan mengenai ulama yang telah dilontarkan tersebut sehingga posisi ulama akan menjadi sedikit lebih jelas. Dalam awal mula sejarah Islam, negara mengatur semua urusan dalam masyarakat, menetapkan persiapan-persiapan sembahyang berjama'ah, menyusun rencana-rencana pengelolaan semua masjid yang ada serta mengorganisasi haji, ibadah haji ke Mekah yang dijalankan tiap tahun. Tradisi ini tetap berlangsung terus dan walaupun ulama diasosiasikan dengan organisasi masjid, namun tanggung jawab utamanya berada di tangan negara. Haji selalu tetap diorganisasi oleh pemerintah yang mengelola Hejaz, tanah suci tempat menunaikan ibadah haji. Ketika dalam beberapa negara, mungkin karena kekuatan politik lepas

dari tangan orang-orang Muslimin, atau karena beberapa alasan lainnya, negara tidak berminat lagi dalam pengelolaan masjid, maka masyarakat setempat mengambil alih pelaksanaan menejemennya. Sebuah masjid biasanya mempunyai sekelompok staff kecil yang dikepalai oleh seorang imam, yang diserahi kewajiban untuk mengatur pelaksanaan sembahyang berjama'ah pada waktu-waktu yang telah ditetapkan serta memimpin sembahyang. Masjid-masjid yang lebih besar mungkin memiliki khatib yang bertugas memberikan khotbah. Hampir setiap masjid mempunyai seorang muadzin, yang bertugas mengumandangkan adzan. Selain itu seorang imam juga diserahi beberapa kewajiban kecil lainnya. Kemungkinan ada seseorang yang diserahi kewajiban untuk membersihkan tempat-tempat ibadah ini serta mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kasar lainnya. Para tokoh pimpinan dalam masyarakat, yang bertindak sebagai dewan pengurus tidak resmi, mengangkat staf dan mencari dana untuk pembiayaan semua ini. Mereka juga mengelola pekerjaan-pekerjaan rutin lainnya atau bahkan mengadakan perubahan-perubahan serta pembaharuan-pembaharuan bentuk bangunan-bangunan masjid ini. Jika pendanaan masjid hanya ditopang oleh perseorangan saja, biasanya diangkat seorang mutawalli yang menjalankan tugasnya bersama-sama dengan beberapa anggota senior jema'ah dewan pengurus atau mungkin sendirian saja.

Di atas telah disebutkan bahwa tak satu pun dari orang-orang ini yang ditahbiskan ataupun merupakan seorang pemimpin keagamaan dalam artian apa pun juga. Pelaksanaan ibadah sholat bisa dipimpin oleh siapa pun juga dan jika pelaksanaan ibadah sholat dilakukan di luar masjid maka biasanya dipimpin oleh orang yang dianggap lebih saleh atau lebih luas pengetahuannya dari pada yang lainnya, sekalipun dia bukan seorang alim. Perkawinan secara teoritis merupakan perjanjian sipil, sungguhpun perkawinan itu diselenggarakan oleh seorang alim, namun lagi dalam hal ini setiap orang awam pun dapat melaksanakannya. Tak ada

upacara yang dapat diselenggarakan hanya oleh seorang alim. Jadi bagaimanapun juga ulama tidak memonopoli setiap fungsi dalam tiap upacara yang oleh orang-orang non-Muslim semata-mata dipandang relijius. Dan, lebih jauh lagi, bahkan pengetahuan yang mereka miliki bukanlah merupakan prasyarat untuk bisa menyelenggarakan fungsi-fungsi ini: hanya pengetahuan terbatas yang sesuai dengan tujuannya yang dibutuhkan.

Sekarang marilah kita bicarakan fungsi utama ulama yang sangat diharapkan mampu menyerap pengetahuan dasar yang dispesialisasikan.

Untuk tujuan ini sangatlah diharapkan adanya pemahaman karakteristik Islam yang tidak mungkin ditemukan dalam agama-agama lainnya. Islam tidak membedakan antara masalah religius dan masalah keduniawian. Ketiadaannya *ecclesia* (kelompok doktrin luas dari suatu agama), yang merupakan *counterpart saeculum* menjadi *pleonastis*. Dalam beberapa hal Islam merupakan agama sekuler, sebab Islam tidak mempunyai semacam badan gerejawi. Kaum Muslimin membentuk suatu masyarakat orang-orang awam yang terorganisasi pada dasarnya untuk tujuan relijius: suatu masyarakat yang memungkinkan anggota-anggotanya menjalankan kehidupan mereka sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Semua prinsip ini mencakup seluruh kehidupan seorang Muslimin. Dia sangat terikat untuk melaksanakan kewajibannya sebagai seorang Muslimin walaupun dia sedang sibuk dalam pencarian nafkah untuk menopang kehidupannya beserta familinya sama terikatnya ketika dia bersembahyang ataupun menjalankan ibadah puasa atau ketika dia menjalankan suatu pekerjaan yang berkaitan dengan kelangsungan masyarakatnya sebagai suatu organisasi hidup serta aktif yang melaksanakan semua kewajiban bersamanya. Dengan demikian banyak aktivitas yang diklasifikasikan sebagai masalah keduniawian oleh komunitas-komunitas lain menjadi relijius dalam Islam asal saja semua aktifitas itu syah menurut hukum serta menimbulkan kehi-

dupan perseorangan ataupun komunal yang sehat. Oleh karena itu, sebagai rangkaian logikalnya agama dalam Islam mencakup keseluruhan aneka warna kehidupan umat manusia, yang harus dijalankan dalam suatu kesadaran penuh akan tanggung jawab insan terhadap Tuhannya serta umat manusia sesamanya. Dalam Islam tidak ada pembatasan antara kewajiban terhadap Tuhan serta terhadap Rajanya.

Dengan filsafat kehidupan relijius ini, maka tidak dibutuhkan adanya priesthood yang merupakan perwalian spiritual atas semua umat Islam. Oleh karena itu Islam tidak pernah bermaksud mendirikannya. Tetapi Islam membutuhkan bimbingan pedoman serta penafsiran. Konsep tentang Rasul itu sendiri yang mengatakan bahwa seorang Rasul adalah seorang lelaki hamba Allah yang mendapat wahyu dari-Nya untuk membimbing semua umat manusia yang tidak berada di jalanNya, meneruskan semua ajaran yang telah diberikan oleh-Nya kepada semua umat manusia untuk menunjukkan jalan yang benar merupakan suatu pengakuan yang positif atas suatu kenyataan bahwa semua orang membutuhkan bimbingan dan mereka tidak mungkin dapat menemukan semua kebenaran yang ada padanya melalui semua usaha yang dilakukannya. Hal ini telah dipenuhi Allah melalui rasul-rasulNya, dan Muhammad adalah yang terakhir. Karena rantai kerasulan ini telah putus, maka bimbingan yang diberikan kepada masyarakat hanya melalui orang-orang yang berpengetahuan serta berpengertian luas. Sebab itu kemudian dibutuhkan adanya para ulama.

Secara luas telah diyakini, walaupun keliru, bahwa Nabi Muhammad saw bersabda, "Para ulama (mereka yang berpengetahuan tinggi) di antara para umatku adalah sepandai para nabi Israel".[1] Kata-kata yang kurang diyakini kebenarannya ini tidak mencoba membandingkan para ulama dengan para nabi dalam aliran keyakinan Judaik, tentu saja semua kaum Muslimin mengakui adanya suatu fakta bahwa para nabi itu merupakan suatu persaudaraan kepada mereka sendiri yang mentabukan adanya suatu perbandingan, se-

bab mereka mendapatkan wahyu Tuhan yang jelas, terang, pasti dan langsung (wahi) sehingga mereka bisa membimbing umatnya. Kaum Muslimin tidak membedakan antara nabi yang satu dengan lainnya, sepanjang menyangkut respek kepribadian serta wahyu Ilahi, dan menganggap tidak ada satu orang pun yang dapat dibandingkan dengan nabi, bagaimanapun juga tingginya spriritual seseorang. Satu-satunya titik perbandingan adalah fungsi dari salah satunya. Ketika seorang nabi Israel meninggal dan umatnya mulai melupakan semua ajarannya atau menjadi simpang siur dalam penafsiran ajaran-ajarannya, maka Tuhan mengirim utusan-Nya yang lain untuk membawa mereka ke jalan yang benar. Hal ini telah tidak berlangsung lagi setelah wafatnya Nabi Muhammad saw, sebab tidak ada nabi-nabi yang lain setelah Muhammad. Lalu siapa yang akan membimbing umatnya setelah sepeninggal beliau? Nabi Muhammad saw dengan seksama telah mendapatkan semua wahyu Allah yang beliau terima mencatat dan meletakkan dasar tradisi pengkudusan lisan dari Al Qur'an untuk memastikan keutuhan keaslian ayat-ayatnya. Kaum Muslimin dengan bangga menunjukkan kemurnian ayat-ayat Al Qur'an, yang tetap tak pernah berubah sepanjang abad. Al Qur'an juga telah diteruskan secara lisan oleh beratus-ratus huffaz yang mampu menghafalnya di luar kepala..

Al Qur'an tetap selalu memegang posisi sentral dalam pemikiran Islam. Tentu saja Al Qur'an mempunyai kedudukan yang bahkan lebih tinggi daripada kedudukan yang dimiliki Nabi Muhammad itu sendiri, sebab beliau sangat terikat akan perintah-perintahnya sama halnya dengan para pengikut beliau. Al Qur'an adalah firman Allah dan Al Qur'an meletakkan dasar prinsip-prinsip Islam, falsafah serta norma kehidupan Islam. Al Qur'an meliputi semua ruang lingkup aktivitas umat manusia dalam semua aspek multifarious mereka, dan hal ini tidak dideskripsikan secara terperinci. Tentu saja pada waktu itu ketika kaum Muslimin kadang kala mempertanyakan kaidah-kaidah kewajiban

serta tugas umat manusia secara terperinci, mereka diperingatkan untuk tidak mempertanyakan hal itu, [2] sebab penjabaran tugas serta kewajiban semacam ini pastilah akan membatasi dan meninggalkan kebebasan memilih melumpuhkan semua pengikut Islam. Tujuan Islam adalah tidak membuat orang menjadi tahanan doktrin serta *injungsi,* namun Islam bertujuan untuk menuntun mereka dalam suatu sikap hidup di bawah bimbingan serta disiplin Islam, mereka menemukan suatu kekayaan hidup melalui penghikmatan akal budi serta kecakapan mereka. Maksud tujuan Islam adalah tidak memperbudak pikiran serta hati namun membangunkan kemampuan human reason dan emosi yang terpendam untuk tujuan-tujuan konstruktif serta untuk menghilangkan ketimpangan-ketimpangan yang disebabkan adanya kepercayaan akan takhayul dan dorongan-dorongan serta insting yang tercela. Islam tidak mengetrapkan kaidah etika yang menjijikkan yang akan melumpuhkan dorongan-dorongan manusiawi serta menimbulkan kesulitan moral dan psikologis. Islam tidak menganggap sifat dasar manusia sebagai suatu kejahatan dan kekejian dan Islam menunjukkan jalan yang syah serta berguna untuk ini. Hal inilah yang menjadi sasaran tujuannya, penggunaan human reason mempunyai peranan penting dalam Islam. Suatu peristiwa dalam awal sejarah Islam menggambarkan gagasan ini hampir tepat pada kebenarannya.

Sudah bukan merupakan rahasia lagi bahwa beberapa pengikut dan pendukung Ali, kalifah keempat, berbalik arah menentang beliau dan mendirikan aliran keyakinan Khawarij. Pada masa awal mulanya kepemimpinan Khawarij dipegang oleh para tokoh fundamentalis yang menolak untuk menerapkan prinsip-prinsip Islam pada masalah kemanusiaan dalam suatu sikap rasional. Segera setelah pemilihan Ali, mereka menekan beliau untuk menerapkan Al Qur'an sejauh penafsiran mereka sendiri pada situasi politik masa itu. "Biarlah Qur'an yang berbicara", kata mereka dengan sikap bersikeras. Ali membawa sebuah kitab Al

Qur'an ke depan majelis dan berkata, "Inilah Al Qur'an itu. Bagaimana ia akan bisa bicara?" [3] Apa yang Ali inginkan dengan mengingatkan para fundamentalis yang menyeleweng ini – dan sejarah sebagai saksinya bahwa sebagian besar dari orang-orang ini adalah orang-orang yang saleh, mereka biasa menggunakan waktu istirahat malam mereka untuk berdoa dan mereka mempunyai karakter yang patut dicontoh – adalah bahwa semua ajaran Qur'an harus dipahami serta diterapkan secara rasional.[4] Dan beliau memang benar, sebab Nabi sendiri selalu menganjurkan suatu pemahaman serta penerapan yang masuk akal dari semua prinsip yang terkandung di dalam Al Qur'an.

Karena Al Qur'an selalu merupakan dasar etika bagi kaum Muslimin dalam pergaulannya dengan orang-orang di luar Islam , maka suatu pemahaman atau penafsiran pribadi atas semua ayat-ayatnya tidak akan betul-betul mencukupi tapi bahkan mengacaukan. Tentu saja dalam berbagai situasi, seperti situasi yang berkembang antara kaum Khawarij, yang sangat saleh individualistik, tapi tersesat dan Ali, suatu tendensi untuk memaksakan penafsiran-penafsiran yang tidak memperoleh konsensus dukungan dapat sangat membahayakan sebab ini bisa merupakan sumber konflik dan destruktif masyarakat Islam. Karena itu perlu adanya peletakan norma-norma penafsiran dan penerapan yang secara luas dapat diterima sebab kebijaksanaan yang logis serta kewajaran yang terkandung di dalamnya.

Pertama-tama dari semuanya ini adalah bahwa sabda dan perbuatan Nabi merupakan tawaran dasar persetujuan yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Al Qur'an dinyatakan kepada Nabi Muhammad saw dan Allah telah menganugerahkan kepadanya suatu kebijaksanaan serta wawasan yang tak seorang pun bisa mendapatkannya. Gambaran ini melekat dalam Al Qur'an dengan menyebut Nabi sebagai Suri Tauladan. [5] Tentu saja kebebasan beliau dari perbuatan salah selama tugas kerasulannya menjadikan kehidupan beliau sebagai penafsiran yang baik dari semua perintah serta

falsafah Qur'an. Oleh karena itu, Sunnah atau segala perbuatan Nabi memegang suatu kedudukan yang paling berarti, tidak hanya dalam kebenarannya seperti mewujudkan suatu kriteria yang benar atas semua prinsip Islam, tetapi juga sebagai bimbingan dasar dalam mencari kebenaran arti Al Qur'an. Dalam setiap kedudukan Sunnah menjadi suatu elemen fundamental ajaran-ajaran Islam, yang kedua dan berada di bawah posisi Qur'an itu sendiri.

Dalam kedua kekuatan raksasa ini telah dibangun kerangka besar doktrin serta hukum Islam. Kedua elemen lainnya adalah human reason yang diterapkan pada hal tersebut di atas, Al Qur'an dan Sunnah, yang menghasilkan suatu deduksi putusan yang dapat diterapkan pada situasi tertentu. Hal inilah yang disebut ijtihad, suatu usaha akal manusia untuk menemukan kebenaran atau untuk menarik kesimpulan suatu prinsip dipandang dari sudut Qur'an maupun Sunnah. Ketika hasil dari usaha semacam ini dijalankan oleh orang-orang yang berkemampuan melaksanakannya dan yang telah terdidik untuk tujuan tersebut memperoleh dukungan dari orang-orang yang berkualifikasi sejajar dengan mereka, maka hasil kesimpulan tersebut menjadi suatu konsensus atau ijma. Singkatnya hal ini merupakan suatu proses yang telah membangun detail-detail hukum Islam, syari'ah, dan norma kehidupan Islam.

Para cendekiawan non-Muslim terbentur oleh suatu kenyataan bahwa syari'ah memegang suatu kedudukan yang begitu dominan dalam pemikiran Islam serta menjalankan peranan fundamental dalam kehidupan kaum Muslimin. Alasannya adalah bahwa syari'ah bersumber pada Qur'an dan sunnah, dua patokan yang tak mungkin berubah, Qur'an yang merupakan firman Tuhan adalah mutlak dan demikian pula halnya dengan sunnah, ketika akhirnya terbukti otentik dan asli. Deduksi dari keduanya yang berlandaskan pada Qur'an dan Sunnah tersebut memperoleh prestise sama halnya dengan deduksi-deduksi semacam itu. Mengenai sumber acuan landasan aslinya telah dipersoal-

kan di atas, satu-satunya kesangsian adalah apakah semua deduksi ini telah tercapai sebagaimana mestinya. Kesangsian ini terkubur oleh pengetahuan yang dijadikan dasar pelaksanaan deduksi ini oleh tokoh-tokoh yang cakap serta jujur, telah terdidik penuh untuk tujuan ini dan secara mendalam benar-benar mengenal adat serta pengetahuan yang telah mereka tafsirkan dan gambarkan. Gagasan ini memperoleh konfirmasi dalam suatu kenyataan dukungan yang luas dari orang-orang yang berkualifikasi serta berpendidikan setara dengan mereka. Kebutuhan akan adanya suatu revisi dalam kepercayaan yang terkandung secara luas yang berkaitan dengan keaslian serta kebenaran deduksi-deduksi yang telah pasti akan terasa hanya jika beberapa orang melihat adanya deduksi-deduksi paralel yang dicapai oleh tokoh-tokoh lainnya yang mempunyai kecakapan sama, dengan mengikuti suatu garis argumen yang berbeda atau ketika kondisi telah berubah sampai pada suatu tingkatan bahwa keputusan yang telah diambil dalam keadaan apapun yang berbeda secara total telah kehilangan relevansinya. Hal ini menjelaskan mengapa syari'ah dipertahankan dalam suatu penghargaan yang begitu tinggi oleh kaum Muslimin.

Tetaplah diperlukan adanya suatu penjelasan mengapa doktrin, moralitas, dan hukum dengan begitu kuat terjalin dalam Islam hingga seseorang tak mungkin terlepas dari yang lainnya. Memang benar adanya bahwa di sini terdapat bagian-bagian syari'ah yang dapat dijalankan serta dipertanggungjawabkan, legal, dan difinitif yang dapat disetarakan dengan hukum dalam kebudayaan dan masyarakat lainnya. Moralitas dalam Islam tidak berarti hanya asal terpenuhinya semua syarat difinitif syari'ah, sebagaimana moralitas di luar Islam yang melebihi wewenang hukum serta lebih komprehensif sebab moralitas memiliki suatu dimensi yang tak mungkin dimiliki oleh hukum, namun sebab, dalam Islam, gagasan-gagasan moral berasal dari sumber yang sama yang telah melahirkan syari'ah yaitu Qur'an dan sun-

nah, karena itu tidak mungkin terdapat dikotomi di antara moralitas dan hukum dalam Islam. Hukum yang berlandaskan pada syari'ah tidak mungkin dicap sebagai hukum yang tidak adil oleh seorang Muslimin. Detail-detail ritual dalam ibadah sembahyang serta pelaksanaan hal-hal yang bersifat relijius pasti bertumpu pada sumber yang sama. Karenanya syari'ah juga mencakup semua ini.

Dengan demikian jelaslah bahwa mereka yang menafsirkan Al Qur'an dan Sunnah atau memperbanyak bukti-bukti dalam tafsirannya atas syari'ah menduduki tempat yang penting dalam masyarakat Muslimin. Karena, meskipun keyakinan fundamental Islam masih sederhana, aplikasi detail mereka mengenai kehidupan tidaklah merupakan suatu masalah yang simpel. Meskipun dalam kenyataannya banyak terdapat buku-buku fiqih yang standar, komprehensif dan sudah dikenal umum yang menunjukkan putusan-putusan secara terperinci mengenai semua urusan sehari-hari, namun orang-orang awam sedikit mempunyai kecenderungan untuk tetap berkonsultasi dengan mereka. Bahkan mungkin bisa saja semua buku fiqih dianggapnya kurang memenuhi, jika mereka betul-betul condong pada konsultasi, sebab kompleksitas kehidupan yang begitu rumitnya sehingga tak seorang pun yang dapat meramalkan ke dalam situasi mana syari'ah akan bisa diterapkan. Karenanya orang-orang Muslimin rata-rata berpaling kepada seseorang, yang menurut pendapatnya, mungkin mengetahui hal itu dengan baik. Kedudukan setiap cendekiawan dalam fiqih Islam adalah sebagai seorang ahli yang mampu memberikan konsultasi. Tetapi, bagaimanapun dalamnya ilmu pengetahuan yang ia miliki, ia tak mungkin lepas dari kekhilafan. Oleh karena itu, semua advisnya perlu dipertimbangkan, diperbandingkan, dan dinilai oleh mereka yang sebetulnya tidak mempunyai kompetensi khusus dalam masalah ini dan kemudian menerimanya atau menolaknya. Tetapi biasanya hanyalah soal pengalaman saja yang hampir pasti bisa diterima. Di antara faktor-faktor lainnya, sebagaimana

masalah kesehatan suatu bangsa yang tergantung pada kecakapan para dokter yang dimiliki bangsa tersebut, maka kesejahteraan moral dan relijius suatu masyarakat Muslim sebagian besar dipengaruhi oleh kualitas ulama yang dimiliki masyarakat itu pula. Bahkan lebih tepatnya hal ini merupakan sektor-sektor masyarakat relijius minded yang kurang berpendidikan.

Untuk jelasnya, para ulama sebetulnya tidak mempunyai wewenang apa pun juga di luar wewenang untuk menyampaikan doktrin-doktrin mereka serta menasehati siapa saja yang sudi berkonsultasi dengan mereka. Mereka adalah tokoh-tokoh cendekiawan dan para ahli dan pengaruh mereka terutama terletak pada kecendekiawan serta ketaqwaan mereka. Mereka adalah orang-orang saleh dan diharapkan bertindak sesuai dengan ajaran-ajaran yang mereka berikan. Tentu saja di antara mereka terdapat tradisi kesalehan yang kuat dan ini disebabkan oleh konviksi yang mereka miliki. Bahkan dewasa ini mereka dihormati dan meskipun mereka hanya memiliki konservasi serta spesialisasi sempit dalam adat dan pengetahuan. Tidak memiliki wawasan ke dalam masalah-masalah dunia yang pasti tak terelakkan dari kehidupan mereka beserta para pengikutnya dan secara kontinyuitas mereka harus bisa menyesuaikan diri mereka. Hal ini bisa menggeser mereka dari kepemimpinan atas masalah-masalah keduniawian sepanjang menyangkut klas-klas masyarakat sophisticated yang terdidik dalam disiplin ilmu modern. Tetapi dalam masyarakat relijius minded yang tidak terdidik dalam garis-garis modern pengaruh mereka amat besar bahkan di semua bidang di mana pengetahuan sains tradisional Muslim sangat kurang menolong.

Konservatisme ulama dapat dibeberkan di sini. Pendidikan mereka bisa disejajarkan dengan pendidikan seorang pengacara maupun seorang yuris. Mereka mencari sesuatu yang bisa dijadikan sumber dan contoh. Dari pengalaman masa lampau mereka mencari penerangan bagi masa kini

dan masa akan datang. Hukum pada umumnya cenderung untuk tetap melangsungkan semua adat-istiadat serta lembaga yang ada. Di mana ada perubahan, hukum biasanya, meskipun tidak selalu, berusaha untuk menyesuaikan diri dengan opini yang telah mengkristal dalam konviksi-konviksi. Oleh karena itu hukum yang paling progresif tidak mengikuti opini maupun behavior. Hukum progresif ini merupakan perubahan konstan, hampir tidak dapat dilaksanakan namun tetap berlangsung terus dalam pandangan dan segala keadaan yang memaksakan perubahan-perubahan pertama-tama dalam publik opinion dan baru kemudian dalam hukum. Hal ini memang benar ketika hukum tidak mempunyai sangsi selain daripada hukum itu sendiri dan publik opinion. Tetapi ketika hukum berlandaskan pada sumber yang dianggap kekal dan di atas amandemen, maka hukum itu cenderung menjadi bahkan lebih konservatif. Hal ini tidak berarti bahwa hukum tidak dapat progresif atau harus menjauhi pertumbuhan kebutuhan manusia serta kompleksitas mereka, tetapi hukum memerlukan orang-orang yang mempunyai sensitifitas yang tajam dan mempunyai tinjauan atas perluasan interpretasi serta penerapan hukum itu di masa depan, untuk mengimbangi semua kebutuhan pada masa itu serta untuk meramalkan, sepanjang hukum itu memungkinkan, keperluan-keperluan pada masa depan. Dan bahkan kemudian hukum itu merupakan suatu usaha yang sukar dan sulit sebab adanya bahaya tambatan sumber yang hilang selama proses hukum ini berlangsung. Bahkan ulama yang berpandangan ke depan akan waspada dalam suatu pelaksanaan semacam ini.

Hal ini merupakan pembeberan dari konservatisme ulama, bukannya pengasingan mereka dari kemajuan dunia ilmu pengetahuan modern serta segala masalah dunia. Masalah-masalah ini secara bertahap dan pelan dirongrong oleh berbagai organ informasi, di antara yang lainnya surat kabar adalah yang paling berperan. Sekalipun begitu literatur analisa situasi yang lebih sophisticated yang sebagian

besar ditulis dalam bahasa Eropa tidak tersedia bagi para ulama. Tetapi ketika begitu erat dengan ilmu pengetahuan modern, maka ketidaktahuan para ulama atas ini bahkan mendapat celaan. Mungkin seseorang dapat saja mengabaikan sikap para ulama ini terhadap natural sains, yang condong mereka tolak karena tidak relevan dengan kewajiban mereka. Bagaimana mereka bisa membimbing umat manusia jika mereka begitu acuh tak acuh saja terhadap ilmu sosial dewasa ini? Suatu pengetahuan dasar tentang ilmu ekonomi, psikologi, sosiologi, ilmu politik, serta hubungan internasional sangatlah perlu untuk mengetahui dunia tempat tinggal kita ini. Tak ada interpretasi ataupun aplikasi fundamental Islam yang dapat menemukan relevansi dalam masyarakat dewasa ini jika tidak memperhatikan semua kekuatan yang sedang giat dalam masyarakat itu. Adalah merupakan suatu anggapan salah yang mengatakan bahwa prinsip-prinsip Islam telah meletakkan perhatian besar pada human nature, sebab itu prinsip-prinsip dasar ilmu sosial melekat dalam fundamental agama Islam dan maka dari itu tidak diperlukan adanya bantuan dalam penafsiran-penafsiran yang dilaksanakan kemudian. Pada tingkatan ketidaktahuan ilmu pengetahuan modern yang diperlihatkan para ulama, pengaruh mereka menyusut dalam publik affairs dan di antara masyarakat elite berpendidikan.

Sepanjang menyangkut doktrin Islam maka tidak benar adanya justifikasi terhadap sikap para ulama dewasa ini. Tentu saja Al Qur'an selalu menuntut penggunaan human reason dan pengamatan kejadian alam serta lingkungan, sebab Al Qur'an beranggapan bahwa akal serta pengamatan menambah tebal keyakinan sekaligus kearifan.Sa'di seorang penyair besar dari Iran berbicara dalam spirit keyakinan-Islam ketika dia telah menyadari bahwa "tidaklah mungkin bisa memahami Tuhan tanpa ilmu".[6] Istilah "ilmu" selalu dipakai dalam suatu arti yang liberal serta komprehensif. Ketika Nabi bersabda, "Tuntutlah ilmu meskipun kamu harus pergi ke negeri Cina", jelaslah beliau tidak menunjuk

pada teologi atau Al Qur'an.

Pepatah Arab yang oleh sementara orang dikira sebagai sabda Nabi, "Ilmu pengetahuan memiliki dua cabang, yaitu ilmu pengetahuan agama dan ilmu pengetahuan obyek material", mengacu pada perlunya mempelajari ilmu. ada sebuah peristiwa yang terjadi dalam kehidupan Nabi yang memberikan penjelasan tentang hal ini. Bukhari meriwayatkan melalui kesaksian Ibn 'Abbas bahwa sebagai anak kecil ia pada suatu ketika ingin sekali melihat bagaimana Nabi melaksanakan ibadah pada tiap malam harinya. Baginya hal ini cukup mudah karena istri Nabi yang bernama Maimunah adalah bibinya. Kemudian pada suatu malam ia pergi ke rumah Maimunah untuk tidur di sana. Waktu Nabi datang, beliau melihat anak itu tampaknya sedang tidur. Kira-kira tengah malam, Nabi bangun dari tidurnya, Ibn 'Abbas juga keluar dari tempat tidurnya dan seperti Nabi ia pun mengambil air wudlu untuk sembahyang. Sebelum melaksanakan sembahyang Nabi keluar rumah, menatap bintang-bintang di langit seraya mengutip ayat-ayat berikut dari Qur'an:

"Sesungguhnya ditentang kejadian langit dan bumi dan pergantian siang dan malam itu, ada tanda-tanda bagi orang-orang yang mempunyai pikiran.

Yang mengingat Allah sambil berdiri, sambil duduk dan sambil berbaring, dan memikirkan kejadian langit dan bumi (sambil berkata) "Hai Tuhan kami, Engkau tidak jadikan ini semua dengan sia-sia".[7)]

Pada kesempatan lain – dan yang ini diriwayatkan oleh 'A'isyah, istri Nabi – setelah mengucapkan ayat tersebut di atas, Nabi kemudian berkata "Kerugian bagi mereka yang membicarakan (mengulang-ulang) ayat ini tetapi tidak merenungkannya".[8)]

Peristiwa ini menunjukkan bahwa menurut pendapat Nabi ayat-ayat yang berhubungan dengan fenomena alam ini dimaksudkan bukan hanya sebagai argumen untuk membuktikan eksistensi Tuhan, tetapi juga sebagai pendorong

untuk memahami keajaiban penciptaan secara lebih intensif. Hal-hal yang terkandung di dalamnya harus mendorong, dan pada permulaan Islam memang mampu ke arah studi tentang alam dan ilmu. Makanya sangat mengherankan bila pada saat ini ulama tidak menunjukkan perhatian sedikit pun kepada studi semacam itu.

Fenomena apakah yang lebih besar yang ada di sana dibanding fenomena masyarakat itu sendiri, di samping kekuatan-kekuatan alam yang saling mempengaruhi? Bagi seorang ahli hukum studi semacam ini sangat perlu, karena tidak ada hukum, dan sebenarnya, tak ada agama yang terbukti efektif apabila ia mengabaikan perubahan sosial, penyebab-penyebabnya serta akibat-akibatnya. Seperti yang akan dibicarakan kemudian, bahkan ulama pada abad pertengahan menyadari akan pentingnya memahami perubahan-perubahan ini. Pada zaman modern, seorang penulis Ikhwan, Sayyid Muhamad Qutb, seorang 'alim terpelajar, memandang perlu menulis tentang masalah-masalah ekonomi dan kemasyarakatan.[9] Demikian juga pemimpin Jama'at-i-Islami di Pakistan, Sayyid Abu-'l-A'la Maududi menulis mengenai masalah-masalah konstitusional.[10] Tetapi ini semua merupakan perkecualian yang menunjukkan kaidah umum bahwa ulama sebagai suatu kelompok memusatkan perhatian pada masalah fiqih dan ilmu-ilmu tradisional lainnya yang didasarkan pada otoritas *(manqul)*, mengesampingkan ilmu-ilmu rasio modern *(ma'qul)*. Ilmu-ilmu rasio yang sedikit mereka pelajari sudah ketinggalan zaman dan tidak berguna lagi.

Namun demikian tidaklah semua seperti ini. Akan sangat menarik apabila kita menghubungkannya dengan sejarah kemunduran kualitas ulama dan menganalisa beberapa penyebabnya.

Telah kita singgung bahwa Nabi menggunakan istilah *'ilm* dalam arti yang luas bagi 'ilmu pengetahuan'. Selama jangka waktu beberapa abad setelah wafatnya, kata ilmu pengetahuan digunakan dalam arti yang luas dan kata *'alim*

juga dipakai secara harfian bagi seorang yang terpelajar. Seorang ahli dalam bidang keagamaan dipandang sebagai seorang yang terpelajar seperti halnya yang lain, namun juga dibedakan sebagai seorang ahli tafsir (mufassir), ahli fiqih (faqih) atau ahli hadits (muhaddits). Tentu saja otoritas para ahli ini dalam bidangnya masing-masing lebih besar bila dibandingkan dengan mereka yang mempelajari bidang-bidang keagamaan yang nantinya akan berfungsi sebagai imam, hakim (qadi) atau khatib. Harus diingat bahwa pendidikan dasar sebelum mereka memasuki spesialisasi masing-masing semuanya sama dan di dalamnya tercakup, menurut klasifikasi abad pertengahan, dasar-dasar ilmu agama dan ilmu dunia. Tentu saja kurikulum yang berlaku di pesantren-pesantren bahkan sampai saat ini ilmu keagamaan menduduki proporsi yang sangat tinggi dibandingkan dengan ilmu-ilmu non-relijius, tetapi isinya semuanya model kuno dan sudah ketinggalan zaman. Masih terdapat sisa-sisa sistem pendidikan kuno yang menunjukkan perhatian yang besar terhadap ilmu pengetahuan. Hingga pertengahan abad kedelapan belas, masih terdapat pelajaran yang relevan dan berguna. Tetapi kemudian perubahan besar-besaran terjadi di dunia. Bangsa Barat mulai mendominasi politik dunia secara besar-besaran di satu pihak dan pencapaian serta kemajuan intelektual di lain pihak. Keduanya memberikan dampak yang sangat dahsyat bagi dunia Islam.

Karena sebagian besar ekspansi kekuatan politik Barat mengorbankan dunia Islam, maka mudah dimengerti apabila kemudian menimbulkan kemarahan terhadap Barat. Kekalahan-kekalahan dalam bidang politik tidak sekonyong-konyong membawa kepastian juga dengan sendirinya menyerobot gerakan dalam bidang intelektual. Dan tampaknya satu-satunya jalan untuk menghindari penyerahan total terhadap Barat adalah dengan cara memelihara keyakinan terhadap Islam dan pandangan hidup yang Islami termasuk kebudayaan dan ilmu pengetahuan yang telah diciptakan oleh Islam. Kekalahan politis tidak menyebabkan kaum

Muslimin merasa kebudayaannya lebih rendah. Tentu saja, selama mereka masih tetap Muslim, mereka tidak dapat lain kecuali yakin bahwa agamanya lebih tinggi. Dapatkah mereka memelihara keyakinannya serta kebudayaannya setelah mereka menerima pendidikan Barat? Apabila dipertimbangkan bahwa pendidikan, paling tidak pada saat itu, sangat subyektif, maka ini bukanlah pertanyaan yang sia-sia. Dan meskipun sekarang ini terjadi perubahan-perubahan besar yang menuju ke obyektivitas dalam bidang ilmu-ilmu eksakta dan ilmu-ilmu sosial, namun harus diakui bahwa yang terakhir ini lebih banyak diwarnai oleh pendirian serta ideologi-ideologi sosial. Sekarang ini kaum Muslimin sangat sadar akan perlunya mengejar kemajuan ilmu dan teknologi Barat, namun bukanlah demikian yang terjadi paling tidak pada permulaan abad kedelapan belas. Pada waktu itu tampaknya sudah cukuplah untuk sekedar mempelajari dan meniru teknik-teknik peperangan dan menghasilkan senjata serta amunisi guna memenuhi kekurangan-kekurangan dalam bidang kemiliteran negara-negaranya.

Namun ini bukanlah persoalan yang sederhana. Kekuatan militer Barat bukanlah faktor yang berdiri sendiri, tetapi merupakan ungkapan dari meningkatnya semangat penjelajahan dan penyelidikan yang telah menyadarkan Barat setelah mengalami kelambanan dan kemunduran dalam jangka waktu yang cukup lama. Invasi bangsa Mongol pada abad ketiga belas telah banyak merusak tanah Timur milik orang-orang Islam yang mengakibatkan mereka kehabisan tenaga dan tak berdaya. Kekayaan material musnah disebabkan oleh pengrusakan saluran-saluran irigasi dalam skala besar, yang dibangun dengan tekun dalam jangka waktu yang sangat lama. Ketika areal tanah yang dirusak itu mengalami kekeringan, maka tidak adanya fasilitas irigasi merupakan bencana yang sangat hebat. Lembaga-lembaga pendidikan dan pusat-pusat ilmu pengetahuan dibinasakan, para cendekiawan dibubarkan dan buku-buku dimusnahkan, sehingga mengakibatkan keringnya sumber-sumber aktivi-

tas intelektual kaum Muslimin. Pendek kata, ketika Barat mulai meraih kemajuan, kaum Muslimin Timur mulai tenggelam dalam kelesuan. Rasa ingin tahu yang dulu menjadi penggerak kemajuan intelektual, kini telah hilang. Jadi, meskipun tidak ada hambatan-hambatan psikologis, kecil kemungkinan adanya kecenderungan untuk memandang ilmu-ilmu yang berasal dari Barat secara benar untuk kemudian berpartisipasi sekali lagi kegiatan untuk memperluas cakrawala pengetahuan manusia. Dampak dari Barat sesungguhnya dapat menjadi katalisator kalau saja kalangan intelektual Muslim itu benar-benar sadar dan tidak lesu. Namun pada kenyataannya kecenderungan mengabaikan ilmu pengetahuan Barat lebih banyak diakibatkan oleh kelesuan intelektual karena rasa bangga yang tidak pada tempatnya. Karena ketika para individu dan masyarakat merasa bahwa mereka sudah cukup mengerti, maka sebenarnyalah mereka sudah berada diambang keruntuhan.

Sikap para cendekiawan Muslim pada saat itu membawa akibat bagi lembaga-lembaga pendidikan yang muncul kemudian yang terus melanjutkan metode-metode kuno dan pengetahuan yang statis tanpa sedikit pun menyadari akan adanya tambahan-tambahan baru dalam ilmu pengetahuan manusia. Bukannya mereka berpartisipasi dalam perkembangan intelektual dunia, oleh karena itu mereka menjadi semacam kepingan-kepingan museum yang menjajakan ilmu pengetahuan yang tidak lagi bermanfaat guna mengatasi masalah-masalah dunia. Namun demikian, karena mereka sendiri yang memberikan pelajaran dalam ilmu-ilmu agama Islam, mereka terus melaksanakan cita-citanya dengan mendapatkan dukungan dari orang-orang yang *relijius minded* dan kelompok orang-orang saleh dalam masyarakat. Hal ini menimbulkan akibat-akibat yang sangat gawat bagi kaum Muslimin yang sudah banyak diketahui umum, oleh sebab itu perlu diberi ikhtisar secara singkat.

Akibat pertama yaitu bahwa orang-orang Muslim dunia tidak dapat menerima nasib dalam keadaan mundur untuk

selama-lamanya, maka dari itu perlu adanya ilmu pengetahuan yang up to date. Oleh karenanya muncullah lembaga-lembaga pendidikan baru. Beberapa lembaga pendidikan ini sama sekali bersifat sekular yang didirikan oleh pemerintah-pemerintah asing dan lainnya berorientasi ke Kristen yang didirikan oleh para misionaris. Contoh yang cukup baik dari lembaga pendidikan yang pertama tadi dapat dijumpai pada lembaga-lembaga pendidikan British India, yang sesudah pemberontakan tahun 1857, membebaskan dari pengaruh keagamaan hingga sama sekali mengesampingkan ajaran moral, sedangkan contoh dari lembaga-lembaga misionaris yang paling berhasil bahkan hingga sekarang adalah American University di Beirut. Bagaimanapun juga keterasingan para murid dari agama dan kebudayaannya tidak dapat dihindarkan lagi dan jumlahnya semakin membengkak dengan semakin banyaknya para pemuda dan pemudi yang berhasil lulus dari lembaga-lembaga pendidikan itu sehingga akibatnya sangat mengerikan.

Akibat kedua yaitu pemisahan antara pengetahuan agama dari ilmu-ilmu sekuler, yang pertama menjadi monopoli kehidupan pesantren model kuno di atas menara gading yang semu karena rasa harga diri yang terluka dan kebenaran pribadi. Memang tidak dapat diragukan lagi ketaatan, pengorbanan dan keikhlasan mereka yang merelakan diri meninggalkan kehidupan duniawi meskipun mereka tahu hal ini tidak menguntungkannya. Dan mereka mendapatkan kehormatan atas penderitaan dalam mempertahankan keyakinannya. Selama berabad-abad pada masa lampau kantor-kantor tertinggi negara terbuka untuk para lulusan dari lembaga-lembaga semacam itu di mana mereka mendapatkan keistimewaan-keistimewaan tersendiri, namun sekarang imbalan dunia yang mereka dapatkan hanyalah upah yang sangat rendah sebagai guru besar pada lembaga-lembaga yang sama atau kedudukan yang lebih rendah di masjid-masjid.

Tanpa disadari mereka menimbulkan keadaan yang sama

sekali menyimpang dari filsafat dan ajaran Islam yang berusaha keras untuk menjadikan totalitas kehidupan dan tidak menghendaki adanya pemisahan antara duniawi dan ukhrawi. Pembagian urusan-urusan manusia ke dalam duniawi dan rohani telah dihapus oleh Islam; namun demikian sistem pendidikan Islam cenderung untuk memasukkan pembagian ini. Kehidupan akan menjadi berada dalam dua dunia akibat dari schizofrenia yang sangat mendalam, di mana keyakinan dan tindakan sulit diselaraskan.

Akibat ketiga yaitu adanya polarisasi antara elite berpendidikan Barat dengan massa: yang terakhir ini, karena tidak sadar akan kemajuan-kemajuan ilmu pengetahuan Barat dan relevansinya bagi kehidupan, merasa kebingungan dengan adanya perbedaan yang sangat mencolok antara yang dikhotbahkan di masjid-masjid oleh para khatib model kuno dengan kehidupan di sekitarnya yang dipenuhi oleh kelompok-kelompok yang lebih makmur. Mereka terus tetap setia kepada ulama, tetapi karena pendapatan duniawinya berada di tempat-tempat lain, maka kesetiaan ini semakin lama semakin mengendor. Dan karena tidak ada komunikasi yang cukup antara mereka dengan orang-orang yang berpendidikan Barat, mereka tidak puas dan ini merupakan ancaman bagi masyarakat yang sudah mapan. Mereka menjadi tulang punggung pengikut penggerak rakyat yang tidak bertanggung jawab dan mementingkan dirinya sendiri serta menjadi pendukung utama terhadap kepemimpinan kharismatik yang mampu membangkitkan emosi mereka, tetapi kadang-kadang mencoba menambah pemahaman terhadap masalah-masalah yang mereka hadapi. Memang Islam tidak menyetujui cara hidup membiara dan tidak mengenal kependetaan. Namun demikian, kemiskinan terselubung dan peniadaan imbalan dari pendidikan yang cukup bagus memberi kesan seolah-olah para santri dan ulama itu hidup membiara, yang karena keterbatasan kegiatan-kegiatannya yang diakibatkan oleh pendidikan mereka yang tidak praktis, semakin lama semakin cenderung bertindak seperti pen-

deta, hanya saja agak kurang disenangi karena mereka tidak berada dalam organisasi yang terjalin rapi dan kuat seperti gereja. Karena keadaan semacam inilah sebagai akibat dari pemisahan pendidikan agama dari persoalan-persoalan umum, sehingga orang-orang non-Muslim mendapatkan pemahaman bahwa Islam juga memiliki badan kependetaan.

Dan akhirnya karena ulama sekarang tidak memiliki pengetahuan dalam bidang ilmu-ilmu kontemporer, baik ilmu eksakta maupun sosial, mereka tidak sebanding bahkan sebagai tokoh agama dengan pastor yang lebih baik pendidikannya atau dengan pendeta Yahudi yang pemahamannya mengenai dunia dan masyarakat lebih luas dan lebih dalam. Seringkali terjadi kemampuan intelektual ulama digunakan untuk membahas beraneka ragam masalah dan mereka cenderung memberikan perhatian yang lebih besar terhadap persoalan-persoalan kecil yang tidak begitu penting dengan penuh semangat, yang pada akhirnya hanya menciptakan perselisihan di antara mereka sendiri dan para pengikutnya. Hal ini menghilangkan citra dan rasa hormat terhadap mereka sebagai kelompok yang cukup berarti, seimbang dan lebih berpengalaman.

Sangat jelas bahwa kesenjangan antara ilmu pengetahuan modern dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki ulama semakin bertambah dari waktu ke waktu. Pada abad kedelapan belas hal ini belum begitu kelihatan sebab studi tentang ilmu-ilmu sosial mulai menjadi sangat penting dan mendalam pada waktu yang lebih kemudian. Penemuan-penemuan ilmiah tidak begitu menggoncangkan keyakinan orang-orang Muslim terhadap agamanya, karena tidak ada pertentangan yang berarti antara penelitian ilmiah dengan kebenaran yang terungkap. Pernyataan-pernyataan yang berhubungan dengan fenomena alam, terutama fakta-fakta astronomis dan penciptaan Adam dan Hawa yang dinyatakan dalam Al-Qur'an tidak sulit ditafsirkan melalui penyelidikan-penyelidikan astronomis dan biologis baru yang sudah

cukup mapan. Mereka yang memperoleh pendidikan dalam ilmu-ilmu modern merasakan bahwa interpretasi Tuan Syed Ahmad Khan sangat banyak membantu dan meyakinkan. Tragisnya, masih ada sebagian ulama yang tidak mengetahui bahkan fakta yang sudah diterima mengenai bentuk bumi – meskipun para ilmuwan Muslim telah mengetahui bahwa bumi itu bulat jauh sejak sebelum kebenaran ini diterima oleh Barat – berputar pada sumbunya dan bergerak di orbit mengitari matahari. Kelalaian ini tidak begitu berarti, sebab pemahaman yang berubah mengenai fenomena siang dan malam serta perubahan cuaca tidak mempengaruhi kehidupan manusia, tetapi sangat penting bagi sikap pikiran. Dahulu ketika orang-orang Muslim terpelajar menjumpai fakta-fakta baru serta teori-teori baru, mereka tidak mencapnya sebagai tidak relevan, karena mereka sadar akan kebenaran bahwa tak ada ilmu pengetahuan yang tidak bermanfaat.

Tidak demikianlah sikap kaum Kristen Barat. Ketika dihadapkan pada fakta-fakta baru yang bertentangan dengan jalan pemikiran yang sudah berurat-berakar, maka ia bereaksi keras. Dukungan Galileo terhadap teori Copernicus dalam memandang sisten tata surya mengakibatkan kemarahan gereja terhadap dirinya. Teori-teori Darwin merupakan ancaman yang sangat besar. Semua reaksi tersebut tidak konstruktif. Tidak hanya hukuman saja yang ditimpakan kepadanya tetapi juga penyiksaan. Di negara-negara bagian tertentu di Amerika pengajaran teori evolusi hingga beberapa waktu yang lalu masih dilarang. Namun bukan berarti tidak mendapatkan perhatian. Memang benar bahwa Injil dan gereja-gereja Kristen begitu fanatik dengan pemikiran-pemikiran yang mendapat tantangan serta keyakinan baru yang mengobrak-abrik keyakinan yang sudah berurat berakar, sedangkan dalam Islam tidaklah demikian. Tidak ada ajaran maupun keyakinan yang terguncang. Apa yang harus dihilangkan atau diubah adalah penafsiran secara harfiah mengenai ayat-ayat tertentu yang dapat ditafsirkan

secara rasional dan meyakinkan. Inilah sebabnya mengapa kaum Muslimin terhindar dari penderitaan yang menimpa keyakinan orang-orang Eropa sebagai akibat dari pertentangan antara agama dengan ilmu pengetahuan. Namun sayang sekali keberuntungan ini dibuang begitu saja oleh ulama yang sedikit demi sedikit kehilangan pengaruh di kalangan masyarakat terpelajar. Mereka juga tidak menyadari bahwa pada suatu waktu mereka juga akan dikucilkan dari masyarakat karena orang mengharapkan agar agama tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk keselamatan di akhirat, tetapi juga sebagai petunjuk jalan dalam kehidupan di dunia ini.

Sekarang kita harus kembali kepada kesenjangan antara ilmu pengetahuan modern dengan yang diberikan di pesantren-pesantren tempat para ulama mendapatkan latihan. Untuk itu, pada abad kedelapan belas, sistem pendidikan Islam diperlengkapi dengan logika dan filsafat. Bidang-bidang ini didasarkan pada tradisi Yunani dan pemikir-pemikir Islam yang karya-karyanya sangat dihargai baik di Barat maupun di dunia Islam. Semua ini sangat dikenal oleh kalangan ulama. Jadi pemikiran ulama memiliki daya tarik intelektual bagi orang-orang yang terpelajar pada waktu itu. Para pengunjung terpelajar yang berasal dari Barat merasakan adanya perbaikan hubungan dengan rekan-rekannya di Anak Benua.[11] Tetapi pengajaran tentang Islam sedikit demi sedikit mulai tertinggal dan ketika volume ilmu pengetahuan Barat bertambah, ilmu pengetahuan Islam menjadi ketinggalan zaman. Kendatipun demikian, hal ini memerlukan waktu yang cukup lama dan orang seperti Shah Wali-u'llah mampu memberikan sumbangan pemikiran yang baik sekali melalui pengetahuan dan pemikirannya.[12]

Tidak ada ilmu pengetahuan yang sama sekali menjadi tidak relevan apabila pikiran manusia mampu menangkap prinsip-prinsip tertentu yang abadi yang tidak kehilangan validitasnya sepanjang masa. Plato dan Socrates, lebih tua

bila dibandingkan dengan pemikir Islam abad ketujuh belas dan kedelapan belas, karya-karyanya masih tetap dibaca dan dipelajari di Barat. Logika Deduktif dan Induktif klasik sekarang bahkan sangat menarik perhatian manusia berpikiran rasional. Tentu saja ulama tidak perlu membuang semua yang telah dipelajarinya termasuk ilmu-ilmu duniawi, tetapi mereka harus mengubah agar tetap upto date. Dalam bidang-bidang spesialisasinya, dimana pemikirannya tidak bisa ditentang, mereka juga harus memperhatikan persoalan-persoalan kemasyarakatan yang lebih rumit karena ilmu pengetahuan mereka hanya dapat mempunyai relevansi melalui penilaian ilmiah tentang faktor-faktor perubahan yang ada di dalamnya. Untuk memperoleh tambahan ilmu pengetahuan ini rasanya tidak begitu sulit. Mungkin cara termudah untuk mencapai tujuan mendapatkan ulama yang mengerti tentang mekanika atau perubahan sosial dan ekonomi adalah dengan cara mengharuskan mereka memperoleh gelar universitas dalam bidang ilmu-ilmu sosial sebelum masuk ke spesialisasi dalam bidang keagamaan. Hanya para pemimpin agama yang tahu bahasa mereka yang akan mendapatkan pengikut di kalangan elite terpelajar. Hampir hingga pertengahan abad kesembilan belas komunikasi ini dapat berjalan dengan lancar, oleh sebab itu ulama pada umumnya berhasil sebagai pemimpin politik, pembaharu sosial dan pendakwah gerakan-gerakan keagamaan. Seperti diketahui oleh para sejarawan pengamat Islam di Anak Benua, tahap ini berakhir dengan wafatnya Saiyyid Ahmad Syahid dan akhir dari Gerakan Jihad yang pertama dan paling berarti.[13)]

Kerja politik dan sosial ulama terus berlangsung tetapi peranannya hanya sebagai tambahan dan bawahan dari kepemimpinan lain yang muncul di antara kelompok-kelompok terpelajar baru. Mereka tidak lagi muncul sebagai pemimpin pergerakan yang didasarkan atas reaksi akademisnya terhadap keadaan yang berlaku. Satu-satunya perkecualian di Anak Benua dalam periode ini adalah Maulana Abu-'l-A'la Maududi, tetapi kemudian hasil kerjanya telah

mengembangkan kehendak massa. Maulana sendiri sudah terbiasa dengan berbagai aspek pemikiran Barat mengenai masalah-masalah yang termasuk dalam bidangnya dan ia mendapatkan bantuan dari sejumlah kecil orang-orang berpendidikan modern. Kenyataan yang ada yaitu bilamana ulama tidak bekerja sama dengan kepemimpinan baru, mereka tidak dapat mempengaruhi massa meskipun telah terjadi hubungan yang cukup lama dengan orang-orang itu di masjid. Dengan kata lain mereka mampu memikat para pemimpin yang mengerti akan kehendak dan perasaan rakyat, tetapi di pihak ulama sendiri bahkan tidak mampu mengatasi perbedaan perasaan orang banyak secara tepat. Kegagalan semacam itu terjadi pada orang-orang yang jarang berhubungan dengan rakyat, tetapi tidak pada ulama yang dapat memanfaatkan masjid sebagai sarana untuk meraba detak nadi perasaan orang banyak.

Hal semacam ini tidak pernah terjadi karena, bersamaan dengan pengabaian prinsip-prinsip ilmu-ilmu sosial dan sebagian besar memang diakibatkan olehnya, mereka tidak memanfaatkan masjid-masjid untuk membangun hubungan dan pengaruh. Pertama-tama, beberapa imam tidak memiliki pendidikan lebih dari sekedar pengetahuan yang dangkal untuk dapat memimpin sembahyang dan menjalankan upacara keagamaan yang sudah umum. Mereka tidak memiliki kedudukan, pengetahuan atau keinginan untuk mempengaruhi orang-orang yang datang bersembahyang di masjid dan beberapa di antaranya bahkan tidak datang karena kelelahan atau ketidakacuhan atau karena mereka tidak dapat menangkap buah yang lebih dalam dari sembahyang. Kemudian, meskipun imam itu memiliki pendidikan yang lebih baik dan memiliki motivasi yang lebih kuat, tidak ada forum tempat mereka mendiskusikan masalah-masalah dan kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi kemudian merencanakan tindakan apa yang seharusnya diambil pada waktu yang akan datang. Terakhir, tidak adanya hirarki. Hal ini meniadakan kemungkinan adanya bimbingan dari orang-orang yang lebih tinggi pengetahuannya serta kepemimpinan yang lebih bagus. Namun demikian bukan berar-

ti bahwa Islam harus membentuk organisasi seperti gereja, tetapi tidak ada alasan mengapa kegiatan bimbingan keagamaan tidak bisa diorganisasikan secara lebih baik. Tentu saja penyerahan pendidikan orang banyak sepenuhnya di tangan imam yang setengah terpelajar, kurang gaji, diperlakukan kurang wajar tanpa memperoleh bimbingan maupun pengarahan merupakan tindakan yang sangat tidak terpuji. Akibat-akibat yang fatal tidaklah dirasakan pada abad-abad ketika dikotomi antara pendidikan agama dengan pendidikan umum belum dikenal. Pada awal mula pembagian sistem pendidikan menjadi dua, akibat dari kealpaan ini belum mereka rasakan karena perasaan relijius yang masih tebal dan ketaatan yang dibangun pada masa lampau belum tergoyahkan, di samping itu masih terdapat sisa-sisa pemahaman agama yang diwariskan dari masa lalu. Tetapi pagar-pagar semacam ini akan lapuk pada masa mendatang, dan memang tidak dapat berfungsi lagi ketika perkembangan informasi media masa tidak lagi bisa dibendung hingga tak ada satu sudut pun yang tidak terpengaruh.

Ulama tidak selamanya tidak ambil peduli terhadap perlunya organisasi. Telah berkali-kali dicoba untuk menemukan forum bagi mereka sendiri, tetapi usaha ini tidak pernah sepenuhnya berhasil. *Jami'at-i-'ulama'-i-Hind* muncul segera setelah adanya Gerakan Khilafat yang berhasil dalam bidang politik, tetapi tidak pernah mengalihkan perhatiannya pada tugas membentuk organisasi imam yang mandiri. Memang juga telah dicoba untuk membentuk *imarat-i-shari'ah* yang dikepalai oleh seorang *'alim* yang telah termasyur kepandaiannya, namun usaha ini mengalami kegagalan karena rasa saling iri dan berbeda pendapat, di samping itu sejumlah besar ulama tidak bersedia berkorban demi kepentingan kegiatan semacam itu. *Imarat* yang bersifat kedaerahan didirikan di Bihar, namun tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya karena tidak memperoleh dukungan ulama.[6] Satu-satunya bidang yang dapat dijangkau oleh *Jami'at* adalah bidang politik, tetapi ini juga mengalami kegagalan memperoleh suara yang nyata dalam politik masyarakat, kecuali ketika bekerja sama dengan para pe-

mimpin Gerakan Khilafat.

Kesulitan yang selalu dialami ulama adalah kesulitan untuk menghindari perbedaan-perbedaan mazhab. Keberhasilan untuk mengatasi masalah perbedaan ini hampir dicapai oleh Shah Wali-u'llah yang dengan tekun berusaha memecahkan perbedaan-perbedaan. Seringkali gerakan-gerakan didasarkan pada pendapat ajaran tertentu yang tidak bisa diterima oleh sebagian besar aliran yang diikuti ulama, misalnya Gerakan Jihad mendapatkan berbagai kesulitan yang tak bisa dihindarkan karena, meskipun ada pengaruh yang moderat dari Saiyyid Ahmad Syahid, sebagian besar pemimpinnya terlalu cinta kepada berbagai penjabaran doktrinal yang tidak bisa diterima oleh rakyat yang dukungannya sangat menentukan. Sudah sering terjadi dalam sejarah Islam hal ini menghalangi kaum Muslimin memberikan serangan terpadu kepada musuh-musuhnya.

Kendatipun terdapat kekurangan-kekurangan dalam latihannya, ulama telah memainkan peranan yang sangat penting dalam sejarah kita. Mereka telah membantu kita menjaga warisan-warisan kita. Konservatisme mereka memang menjengkelkan dalam beberapa bidang, namun tanpa mereka rakyat akan seluruhnya pindah ke pandangan hidup lain. Kenyataan bahwa umat Hindu lebih taat kepada adat istiadatnya dan lembaga-lembaganya jangan sampai membawa kita berkeyakinan bahwa kita juga akan melakukan hal yang serupa, karena kaum Muslimin pada dasarnya maupun pandangannya tidak konservatif. Mereka lebih bisa mengalami perubahan karena mereka tidak memandang setiap institusi asing sebagai tidak Islami bahkan seringkali terjadi mereka tidak membedakannya secara ketat. Ulama memperlihatkan konservatismenya meyakinkan melalui pengorbanannya, karena mereka berada jauh dari keuntungan-keuntungan yang akan diperolehnya apabila mereka menghilangkan rintangan terhadap masuknya konsep-konsep dan pendidikan asing. Mereka mampu menopang dirinya sendiri karena keyakinannya terhadap Islam yang telah meneguhkannya. Keyakinan ini begitu kuat dan begitu besar. Kalau saja mereka tidak menyamakan antara yang

prinsip dengan jabarannya, antara yang pokok dengan cabangnya, maka keyakinan yang sungguh-sungguh sangat kuat dan tidak mengenal kompromi ini akan mendorong ke arah usaha-usaha yang positif dan mereka tidak hanya menjadi pendukung reaksi yang negatif.

Perhatian yang besar terhadap pemeliharaan hal-hal yang kecil bukanlah diakibatkan oleh perasaan mementingkan diri sendiri, tetapi muncul dari kesetiaan total terhadap Islam yang tidak mengenal kompromi bahkan dalam masalah ide yang paling kecil yang muncul dari penafsiran terdahulu, baik langsung maupun tidak langsung, mengenai pengajaran tauhid. Kemudian seluruh kepustakaan, kebiasaan, adat istiadat, baik yang berasal dari Islam maupun yang bukan berasal dari Islam tetapi sudah diasosiasikan dengan Islam, dalam pikiran mereka diidentifikasikan dengan keyakinannya dan mampu membangkitkan tanggapan emosi dalam hatinya.

Sepanjang kecintaan mereka terhadap Islam masih tetap utuh, maka perasaan itu akan lebih mendalam dan kuat. Bilamana ada tantangan terhadap Islam dan mereka benar-benar mengetahui akan bahayanya, banyak di antara mereka tidak segan-segan bersedia mengorbankan dirinya. Memang tidak bisa dipungkiri di antara mereka juga terdapat kambing hitam, tetapi ini hanyalah untuk menunjukkan bahwa mereka juga tidak lepas dari kekurangan dan kekhilafan. Kendatipun terdapat berbagai kelemahan dan kekurangan, namun mereka telah berusaha untuk memelihara kemurnian ajaran dan kerap kali dibuktikan dengan perjuangan yang gigih dalam mempertahankan Islam ●

Catatan Kaki:

Qureshi, I.H., Ulema in Politics, Ma'areef Limited, Karachi, 1974.

1. Peribahasa yang dikatakan sebagai ucapan Nabi ini dikutip secara luas, namun tidak sahih. Sakhawi, *Al-Maqasidu'l-hasanah*, (Cairo, 1956), P. 286. Versi lain yaitu "Ulama adalah pewaris Nabi", lebih se-

suai dengan pemikiran agama Islam dan terdapat dalam Tirmidhi, Abu Da'ud dan Ahmad, *ibid.*

2. *Qur'an*, Surat V, ayat 104, 105.
3. 'Ali berkata' "Dan inilah Qur'an, yang ditulis di atas baris lurus, di antara dua papan (yaitu sampul penjilidnya). Ia tidak bisa berbicara dengan lidah, makanya memerlukan ahli tafsir, dan ahli tafsir itu haruslah orang (yang memenuhi persyaratan)" – *Nahj-u'l-balaghah* (Lahore, 1963) p. 247.
4. Dari keterangan di atas sudah jelas. *Qur'an* sendiri mengatakan: "dan tidak dapat mengambil pelajaran daripadanya kecuali orang-orang yang mempunyai pikiran". Surat III, ayat 7.
5. *Qur'an*. Surat XXXIII, ayat 21.
6. Ucapan "   " sudah hampir menjadi peribahasa sehari-hari.
7. *Qur'an*, Surat III, ayat 190. Ibn 'Abbas dikabarkan yang meriwayatkan kejadian ini dalam Bukhari, *Sahih*, (meerut 1328 A.H.) V. I.,p. 21, V, p. 97; V. I, p. 135; V. II,p. 657, 'Ali juga mengabarkan bahwa ketika Nabi bangun untuk melaksanakan sembahyang *tahajjud*, beliau mengutip ayat tersebut di atas, A'r-Razi, *Tafsir-u'l-kabir* (Cairo, n.d.) V. III,p. 171.
8. Zamakhshari, *Kashshaf (Cairo, 1946), V.I,p. 452; Ibn Kathir, Tafsir* (Cairo, n.d.) V.III.p.171.
9. Saiyyid Muhamad Qutb, *Islam The Misunderstood Religion*, (terjemahan dalam bahasa Inggris dari aslinya berbahasa Arab), (Dacca, 1969).
10. Misalnya, Abu-'l-A'la Maududi, *Islamic Law and Constitution, (diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan diedit oleh Khurshid Ahmad) (Lahore, 1955).*
11. *Sleeman, Rambles and Recollections* (London, 1884), V.II,p. 53.
12. I.H. Qureshi, *The Muslim Community of the Indo-Pakistan Subcontinent*, 'S-Gravenhage, 1962.pp. 186-192.
13. *Ibid.*, pp. 202, 205.
14. Yang lebih menonjol di antaranya adalah seorang ekonom. Khurshid Ahmad, dan Kaukab Siddig, seorang lektor bahasa Inggris dan Maryam Jameela, seorang cendekiawan wanita Amerika (berpindah memeluk Islam).
15. Tujuannya adalah untuk mendukung Maulana Abu-'l-kalam Azad, seorang Muslim India terkemuka, agar terpilih menjadi menteri dalam kabinet Jawahar Lal Nehru.
16. Markas besarnya berada di Phulwari Sharif di Bihar. Maulana Bard-u'd'din sebagai *amir* dan Maulana Abu-'l-muhasin Muhammad Sajjad sebagai *na'ib*. Imarat tidak pernah sepenuhnya efektif.

Bab 6.
Perlawanan Tradisionalis Ulama Terhadap Parlementarianisme: 1907–1909

Oleh • Said Amir Arjoman

ARTI penting perlawanan sebagian besar *ulama* kelas menengah dan kelas atas terhadap konstitusionalisme telah begitu kabur dalam lembaran sejarah revolusi konstitusional Iran. Perlawanan ini dimulai tahun 1907, menemukan momentum yang tepat pada pertengahan kedua tahun itu dan berlangsung terus hingga akhir 1908. Ada 4 faktor yang menyebabkan kurangnya perhatian pada bagian penting sejarah revolusi ini. Pertama, begitu menonjolnya dua orang *mujtahid*, Tabataba'i dan Behbehani di kalangan pendiri Majelis. Kedua, adanya dukungan kuat yang diberikan kepada alasan konstitusionalis oleh tiga tokoh dari *marja'i taqlid Najaf.* Ketiga, adanya sikap pro-konstitusionalisme beberapa orang *tullah* muda dan keempat, aktifitas yang amat mencolok dari beberapa ulama yang kurang terkenal.

Lebih dari itu, selama bulan-bulan pertama 1909 kekuatan perlawanan konstitusionalis terhadap Mohammad 'Ali Shah telah amat meluas bahkan sampai ke daerah-daerah pedalaman. Ketidakcakapan dan kekejaman autrokrasi, serta antipasi terhadap keruntuhannya telah menyebabkan hampir semua *ulama* terkemuka menarik kembali dukungan aktif mereka. Ada juga yang bergabung dengan sayap konstitusionalis dengan cara yang sangat hati-hati dan luar biasa.

Tulisan ini dimaksudkan untuk memulihkan perhatian terhadap topik penting yang selama ini diabaikan itu dengan menjelaskan perkembangan opini ulama terhadap pemerintahan parlementer, serta dengan memperhitungkan arti penting dan implikasi-implikasinya. Pola tradisionalisme yang telah diverpolitisir yang akan dijelaskan melalui analisa kita ini nampak akan menghasilkan pola yang sangat mirip dengan apa yang muncul dalam revolusi 1979.

Dalam karyanya *Tarikh-e Ejtema'i-ye Iran,* Ravandi mengemukakan bahwa mayoritas *ulama* tingkat atas (high ranking *ulama*) adalah pendukung-pendukung rezim kuno dan merupakan musuh konstitusionalisme. Sementara itu sejumlah kecil dari kelompok mereka secara efektif menjadi pendukung para konstitusionalis.[1] Pernyataan ini, sekalipun benar nampaknya terlalu a-temporal dan mengisyaratkan adanya suatu sikap dan kepastian posisi pada sebagian pemimpin-pemimpin agama yang bisa menyesatkan. Pernyataan ini agaknya juga tidak memperhitungkan fluiditas (ketidakstabilan) situasi dan berkembangnya secara berangsur-angsur paham konstitusionalime yang menjadi orientasi para ulama. Sebaliknya, Kasravi telah mengidentifisir terjadinya *persekutuan dua Sayyed,* Abdollah Behbehani dan Mohammad Tabataba'i. Ia juga menyatakan bahwa pidato mereka yang berulang-ulang dalam peristiwa 1907 serta berpalingnya para Mullah dari rakyat dan Konstitusionalisme sebagai awal bermulanya Revolusi Konstitusional.[2] Meskipun dia mengemukakan bahwa terdapat beberapa pengecualian, terutama mereka yang kurang terkenal (the lesser Mollah)[3] pengamatan Kasravi mengenai perlawanan ulama (clerical opposition) terhadap konstitusionalisme ini menunjukkan adanya pergeseran umum dalam opini ulama di bawah pengaruh kekuasaan Mullah pada tahun 1907. Nampaknya pandangan Kasravi mengenai perlawanan ulama terhadap konstitusialisme ini lebih bercorak temporal ketimbang numerik.

Lambton, pengamat lain, menunjukkan penyebab natu-

rál *ulama* memukul kepemimpinan gerakan protes melawan kekuasaan tiranik dan imperialis yang berlangsung sejak 1905 dan mengarahkannya pada isyu mengenai *farman* konstitusional oleh Muzaffar al-Din Shah dan isyu dibentuknya Majelis yang pertama pada tahun 1906.[4] Dalam bagian ini, dengan mengikuti jalan pikiran Lambton saya mencoba menunjukkan bahwa peranan pokok *ulama* pada awal Revolusi Konstitusional hanya bisa dimengerti dengan baik juka dilihat dalam kerangka wawasan tentang tujuan awal gerakan rakyat.

Dasawarsa awal periode Qajar telah memberi kesaksian akan timbulnya diferensiasi yang semakin kentara dalam bidang politik dan outoritas hierokratik, serta konsolidasi institusi-institusi keagamaan yang otonom dan *autocephalous* di Iran.[5] Jadi masih ada suatu area potensial penting yang berimpit, yaitu antara outoritasnya mencakup subyek itu atau tidak mencakupnya, di luar masalah-masalah temporal, pada prinsipnya penguasa tetap menjadi "the King of Iran and of the Shi'ite Nation". Ini berarti bahwa perlindungan terhadap bangsa Syiah dari gangguan kaum kafir menjadi tanggung jawab utama penguasa. Bahkan tanggung jawab untuk menjalankan suatu *hierrocracy* otonom (pemerintahan oleh ulama) juga terletak padanya. Yang mendasari hal ini adalah tidak adanya diferensiasi antara Islam Syiah sebagai suatu sistem keyakinan agama dengan konsepsi komunitas Syiah sebagai suatu tata sosial yang otonom. Dengan kata lain, konsepsi tentang masyarakat sekuler tidak mendapat tempat di situ. Apabila penguasa gagal melaksanakan tugasnya yang paling pokok, yaitu memberi perlindungan terhadap Islam dan terhadap bangsa atau komunitas Syiah maka hierokrasi merasa berhak menjalankan kewajiban itu dengan merebut kepemimpinan bangsa dan menyusun kembali suatu komunitas Syiah yang baru.[7]

Contohnya adalah waktu hierokrasi memberi respon, atas tuntutan kaum pedangang dan nasionalisme, untuk merebut kepemimpinan bangsa Syiah atas nama Imam

Ghaib (Hidden Imam) karena adanya pengakuan konsesi tembakau antara Nasir al-Din Shah dengan perusahaan Inggris. Waktu itu dengan cepat bangsa Syiah mengadakan perlawanan terhadap kaum imperialis kafir. Timbul protes yang besar dan meluas pada tahun 1891 – 1892 yang mengakibatkan terusirnya Inggris dari Iran.

Sebelum itu pernah timbul perlawanan serupa, yaitu yang dilakukan oleh *mujtahid* Mirza. Masih terhadap Fath Ali Shah pada sekitar tahun 1870-an, setelah terjadinya perang Persia - Rusia yang kedua.

Dalam perspektif observasi mengenai "the men of religion" inilah Dawlatabadi membagi ulama terkemuka menjadi dua kelompok. Pertama adalah mereka yang tidak mempunyai hubungan dengan fungsionaris-fungsionaris negara, tidak mengurusi pelaksanaan Hukum Wahyu (Sacred Law) dan menghindari kemewahan. Kelompok kedua adalah mereka yang lebih mementingkan kekuasaan duniawi (*riyasatma'abi*) daripada segi-segi keagamaannya. Mereka berbaur dengan fungsionaris-fungsionaris negara dan mengurusi pelaksanaan peradilan agama

Kelompok kedua inilah yang menentukan keputusan-keputusan mengenai perselisihan hukum, dan bertindak sebagai perantara pemerintah dan rakyat.[8] Bagi kelompok ini fungsi pengadilan merupakan "tambang penghasilan" yang mengakibatkan timbulnya banyak keputusan yang saling bertentangan. Kasus ini banyak terjadi sekitar pergantian abad yang lalu.[9]

Menurut Dawlatabadi, rangking di bawah kelompok ini dalam hal prestise dan otoritasnya adalah kelompok pengkhotbah (ahl-emenbar; vo'az) yang memiliki pertalian tertutup dengan bangsawan karena peranan mereka dalam *rawza-khani* dan *ta'ziah.*[10]

Lewat pengamatan semacam ini kita bisa menambahkan bahwa *Imam Jum'ah* dan *Shaykh al Islam* adalah orang-orang yang diangkat negara dan dengan demikian termasuk kelompok *ulama* yang mencari kekuasaan duniawi. Bebera-

pa orang dari mereka memiliki kekuasaan atas tanah yang luas dan kekuasaan atas pengawasan kekayaan *waqf*.

Ketika kota-kota suci Arab Irak jauh mengungguli Isfahan dan Teheran sebagai pusat-pusat pengajaran agama pada kedua abad XIX, dikhotomi antara *ulama* "duniawi" dengan mereka yang secara alim menarik diri dari keterlibatan politik ini tercermin dalam perbedaan geografis yang menjadi tempat tinggal mereka.[11)]

Gerakan nasional melawan konsesi tembakau menimbulkan dua konsekuensi penting. Gerakan ini telah menarik kaum cendekiawan *atabat* ke dalam arena politik[12)], juga telah memperkuat kekuasaan ulama-ulama duniawi yang pusat pemerintahan yang lemah sangat tergantung kepada fungsi perantara politiknya.[13)] Adanya gerakan ini menyebabkan Fazel-e Sharabiyani (wafat 1904) dan Shaykh Mohammad Hasan Mamaqani (meninggal 1906) muncul sebagai pemuka-pemuka agama yang paling menonjol dari pihak *atabat*, setelah meninggalnya Mirza Hasan Shirazi. Mereka memperoleh kekuasaan penasehat (advisory) dan kekuasaan penentu (veto) yang sangat efektif dengan pengangkatan fungsionaris negara tingkat atas[14)], sementara itu tuntutan tetap dari pemerintah pusat untuk menjadi perantara politik melalui ulama terkemuka dari Teheran dan dari daerah-daerah lain telah membangkitkan ambisi politik tokoh-tokoh agama yang terkemuka beserta murid-muridnya.[15)]

Dengan latar belakang seperti di atas maka peranan pokok ulama dalam pergerakan rakyat yang terjadi pada 1905-1906 menjadi mudah dipahami. Sebab gerakan itu dipandang dari wawasan kontemporer merupakan suatu pertarungan antara rakyat (mellat) dan pemerintah (dawlat) yang tidak saja tiranik tetapi juga telah menjual negerinya kepada imperialis asing. Otonomi hierokrasi Syiah dari negara Qajar telah menyebabkan konflik antara dua institusi ini sebagai endemi yang potensial. Pelaksanaan bestinado terhadap Mirza Mohammad Reza, *mujtahid* Kerman dan perlakuan kasar atas beberapa ulama lainnya merupakan

penyebab penting yang mempercepat krisis 1905. Lebih dari itu, kecilnya diferensiasi antara komunitas kaum beriman dengan bangsa atau masyarakat secara keseluruhan pada dekade awal abad ini telah ikut mendukung terjadinya bentrokan antara hierokrasi Syiah melawan pemerintahan Qajar. Dalam konflik itu orator termasyur Sayyed Jamal telah mengajak *ulama* agar melepaskan tanggung jawab kepemimpinan mereka sebagai *pemimpin-pemimpin Islam* (ru'asa) dan *wakil-wakil para imam.*[16] Adalah merupakan hal yang wajar bagi Nazem al Islam Kermani ketika membicarakan surat Tabataba'i kepada Mozaffar al-Din Shah sebagai surat dari *pemimpin bangsa* (ra'is-e mellat) kepada orang yang paling terkemuka dari negara (shakhe-e avval-e dawlat)[17] dan bagi Tabataba'i yang menandatangani telegramnya kepada kaisar Jepang sebagai ra'is-e mellat-e Islam.[18]

Peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tahun-tahun pertama Revolusi Konstitusional membuat kita yakin bahwa para *mujtahid* Teheran yang terkemuka berada di bawah ancaman penindasan berat – tidak jarang dalam bentuk ancaman pembunuhan – untuk menjalankan tanggung jawab kepemimpinan mereka, untuk bertindak sebagai juru bicara rakyat dan bukan untuk mengalah sebelum memenangkan tuntutan mereka secara menyeluruh.[19] Sayyed Mohammad Tabataba'i dan Sayyed Abdollah Behbehani secara tepat telah menanggapi dan membahas persoalan bangsa Syiah ini, didukung oleh Syaikh Mortaza Ashtuyani, Sayyed Mohammad Ja'far as-Ulama dan Sayyed Jamal al-Din Afjeh-i. Tabataba'i dan Behbehani mendukung tuntutan rakyat dan menuntut didirikannya *adalat-khaneh.* Penting juga dicatat bahwa bagi Behbehani *adalat-khaneh* tak lain adalah majles-e shura,[20] dan dalam pidatonya yang paling penting di bulan Juli 1906 Tabataba'i menuntut dibentuknya *majles-e mashru'a-ye adalat khaneh,* dengan menambahkan bahwa ia tidak menuntut *mashrutiyyat.*[21]

Sebaliknya, ada sejumlah *ulama* terkemuka yang mem-

punyai ikatan pribadi dengan negara dan kaum bangsawan yang berkeuangan kuat, khususnya Sayyed Rahyanollah, Shaykh Abdal Nabi, Molla Mohammad Amoli dan Sayyed Ahmad Tabataba'i berpihak kepada pemerintahan Ayn al-Dawla. Sementara itu Sayyed Ali Aqa Yazdi, *marja'i taqlid* Syah tetap netral supaya bisa menengahi dan memutuskan pemecahan akhir dari konflik itu.[22] Inilah jajaran para ulama terkemuka Teheran pada pertengahan Juli 1906, ketika penggusuran terhadap Shaykh Mohammad Va'ez dan pembunuhan Sayyed Abd al Hamid semakin memperburuk konflik sehingga mendorong *ulama* bertindak bukan saja sebagai juru bicara rakyat, tetapi bertindak untuk mempertahankan kehormatan *clerical-estate* mereka. Mereka hijrah ke Qum. Hartawan kaya Shaykh Hosayn Shaykh al-Iraqyan dari Isfahan adalah seorang dari pemuka agama yang bergabung dengan kaum pembangkang ini. Bahkan *mujtahid* Isfahan yang paling konservatif, Aqa Najafi, yang tidak diduga menyimpan simpati terhadap tuntutan-tuntutan rakyat itu, bersama kolega-koleganya telah menyatakan solidaritasnya untuk melawan negera dengan mengirimkan seorang wakilnya ke Qum.[23]

Jika konflik itu dipahami sebagai konflik antara bangsa dan negara (*mellat de dawlat*), maka pemecahan yang tuntas adalah *persatuan dan negara.*[24] Dan sebelum meninggalkan Qum ulama menuntut berdirinya sebuah *majma' va majles-e adalat* dalam rangka mencapai tujuan Islam yang paling penting, yakni "memperkuat kerajaan Islam" (qovvat-e sultanat-e Islamiyya).[25] Ketika apa yang dimaksudkan sebagai *majelis* itu sudah didirikan melalui pengesahan Undang-undang Dasar pada 30 Desember 1906, Revolusi Konstitusional memasuki fase baru di mana fungsi-fungsi dan yuridiksi Majelis dirumuskan secara pro. Dengan definisi parlementarianisme yang progresif ini ulama menghadapi persoalan baru mengenai perlunya mempertegas dan menilai kembali kedudukan dan posisi mereka. Demikianlah kristalisasi sikap *ulama* terhadap konstitusialisme, khususnya terhadap

parlementarianisme yang terjadi tidak hanya setelah ditandatanganinya Undang-undang Dasar itu tetapi juga selama berlangsungnya perdebatan mengenai lampiran-lampirannya.[26)]

Pada bulan Juli-Agustus 1906, selama ulama berada di Qum, para konstitusionalis telah memenangkan satu point penting yaitu diubahnya kata-kata *majles-e shura-ye Islami* menjadi majles-e shura-ye melli.[27)] Tetapi pada kata-kata ini dianggap seolah-olah tidak ada pada saat *ulama* memberikan sambutan yang luar biasa atas kembalinya kejaksaan mereka di Teheran.

Gejala-gejala ketidakpuasan ulama terhadap Konstitusi semakin nampak. Berbaliknya keadaan telah membuat mereka bangkit melawan sesudah diadakan pengesahan Undang-undang Dasar. Pada akhir 1907 Kita mendengar ada sejumlah *ulama* berusaha menghalangi diadakannya pemilihan umum di daerah-daerah.[28)] Dalam bulan Pebruari ketika *majelis* mulai mengadakan diskusi mengenai lampiran UUD, Shaykh Fazlollah Nuri menyusun suatu strategi untuk melawan reformer-reformer sekuler. Strategi ini merupakan suatu upaya untuk membangun benteng perlawanan tradisionalis dengan mengerahkan isyu mengenai perbedaan hak antara kaum Muslim dengan kaum minoritas agama lain, sekaligus pada saat yang sama berusaha mencari penyesuaian dengan Shah.[29)] Mohammad Ali Shah kemudian menanggapinya dengan meminta agar "hukum dirumuskan sesuai dengan *Shari'at-e Mohammadi* (Syariah Islam)".[30)] Tak ketinggalan, Sayyed Akbar Shah menggunakan kesempatan yang diberikan kepadanya dalam perayaan Muharram untuk berpidato menentang konstitusi. Sayyed Akbar Shah, Shaykh Zayn al-Din Zanjani dan Sayyed Mohammad Tafreshi, murid-murid dari seorang rival Behbehani almarhum mencari perlindungan ke pensantren (shrine) Abd al-Azim. Di pesantren ini mereka tinggal sampai bulan Maret sambil menghimpun 60 atau 80 orang terpilih yang akan menjadi pembantu mereka.[31)] Tetapi bagaimanapun juga Sayyed

Akbar Shah dan rekan-rekannya telah gagal menarik perhatian yang lebih luas lagi. Sementara itu Shaykh Fazlollah Nuri telah mengusulkan syarat-syarat mengenai pemerintahan parlementer kepada Aqa Najafi dan saudara Mohammad Tabataba'i Sayyed Ahmad Tabataba'i menyatakan kekecewaannya.[32]

Ketidakpuasan *ulama* dan perlawanan mereka yang terlalu berani itu ternyata masih kurang mendapat perhatian. Pada bulan Maret dan April kita menyaksikan munculnya para petani di Majelis yang mengadukan penindasan dan penghisapan dua orang ulama pemilik tanah yaitu Mutavallu-bashi dari Qum dan Hajj Aqa Muhsin, *mujtahid* kaya raya dari Arak[33]. Kita juga menyaksikan timbulnya perselisihan yang cukup serius antara konstitusionalis dari *ulama* terkemuka dari Rasht dan Tabriz. Pada saat itu Hajji Khammami, mujtahid terkenal dari Rasht beserta para pengikutnya meninggalkan kota itu dan berangkat menuju Teheran[34]. Kejadian yang paling memalukan dan yang menyebabkan timbulnya simpati mendalam terhadap kaum ulama adalah pengusiran *mujtahid* Mirza Hasan beserta pemuka agama Tabriz dari kota itu[35].

Agitasi serius dari kaum ulama di bawah kepemimpinan Shaykh Fazlollah Nuri baru muncul pada bulan Mei, setelah Amin al-Sultan menjadi perdana menteri. Nuri melancarkan kampanyenya dengan terjun langsung ke dalam Majelis dan anaknya dipasang sebagai penghubung di Najaf. Dia mengajukan "prinsip" agar semua legislasi parlementer harus mendapat persetujuan dari sebuah komite yang terdiri dari lima orang *mujtahid* ranking tertinggi. Di pihak lain dia juga mengorganisir sebuah kelompok *tullah* untuk mendukung prinsip yang diusulkannya itu dari majelis serta merongrong anggota majelis yang tidak simpatik. Nuri juga membentuk sebuah *anjoman* yang terdiri dari *mujtahid-mujtahid* Tabriz dan Rasht yang terkucil yaitu Shaykh Abd al-Nabi, Mollah Mohammad Amoli dan *rawzakhan* Hajj Mirza Loftollah. Dua yang terakhir ini merupakan tokoh-

tokoh yang paling vokal dalam oposisi mereka kepada Majelis. Sementara itu di daerah-daerah, Hajj Mohsen terus melancarkan permusuhan terhadap kaum konstitusionalis di Arak dan Hajj Mirza Hasan berjuang bersama anjoman dari Nizabur. Molla Qurban Ali, mujtahid tua dari Zanjan dan Sayyed Jamal dikirim oleh Nuri ke Qazvin untuk mengobarkan perlawanan di kota itu. "Prinsip" Nuri pun dimasukkan sebagai klausul 2 dalam lampiran UUD oleh Majelis pada minggu kedua bulan Juli 1907. Tetapi tanpa memperdulikan kemenangan parlementer ini Nuri kemudian bergabung dengan Abd al-Azim bersama sahabat-sahabatnya, Molla Mohammad Amoli dan Hajj Mirza Loftollah[36].

Pada bulan Mei Sayyed Mohammad Yazdi melakukan kampanye anti parlemen dengan memusatkan upayanya untuk menggasak kaum konstitusionalis yang dituduhnya sebagai kaum bid'ah. Karena Majelis pada bulan Maret 1907 telah menghapuskan *tuyul* maka tuan-tuan tanah penguasa *tuyul* marah. Naqib al-Sadat Shirazi pada permulaan bulan Juni mendirikan *rawza-khani* sebagai platform perlawanannya kepada majelis dengan mengkoordinasi penguasa-penguasa tuyul ke dalam kegiatan oposisi Nuri. Shaykh Fazlollah menggabungkan diri dengan Abd al-Azim bersama-sama dengan Mirza Hasan, mujtahid Tabriz, Sayyed Ahmad Tabataba'i, putra Hajj Mohsen *mujtahid* Arak, pemilik tuyul, ulama lain serta kaum tullah yang jumlahnya lebih dari 500 orang[37].

Selama tiga bulan di pesantren Abd al-Azim yaitu sejak pertengahan Juni sampai pertengahan September 1907, Nuri secara koheren merumuskan tujuan-tujuan ulama dalam melawan parlementarianisme. Meskipun orientasinya tidak jelas, kebersamaan mereka telah melahirkan sebuah ideologi tradisionalis yang konsisten. Dia menerbitkan dan menyebarluaskan serangkaian surat terbuka Abd al-Azim yang kemudian terkenal sebagai *Ruznameh Shaykh Fazlollah.* Surat itu sebagian besar ditulis oleh atau atas perintah Shaykh Fazlollah sendiri. Isi buku kumpulan surat yang diterbitkan

itu juga meliputi surat dan telegram-telegram yang berasal dari Sayyed Kazim Yazdi, *marja'* Najaf yang amat disegani dan dari maraji' berpaham konstitusionalis, Akhund-e Khorasani, Hajj Aqa Hosayn, putra Hajj Mirza Khalil Tehrani dan Sayyed Abdollah Mazandarani[38]

Meskipun pembukaan sekolah-sekolah untuk kaum wanita dan usulan-usulan penggunaan dana yang diberikan kepada *rawza-khani* untuk pembangunan pabrik-pabrik dan industri "Eropa" tidak lepas dari kecaman dan protes[39] tetapi sesungguhnya tema yang dijadikan landasan kepemimpinan Nuri untuk melawan parlementarianisme dan aksi konstitusionalis lebih luas lagi. Tema-tema Nuri berkisar pada masuknya kebiasaan dan praktek-praktek jahiliah yang merusak Hukum Wahyu yang sudah dipermaklumkan sejak 1300 tahun yang lalu, penghinaan dan olok-olok atas kaum Muslimin serta terjadinya pencemoohan terhadap *ulama,* persamaan hak untuk nasionalitas dan agama, berkembangnya prostitusi[40] dan kebebasan pers yang bertentangan dengan Hukum Suci kita[41].

Tujuan pokok kampanye itu adalah "melindungi benteng pertahanan Islam dari penyimpangan yang dilakukan oleh kaum bid'ah dan para penyeleweng[42]. *Ulama* mendambakan munculnya persaudaraan keagamaan dan perbaikan atas miskonsepsi dan kesalahan mereka untuk melindungi mereka dari serangan kaum Babi dan kaum naturalis yang sibuk mempedayakan "masa yang jinaknya melebihi ternak[43]. Kita tidak akan membiarkan", kata Nuri, "Kebangkrutan Islam dan penyimpangan-penyimpangan terhadap Hukum Tuhan"[44].

Berbeda dengan muslihat kaum "modernis" yang menunjukkan bahwa konsep-konsep dan praktek-praktek politik Barat adalah perwujudan semangat Islam maka pendukung tradisionalis Islam mengecam kualitas mereka yang asing dan bertentangan itu serta menggocoh keeropaan parlemen dan Undang-undang Dasar[45]. Mereka berkata; "Petasan-kembang api, resepsi-resepsi para diplomat, kebiasaan

asing mereka, teriakan *hurrah* (kegembiraan) mereka, semua itu adalah inskripsi dari 'Long Live' (zendeh bad) mereka: Long Live untuk Fraternity dan Equality. Mengapa kita tidak teriak: Long Live Syariah. Long Live Qur'an dan Long Live Islam?"[46)]

Tidak seorang pun yang mengingkari adanya keinginan membentuk sebuah Majelis [47)]. Apa yang secara murni dituntut dari negara pada tahun 1906 adalah didirikannya sebuah "Majelis Peradilan" (Majles-e ma'delat) demi tegaknya keadilan dan persamaan dalam melaksanakan hukum Tuhan. Tidak pernah ada seorang pun yang menuntut agar didirikan *shura-ye melli* atau *mashruta*[48)]. Majelis yang diinginkan tersebut diharapkan tidak bertentangan dengan Islam, mampu melaksanakan dan menganjurkan kebaikan, melarang kemungkaran dan melindungi Islam[49)]. Tetapi di pihak lain, kaum konstitusionalis berkeinginan untuk menciptakan Majelis Konsultatif Iran seperti Parlemen Paris. Kita melihat mereka menjalankan isi kitab undang-undang parlemen Eropa di dalam *Majelis Syura*. Mereka menganggap perlu menciptakan hukum-hukum baru. Padahal kaum Muslimin sesungguhnya telah memiliki Hukum Ilahi yang kekal dan suci[50)]. Dalam salah satu telegramnya dari Najaf, Sayyed Kazim Yazdi menuntut agar Majelis memerintahkan kebaikan dan melarang kemungkaran. Ia berkata bahwa Majelis tidak didirikan sebagai parlemen dan harus mematuhi ketentuan-ketentuan *ulama* Abd al-Azim[51)]. Nuri juga mereproduksi sebuah telegram dari tokoh konstitusionalis *maraji'* Najaf yang menuntut dicantumkannya suatu klausul mengenai bid'ah dan pelaksanaan perintah Ilahi dalam (lampiran) Undang-undang Dasar[52)]. Dalam usaha untuk menciptakan suatu konsepsi mengenai sistem pemerintahan yang ia dambakan, Nuri mengajukan usul agar kualifikasi *mashru'a* dikaitkan dengan istilah *mashruta*. Gagasan mengenai *mashruta-ye mashru'a* dengan demikian telah diperluas[53)].

Propaganda Nuri ini menyebabkan timbulnya kegempar-

an. Ia mengartikulasikan ideologi bagi para pendukung pemerintahan parlementer yang kepentingan-kepentingannya terancam oleh rencana reformasi dalam bidang yudisial dan finansial. Propaganda Nuri juga telah menyebabkan sebagian besar ulama yang menarik diri dari kehidupan politik menolak parlementarianisme yang kini muncul sebagai ancaman terhadap tradisi Islam. Dampak *ruznameh* Nuri segera kelihatan. Para juru dakwah, pengusaha toko[54] dan beberapa wakil Majelis terpengaruh olehnya[54]. Tapi lebih dari semua itu Nuri telah memberi bentuk definitif bagi orientasi *clerical-estate* terhadap parlementarianisme. Sebagian kecil mujtahid terkemuka yang meyakini kebaikan demokrasi parlementer[56], mendukung alasan konstitusionalis dengan pantang mundur. Yang lain mendukung mereka jika pandangannya dianggap sesuai. Tapi dalam semua kasus ini para ulama amat menaruh perhatian pada segi-segi yang secara mutlak bersifat kondisional. Mereka menuntut adanya pengawasan atas kekuasaan veto dari otoritas agama, atas dibatasinya kebebasan pers dan atas diingkarinya beberapa usaha reformasi yang berkaitan dengan sistem peradilan dan pendidikan.

Salah satu konsekuensi terpenting dari propaganda Nuri adalah mobilisasi *ulama* apolitik untuk melawan parlementarianisme. Ini membuktikan keberhasilan Nuri yang gemilang di Najaf, suatu fakta penting yang diabaikan dalam sejarah Revolusi Konstitusional[57]. Penyair Olfat, anak Aqa dari Isfahan yang pada saat itu menjadi mahasiswa di Najaf mengatakan bahwa berita-berita mengenai kejadian yang berlangsung dari 1905 sampai 1906 mencairkan kebekuan suasana di madrasah-madrasah *atabat*. Jurnal-jurnal dan literatur-literatur politik mengalir dari India, Mesir, Libanon dan Iran. Para tullah semakin jauh terlibat dalam urusan politik. Bahkan kaum cendekiawan yang semula menarik diri dari kehidupan politik, menyebut diri mereka sebagai tentara Tuhan (Jund Allah) bergabung dengan para konstitusionalis. Di kalangan *marja'i taqlid* pun terjadi perubahan

konstelasi. Wafatnya Sharabiyani dan Mamaqani telah memperkuat otoritas keagamaan bagi rival-rivalnya yaitu Hajj Mirza Hosayn, anak Hajj Mirza Khalil yang sebagian besar pengikut-pengikutnya adalah orang Teheran.(Teheranis), Akhund Mollah Mohammad Kazem Khorasani dengan reputasinya yang tinggi dalam bidang ilmu hukum dan Sayyed Kazem Yazdi yang Resala-ye Amaliyya, al Uwrat al-Wuthaqanya menjadi model risalah yang ditulis pada abad XX berikutnya. Di samping itu juga terdapat Mirza Mohammad Taqi, Hajj Sayyed Esma'il Sadr Esfahani, Hajj Mirza Fathollah Shari'at Esfahani dan Molla Abdollah Mazandarani.

Akhund Khorasani dan Hajj Hosayn, didukung oleh Mazandarani yang kurang terkenal menanggapi semangat umum dan memperoleh keuntungan atas jalur telegraf yang independen dari East India Company dengan menjadikan Najaf sebagai pusat terpenting untuk pengiriman perintah-perintah pro-konstitusi. Sementara itu pemegang otoritas keagamaan yang lain tetap memilih sikap netral dan menolak untuk ikut campur dalam politik. Pada saat putra Nuri berada di Najaf untuk mencari dukungan, Yazdi mendapat tekanan terus-menerus dari murid-muridnya untuk terjun ke dunia politik demi kepentingan kaum konstitusionalis. Dia tetap menolak untuk melakukan hal itu dan desakan para *tullah* pun berubah menjadi intimidasi dan ancaman pembunuhan. Pada saat itu Yazdi menanggapi tuntutan Shaykh Fazlollah dan mengutus anaknya ke pesantren Abd al-Azim untuk menentang konstitusionalisme. Yazdi didukung pengikut-pengikutnya yang berasal dari orang Arab, gubernur propinsi Ottoman dan "Tentara Tuhan". Pertarungan antara pendukung-pendukungnya dengan pengikut Khorasani dan Hajj Mirza Hosayn berakhir dengan kemenangan penuh di pihak Yazdi. Yazdi muncul sebagai pemimpin *atabat* yang tak diragukan lagi. Kelompok agama membelot dari kelompok Konstitusionalis. Pendukung-pendukung otokrasi dari kalangan Arab lokal dan kaum

awam Iran memaksa Sayyid Mohammad Kazem Yazdi keluar dari netralitas dan memintanya sebagai pemegang panji-panji otokrasi[58]. Menurut Kasravi, ribuan orang Iran dan Arab akan berdoa di belakang Yazdi setiap hari, sementara itu tak lebih dari tiga puluhan orang yang bisa ditemui mengikuti Akhund Khorasani dalam sembahyang jamaahnya setiap hari[59].

Keberhasilan Nuri dalam mengorganisasi aksi politik yang terpusat dengan Shah bersama fraksi dan kelompok-kelompok anti-Majelis lainnya pada tahun 1907 dan permulaan 1908 nampak kurang begitu mengesan dibanding dengan prestasinya dalam merumuskan ideologi tradisionalisme Islam. Terbunuhnya agen Nuri, Amin al-Soltan pada saat Nuri masih berada di pesantren Abd al-Azim merupakan kegagalan yang serius[60], terutama karena ia merencanakan untuk tetap berhubungan dengan raja yang bimbang dan keras kepala secara langsung. Shah dan kaum bangsawan membuat perjanjian damai dengan kaum konstitusionalis segera setelah terbunuhnya Amin al-Soltan dan tidak mengikutsertakan kelompok ulama. Tetapi bagaimanapun juga perjanjian itu sendiri tidak berumur lama. Menjelang akhir 1907, Mohammad Ali Shah, setelah mendapat kecaman pedas dari pers konstitusionalis, mulai mengharapkan lagi dukungan aktif kelompok ulama. Sementara itu sejumlah besar *ulama* terkemuka telah berjanji mendukung Nuri. Sayyed Mohammad Yazdi dan Sayyed Akbar Shah juga mendukung slogan: *'mashruta, emikhahim, ma din-e nabi khahim'*. Sayyed Ali Aqa Yazdi dan seorang mujtahid kaya, Mirzani Abu Talib Zanjani bergabung bersama Nuri. Mereka menjadi penghubung dengan pihak peradilan dan kaum bangsawan absolutis[61]. Boleh juga dicatat, antara 1907 sampai 1908 dalam kelompok *ulama* anti parlementer tidak saja muncul sikap reaksioner yang kokoh seperti pada Molla Ali Akbar Borujerdi yang bahkan menentang tuntutan diadakannya *adalat khaneh,* tetapi Mirza Aqa Esfahani yang pernah mengalami penghinaan dan pengucilan yang

kasusnya justru membangkitkan gelombang protes di tahun 1905–1906[62].

Dengan merenungkan berbaurnya kaum bajingan pemabuk (arak dibbing ruffians) Teheran dalam perjuangan *mujtahid* terkemuka selama terjadinya demonstrasi terkenal *Tup-Khaneh* pada bulan Desember 1908, orang tidak akan mendapat kesan mengenai adanya perencanaan dan pengorganisasian yang baik dalam politik mereka. Dalam suatu peristiwa terlihat jelas bahwa Mohammad Ali Shah telah mengubah pikirannya mengenai *coup d'etat* yang direncanakan beberapa menit sebelum dilakukan tanpa konsultasi lebih dulu dengan sekutu-sekutu ulamanya dan tanpa memperdulikan sedikit pun juga harga diri mereka[63]. Andil Nuri dalam peristiwa itu dan kerjasamanya dengan orang-orang sewaan Shah membuat hubungannya dengan takfir Khorasani dan kolega-koleganya retak. Hal ini menyebabkan nama Nuri tercemar untuk sementara.

Ulama-ulama anti konstitusionalis telah menunggu selama enam bulan lebih sampai Shah memutuskan untuk menentang Majelis. Pada saat itu, Mir Hashem, Mujtahid Mirza Hasan beserta rombongannya berangkat menuju Tabriz untuk mempengaruhi seluruh organisasi ulama dan kalangan absolutis. Kemudian mendirikan *Anjoman-e Eslamiyya* yang mendeklarasikan manifesto-manifesto tentang kewajiban *jihad* di bawah tanah melawan kaum bid'ah yang berusaha menghancurkan Islam atas nama Konstitusionalisme[64]. Sementara itu Aqa Abu'l-Qasem Tabataba'i, anak seorang *mujtahid* konstitusionalis mendirikan Anjoman-e Al-e Mohammad yang berslogan *Al-e Mohammad mashruta memikhadad.* Nuri berjanji mendukung[65]. Mohammad Ali Shah meminta agar Mirza Abu Talin Zanjani, dengan melalui *istikharah*, memilih apakah bersedia melawan Majelis atau tidak. Dengan bijaksana Zanjani menjawab: "Tindakan harus diambil untuk mengatasi masalah ini. Kemenangan adalah sesuatu yang pasti, meskipun harus melalui kesulitan-kesulitan[66]. Serangan terhadap Majelis dilaku-

kan pada 23 Juni 1908.

Catatan-catatan kejadian dalam *Tarikh-e Bidari* nya Nazem al-Eslam Kermani terhenti pada bulan April 1907 dan dilanjutkan lagi pada bulan Juni 1908, sebelum terjadinya penyerangan terhadap Majelis. Nazem al-Eslam Kermani adalah seorang ulama agama yang sangat saleh[67], juga seorang konstitusionalis yang yakin. Perubahan gaya dalam dua bagian buku itu mencolok sekali. Kalau kita membaca bagian terakhir buku kita merasakan lenyapnya entusiasme Nazem al-Eslam kepada konstitusionalisme. Terasa kalau penulisnya pasrah, skeptis, mendongkol karena melihat terjadinya ekses-ekses libertarian kaum intelektual sekuler. Terasa juga ada bekas kekhawatiran dan kebencian yang mendalam terhadap anarkhi dalam tulisan itu. Adanya pertentangan pertentangan yang menyakitkan hati di dalam mashurta-ye mashry'a dan kacau-balaunya keadaan dapat dibaca dalam laporan-laporan pembicaraan di lingkungan *ulama* setelah ada restorasi otokrasi.

"Setiap orang membicarakan bobroknya *mashrutiyyat*", tulis Nazem al-Eslam berkali-kali dalam hari-hari terakhir bulan Juni 1908[68]. Pada permulaan Juli 1908, dengan tekanan *Imam Jum'ah* dari Teheran dan Khoy menutup Majelis untuk melindungi Islam dan akan membuka kembali pada waktu yang akan ditentukan kemudian. Nazem al-Eslami langsung mengkritik dengan mengatakan bahwa tindakan penutupan Majelis itu tidak bijaksana dan seharusnya Shah tidak melakukan hal itu[69]. Sampai bulan November 1908 Kermani masih berusaha mendampingi Shah. Dengan pasrah ia berkata, sulit sekali menemukan seribu konstitusionalis di Teheran, sebuah kota dengan penduduk berjumlah tiga ratus ribu penduduk[70].

Pada tanggal 11 Juli 1908 Shah mengirimkan keretanya untuk menjemput Shaykh Fazlollah ke istana raja. Setelah diterima dengan baik oleh raja Nuri pun menyatakan keinginannya akan adanya sebuah mashruta-ye mashru'a dan sebuah majelis dan bukannya kekacau-balauan (chaos) se-

perti yang tengah melanda negerinya[71]. Pada hari berikutnya dengan penuh kemenangan Nuri mengeluarkan perintah untuk menahan semua jurnalis[72]. Pada pertengahan Agustusnya dia mengeluarkan perintah yang sama untuk menahan semua konstitusionalis *maraji'* Najaf[73].

November 1908, tibalah saat bagi Nuri untuk merumuskan penjabaran institusional yang cocok bagi pemerintahan *mashru'a* nya. Seminggu setelah diadakan rapat Majelis (9 Syawal 1326), Mohammad Ali Shah mengingkari janjinya atas dasar pernyataan Nuri bahwa konstitusionalisme bertentangan dengan Islam dan pemilihan majelis hanya akan mengakibatkan "rusaknya agama dan diabaikannya norma-norma Islam"[74]. Mulai akhir November sampai awal Desember 1908 Nuri yang didukung oleh *Imam Jum'ah* Teheran dan Sayyed Rayhanollah mengirim telegram ke propinsi-propinsi yang isinya ajakan mendirikan suatu majelis alternatif; *Majles-e Dar al-Shura-ye Kobra*. Setengah anggota majelis ini adalah orang-orang yang terpilih[75].

Keunggulan Nuri menyebabkan beberapa *mujtahid* eselon puncak dari hierokrasi Syi'ah yang amorphous (acak-acakan) gelisah. Sementara itu kegiatan kaum konstitusionalis di Istambul dan Najaf yang didorong Revolusi Kaum Muda Turki (Young Turks' Revolution) sedang mengalami kesulitan baru. Pada bulan Desember 1908 Sadr al-Ulama dan Afjeh-i yang menanggapi isarat baru dari Istambul dan Najaf mencari perlindungan di kedutaan besar Utsman. Sayyed Ali Aqa Yazdi sangat marah karena Shah tidak membayar hutang-hutangnya sebagai ganti rugi atas jasa-jasanya dalam peristiwa Tup-khaneh untuk mencarikan perlindungan di pesantren Abd al Azim[76]

Dengan cepat Nuri bereaksi membendung arus perlawanan terhadap rezim *mashru'a* nya dan bersumpah akan mencegah diadakannya restorasi (pemulihan kembali) *mashrutiyyat* selama dia masih hidup. Secara bersungguh-sungguh ia melakukan upaya itu dan berhasil. Ia bisa menunjukkan terjadinya berbagai manipulasi di kalangan *clerical esta-*

te. Dengan reaksi Nuri ini, "Situasi berubah secara drastis", tulis Nazem al-Eslam.[77] Tetapi hal itu tidak berlangsung lama. Masih ada faktor lain yang berada di luar kontrol Nuri.

Dalam bulan Januari 1909 Nuri luka parah akibat usaha pembunuhan. Berita-berita mengenai kekacauan di Rasht dan Mashhad, juga mengenai jatuhnya Isfahan ke tangan kaum pro-konstitusionalis Najaf mengeluarkan larangan untuk membayar pajak apa pun kepada negara.[78]

Menjelang akhir Januari, Aqa Abu'l Qasem gagal mengajak Sadr al Ulama mengakhiri *bast* di kedutaan besar Utsmani. Meskipun dia ditawari jumlah imbalan yang lebih besar dari yang ia tuntut. Bagi dia memutuskan tindakan seperti itu merupakan langkah gegabah.

Pada akhir Februari dan awal Maret 1909 terjadi perubahan yang paling menentukan. Akhir Februari Aqa Abu'l Qasem Tabataba'i mengatakan kepada Perdana Menteri bahwa rakyat menginginkan agar Konstitusi diperbaiki. Akan sangat terlambat kalau mencari cara mengatasi keadaan selain itu.[79] Pada bulan Maret 1909 Sayyed Rayhanollah co-signatory (peserta penanda-tangan) dari telegram-telegram Nuri pada bulan November 1908 melakukan *bast* di pesantren Abd al-Azim. Sesudah itu dia segera mengeluarkan *fatwa* agar menyetujui Majelis. Orang-orang Ashtiyani marah. Mereka berangkat ke pesantren. Konstitusionalis Shaykh Mahdi, salah seorang anak Nuri memperingatkan ayahnya sehingga Nuri terhindar dari pembunuhan yang dengan nekad akan dilakukan Mirza Mostafa Ashtiyani.

April 1909, *Imam Jum'ah* Teheran, seperti halnya Mohammad Ali Shah, memperingatkan pemilih-pemilihnya untuk menegaskan simpatinya terhadap *mashrutiyya*. Seorang farman yang mengucilkan Shaykh Fazlollah dari Teheran telah dipecat oleh Shah, tetapi kemudian pemecatan itu dibatalkan. Hanya orang-orang berkeyakinan teguh atau orang dungu di kalangan Mullah yang tetap mengutuk parlementarianisme.[80]

Mohammad Ali Shah pada bulan Mei 1909 menyerahkan sebuah "parlemen" (kurang lebih sama dengan Majelis-e Shura) kepada kaum konstitusionalis. Meskipun kaum konstitusionalis sangat mengharapkan tapi waktu penyerahan dianggap sangat terlambat.[81] Sehingga pada bulan Juli berikutnya Mohammad Ali Shah digulingkan. Sementara itu kaum ulama anti-parlementarian-kaum bijak yang melarikan diri tanpa luka - meninggalkan rumah mereka atau menyamar sehingga tidak dikenal atau berlindung pada rekannya yang berpaham konstitusionalis.[82] Mirza Mas'ud, Shaykh Ahmad Fumani dan Bahr al-Ulmum Rashti dibunuh oleh *Mojahedin*. Mir Hashem dari Tabriz dipenjara dan Molla Qorban Ali dari Zanjan meninggal dalam perjalanan menuju tempat pembuangannya. Shaykh Fazlollah Nuri sendiri yang selama masa penahanan dan pemeriksaan menunjukkan kewibawaannya yang besar akhirnya dihukum gantung pada 31 Juli 1909.[83]

Saya bukanlah seorang 'reaksioner', demikian juga Sayyed Abdollah (Behbehani) dan Sayyed Mohammad (Tabataba'i) bukanlah 'konstitusionalis'. Ini semata-mata terjadi karena mereka sangat ingin mencampakkan saya. Bagi saya tidak ada masalah, apa itu prinsip-prinsip 'reaksioner' maupun 'konstitusionalis'.[84]

Kata-kata terakhir Fazlollah Nuri ini mau tidak mau telah menambah gentingnya persaingan pribadi antara dia dengan dua ulama pendukung Majelis. Tetapi mereka dengan tepat di pandang lebih menekankan fakta bahwa berbedaan sikap dari tiga orang *mujtahid* terhadap konstitusionalisme betapapun juga hanya merupakan sekunder. Relatif kurang begitu penting jika dibandingkan dengan basis orientasi mereka yang sama-sama dimiliki sebagai Doktor-doktor Syiah. Dengan kata lain, orang akan tersesat jika beranggapan bahwa sikap menentang konstitusi selalu terwujud sebagai "defining feature" dalam perilaku *ulama*. Sikap yang berbeda-beda di kalangan ulama terhadap konstitusionalisme akan sangat tepat jika dilihat sebagai perbedaan

yang bersifat sebagai permukaan karena relatif berakar pada suatu wawasan yang sama. *Ulama* yang pro dan anti konstitusionalis pertama-tama adalah sebagai anggota *clerical estate* lebih daripada sebagai anggota kelompok konstitusionalis sekuler atau sebagai anggota kelompok bangsawan absolutis.

Tidak hanya selama konfrontasi dengan negara Qajar pada tahun 1905 - 1906, tetapi juga selama periode polarisasi ke dalam blok pro dan anti konstitusionalis pada tahun 1907 -1908 *ulama* mampu bertindak sebagai kelompok yang bersatu ketika tindakan demikian dibutuhkan untuk kepentingan mereka yang sama sebagai suatu *estate.*[85] Tidak hanya Nuri, tetapi juga Behbehani dan Tabataba'i yang marah besar karena diusirnya seorang anti-konstitusionalis Mirza Hasan, mujtahid dari Tabriz. Mereka mengusahakan dengan sungguh-sungguh agar pengusiran tersebut dibatalkan[86]. Bahkan Khorasani dan rekan-rekannya dari Najaf menyatakan dukungannya untuk Mirza Hasan.[87] Pada bulan Mei 1908 Behbehani bertindak sebagai penjamin keamanan Mirza Hasan untuk masuk kembali ke Tabriz.[88] Ulama konstitusionalis juga menggunakan pengaruh mereka untuk melindungi Sayyed Mohammad Yazdi sesudah dia dituduh bertanggung jawab atas penampungan kaum konstitusionalis dengan mengabaikan tanda Babi yang tertera di dalamnya.[89] Demikian juga ketika terjadi perpecahan besar-besaran antara dua kelompok selama restorasi otokrasi pada 1908 - 1909. Perubahan-perubahan yang seringkali terjadi tidak menjadi alasan, sebagaimana kita lihat, kenapa saudara laki-laki dan anak Tabataba'i berpihak pada kelompok anti-konstitusionalis. Begitu juga bagi Sayyed Ahmad Behbehani yang bersumpah untuk menjaga mashrutiyyat sepanjang masa hidupnya bersama Nuri.[90] Lebih penting lagi, telegram Tabataba'i yang berisi ucapan atas jatuhnya Mohammad Ali Shah dan atas dilakukannya restorasi konstitusi telah disampaikan kepada Sayyed Ali Aqa Yazdi dan Sayyed Rayhanollah. Dua orang pendukung gi-

gih Shaykh Fazlollah yang lambat laun berpihak ke sayap konstitusionalis.

Apa yang tidak bisa dimengerti dari term pemisahan ulama ke dalam kelompok 'konstitusionalis' dan 'reaksionaris' menjadi mudah dipahami jika kita melihat perilaku mereka atas dasar wawasan dan orientasi mereka yang sama sebagai anggota *clerical estate*. Inilah yang nampaknya paling tepat untuk menggolongkan aspek supra personal dari orientasi politik ulama sebagai *nasionalisme relijius*. Sikap mereka terhadap pemerintah parlementer ditentukan secara pragmatis, yaitu berdasar penilaian tentang pengaruh lembaga dalam memperkuat atau memperlemah Islam. Terjaganya dari tindakan korup dan kepentingan pribadi mendasari pertimbangan umum yang menentukan sikap ulama terhadap konstitusi dan semuanya secara potensial ada karena Islam. Mereka yang menganggap perlu untuk "melindungi benteng pertahanan Islam" terhadap serangan imperialisme Eropa telah mendukung konstitusi. Sebaliknya, sejumlah ulama terkemuka yang menganggap konstitusionalisme sebagai penyebab utama terjadinya anarkhi yang merupakan ancaman terhadap Islam dan komunitas Muslim, mereka berbalik menentang konstitusionalisme. (Dalam term-term anakhronistik ancaman semacam itu dirasakan sebagai imperialisme kultural dengan melalui proses pendangkalan Islam).

Bagi beberapa *mujtahid* anti-parlementarian, khususnya Sayyed Kazem Yazdi dan Molla Qorban Ali dari Zanjan yang memperkuat sikap apatisnya terhadap politik[91)], satu-satunya motif yang diperlukan untuk lahirnya oposisi adalah kepentingan ideal untuk memelihara kemurnian agama dan perlindungan terhadap Islam. Bagi para pemimpin dan mayoritas pendukung gerakan ini kepentingan ideal di atas telah dipadukan dengan kepentingan material yang kuat. Kepentingan material untuk memelihara hak-hak prerogatif mereka dalam peradilan. Dalam beberapa kasus, kepentingan ekonomi *ulama* sebagai tuan tanah juga memegang

peranan yang menentukan.

Dampak terbesar dari propaganda tradisionalis Nuri atas sikap ulama terhadap pemerintah parlementer hanya dapat dipahami dengan tepat jika kita melihat ulama sebagai suatu *estate*. Estate yang respon-responnya ditentukan oleh kepentingan ideal mereka untuk mempertahankan Islam dan kemurnian agama, serta oleh kepentingan material mereka untuk melindungi dan untuk memelihara wewenang hukum dan hak prerogratif mereka dalam dunia peradilan. Meskipun anti parlementarianisme yang tanpa kompromi dari Shaykh Fazlollah Nuri selama dilangsungkan restorasi otokrasi mengalami kegagalan dengan jatuhnya Mohammad Ali Shah tetapi berlakunya *mashruta-ye mashru'a*-nya telah diterima oleh sebagian besar ulama konstitusionalis. Sekalipun akhirnya mereka menolak terminologi yang dipakai Nuri. Tanggung jawab dari setiap majorpoint yang dikemukakan Nuri kemudian diambil alih oleh *ulama* konstitusionalis, dalam teori maupun praktek.

Risalah pro-konstitusionalis pertama dari seorang alim menurut pengetahuan saya adalah *Resala-ye Ma'na-ye Mashruta*. Risalah ini ditulis di bawah pengaruh propaganda Nuri pada bulan November dan Desember 1907. Isinya menekankan pada pembatasan legislasi parlementer untuk hanya mengurusi masalah duniawi, wewenang peradilan ulama yang tanpa cela, pembatasan yuridiksi dari *Adliyya* kepada *Orfiyyat* dan menetapkan perlunya pengawasan ulama atas pers demi kemurnian agama[92]. Risalah-risalah konstitusionalis berikutnya yang ditulis para cendekiawan agama juga bernada seperti itu[93].

Dalam praktek pun aksi-aksi politik ulama konstitusionalis juga dilandasi oleh prinsip-prinsip yang dirumuskan Nuri. Khorasani dan para konstitusionalis lainnya sangat mendukung "prinsip" Nuri yang telah disahkan sebagai Klausul 2 dari Lampiran Undang-undang Dasar. Khorasani juga mendukung tuntutan Nuri (yang tidak berhasil) untuk mencantumkan sebuah Klausul mengenai bid'ah[94]. Yang lebih

hebat lagi adalah perlawanan *ulama* konstitusionalis terhadap usaha reformasi peradilan.

Pada bulan September 1907 di bawah todongan senjata terpaksa Behbehani menerima klausul-klausul yang berkenaan dengan peradilan itu[95]. Ketika undang-undang mengenai Adliyya diajukan dalam sidang terakhir Majelis pertama Mei 1908, Haji Yahya Dawlatabadi dan Mokhber al-Saltana Hedayat yang mendukung reformasi peradilan didatangkan dari pengucilan oleh Behbehani dan Adr al-Ulama. Tujuan-tujuan dari prinsip Nuri mengenai persamaan hak antara kaum Muslim dengan minoritas agama lainnya juga bergaung keras di kalangan ulama anggota Majelis pertama.

Pada kenyataannya hal yang paradoks seperti ini muncul karena kesalahpahaman. Ada suatu lapisan dari kelompok oposisi tradisionalis yang menentang parlementarianisme dan menentang negara sekuler akhirnya menjadi beban Behbehani setelah wafatnya Nuri[97]. Ulama konstitusionalis merasa sangat kecewa kepada rezim parlementer yang sudah direstorasi itu. Penting juga disebut bahwa pada saat terbunuhnya di bulan Agustus 1910, Behbehani bermaksud untuk mulai melancarkan kampanye oposisi melawan pendukung kebudayaan barat yang anti agama dengan backing ulama konstitusionalis Najaf[98].

Situasi ini bertambah ruwet dengan adanya invasi Rusia ke Iran dalam tahun 1911. Mengakibatkan peran kaum ulama kelak muncul hanya sebagai bayang-bayang dalam suatu platform persatuan nasional "untuk melindungi benteng pertahanan Islam" dengan gabungan kekuatan semu antara ulama anti-konstitusionalis Yazdi, ulama netral Shirazi dan Akhund-e Khorasani[99]. Meskipun begitu, ketika ulama Najaf menyatakan maksud mereka untuk terjun kembali ke arena politik dukungan mereka bagi konstitusioanlisme tidak dinyatakan atau disembunyikan. Sebaliknya meskipun mereka tidak suka menggunakan terminologi Nuri tetapi salah satu sasaran Akhund beserta pengikut-pengikutnya

mengusahakan sejauh mungkin agar *mashruta-e mashru'a* menjadi kenyataan dengan mengubah pemerintah parlementer. Usaha ini gagal. Khorasani meninggal secara mendadak pada malam menjelang keberangkatannya ke Teheran[100].

Demikianlah semuanya terjadi, seperti kata Olfat: "Masa intervensi fundamental dari para *mujtahid* atabat di negeri Iran dimulai dengan peristiwa tembakau dan berakhir pada kematian Akhund."

Sejak 1911 sampai masa-masa selanjutnya munculnya kekecewaan ulama terhadap parlementarianisme bukannya menyebabkan timbulnya aksi politik, tetapi justru membuat ulama terasing dari politik. Mereka memang mengambil sikap menjauhi arena politik.

Catatan Kaki:

1. M. Ravandi, *Tarikh-e Ejtema'i-ye Iran,* Tehran, Amir Kabir, 1977, III, hal 528–529.
2. A. Kasravi, *Tarikh-e Mashruta-ye Iran,* 2 Vol., Tehran, Amir Kabir, 1967 & 1976, I, hal 288–291; 358–362.
3. Ibid, hal 248, 262–263.
4. A.K.S. Lambton, *The Persian Ulama and Constitutional Reform,* dalam *Le Shi'isme Imamite,* Calloque de Strasbourgh, Paris, Presses Universitaires de France, 1970, hal. 245–269.
5. S.A. Arjoman, *The Shi'ite Hierocracy and the State in Pre–Modern Iran: 1785–1890,* Eurpoean Journal of Sociology, XXII, No. 1, 1981.
6. Dalam kenyataannya, penguasa-penguasa Qajar telah mewarisi tradisi 'caesaropapist' atas sejumlah pengangkatan klerik (ulama) yang hampir semuanya merupakan *emam jum'as* (imam jum'at).
7. Situasi ini bisa dibandingkan dengan keadaan masyarakat Kristen pada zaman pertengahan, di mana "dari dua kekuasaan antara Gereja dan Negara, apabila diperlukan, masing-masing bisa dan harus merebut kekuasaan atas rakyat secara menyeluruh, fungsi-fungsi mana dalam dirinya sendiri, bukanlah fungsi-fungsi yang semestinya". Lihat O. Gierke, *Political Theories of the Middle Ages,* Boston, Beacon Press, 1958, hal 18.
8. Y. Dawlatabadi, *Tarikh-e Mo 'aser ya Hayat-e Yahya,* Tehran, Ibn

Sina, n.d., I, hal 50–51.

9. M.Q. Hedayat, *Khaterat va Khatarat,* Tehran, Zavvar, 1965, hal 164–167.
10. Dawlatabadi, I, hal 52–54. Untuk studi mengenai pengaruh kaum ningrat terhadap perkembangan *ta'zia,* lihat J. Calmard, *le Mecenat de representations de ta'ziye,* dalam Le Monde iranien et l'Islam VI, No. 2, 1974, hal 72–127.
11. Dawlatabadi, op cit, hal 134.
12. Ibid, hal 131–135.
13. A. Amin al-Dawla. Khaterat-e Siyasi (H. Farman-farma'iyan, ed.), Tehran, Ketabha-ye Iran, 1977, hal 164–168.
14. Untuk informasi mengenai ini dan juga mengenai sebagian besar dari apa yang disebut selanjutnya tentang *ulama* Najaf, saya menyandarkan diri pada memoir Mohammad Bagir Olfat yang tidak diterbitkan (ditulis tahun 1940-an) Saya berhutang budi kepada Mr. Badr al-Din Ketabi, editor *divannya* Olfat, dan sekretarisnya yang telah menyalin bagian-bagian yang relevan untuk saya melalui tulisan tangannya sendiri.
15. Amin al-Dawla, op cit, hal 231–239.
16. M. Mazem el-Eslam Kermani, *Tarikh-e Bidari-ye Iraniyan,* Volume Pendahuluan dan bagian I & II, dalam A.A. Sa'idi Sirjani (ed.). *Bonyad-e Farhange-e Iran,* Tehran, 1970, I, hal. 94.
17. Ibid, hal 151.
18. Ibid, hal 225.
19. Ibid, hal 142 ff, 353–357.
20. Ibid, hal 133.
21. Ibid, hal 210–213.
22. Ibid, hal 236–237.
23. Ibid, hal 299–300; 310. Aqa Najafi setelah itu nampaknya tidak memiliki alasan lagi untuk melawan Majelis karena wakil-wakilnya dari Isfahan telah dipilih melalui *estekhara*nya. Lihat A.H. Hava'i, *Qanun-e Asasi-ye Iran va Motamman-e An Chegunen tadvin shod,* Yadegar IV, No. 5, 1948, hal 39.
24. Lihat misalnya MA. Farid al-Mulk Hamadani, *Khaterat-e Farid,* Tehran, Zavvar 1975, hal 244–245; juga Kermani, op cit.
25. Kermani, op cit, hal 336.
26. Ibid, hal 405.
26. Ibid, hal 405.
27. Ibid, hal 321–327.
28. Ibid, II, hal 66–67.
29. Dawlatabadi, 2, hal 108–109.
30. Kermani, op cit, II, hal 85.
31. Kasravi, op cit, I, hal 224–226.

32. Ibid, hal 87–290.
33. Ibid, hal 218–285.
34. H.L. Rabino, *Mashruta-ye Gilan az Yaddashha-ye Rabino*, dalam M.Rawshn (ed.), Rasht, 'ata'i, 1973, hal 12–13; 103–104.
35. M.B. Vayjaviyeh, *Tarikh-e Enqelab-e Azarbaijan va Balvaye Tabriz*, dalam A. Ketabi (ed.), Tehran, Simorgh, 1976, hal 14.
36. Kasravi, op cit, hal 370–375.
37. Ibid, hal 364; 375–376.
38. Sebagian besar dari surat-surat itu dikutip dalam Kasravi, op cit, hal 415–423; 429–438. Rezvani baru-baru ini juga memproduksi sebuah koleksi yang lebih lengkap disertai dengan sebuah pengantar. Lihat M.E. Rezvani, *Ruznameh-ye Shaykh Fazlollah Nuri*, Tarikh I, No. 2, 1977, hal 159–209.
39. Rezvani, op cit, hal 168.
40. Ibid, hal 168–169.
41. Ibid, hal 172–173.
42. Ibid, hal 185.
43. Ibid, hal 171.
44. Ibid, hal 170.
45. Ibid, hal 199–200.
46. Ibid, hal 169–170.
47. Ibid, hal 186–189; 196–197
48. Ibid, hal 200.
49. Ibid, hal 205.
50. Ibid, hal 171.
51. Ibid, hal 192–194.
52. Ibid, hal 175–178.
53. Ibid, hal 200.
54. Ibid, hal 164; Dawlatabadi, op cit, II, hal 131.
55. kasravi, op cit, hal 569.
56. Mereka ini meliputi Sayyed Mohammad Tabataba'i, hakim agung Shiah Akhund-e Khorasani, dan Marja'-e taqlid komunitas. Tehran Hajj Mirza Hosayn, putra Hajj Mirza Khalil. Yang terakhir ini menurut sekretarisnya, menerima berita tentang diakuinya Konstitusi dan dijalankannya Undang-undang Dasar dengan air mata gembira (tearful Joy); dikatakan bahwa dia tidak percaya hal seperti itu terjadi sebelum kembalinya Imam Ghaib. (Wawancara pribadi Ayatollah Agung Shehab al-Din Mar-ashi Najafi pada tahun 1977).
57. Keddie tidak melihat (does not take not og) oposisi ulama terhadap konstitusionalisme di Najaf. Lihat N.R. Keddie, *The Origins of the Religious Radical Alliance in Iran,* Past & Present, No. 34, 1966, hal 79. Sementara itu Hairi mencetak fakta ini — suatu fakta yang sama sekali tidak sejalan dengan view pointnya — tanpa menunjukkan implikasi-implikasinya. Lihat A.H. Hairi, *Shi'ism and Constitutionalism in Iran* Leiden 'Brill, 1977, hal 114 ff, terutama hal 124.
58. Olfat, loc cit.

59. Kasravi, op cit, hal 382.
60. Dawlatabadi, op cit, hal 146.
61. Kasravi, op cit, hal 505 ff.
62. E.G. Browne, *The Persian Revolution of 1905–1909*, London, Frank Cass, 1966, hal 116–117; lihat juga Kermani, op cit.
63. Hedayat, op cit, hal 163; Kasravi, op cit, hal 562.
64. Vijuyeh, op cit, hal 20–23.
65. Dawlatabadi, op cit, hal 260–261.
66. A. Tavakkoli, *Chand Estekhara az Mohammad Ali Shah ba Javabha-ye Anha*, Yadegar, V, No. 8 & 9, 1949, hal 57.
67. Lihat spekulasi-spekulasinya mengenai kembalinya Imam Ghaib dalam bukunya *Ala'em al Zuhur*, Tehran, 1911. Nazem al-Eslam bermusuhan dengan Nuri san salah seorang sahabat Tabataba'i. Selama restorasi otokrasi, dia melanjutkan hubungannya dengan seorang anti-parlementarian Abu'l–Qasem Tabataba'i.
68. Kermani, op cit, hal 161–164.
69. Ibid, hal 166.
70. Ibid, hal 236–238.
71. Ibid, hal 169.
72. Ibid, hal 170.
73. Ibid, hal 183. Nuri mengulangi *takfir*nya untuk Akhund pada bulan Januari 1909. Lihat Kermani, ibid, hal 274.
74. Ibid, hal 241–242.
75. E. Zahir al-Dawla, *Khaterat va Asnad-e Zahir al Dowla*, I, Asfhar (ed.), Tehran, Jibi, 1972, hal 401–407.
76. Ibid, hal 414–415; Kermani, op cit, hal 265–270.
77. Kermani, op cit, hal 266–267.
78. Ini ditentang oleh Sayyed Kazem Yazdi, – lihat Farid al Muluk, op cit, hal 311. Betapapun tidaklah sulit membayangkan: mana di antara ketentuan-ketentuan yang bertentangan mengenai pajak itu yang akan lebih bisa dicerna.
79. Kermani, op cit, hal 306.
80. Ibid, hal 326–391.
81. Ibid, hal 404.
82. Sebagai contoh, lihat E.G. Browne, op cit, hal 407–408.
83. Kasravi, op cit, II, hal 10; 25–26; lihat juga E. Fakhra 'i, *Gilan dar Jonbesh-e Mashrutiyyat*, Tehran, Jibi, 1973, hal 103–104.
84. E.G. Browne, op cit, hal 444.
85. Behbehani dan Tabataba'i membantu untuk mengembalikan martabat dan harga diri Nuri dan Abd al-Azim setelah terbunuhnya Amin al-Soltan. Lihat Kasravi, op cit, I, hal 456. Khorasani mencoba mencegah eksekusi atas diri Nuri sehingga sangat mengejutkan kaum ulama. Lihat Hairi, op cit, hal 114, n. 26.
86. Kasravi, op cit, hal 246; 196–299.
87. Rezvani, op cit, hal 177.

88. Kasravi, op cit, hal 557–558.
89. Dawlatabadi, op cit, hal 232.
90. Kermani, op cit, hal 266.
91. Kasravi, op cit, II, hal 81–83; 102–105.
92. A. 'Emad al-Ulama Khalkhali, *Resala-ye Ma'na-ye Mashruta*, Tehran, 1907, hal 34, 43, 51–54.
93. F. Adamiyyat, *Ideologie-ye Nahzat-e Mashrutiyyat-e Iran* Tehran, Payam, 1976, hal 259–267; lihat juga Hairi, loc cit.
94. Adamiyyat, ibid, hal 179–180.
95. Dawlatabadi, op cit, hal 150.
96. Ibid, hal 213–216; Hedayat, op cit, hal 164–167.
97. Zahir al-Dawla, op cit, hal 438.
98. Kasravi, op cit, hal 130; Hairi, op cit, hal 115.
99. Hairi, ibid, hal 122–123.
100. Ibid, hal 117. Menurut Ke:abi, Olfat pada berbagai kesempatan selalu mengulangi kata-kata Akhhund mengenai tujuan keberangkatannya ke Tehran: *miravam ...n l·hari rakeh bala-ye bam bordeham pa 'in biavaram.*
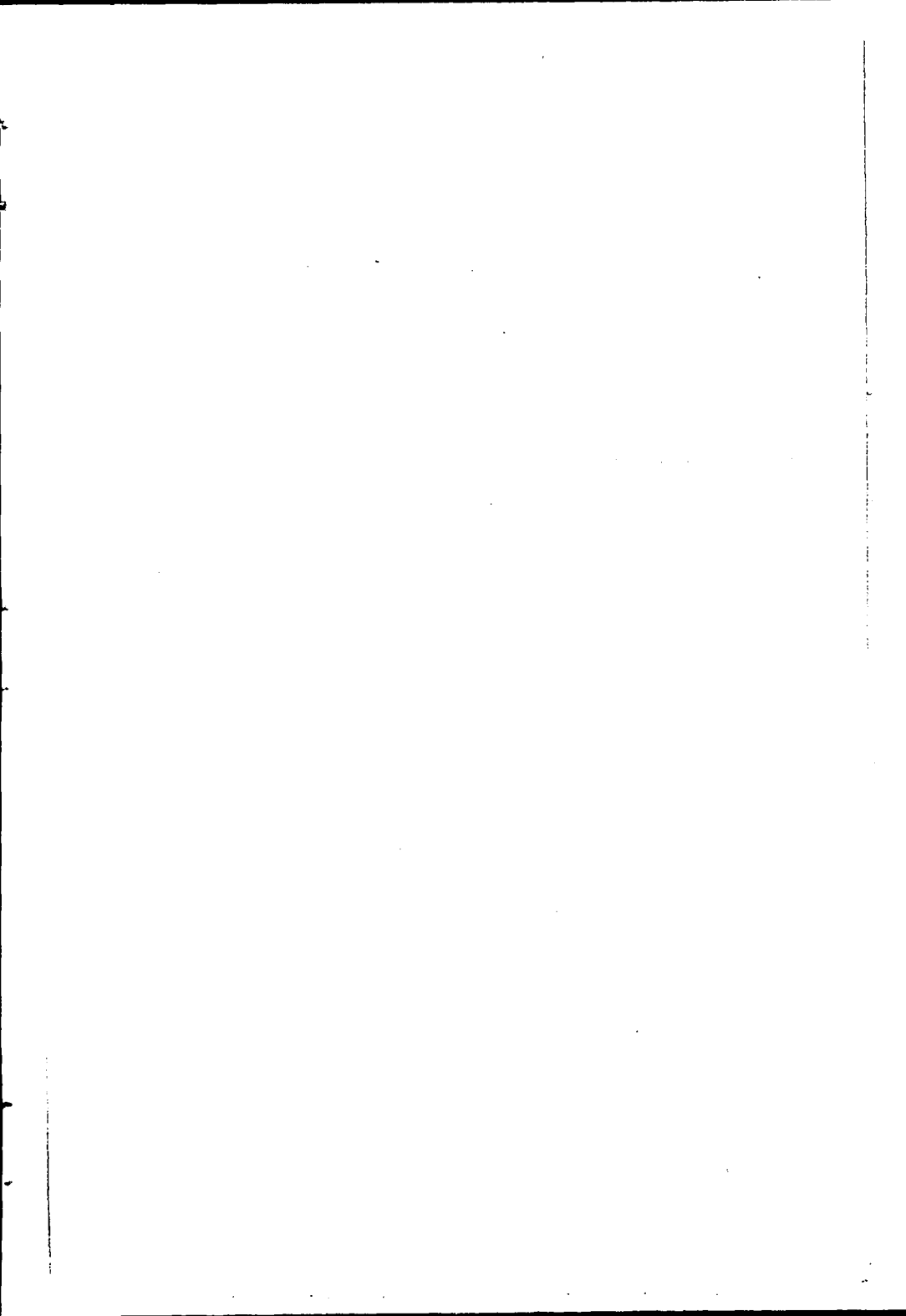
Bab 7.
Ulama Persia dan Kembalinya Konstitusi

Oleh • Ann K. S. Lambton

PADA umumnya orang sependapat bahwa ulama memainkan peranan utama dalam revolusi konstitusi Persia pada tahun 1905-6, dan sependapat kalau pada waktu itu terjadi persekutuan yang erat antara mereka dengan orang-orang yang pandangan politiknya mengarah ke negara-negara demokrasi Eropa Barat[2]. Hal ini pada mulanya mungkin tampak paradoksal. Namun dalam makalah ini bukanlah aspek revolusi ini yang akan saya bicarakan. Saya lebih cenderung memperlihatkan bagaimana ulama menjadi pemimpin pergerakan yang kemudian berkembang menentang pemerintahan yang dhalim. Sebelumnya perlu saya ketengahkan dua hal yang tidak dapat saya bahas secara panjang lebar di sini. Pertama, apa yang dikehendaki oleh sebagian besar pemimpin gerakan konstitusi adalah *reformasi*, bukan *revolusi* – dan hal ini sangat penting untuk memahami peran yang dimainkan oleh ulama. Kedua, gerakan konstitusi ini merupakan gerakan keagamaan sekaligus gerakan nasionalis.

Dengan semakin melemahnya kekhalifahan dan munculnya pemerintahan-pemerintahan semi-independen di propinsi-propinsi bagian timur kekhalifahan Abbasiyah, maka disusunlah hubungan baru antara khalifah dengan para penguasa propinsi berdasarkan atas saling ketergantung-

an antara kekaisaran dengan agama. Di satu pihak, raja diperlukan untuk menjaga Islam, dan di lain pihak keseimbangan duniawi terjaga oleh agama. Dengan adanya hubungan baru antara kekhalifahan dan kesultanan di bawah kekuasaan Saljuq yang Agung, maka kedudukan ulama kembali mendapat penghargaan. Yaitu sebagai "pewaris nabi", yang kemudian memainkan peranan kunci dalam situasi yang baru ini. Kekuasaan khalifah dilimpahkan kepada para *qadi* yang menjadi wakil-wakilnya; tetapi mereka juga menjadi pegawai pemerintah, "oleh karena mereka dipilih dan untuknya mereka bekerja"[1]. Mereka menerima gaji dari pemerintah, tetapi meskipun mereka tergabung dalam pemerintahan, mereka tidak menjadi pegawai pemerintah sepenuhnya. Dilihat dari sudut pandangan negara, tugas utama mereka kemungkinan besar melindungi lembaga keagamaan, khususnya bersikap hati-hati terhadap bid'ah dan pendapat-pendapat yang menyimpang dari kebiasaan.

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya agar kehidupan masyarakat sehari-hari dapat berjalan lancar, ulama, dan para qadi khususnya, seringkali dihadapkan pada suatu konflik dalam tugasnya antara peradilan Islam dan peradilan adat di satu pihak dengan kebijaksanaan politik di pihak lain. Hal ini terjadi sebagai akibat dari sifat dasar kekuasaan yang sewenang-wenang negara Persia pada abad pertengahan. Sebagian ulama ada yang menjauhkan diri dari segala bentuk partisipasi dalam kenegaraan dan segala macam hubungan dengan kelompok penguasa; yang lain berkompromi. Sebagian karena mereka berkeyakinan bahwa kehidupan masyarakat harus diatur walaupun terdapat kekurangan-kekurangan pada orang-orang yang duduk dalam pemerintahan, sementara yang lain tertarik oleh imbalan yang akan diterima melalui partisipasi dalam pemerintahan.

Beberapa anggota kelompok-kelompok relijius, termasuk di dalamnya para sufi, mendapatkan banyak pengikut dari segala lapisan dalam masyarakat. Dalam keadaan-keadaan sulit dan tertindas, orang-orang biasanya mencari perlindungan kepada mereka. Kesulitan dan penindasan

terus berlanjut pada masa pemerintahan Mongol Ilkhan. Tetapi keikutsertaan ulama dalam pemerintahan negara pada waktu itu masih agak kurang, paling tidak sebelum berpindahnya Ilkhan menjadi pemeluk Islam. Sebaliknya mereka memainkan peranan yang penting sebagai wakil rakyat setempat melawan orang-orang yang mencampuri urusan mereka dan seringkali diasosiasikan dengan gerakan-gerakan "massal". Di bawah kekuasaan Timurid, kaum agamawan dihormati oleh segala lapisan masyarakat. Ada usaha untuk menyatukan kembali pemerintahan duniawi dengan pemerintahan Syari'ah, namun pada kenyataannya keduanya lebih banyak berjalan sendiri-sendiri.

Selama periode kekuasaan Sunni, ulama bertindak sebagai pelindung tradisi dan melalui mereka agama diwariskan kepada generasi berikutnya. Persoalan yang terpenting bukanlah penerimaan aqidah dan keimanan, melainkan penerimaan *ijma'* dari ulama. Sementara gerakan-gerakan ekstrim di mana para pengikutnya dianggap mengancam stabilitas negara dipandang berada di luar Islam, (saat itu pemerintah dipandang berkewajiban untuk menumpasnya, kalau perlu dengan kekerasan) maka pada saat yang sama orang-orang yang berpikiran maju, orang-orang Syi'ah dan lain-lain memainkan peranan yang penting dalam membawa penafsiran-penafsiran baru serta ide-ide baru bagi suatu bentuk Islam. Beberapa di antara gagasan-gagasan itu pada akhirnya disetujui oleh ijma' ulama.

Lebih lanjut, dalam sebuah masyarakat yang tidak mengenal perbedaan antara "gereja" dengan negara dan di mana kelompok-kelompok relijius memonopoli sebagian besar pusat-pusat ilmu pengetahuan, maka wajar bilamana gerakan-gerakan intelektual muncul terutama melalui kelompok-kelompok relijius. Meskipun hal itu kerap kali pada mulanya muncul melalui orang-orang yang sangat ortodoks.

Dengan berkembangnya kekuasaan pemerintah Safavid dan pengambilan ajaran Syi'ah Itsna 'Asyari sebagai agama negara, situasi baru muncul: ajaran Syi'ah menggantikan ajaran Sunni sebagai ortodoksi baru. Hal ini

membawa para *mujtahid*, kepada mereka wakil-wakil Imam yang Gaib dilimpahkan, menghadapi persoalan baru. Karena seluruh pemerintahan Syi'ah, selama Imam yang Gaib tidak ada, sesungguhnya dirampas. Selama pemerintahan dipegang oleh kaum Sunni, persoalan legitimasi kekuasaan politik tidak pernah diberikan kepada para mujtahid. Di bawah kekuasaan Safavid, yang mengaku sebagai keturunan Imam Musa al-Kazim, mereka dipaksa untuk membuka mata terhadap persoalan ini. Dalam prakteknya lembaga keagamaan digabung ke dalam organisasi negara dan mendapatkan pengawasan yang lebih besar dibandingkan dengan sebelumnya, dan dari awal mula memang berada di bawah lembaga politik. Dengan mengizinkan perlunya raja mengangkat dan menggunakan pedang dalam pelaksanaan peradilan, maka kaum Syi'ah seperti halnya kaum Sunni sebelumnya, menyetujui adanya saling ketergantungan antara agama dengan kekaisaran.

Seperti juga dahulu kaum Sunni menjauhkan diri dari hubungan dengan negara, maka demikian juga ulama Syi'ah menjauhkan diri dari hubungan dengan apa yang mereka pandang sebagai pemerintahan yang dhalim. Sementara itu sebagian yang lain berkompromi dan meneruskan pekerjaan mereka, sebagian di antara mereka tentu saja menjadi kaya dan memperoleh tanah yang luas seperti yang pernah dilakukan oleh kaum Sunni. Pada saat yang sama, kelompok-kelompok relijius pada tingkatan tertentu terus memberikan perlindungan bagi kaum tertindas. Keadaan ini menyebabkan penguasa dan Gubernur tidak bisa dengan bebas melanggar pendapat mujtahid yang cukup kuat.

Pada awal mula kekuasaan Safavid semua energi yang tersedia dipergunakan untuk menjadikan ajaran Syi'ah sebagai ortodoksi baru. Akibatnya kecil kemungkinannya bagi adanya penyebaran ide-ide baru, di samping juga tidak adanya dana yang cukup tersedia. Akibat yang lain dari pengambilan ajaran Syi'ah oleh pemerintahan Safavid adalah pemisahan dunia Syi'ah dari dunia Sunni berdasarkan wilayah. Hal ini membuat ajaran Syi'ah dapat dengan mudah diasosiasikan dengan nasionalisme, atau lebih tepatnya

menjadi sarana pengungkapan rasa nasionalisme.

Di bawah kekuasaan dinasti Qajar, lebih lanjut terjadi perubahan-perubahan mengenai kedudukan ulama terhadap pemerintah. Dinasti Qajar tidak bisa mengklaim sebagai keturunan para imam Syi'ah seperti yang dilakukan dinasti Safavid. Tetapi mereka seperti seluruh atau sebagian besar penguasa duniawi dipandang sebagai bayangan Tuhan di bumi. Demi kesejahteraannya maka menjadi tugas rakyat untuk mendoakannya: kekaisaran sekali lagi menjadi pelengkap agama, bukannya sebagai bagian dari agama. Hal ini membawa akibat-akibat yang cukup penting. Sekali lagi terdapat sebuah lembaga keagamaan yang menentang negara dan tidak sepenuhnya tergabung dalam pemerintahan. Seperti pada masa sebelum pemerintahan Safavid kedudukan ulama merupakan sesuatu yang sulit. Negara meminta kerja samanya untuk menyelenggarakan berbagai macam fungsi kemasyarakatan.

Di kota-kota besar pemerintah menunjuk *Imam Jum'ah, Shaykh al-Islam*, para Qadi dan *pishnamaz* di masjid-masjid utama, dan memberi gaji kepada mereka. Meskipun hal ini mengurangi independensi mereka, namun kedudukan mereka bukanlah sebagai pegawai pemerintah. Sir John Malcolm dalam tulisannya pada masa pemerintahan Fath 'Ali Shah (1797 - 1834) mencatat bahwa meskipun *Shaykh al-Islam* itu dipilih oleh penguasa, namun keinginan dan harapan rakyat selalu diperhatikan. Ia juga menyatakan bahwa para pegawai ini "secara berhati-hati menghindari hubungan terbuka dengan orang-orang yang berkuasa. Bahkan adanya hubungan semacam itu saja akan menghilangkan rasa hormat dan kepercayaan rakyat yang berharap akan indepensi mereka serta integritas mereka".[4] Sedangkan dalam tulisan mengenai mujtahid, Malcolm menyatakan bahwa mereka "tidak menduduki jabatan, tidak memperoleh pengangkatan, tidak memiliki tugas-tugas tertentu, tetapi karena pengalaman, kesalehan dan kebajikan mereka, sebagai pemberi petunjuk dalam bidang agama atau pelindung menghadapi penguasa oleh orang-orang di seluruh negeri yang tidak banyak bersuara; mereka dihormati dan

mendapat tugas hingga mampu membawa raja yang angkuh berpihak pada suara massa, dan berpura-pura menghormati mereka"[5].

Dengan tidak adanya sarana yang efektif untuk mengekspresikan opini publik, maka ulama adalah satu-satunya kelompok yang dapat menjadi kendala pemerintah dan dapat secara terus terang berkata kepada Shah dan para penasihatnya tentang bahayanya kebijaksanaan tertentu. Pada umumnya pandangan-pandangan yang disampaikan mereka sangat diperhatikan. Hal ini bukan berarti bahwa mereka terorganisasi dan terjalin dengan baik untuk mengizinkan atau mengontrol tindakan pemerintah sehari-hari. Tetapi seringkali mereka mampu menjadi kendala dan sebagai pencipta kedamaian, dan usaha terakhir memberikan perlindungan kepada rakyat menentang ketidakadilan. Seperti pada waktu-waktu yang lalu, terjadi perpecahan antara ulama yang memandang pemerintah bertindak dhalim sehingga segala macam hubungan dengannya harus dihindari, dengan mereka yang berkompromi. Alasan bagi yang akhir ini adalah: Mereka percaya bahwa mereka dapat bekerja sama dengan cara memberikan pengaruh dan menimbulkan rasa hormat kepada hukum, baik itu oleh pemerintah maupun oleh rakyat. Atau mereka melihat partisipasi dalam pemerintahan merupakan jalan untuk mendapatkan kekayaan serta pengaruh[6].

Para pegawai pemerintah mempunyai hubungan dengan rakyat hanya dalam pengumpulan pajak dan retribusi tentara. Tidak ada rasa kebersamaan antara mereka dengan rakyat. Ulama, sebaliknya selalu berhubungan dengan rakyat. Persoalan-persoalan hukum perorangan diselesaikan oleh mereka, sertifikat hak milik ditulis oleh mereka, dan disahkan di hadapan mereka. Perselisihan kerapkali diselesaikan oleh mereka; persoalan-persoalan ekonomi yang memerlukan kesaksian diserahkan kepada mereka; pendidikan pun sebagian besar berada di tangan mereka. Upacara-upacara yang berhubungan dengan kelahiran, perkawinan dan kematian semuanya memerlukan bantuan ulama. Peristiwa-peristiwa semacam ini, bersama-sama dengan pe-

rayaan-perayaan keagamaan, *ta'ziehs, rawzehkhwanis* dan berkumpul pada bulan Ramadhan merupakan peristiwa penting yang mampu melepaskan orang-orang kebanyakan dari kebosanan. Dengan adanya peristiwa semacam ini kelompok-kelompok relijius dapat terjalin erat. Oleh karenanya, kepada merekalah, dan bukan kepada para pegawai pemerintah, orang-orang mencari pemenuhan aspirasinya dan terutama sekali untuk memperoleh perlindungan.

Namun demikian terdapat satu dilema: sebagian besar ulama tidak menerima gaji yang tetap, baik dari pemerintah maupun dari sumber lain. Mereka sebagian besar, (kecuali kalau mereka makan hasil dari *waqaf*) bergantung pada pemberian orang-orang beriman atau uang pensiun dari pemerintah. Keduanya dapat dihentikan sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Akibatnya mereka dipaksa mendukung pemerintah dan seringkali terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang tidak selaras dengan profesinya. Akan tetapi pada saat yang sama mereka juga menjadi kaki tangan kehendak rakyat, yang kadang-kadang tidak jelas dan bersifat reaksioner. Mereka tidak menikmati kebebasan yang nyata untuk mencapai sintesa baru atau interpretasi terhadap keyakinan yang diberikan kepadanya. Tetapi terdapat salah satu fakta yang memberikan kebebasan khusus dalam menghadapi pemerintah, yaitu bahwa pusat-pusat ajaran Syi'ah terbesar, Najaf dan Karbala, berada di luar Persia. Banyak ulama yang menuntut ilmu Najaf; dan dikota-kota suci di Iraq. Dari sana mereka mengeluarkan fatwa yang menyeru kepada orang-orang yang beriman agar menentang kebijaksanaan Pemerintahan Persia yang tidak selaras dengan kehendak rakyat. Selama pergerakan konstitusi, dukungan ulama Najaf dan Karbala merupakan sumber kekuatan yang sangat berarti bagi para konstitusionalis.

Dengan tidak adanya dokumen-dokumen keluarga yang terperinci tidaklah mudah untuk melacak asal mula dan evolusi kelompok yang berbeda-beda di Persia. Namun tampaknya cukup jelas bahwa terdapat kecenderungan yang kuat di kalangan ulama memberikan warisan dalam

pengalihan jabatan-jabatan keagamaan, terutama mereka yang terlibat dalam pengelolaan waqaf. Berbeda dengan ulama adalah para sayyid, yakni mereka yang punya garis hubungan keturunan dengan Nabi melalui menantunya, Ali. Oleh sebab garis hubungan itu maka mereka menduduki jabatan istimewa yang tidak ada hubungannya dengan keagamaan maupun pemerintahan. Mereka tidak seluruhnya bergabung dengan ulama dalam artian ikut menyelenggarakan upacara-upacara keagamaan. Sebagian di antaranya menggeluti pekerjaan-pekerjaan lain. Meskipun demikian mereka membentuk kelompok-kelompok yang penting di kalangan ulama. Kehormatan yang diberikan kepada para pemimpin relijius terkemuka, para mujtahid, ditandai dengan fakta terjadi ikatan perkawinan antara keluarga yang sedang berkuasa dengan mereka. Terdapat hubungan yang mirip antara birokrasi dengan penarikan ulama ke dalam tingkatan birokrasi. Hubungan ulama dengan kelompok tuan tanah, secara keseluruhan tidaklah kuat, meskipun terjadi hubungan melalui perkawinan atau terkait karena para pemimpin relijius yang mengelola waqaf demi kepentingan bersama. Tetapi sementara sebagian besar tuan tanah tertarik kepada tanah-tanah mereka karena pengaruh politik dan ekonomi yang akan diperolehnya, perhatian para pemimpin relijius terhadap tanah waqaf hanya demi kepentingan ekonomis.

Hubungan antara kelompok-kelompok relijius dengan kelompok-kelompok pedagang sangat erat dan menguntungkan kedua belah pihak. Pedagang membutuhkan jasa ulama untuk melaksanakan urusan sehari-harinya: dokumen-dokumen harus dibuat dan disahkan oleh ulama dan nasihat ulama sangat diperlukan karena pengaruhnya di pasar dan masyarakat pada umumnya. Perkataan para pemimpin agama dapat mendekatkan kepada pasar atau juga mengakibatkan pemboikotan terhadap barang perdagangan tertentu, seperti pemboikotan tembakau pada tahun 1891. Demikian juga sebaliknya kepada para pedagang itu kelompok relijius di kota-kota mencari pembayaran zakat dan pengumpulan dana untuk penyelenggaraan ibadah pa-

da bulan Ramadhan dan Muharram serta untuk merayakan hari-hari besar keagamaan.

Demikian juga terjadi hubungan yang erat antara serikat kerja dengan kelompok relijius. Masjid adalah tempat anggota perserikatan itu biasanya berkumpul; dan mereka seringkali ambil bagian dalam peristiwa-peristiwa keagamaan sebagai kelompok yang benar-benar ada. Hal ini menyebabkan mereka memiliki hubungan yang dekat dengan ulama. Baik itu pedagang maupun anggota serikat kerja mencari perlindungan kepada mereka; dan pada saat-saat yang kacau seringkali mereka mencari perlindungan di rumah seorang mujtahid. Fakta bahwa pendidikan sebagian besar berada di tangan kelompok relijius lebih memperkuat ikatan antara mereka dengan para pedagang dan para pekerja ahli yang mempercayakan hampir seluruh pendidikan anak-anaknya kepada kelompok relijius[7]. Juga terjadi mobilitas yang sangat besar antara ulama dan para pedagang dalam berbagai bidang, termasuk di dalamnya ikatan perkawinan.

Para petani juga menghormati kelompok-kelompok relijius. Sebagian mullah yang pergi berkeliling di pelosok negeri untuk mengumpulkan iuran adalah para dukun (charlatan). Namun mereka justru mampu memainkan peranan dalam kehidupan desa, dan membuka salah satu hubungan orang-orang pedesaan dengan dunia luar. Terakhir, terdapat kelompok-kelompok zulm. Ulama tidak banyak mempunyai hubungan dengan mereka; dan kemungkinan besar para darwis, bukan sekedar para mullah kebanyakan, yang perintahnya ditaati dan dipatuhi.

Posisinya jadi agak membingungkan. Ulama membentuk banyak sekali kelompok tetapi sama sekali bukan merupakan kelompok yang seragam. Di satu pihak, sebagian tokoh agama terkemuka melaksanakan pekerjaan sebagai pejabat pemerintah, menerima gaji serta pensiun dari pemerintah. Dengan demikian mereka berkompromi; sebagian yang lain, mepunyai kepentingan bersama dengan para tuan tanah. Di lain pihak, karena hubungan mereka dengan hukum agama dan pengetahuan agama, ulama dihormati hampir oleh seluruh lapisan masyarakat; dan mempunyai hu-

bungan yang dekat dengan para pedagang dan anggota serikat kerja. Terakhir, karena konsepsi yang sudah lazim mengenai pemerintahan adalah pemerintahan *syari'ah* yaitu suatu konsep pemerintahan yang adil dan jujur yang dijalankan ketika Imam yang Gaib tidak ada oleh seorang raja yang sabar sebagai bayangan Tuhan di bumi. Dia memerintah di bawah bimbingan para mujtahid, kepada siapa kekuasaan imam yang Gaib itu dilimpahkan dalam rangka menentang rezim tirani (dhulm).

Penyimpangan dari ortodoksi sekali lagi menjadi saluran bagi penyebaran ide-ide baru. Salah satunya adalah gerakan Babiyah yang didirikan oleh Sayyid Ali Muhammad dari Shiraz pada tahun 1884. Suatu gerakan messianik yang menghendaki pendirian kerajaan surga di bumi. Dasar-dasar intelektualnya lebih banyak cenderung kembali ke pemberontakan dan revolusi gerakan-gerakan Islam abad pertengahan daripada reformasi gerakan-gerakan liberal barat. Seperti halnya gerakan-gerakan revolusi sebelumnya. Hal ini disebabkan terutama oleh rasa ketidakadilan serta kekecewaan terhadap kegagalan-kegagalan pemerintah. Di samping juga ditimbulkan oleh ketamakan dan kefanatikan ulama, terutama mereka yang mempunyai hubungan dekat dengan pemerintah. Sementara itu para pemimpin gerakan Babiyah dan sebagian pengikutnya dikeluarkan dari kelompok-kelompok relijius. Para pengikut gerakan Babiyah memegang teguh maksud yang ingin dicapai pemimpin mereka dengan penuh fanatisme. Karena ancaman gerakan itu terhadap stabilitas politik, maka reaksi terhadap gerakan itu demikian keras.

Sayyid Ali Muhammad yang mengaku dirinya sebagai *mahdi,* ditahan pada tahun 1847. Tahun berikutnya kaum Bab menyatakan diri keluar dari Islam. Antara tahun 1848 dan 1850 terjadi kekacauan yang luar biasa di Mozandaran, Yazd, Fars, dan Zanjan sebagai akibat dari propaganda yang berlangsung atas nama revolusi baru. Kerusuhan ini ditindak dengan cara kekerasan. Amir Nizam, *sadr-i a'zam* Nazir al-Din menyuruh menjatuhkan hukuman bunuh terhadap diri Bab pada bulan Juli 1850 karena keyakinan bah-

wa eksekusi terhadap dirinya akan mematahkan pergerakan yang telah mendapatkan pengikut-pengikut baru terutama di kalangan mullah. Sebelumnya tujuh orang pengikut Bab telah dieksekusi di Teheran karena mengadakan persekongkolan mengancam kehidupan *sadr-i a'zam*. Beberapa tahun kemudian, setelah percobaan pembunuhan terhadap Nasir al-Din, gerakan itu ditumpas dengan penuh kekejian. Hal ini tampaknya berhasil mematahkan semangat para pengikutnya untuk turut ambil bagian dalam pemberontakan politik terbuka. Sejumlah kerusuhan yang lebih kecil, atau ancaman kerusuhan, oleh para penguasa dituduhkan berasal dari mereka, dan seringkali mereka dituduh oleh kelompok-kelompok relijius dan lain-lain sebagai penghasut. Oleh sebab itu maka mereka menghadapi banyak sekali hambatan. Tetapi hal ini jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan kebanyakan minoritas dan kelompok-kelompok yang tidak setuju dalam sebuah negara di mana ortodoksi atau agama yang benar dipandang sebagai jaminan stabilitas politik. Para individu kaum Bab, terutama yang tergabung dalam kelompok Azali, memainkan peranan yang sangat penting dalam pergerakan reformasi konstitusi, namun untuk mengatakan dengan terang-terangan aspirasi ini datangnya dari kaum Bab rasanya terlalu berlebihan[8]. Memang benar mereka banyak memberikan sumbangan terhadap kesadaran umum yang mulai terjadi pada bagian kedua abad kesembilan belas.

Saluran kedua yang menjadi sarana masuknya ide-ide atau penafsiran-penafsiran baru dibuat oleh kaum modernis Islam dan pan-Islamis, yang dari sudut pandangan ulama Persia mungkin mereka dapat dipandang tidak ortodoks. Tokoh yang paling penting di antara mereka adalah Jamal al-Din Afgani. Kelompok ini secara tidak langsung bersekutu dengan atau termasuk mereka yang mencari cita-cita politik di negara liberal barat. Dari sebab ini, maka untuk kemudian bangsa Persia menjadi semakin akrab dengan diplomasi, travel, pendidikan, dan perdagangan. Di samping itu beberapa kelompok relijius ortodoks mulai berhubungan dengan gerakan-gerakan Islam modern melalui tulisan-

tulisan kaum modernis Islam. Apa pun keyakinan agama pribadi Jamal al-Din – dan berbagai keraguan terhadap hal ini telah dilontarkan oleh berbagai sarjana – namun ia telah mengilhami fanatisme agama kepada para pengikutnya bangsa Persia. Kedua saluran ini memainkan peranan yang penting dalam memperkenalkan ide-ide serta penafsiran-penafsiran baru.

Ada berbagai macam alasan mengapa pada awal abad kedua puluh pengaruh tirani *dhulm* akhirnya dirasakan oleh rakyat yang umumnya semakin tak tertahankan lagi dan mengapa oposisi ulama terhadap pemerintah tiba-tiba menjadi pemberontakan terbuka dan luas. Sebab-sebabnya harus dicari pada peristiwa-peristiwa yang terjadi pada abad kesembilan belas, khususnya mulai kira-kira pertengahan abad itu.

Sementara Fath Ali Shah (1797 – 1834) berusaha sekuat tenaga untuk menunjukkan rasa hormatnya kepada ulama dan agar disenangi mereka, para penguasa berikutnya berusaha mengurangi kekuatan dan pengaruh mereka. Muhammad Shah (1834 – 1848) dan *sadr-i a'zam*-nya, Hajji Mirza Aqasi, secara keseluruhan lebih cenderung kepada kelompok relijius dan memberikan gaji serta pensiun kepada mereka, tetapi persekutuannya dengan berbagai gerakan penghasut mengakibatkan pemerintah melakukan pengawasan ketat terhadap mereka. Di beberapa kota, khususnya Isfahan – pusat kekuatan dan pergolakan – terdapat sebuah tradisi gerakan "massal" yang diasosiasikan dengan ulama. Pada musim dingin tahun 1839 – 1840 kekacauan terjadi lagi yang dilakukan oleh *luti* di bawah lindungan para *mullah*. Karena itu pada musim panas tahun 1840 Muhammad Shah bersama pasukannya menuju Isfahan menumpas kerusuhan itu dan untuk sementara waktu melumpuhkan kekuatan ulama. Pemimpin gerakan *luti*, Hajji Ghulam Husayn, dijatuhi hukuman mati atas perintah Shah; dan Hajji Sayyid Baqir, seorang mujtahid terkemuka, direndahkan dan anak laki-lakinya diasingkan ke Karbala tempat ia kemudian menyatakan bertobat. Demikian pula di Shiraz, pemberontakan yang mendapatkan bantuan

atau paling tidak perlindungan dari ulama, ditumpas dan mujtahid terkemuka Shiraz, Shaykh Abu Turab, ditahan dan dipaksa untuk menghadap Shah[10].

Dalam pemerintahan Muhammad Shah terjadi usaha-usaha untuk membatasi hak memberikan perlindungan. Hal ini sebenarnya merupakan serangan bagi hak istimewa ulama, karena perlindungan hanya dapat ditemukan di masjid-masjid, tempat-tempat suci, dan rumah-rumah ulama. Dalam prakteknya, meskipun tempat-tempat ini terutama dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang pemerintah, seringkali disalahgunakan oleh orang-orang yang hendak melarikan diri dari sidang pengadilan. Pada tahun 1843 Bahman Mirza, gubernur Azarbayjan, berusaha mencegah para penjahat dan orang-orang yang jatuh pailit mencari perlindungan di propinsi tersebut. Kemudian pada tanggal 24 Nopember tahun itu juga seorang *farman* menyatakan tempat-tempat perlindungan dihapus kecuali di masjid-masjid dan tempat-tempat suci yang telah menjadi tempat perlindungan sejak zaman dahulu, seperti tempat tinggal tokoh-tokoh agama dan istana raja[11]. Usaha membatasi tempat perlindungan ini terbukti mengalami kegagalan.

Pada tahun-tahun terakhir kekuasaan Muhammad Shah, pemerintahan mulai hancur dan ketika Nasir al-Din naik tahta pada tahun 1848 kas negara dalam keadaan kosong, sedangkan pemberontakan dan kerusuhan terjadi di mana-mana. *Sadr-i a'zam*-nya, Amir Nizam, berusaha keras mempertegas kembali kekuatan pemerintah pusat. Ia secara pribadi memangku jabatan kekuasaan eksekutif dan mulai membenahi masalah keuangan. Tindakan pertama yang dilakukan adalah mengurangi gaji dan pensiun. Tindakan ini menjauhkan kelompok relijius dan lain-lain yang dulu mendapatkan tunjangan gaji[12] dan merangsang ulama untuk lebih berkecimpung dalam masalah-masalah dunia. Kerusuhan-kerusuhan di Isfahan, yang mengakibatkan terbunuhnya wakil gubernur, ditimbulkan oleh imam Jum'ah kota tersebut; dan di Teheran intrik-intrik untuk menggulingkan Amir Nizam disiapkan dengan seksama[13].

Hubungan antara pemerintah dengan kelompok-kelompok relijius semakin memburuk dengan adanya peristiwa-peristiwa di Khurasan. Salar al-Dawleh, putra bekas gubernur Asaf al-Dawleh, memberontak dan menarik diri ke kota Mashhad, di sana ia diserbu oleh pasukan-pasukan pemerintah yang merasa khawatir nantinya akan menyerang kota dan tempat suci. Ketidakpuasan mulai menyebar ke seluruh lapisan masyarakat, dan pada tahun 1850 terjadilah kerusuhan-kerusuhan di Fars dan di tempat-tempat lain[14].

Adu kekuatan terjadi di Tabriz pada awal musim panas tahun itu. Tindakan sewenang-wenang dan pemerasan meliputi seluruh propinsi itu, sebagaimana terjadi juga di tempat-tempat lain. Lapisan atas dan kelompok relijius merasa tidak puas atas pengurangan, dan dalam beberapa hal penghapusan pensiun dan gaji mereka. Demikian pula para mullah di desa-desa dan para sayyid yang pada masa pemerintahan terdahulu menerima sedikit tunjangan gaji, sekarang juga dicabut. Keadaan negara yang kacau ini tentu saja mempengaruhi perdagangan, sehingga para pedagang merasa tidak puas. Kegagalan sudah menjadi hal yang sangat biasa, sedangkan uang sangat terbatas. Kekuasaan sesungguhnya bukan berada di tangan gubernur, Hamzah Mirza, melainkan ada di tangan Mirza Hasan Khan, sebagai *wazir-i nizam,* saudara pria Amir Nizam. Yang dipikirkan hanyalah menumpuk kekayaan sebanyak-banyaknya, tanpa mempertimbangkan sah atau tidaknya cara yang digunakan untuk mencapai maksudnya[15]. Menjelang musim panas 1850, tampaknya imam Jum'ah di Tabriz, Hajji Mirza Baqir, seorang tokoh berpengaruh di daerah itu menjadi pemimpin ketidakpuasan yang kemudian berkembang menentang tindakan pemerasan *wazir-i nizam.* Sulayman Khan Afshar dikirim ke Tabriz dengan perintah untuk menangkapnya bersama-sama dengan dua orang pemimpin agama yang cukup berpengaruh lainnya. Mereka yang ditangkap antara lain adalah *Shaykh al-islam,* Hajji Mirza Ali Asqhar, seorang tua yang hampir mencapai usia sembilan puluh tahun, dan putranya, Mirza Abud'l Qasim, dua orang *kadkhudas,* Aqa Sadiq dan Aqa Abdullah, serta penduduk Tabriz terkemu-

ka lainnya.

Sementara itu, sebelum kedatangan Sulayman Khan opini publik sedang digemparkan oleh suatu peristiwa keajaiban yang sungguh-sungguh terjadi di masjid Sahib Zaman. Yaitu adanya dua orang buta dapat melihat kembali setelah melewati masjid itu. Pasar-pasar dirayakan selama tiga hari tiga malam, suatu perayaan yang jauh melebihi yang pernah bisa dijumpai di Tabriz. Perayaan ini diadakan segera sesudah perayaan lain menyambut peristiwa kemenangan angkatan bersenjata pemerintah di Khurasan dan bahkan jauh lebih meriah[16]. Tujuannya kemungkinan besar adalah untuk menunjukkan ketidakacuhan rakyat terhadap kemenangan yang dicapai pemerintah (yang bukan merupakan urusan mereka). Secara tidak langsung hal ini mempertegas bahwa pemimpin mereka adalah *sahib zaman,* dan mereka setia kepadanya. Masjid tempat keajaiban itu terjadi dinyatakan sebagai tempat perlindungan[17]..

Shaykh al-islam beserta putranya ditangkap dan kemudian dikirim ke Teheran. Lima ratus orang pengikutnya dengan bersenjata disiapkan untuk melindungi pemimpinannya, tetapi ketika dijumpai beberapa artileri dan dua batalyon yang siap siaga untuk menjemputnya, orang-orang itu mundur tanpa berusaha memberikan perlindungan terhadap mereka berdua[18]. Sejumlah mujtahid dari kota-kota propinsi lain sementara itu datang ke ibu kota sebagai jawaban atas undangan pemerintah. Tetapi Hajji Mirza Baqir tidak bersedia datang. Menjelang akhir musim panas ia kembali diperintahkan datang di Teheran. Ia tetap tidak bersedia datang dan khalayak ramai mempersiapkan diri untuk mempertahankan dia dari segala usaha untuk memindahkannya dengan cara kekerasan. Beratus-ratus orang bersenjata berjaga-jaga tiap malam di rumahnya untuk tujuan ini. Amir Nizam mengundurkan diri dari jabatannya, dan mengirim pesan ke Tabriz yang berisi bahwa imam Jum'ah diberi kemungkinan untuk bertindak menurut kehendaknya sendiri, apakah akan datang di Teheran atau tidak. Yang terakhir ini, ketika *kadkhudas* kota itu menerangkan kepadanya bahwa Tabriz akan dituduh sebagai

pemberontak kecuali kalau ia bersedia pergi ke Teheran, maka kemudian ia menyerah[19]. Dengan terjadinya peristiwa ini maka oposisi terhadap pemerintah mengalami kegagalan. Secara keseluruhan memperlihatkan keengganan mendorong oposisi ke arah titik-pecah. Hal ini sebagian, tidak dapat diragukan lagi, dikarenakan oleh ketakutan yang sudah turun-temurun yang mereka alami – Persia sudah terlalu sering menderita kerusuhan-kerusuhan sehingga tindakan-tindakan yang mungkin akan dapat menimbulkan konflik, tidak bisa dianggap enteng – Dan ketakutan ini, pada abad kesembilan belas, diperkuat oleh pengetahuan bahwa kerusuhan-kerusuhan intern di Azarbayjan dapat mengundang campur tangan Rusia. Apabila pemerintah mau bertindak dengan tegas, biasanya ia mampu memaksakan kehendaknya. Hanya saja kalau terjadi kelemahan di dalam, pemberontakan mungkin akan semakin meluas.

Amir Nizam yang salah satu bagian dari kebijaksanaannya berusaha memaksakan kembali otoritas pemerintah pusat, juga menentang praktek perlindungan hukum yang telah dicoba dibatasi oleh Muhammad Shah, yang kurang berhasil untuk sementara ia mencapai keberhasilan yang sangat besar, tetapi setelah ia jatuh pada bulan Nopember 1851 praktek perlindungan hukum kembali gencar. Pada tahun 1854 gubernur Shiraz yang baru mencabut hak memberikan perlindungan dari para pegawai masjid Shah Chiragh di kota itu dan mereka yang menguasai imamzadehs kepada mereka tidak diperbolehkan perlindungan kepada para pencuri, penjahat, atau pengganggu perdamaian yang mencari perlindungan kepadanya[20]. Beberapa tahun kemudian, dikeluarkan surat edaran mengenai penataan kembali masalah peradilan pada tahun 1858. Di sana dinyatakan, karena suaka telah dihapus di ibu kota, maka di propinsi-propinsi juga akan dihapus kecuali di tempat-tempat tertentu[21]. Pada musim gugur tahun itu terjadi suatu insiden di Tabriz yang menimbulkan kegemparan luar biasa. Seorang mujtahid terkemuka, sempat memberi perlindungan kepada seorang yang jatuh pailit. Dia dipaksa untuk menyerahkan orang tersebut kepada gubernur. Pada saat yang sama

seorang *farman* yang muncul dalam *diwankhaneh* menyatakan bahwa perlindungan di rumah-rumah ulama akan dihapus[22]. Pada tahun 1863 pernyataan lain dikeluarkan dalam pemerintahan Shah Abd ul-'Azim yang berisi peniadaan suaka bagi mereka yang pernah melakukan pembunuhan, pencurian atau pemerkosaan terhadap wanita Muslim[23]. Meskipun usaha-usaha untuk membatasi tempat-tempat perlindungan lebih kecil bila dibandingkan dengan harapan-harapan yang ingin dicapai, namun merupakan ancaman bagi kedudukan ulama.

Pada bulan Juni 1852 peristiwa lain terjadi, yang menurut pandangan ulama juga merupakan ancaman bagi kedudukan mereka, yaitu pembukaan Dar al-Funun, sekolah pertama tempat ilmu-ilmu modern diajarkan. Sekolah ini didirikan oleh Amir Nizam, dan merupakan salah satu rencananya untuk memaksakan kembali kekuasaan pemerintah pusat dengan modernisasinya. Tujuannya adalah untuk menyediakan perwira bagi angkatan bersenjata yang akan dibentuknya dan pegawai negeri baru yang akan melaksanakan pemerintahan terpusat.

Tidak lama sebelum peresmian Dar al-Funun, Amir Nizam jatuh dari kekuasaannya. Dengan terjadinya peristiwa ini maka ketegangan antara pemerintah dengan ulama menjadi agak reda, namun demikian perselisihan masih terus berlangsung. Satu ungkapan yang cukup penting tertulis dalam surat Mirza Aqa Khan Nuri yang menggantikan Amir Nizam sebagai *sadr-i a'zam*, dikirimkan kepada seorang mullah yang telah ditunjuk oleh Mirza Aqa Khan Nuri untuk melaporkan insiden yang terjadi antara saudara imam Jum'ah Tabriz terdahulu dengan salah seorang penulis Persia dari konsulat Inggris. Dalam surat itu dinyatakan "Anda sendirilah yang banyak tahu tentang karakter dan tingkah laku mullah Persia terhadap pemerintah dan terhadap siapa saja di Persia. Dan Anda juga tahu bahwa *kami tidak memiliki kekuasaan terhadap mereka yang sebenarnya kami inginkan; dan bagaimanapun juga kami harus berhati-hati menghadapi mereka*" (cetak miring dari penulis)[24].

Meluasnya peraturan hukum sekular dan persoalan re-

formasi hukum, keduanya sangat berpengaruh terhadap *Mulama*. Sebagai akibat dari Pakta Turkomanchay (1828) kasus-kasus campuran yaitu kasus yang terjadi antara bangsa Persia dengan bangsa asing, dikeluarkan dari kekuasaan hukum syar'i. Sejak dari pemerintahan Nasir al-Din seterusnya terdapat kecenderungan bahwa pada pengadilan tertentu telah terjadi pelanggaran batas kekuasaan atas hukum syari'i[25]. Pada tahun 1855 *sadr-i a'zam,* Mirza Aqa Khan Nuri, jelas-jelas memberikan suatu rancangan kepada Shah untuk menyebarkan suatu kumpulan hukum yang diambil dari berbagai kitab undang-undang hukum Eropa yang berasaskan pada keamanan hidup, milik dan kehormatan subyek seperti pada masa Ottoman *katti sharif-i gulkhaneh*[26]. Tidak ada hasil yang dicapai dari usaha ini. Beberapa tahun kemudian, pada tahun 1858 setelah pendirian dewan menteri, peraturan-peraturan tatacara bagi *diwankhaneh* atau kementerian kehakiman ditetapkan. Menjelang akhir tahun lebih jauh diumumkan bahwa departemen kehakiman *(diwankhaneh-i 'adliyyeh)* akan didirikan di tiap-tiap propinsi di bawah pengawasan *diwanbegi*. Surat-surat keputusan yang akan dibuat oleh departemen-departemen ini kemudian akan diteruskan kepada seorang mujtahid apabila menyangkut persoalan *syari'ah*, dan kepada gubernur apabila menyangkut masalah *urfi'*. Dokumen-dokumen syari'ah harus dicatat bersama *diwanbegi*[27]. Tindakan-tindakan ini mulai diberlakukan tidak tepat pada waktunya; meskipun demikian merupakan usaha yang sungguh-sungguh dari pemerintah untuk mengawasi ulama secara lebih ketat dan membatasi kekuasaan pengadilan hukum syari'ah.

Pada tahun 1863 Mirza Khan Mushir al Dawleh, yang telah lebih dari dua belas tahun berada di Turki sebagai wakil pemerintah Persia, memberikan konsep tentang peraturan penataan kembali dalam kementerian kehakiman untuk mendapat persetujuan dari Shah. Ia sempat pula naik jabatan sebagai menteri kehakiman pada tahun 1871, untuk kemudian menjabat sadr-i a'zam dalam waktu yang singkat. Peraturan-peraturan itu semuanya dikeluarkan pada tahun berikutnya, tujuannya adalah untuk memusatkan pelaksa-

naan peradilan dan membatasi kekuasaan gubernur propinsi. Demikian pula, pajak dokumen hukum dan akte mulai diperkenalkan[28].

Peraturan ini membawa akibat terjadinya konflik antara Mirza Husayn Khan dengan penguasa propinsi dan ulama. Karenanya pembentukan departemen-departemen kehakiman di propinsi-propinsi untuk sementara waktu ditangguhkan. Pada tahun 1863 juga diumumkan bahwa persengketaan masalah tanah akan diserahkan kepada departemen kehakiman setempat[29]. Ini merupakan pelanggaran yang lebih jauh terhadap kekuasaan hukum syar'i. Tahun 1875, setelah Nasir al-Din kembali dari lawatannya yang pertama ke Eropa, ia berusaha untuk mendirikan dewan-dewan pelaksana. Tujuannya adalah dewan pelaksana ini harus membantu pemerintah setempat dalam tugas-tugas pemerintahan, memeriksa ketidakadilan dan korupsi, dan meniadakan pengaruh ulama. Yang terakhir ini berhasil mempengaruhi rakyat dengan mengatakan bahwa pembaharuan model Eropa semacam itu akan menghilangkan perlindungan yang telah mereka terima terhadap tindakan sewenang-wenang pemerintah. Oposisi terhadap rancangan ini muncul, dan tidak mendapatkan tanggapan[30]. Pada tahun 1889 dewan negara diperintahkan untuk mempersiapkan suatu kumpulan hukum baru. Dewan mulai menerjemahkan Kitab Undang-undang Hukum Napoleon. Proyek ini tidak menghasilkan apa-apa[31]. Setelah penundaan konsesi tembakau, Muhsin Khan Mushir al-Dawleh, menteri kehakiman dan perdagangan diperintahkan untuk mendirikan sebuah *'adalut-khaneh* (majelis kehakiman). Rencana ini juga terbukti mengalami kegagalan[32]. Pada tahun-tahun pertama abad kedua puluh, atas saran penasihat hukum Belgia, suatu kodifikasi hukum benar-benar dipikirkan, bersama-sama dengan reorganisasi pengadilan yang menyangkut masalah kasus campuran dan menyediakan peradilan tingkat pertama dan peradilan tingkat atas yang akan memutuskan perkara-perkara campuran dengan penerapan kitab undang-undang hukum perniagaan yang didasarkan pada hukum yang ada di Turki. Rencana ini juga berhasil digagal-

kan oleh ulama yang berpendirian bahwa penguasa duniawi tidak berkompeten membuat undang-undang dalam masalah seperti ini, undang-undang semacam itu harus selaras dengan *syari'ah*[33].

Terakhir, *masalah pengawasan terhadap awqaf.* Pada kenyataannya, sebelum terjadi revolusi konstitusi hanya terdapat sedikit campur tangan terhadap administrasi mereka, tetapi berbagai tindakan diambil yang dalam pandangan ulama mungkin merupakan tindakan terang-terangan pemerintah yang pada akhirnya ingin mengawasi pendapatan *waqaf.* Ketika Mirza Muhammad Husayn Abud al-Mulk dipilih menjadi menteri urusan pensiun dan awqaf pada tahun 1854, ditetapkan bahwa *mutavallis awqaf* tidak diperbolehkan bertindak tanpa sepengetahuannya, atau tanpa sepengetahuan pengawasnya (*mubashir*). Mereka juga harus memberikan laporan secara berkala mengenai jumlah pemasukan dan pengeluaran[34]. Ketika administrasi ditata kembali pada tahun 1858 dan urusan dipercayakan kepada enam kementerian, bukannya kepada *sadr-i a'zam,* salah satu di antaranya adalah kementerian urusan pensiun dan awqaf[35]. Tugasnya adalah mengawasi jumlah yang dialokasikan untuk pensiun dan pendapatan dari awqaf harus disediakan untuk tujuan-tujuan yang semestinya. Pada tahun 1863 peraturan baru dikeluarkan sebagai petunjuk dalam kementerian. Perintah pengawasan terhadap awqaf dikirimkan kepada para pegawai kementerian di propinsi, dan para *mutasaddis* diperintahkan untuk mengirimkan bagiannya, sebelumnya disahkan oleh seorang mujtahid, kepada kementerian. Bilamana mereka tidak berhasil melaksanakan tugasnya maka mereka akan kehilangan pekerjaannya[36]. Memang benar tindakan-tindakan ini ternyata mengalami kegagalan dan tidak diterapkan di seluruh negeri. Walaupun begitu merupakan bukti tentang maksud pemerintah untuk memperbesar pengawasan terhadap ulama.

Berbagai macam tindakan ini – pembatasan hak memberikan perlindungan, pelangaran batas terhadap kekuasaan hukum syar'i, usaha-usaha mengawasi pendapatan waqaf, pengurangan tunjangan gaji bagi ulama, dan meluasnya

pendidikan sekular – menimbulkan oposisi ulama yang khawatir akan kehilangan pengaruh. Di satu pihak, sentralisasi merupakan prasyarat mutlak bagi adanya reformasi di seluruh negeri, yang juga berarti penciutan kekuasaan ulama dan pembatasan kekuasaan hukum syar'i, atau paling tidak terdapat batasan yang jelas antara kekuasaan hukum syar'i dengan hukum *urfi'*. Ulama tidak jauh berbeda dengan kelompok lain dalam masyarakat. Mereka tidak terlepas dari keterbatasan serta kelemahan. Sebagian di antara mereka ada juga yang bisa disuap dan melakukan korupsi, dan terlibat juga dalam spekulasi serta monopoli barang-barang (lihat juga di awal tulisan ini); dan sebagian juga sebagai obskurantis dan menentang penyebaran pendidikan. Di lain pihak, terdapat orang-orang di kalangan ulama yang menyadari akan perlunya reformasi dan mereka bergabung dengan gerakan-gerakan yang memberi harapan akan adanya reformasi, sebagaimana terbukti dari ada di antara mereka menjadi pengikut gerakan Babi juga mereka yang bergabung dengan gerakan konstitusi. Mereka bukanlah merupakan suatu badan yang bersatu padu, melainkan terdiri dari berbagai golongan dan kelompok. Akan salahlah bila kita mengira bahwa pemerintah bergerak hanya, atau mungkin terutama, oleh keinginan untuk mengadakan reformasi.

Salah satu motif adanya sentralisasi yang lebih besar adalah keinginan untuk menambah kekuatan pemerintah sehingga dapat membungkam oposisi. Lebih-lebih lagi, beberapa rencana guna perbaikan keadaan tidak ada hasilnya sama sekali karena dana yang disediakan untuk merealisir rencana itu tidak pernah sampai pada tujuannya. Juga, tindakan yang diambil mengenai sentralisasi pemerintahan yang tidak dibarengi dengan reformasi administratif dan konstitusional dirasa cukup efektif, sehingga tindakan sewenang-wenang dan tirani kekuasaan pemerintah semakin lebih terasakan. Oposisi ulama, paling tidak sebagian, merupakan reaksi dari tindakan sewenang-wenang pemerintah.

Tirani bukanlah suatu hal yang baru lagi dalam kehidupan bangsa Persia. Penekanan yang terus menerus dalam

karya-karya penulis abad pertengahan tentang masalah keadilan, tentang politik dan etik, sebagian merupakan protes menentang tirani. Tetapi faktor baru mulai mempengaruhi situasi dalam abad kesembilan belas dan ini, ditambah dengan tekanan pemerintah dalam berbagai bidang yang semakin terasa, mengakibatkan bobot tirani semakin tidak tertahankan lagi. Faktor baru ini adalah adanya campur tangan asing dengan kekuatannya yang sangat dahsyat, yang sejak terjadinya perang Rusia dalam pemerintahan Fath Ali Shah, semakin terasa. Campur tangan ini tampak merupakan ancaman terhadap Islam, terhadap pandangan hidup tradisional Persia, dan terhadap kemerdekaan nasional. Maka oposisi terhadap campur tangan ini mengambil corak keagamaan dan nasionalis. Pada tahun 1826 misalnya, Ali dipaksa membuka kembali kampanye anti Rusia karena adanya demonstrasi-demonstrasi yang dipimpin oleh ulama. Di lain pihak ketika pada tahun 1856 terjadi peperangan melawan Inggris atas Herat, usaha untuk membangkitkan rakyat dengan pernyataan *jihad* tidak banyak mendapat sambutan. Sebab-sebabnya saya kira cukup jelas. Kekacauan dan pemerintahan yang dhalim meliputi seluruh kerajaan dan rakyat merasa tidak ada gunanya pergi berperang membantu pemerintah yang membuat mereka menderita sebagai akibat pemerasan dan berbagai tekanan. Untuk itu, ketika terjadi kerusuhan-kerusuhan tentang harga roti yang membubung tinggi di Tabriz pada akhir musim salju tahun 1856-7, dan ketika salah seorang mujtahid mencoba menenangkan rakyat, mereka menjawab bahwa perang untuk mendapatkan roti lebih penting daripada jihad melawan Inggris[37].

Permusuhan kelompok relijius/nasionalis terhadap intervensi asing memuncak pada bagian kedua abad itu dengan adanya penjajahan perdagangan oleh bangsa Eropa dan penyerahan konsesi kepada perusahaan-perusahaan asing. Bukan hanya pandangan hidup tradisional negara itu saja yang terancam, tetapi juga sumber-sumber kekayaan negara itu dijual kepada orang-orang asing. Oposisi terhadap konsesi Reuter sebagian dipimpin oleh ulama dan konsesi

tembakau akhirnya dihilangkan sebagai hasil dari tindak perjuangan mereka[38]. Hal ini sangat penting bukan hanya dalam memobilisasi permusuhan kelompok relijius/nasionalis terhadap intervensi asing, tetapi juga dalam hal penegasan kembali kekuatan ulama. Dalam oposisinya terhadap konsesi tembakau – untuk pertama kalinya – mereka bekerja sama dalam skala nasional dan menemukan kekuatan mereka. Pada tahun-tahun berikutnya sikap mereka menjadi tambah agresif ketika kekuatan mereka bertambah besar[39].

Perasaan anti-asing yang seringkali dibarengi dengan fanatisme keagamaan, dinyatakan dalam beberapa bidang: pecahnya pertentangan melawan golongan minoritas, seperti bangsa Armenia dan bangsa Yahudi, dan pertentangan terhadap perusahaan-perusahaan perdagangan asing. Pada tahun 1904 surat edaran dikirimkan kepada para wakil negara asing di Teheran yang berisi bahwa wanita Muslim pada waktu mendatang tidak diperkenankan bekerja di pabrik-pabrik sutera (kepompong ulat sutera) yang dimiliki orang-orang non-Muslim. Hal ini disebabkan oleh suatu kejadian di Barfurush, di mana para mullah mendesak penguasa setempat untuk mencegah wanita bekerja mensortir kepompong di pabrik pengeringan kepompong ulat sutera milik Mr. Stevans, seorang warganegara Inggris[40]. Tahun berikutnya terjadi gerakan menentang Christian Missionary Society s schools di Shiraz yang dipimpin oleh Aqa Mirza Ibrahim, seorang mujtahid terkemuka setempat[41].

Bukan hanya perubahan-perubahan politik dan sosial saja yang mulai membawa ketidakpuasan menjadi semakin gawat. Juga adanya tekanan dalama bidang ekonomi pada abad kedua puluh. Sebagai akibat dari dominasi politik Rusia dan Inggris, maka terjadilah perubahan-perubahan arah perdagangan Persia, dan terjadi pertumbuhan hubungan perdagangan dengan Eropa. Perbedaan tarif bagi barang-barang dengan melihat perbedaan kewarganegaraan importir maupun eksportir diperkenalkan menurut pakta perdagangan yang ditandatangani bersama Rusia di bawah Fakta

Turkomanchay pada tahun 1828, yang pada prakteknya sering digunakan untuk menentang para pedagang Persia. Persaingan dengan Eropa lebih-lebih mengancam industri setempat, terutama industri tekstil. Seringkali terjadi para pedagang setempat mengajukan petisi menentang impor barang-barang dari luar negeri dan juga kebangkrutan yang diakibatkan oleh kondisi yang berubah dalam bidang perdagangan luar negeri. Kemungkinan besar persaingan dengan luar negeri yang semakin meningkat merupakan faktor yang mendukung berkembangnya rasa ketidakpuasan; dan karena persaingan ini datang dari orang-orang non-Muslim maka juga dirasakan sebagai ancaman terhadap pandangan hidup Islami. Sebaliknya tidak dapat diragukan lagi terdapat pedagang-pedagang yang memperoleh keuntungan dari perdagangan baru dengan Eropa, tetapi sebagian besar dari mereka bertempat di luar negeri dalam kalangan masyarakat pedagang Persia yang khususnya berada di Istambul dan Kalkutta.

Faktor penting lainnya yang mempengaruhi kondisi ekonomi adalah menurunnya nilai mata uang secara terus-menerus. Hal ini sudah berlangsung sejak tahun-tahun pertama abad kesembilan belas, dan terutama turun drastis menjelang akhir pemerintahan Fath Ali Shah dan di bawah pemerintahan Muhammad Shah. Keadaan ini mengakibatkan penurunan besar-besaran nilai mata uang Persia, kenaikan harga, dan ketekoran yang menimpa kalangan luas; dan kemungkinan juga bertambahnya transaksi pinjaman dengan bunga yang cukup tinggi. Kemungkinan lain yang tumbuh adalah betapa hal ini juga mengakibatkan bertambahnya kemiskinan. Karena tidak ada statistik yang cukup memadai maka sulit untuk memperkirakan betapa luasnya kenaikan harga itu atau akibat sesungguhnya dari kenaikan harga ini bagi standar hidup masyarakat. Ketimpangan keadaan terjadi secara mencolok dari satu daerah dengan daerah lain dan dari tahun ke tahun.

Kemiskinan bukan lagi sesuatu yang baru dalam kehidupan di Persia. Dalam kenyataannya, kemiskinan merupakan kehidupan yang terus menerus dialami oleh sebagian besar

orang-orang saleh, tetapi kini ada suatu kelainan yang dirasakan, yaitu sejak pemerintahan Nasir al-Din dan seterusnya kemiskinan ini dirasakan bersamaan dengan semakin banyaknya campur tangan orang-orang asing serta penyerahan konsesi niaga dan lain-lain kepada mereka[42]. Ketika sebagai bagian dari usaha yang terlambat untuk menata kembali keuangan negara dan menjamin pembayaran bunga pinjaman asing, pengelolaan cukai dipercayakan kepada orang-orang Belgia dan tarif baru dirundingkan dengan Rusia dan diperkenalkan pada tahun 1903, terjadi ketidakpuasan di kalangan kelompok-kelompok pedagang dan masyarakat luas. Ketidakpuasan ini disuarakan oleh ulama.

Masalah pinjaman luar negeri khususnya menjengkelkan perasaan nasionalis dan keagamaan sejak kira-kira tahun 1897 hingga kemudian. Persoalan ini menjadi sulit karena persaingan kekuasaan dan intrik-intrik intern, yang tidak bisa saya bicarakan di sini[43]. Tetapi konflik yang sebenarnya terjadi antara pemerintah dengan ulama dalam masalah pinjaman luar negeri adalah mengenai cara penanganan pemerintah dan penghambur-hamburan sumber-sumber material Persia.

Sudah sejak menjelang akhir masa pemerintahan Nasir al-Din Shah kelompok-kelompok orang mulai mengadakan pertemuan rahasia guna membicarakan keinginan memerdekakan rakyat dari belenggu kedhaliman dan menolong terselenggaranya kebebasan, keadilan, dan pendidikan mereka. Setelah terjadi pembunuhan atas diri Nasir al-Din mereka menjadi lebih aktif di pusat maupun di propinsi-propinsi. Para anggotanya tampaknya datang terutama dari ulama tingkat menengah. Kelompok-kelompok atau masyarakat *(anjumanha)* ini mengalamatkan keinginannya pertama-tama kepada ulama dan kelompok pejabat pemerintah yang lebih cenderung kepada "pengetahuan baru". Mereka yang termasuk ke dalam kelompok-kelompok religius mendesak rakyat dari atas *mimbar* agar menyetujui modernisasi sebagai upaya untuk mengontrol kedhaliman serta mengendalikan agresi asing[44].

Berkembangnya rasa ketidakadilan dan tirani yang diaki-

batkan oleh berbagai macam perkembangan politis, sosial, dan ekonomis yang sudah saya singgung di atas, akhirnya menyebabkan sejumlah orang mengadakan pertemuan bersama pada tahun 1904. Setelah diadakan diskusi-diskusi, mereka mengambil keputusan mengkoordinasi tindakan-tindakan untuk menggulingkan kedhaliman. Sebagian besar di antara mereka tergabung dalam kelompok-kelompok relijius; namun demikian anggotanya juga terdiri dari para pedagang dan anggota birokrasi. Mereka bertekad untuk bekerja menyusun kitab undang-undang tentang hukum dan keadilan, dan untuk menggulingkan tirani serta penindasan. Diskusi-diskusi mereka memperlihatkan keadaan yang segera meminta, keputusan serta keyakinan bahwa rakyat Persia dihadapkan pada satu di antara dua pilihan, yaitu kebebasan serta kemerdekaan di satu pihak dan tetap berlangsungnya kedhaliman serta perbudakan oleh bangsa asing di lain pihak[45].

Persoalan pengelolaan cukai dan tarif cukai sementara itu memuncak dan menambah rasa ketidakpuasan yang semakin meluas. Gerakan menentang cukai merupakan sesuatu yang kacau, dan dimanfaatkan oleh berbagai golongan demi keuntungan serta keinginan mereka sendiri. Tetapi ini merupakan persoalan di mana fanatisme keagamaan dapat dengan mudah dibangkitkan karena cukai tersebut berada di bawah pengelolaan administrator asing (Belgia) dan pembayaran kembali pinjaman luar negeri dijamin oleh mereka. Ini juga merupakan persoalan yang menyangkut keuntungan material pedagang karena bukan saja bea cukai yang mengalami kenaikan, tetapi juga usaha untuk menghindarinya mungkin menjadi lebih sulit. Di samping itu, mereka yang dahulu bekerja sebagai penarik cukai, kini kehilangan penghasilannya. Dan mereka ini juga merasa tidak puas. Segala jenis kenaikan harga barang komoditi yang mempengaruhi masyarakat luas dapat dipandang sebagai akibat dari tarif cukai ini. Lebih-lebih lagi, pengelolaan cukai oleh orang awam dipandang sebagai institusi Rusia karena tarif baru telah dirundingkan bersama antara Rusia dengan M. Naus, seorang direktur berkebangsaan Belgia[46].

Kira-kira permulaan tahun 1905 diadakan usaha yang tekun untuk mengorganisasi agitasi menentang M. Naus. Usaha ini dimulai dengan serangkaian peristiwa yang membawa ke arah pengakuan konstitusi pada tahun 1906. Uraian terperinci mengenai peristiwa ini, yang tidak dapat saya bicarakan di sini, akan memberikan keterangan yang lebih jelas terhadap kekusutan intrik dan intrik-balasan yang mengitari peristiwa-peristiwa ini dan peranan ulama di dalamnya.

Bukannya tekanan kemiskinan dan ekonomis yang menimbulkan protes – walaupun keduanya tidak bisa diingkari adanya – tetapi lebih banyak diakibatkan oleh fakta bahwa situasi yang ada pada saat itu dirasakan bertentangan dengan pemerintahan Islam yang benar. Pemerintahan yang salah berlangsung dan telah mencapai jarak yang sedemikian rupa sehingga eksistensi Persia yang sebenarnya, *mamalik-i islam,* dirasakan terancam. Ketika tingkat tirani bertambah kuat, muncullah seruan, *musalmani cheh shud,* dan kepada seruan ini rakyat memberikan tanggapan, menghendaki kembali kepada pemerintahan Syari'ah karena asumsi-asumsi serta nilai-nilai yang diletakkan oleh Islam dirasakan besarı serta nilai-nilai yang diletakkan oleh Islam dirasakan tetap relevan dengan kehidupan mereka. Apa yang dikehendaki oleh gerakan "massal" bukanlah pemindahan kekuasaan kepada suatu kelompok dengan ideologi baru, tetapi hanyalah pengembalian kepada pemerintahan yang adil dan jujur. Dalam hal ini, meskipun terdapat fakta bahwa ada sebagian ulama yang mendukung kedhaliman – kadang-kadang mereka bisa disuap – rakyat tetap berpaling kepadanya sebagai satu-satunya kemungkinan pemimpin mereka. Kelompok tuan tanah bersekutu dengan pemerintah: individu di antara mereka mungkin dari waktu ke waktu menolaknya atau bahkan berusaha menggulingkannya, tetapi gerakan semacam itu tidak menimbulkan perhatian bagi orang awam–mereka hanya menghasilkan, kalau mereka berhasil, perpindahan kekuasaan dari orang dhalim yang satu kepada orang dhalim lainnya. Para pedagang dan saudagar dapat memberikan sumber-sumber material, teta-

pi mereka tidak pernah memperoleh kehormatan dan prestise seperti yang mungkin mereka terima apabila memanfaatkan kepemimpinan gerakan "massal".

Bagi mereka yang cita-cita politiknya mengarah ke liberal barat, terjadi jurang pemisah dalam hal pengertian antara mereka dengan orang awam. Mereka barangkali juga telah memberikan sumbangan ideologi baru kepada gerakan itu, tetapi ideologi semacam itu hanya akan diterima bilamana diinterpretasikan dalam terminologi Islam. Pada kenyataannya mereka tidak mengajukan suatu ideologi baru, mungkin karena mereka tahu bahwa mereka tidak akan mendapatkan dukungan kecuali kalau ditafsirkan dalam terminologi Islam, atau karena dalam lubuk hatinya mereka juga berpegang teguh pada Islam. Tujuan yang dinyatakannya juga menghendaki pengembalian kepada pemerintahan yang jujur, yaitu peraturan syari'ah yang diterima oleh massa dan ulama. Sebagian orang-orang "Liberal" tentu menyadari bahwa apa yang sebenarnya dikehendaki bukanlah seperti ini, namun demikian mereka tidak menentang ulama dalam masalah ini.

Di kalangan ulama sendiri, walaupun kepemimpinan mereka terhadap gerakan "massal" tidak perlu dipertentangkan lagi, tetapi sama sekali bukan berarti mereka bersatu padu. Tidaklah mengherankan bahwa ketika kemenangan pertama diraih, mereka tidak mampu menjaga persatuan. Sebagian barangkali digerakkan oleh-tidak lebih dari-sekedar keinginan untuk mempertahankan hak-hak istimewa mereka yang ada, yang tampak oleh mereka lepas dari genggamannya sebagai akibat dari adanya kecenderungan-kecenderungan baru. Sebagian yang lain mendapati dirinya berada pada satu pihak atau pada pihak lain disebabkan oleh alasan yang tidak kuat, bahkan sekedar persaingan ataupun ambisi pribadi. Sebagian lagi memandang gerakan baru sebagai langkah menuju pembentukan kerajaan Tuhan di bumi; dan yang lain memandang dalam hal pengambilan cara-cara pemerintahan parlementer terdapat adanya kemungkinan mengendalikan kedhaliman. Tujuan mereka bukanlah pengambilan peradaban barat, me-

lainkan hanya teknik-tekniknya saja sebagai upaya untuk menegakkan supremasi hukum, yang mereka maksudkan adalah hukum syari'ah, serta mencegah campur tangan asing[47]. Beberapa di antara mereka memandang sains modern dan pencerahan sama dengan rasionalisme tradisional, mereka berkeyakinan bahwa asal mula pemikiran barat atau semua gagasan baru, terdapat dalam Qur'an[48]. Batasan-batasan antara agama dengan pemerintah dengan demikian tidak begitu jelas.

Situasi pada saat itu penuh dengan paradoks. Persaingan pribadi dan intrik-intrik memainkan peranan yang penting; dan uang tidak jarang berganti tangan. Tetapi meskipun demikian, tidaklah berlebihan bila saya katakan bahwa ciri-ciri yang menonjol dari gerakan reformasi konstitusi adalah keinginan yang sungguh-sungguh demi kemerdekaan dan keadilan. Meskipun konsep ini tidak selalu mempunyai arti yang sama bagi bermacam kelompok yang berbeda-beda sebagai pendukung gerakan itu. Tidak terdapat bukti bahwa baik kelompok ulama maupun mereka yang cita-cita politiknya mengarah ke Eropa Barat, telah memberikan pemikiran politik yang nyata atau bahwa mereka memiliki ideologi yang sudah matang. Adalah suatu kebetulan bahwa dari pemerintahan yang salah dan intervensi asing dalam masalah-masalah intern negara, telah mampu menggerakkan mereka bersama karena merasa beban tirani telah sampai pada tingkat yang tidak bisa ditolelir lagi. Mereka yang berkeyakinan bahwa Shah bersama para menterinya menjual negara kepada orang-orang asing. Mereka datang dari berbagai kalangan dan gerakan oposisi yang dibangun di kalangan mereka mendapat dukungan rakyat karena perasaan intuisi orang-orang itu bahwa melawan kedhaliman merupakan tugas mereka sebagai Muslim dalam menyeru kepada kebaikan dan melarang kemungkaran. Karena tujuan tindakan semacam itu adalah mengembalikan pemerintahan supaya menjadi pemerintahan yang jujur dan benar, yaitu pemerintahan syar'i, maka dengan sendirinya pemimpin gerakan itu adalah *ulama.* •

Catatan Kaki:

1. Terima kasih saya sampaikan kepada pengawas H.M. Stationary Office dan pegawai Public Record Office yang telah memberikan izin kepada saya mempergunakan arsip-arsip Departemen Luar Negeri yang tidak diterbitkan.
2. Mrs. KEDDIE dalam artikelnya "The origin of the religious-radical alliance in Iran", dalam *Past and Present*, No. 34, halaman 70-80 membicarakan beberapa aspek mengenai hubungan kedua kelompok ini. Miss ZAHRA SHAJI'I dalam penelitiannya *Namayandagan-i majlis-i shawra-yi milli dar bisl o yak dawreh-i qanunguzari* (Teheran, 1965) membicarakan secara singkat peranan yang dimainkan ulama di dalam Majelis Nasional dan sebab-sebab yang membawa mereka mendukung gerakan konstitusi.

   M. AUBIN. – Il y a les Armeniens et les Franciscains de Terre Sainte. En outre, il existe une source italienne et une autre portugaise. Des le debut du XVI siecle, un libelle nous montre Shah Isma'il se convertissant pour prendre le nom de Ferdinand. On pensait a l'epoque qu'il etait l'homme qui allait purifier l'Eglise.
3. Bandingkan NIZAM AL-MULK, *Siyasal-nameh*, Paris, editor Schefer, 1891-3, Persian text, halaman 40-1.
4. *The History of Persia*, London, 1829, II, 316.
5. Ibid., halaman 314.
6. "Sikap Shaykh Ahmad Ahsa'i mungkin merupakan ciri khas menurut sudut pandangan terdahulu. Setelah dipanggil oleh Fath Ali Shah ke Teheran dan didesak untuk tinggal di sana, Shaykh Ahmad menjawab seraya memberikan alasan, "Menurut pendapat saya para sultan dan pemerintahlah yang menyebabkan perintah atau aturan dijalankan oleh tirani (dhulm). Karena jamaah (*ra'iyyat*) menganggap diri saya perlu dipatuhi, dan dalam segala hal, berpaling kepada saya dan akan mencari perlindungan kepada saya. Karena merupakan kewajiban saya untuk melindungi orang-orang Muslim dan meringankan kebutuhannya, bilamana saya memohonkan pengampunan di hadapan penguasa, maka hasilnya adalah salah satu dari dua kemungkinan: persoalan-persoalan kekaisaran akan tetap ditegakkan dan tetap dipatuhi apabila ia menerima permohonan pengampunan saya, atau saya akan mendapat celaan dan hinaan apabila ia menolak permohonan pengampunan saya" (MURTADA MUDARRISI CHAHARDAHI, "Shaykh Ahmad Ahsa'i (1166 – 1241)", dalam *Yadgar*, Januari 1944, halaman 36-7.
7. Anak-anak para tuan tanah dan para pejabat tinggi, sejak kira-kira

pertengahan abad kesembilan belas sebagian besar mendapatkan pendidikan di Dar ul-Funun atau di beberapa sekolah modern lainnya atau oleh guru pribadi.

8. Lihat lebih lanjut N. KEDDIE "Religion and irreligion in early Iranian nationalism", dalam *Comparative Studies in Society and History*, The Hague, IV, 3 April 1962, halaman 265-95. Mrs. Keddie menekankan peranan kelompok Bab, terutama kelompok Azalfs, dalam kepemimpinan revolusi Persia.
9. Mirza Muhammad Rida, pembunuh Nasir al-Din Shah, tampaknya memandang Jamal al-Din "sebagai nabi terakhir dan terbesar yang dikirim dari sorga untuk memperbaharui dunia" (Great Britain Public Record Office, F.O. 65: 1528. Durand to Salisbury, Teheran, No. 35. 14 Mei 1896 ditandai terbatas).
10. F.O. 60:74. Sheil to Palmerston, No. 42, Erzerum, 24 Agustus 1840, dan surat dari Mr. Burgess kepada Letnan Kolonel Sheil, tertanggal Julfa, Isfahan, 14 Juli 1840, termasuk di atas.
11. F.O. 60:99 Sheil to Aberdeen, No. 99, Teheran, 1 Desember 1843.
12. Bandingkan F.O. 60:145, Farrant to Palmerston, No. 42. kamp di dekat Teheran, 28 Mei 1849.
13. F.O. 64:146. Taylour Thomson to Farrant, No. 6, Teheran, Oktober 1849, termasuk dalam Sheil to Palmerston, No. 10, Tabriz, 6 November 1849. Bandingkan juga Taylour Thomson to Palmerston, No. 2, Teheran, 7 November 1849.
14. Sheil, seorang menteri Inggris, dalam tulisannya pada tanggal 15 Desember 1849 menyatakan, "Tidaklah berlebihan apabila saya nyatakan bahwa rasa ketidakpuasan kalau bukan ketidaksetiaan, meliputi seluruh lapisan ... Pada masyarakat lapisan atas rasa ketidakpuasan ini hanya bersifat demi kepentingan mereka sendiri, yang timbul dari keinginan untuk merebut kedudukan serta kesempatan untuk berbuat curang; tetapi pada kalangan agamawan dan kalangan pedagang rasa ketidakpuasan juga timbul, sedangkan masyarakat kelas rendahan mengikuti jejak para atasannya ..

    "Kalangan agamawan terutama di Teheran, berjuang sekuat tenaga untuk mendapatkan kembali kekuasaan yang mereka miliki selama masa pemerintahan Fath Ali Shah, dan keinginannya selalu ditolak oleh Perdana Menteri, disebabkan oleh hal ini dapat dibayangkan betapa besarnya rasa keseganan dan ketidaksenangan terhadap peraturan-peraturannya. Sementara rasa hormat terhadap kaum agamawan masih kuat di kalangan masyarakat menengah dan bawah, rasa ketidakpuasan kaum agamawan menjalar di kalangan masyarakat bawahannya" (F.O. 60:146, Sheil to Palmerston, No. 14, Teheran, 15 Desember 1849. Lihat juga F.O. 60'151. Sheil to Palmerston, No. 64, Te-

heran, 25 Mei 1850).
15. Bandingkan F.O. 60:155. Stevens to Sheil, No. 3, Tabriz, 13 Januari 1850.
16. F.O. 60:155. Stevens to Sheil, No. 31, Tabriz, 24 April 1850.
17. *Ibid.*
18. F.O. 60:152. Sheil to Palmerston, No. 71, kamp di dekat Teheran, 18 Juni 1850.
19. F.O. 60:153. Sheil to Palmerston, No. 110, kamp di dekat Teheran, 16 September 1850. Lihat juga NADIR MIRZA, *Tarikhi-i Tabriz,* Teheran, litografi, 1905, halaman 118-9 dan 245-6.
20. Ruznameh-i waqayi'-i ihifaqiyyeh, No. 158. 11 Jumadil-awwal 1270/18 Februari 1854.
21. *Ibid.*, No. 407, 11 RAbiulakhir 1275/18 November 1858.
22. F.O. 60:234. Dickson to Doria, No. 65, Tabriz, 4 November 1858, termasuk dalam Dickson to Malmesbury, No. 53, Tabriz, 5 November 1858.
23. *Ruznameh-i dawlal-i Iran,* 15 Muharram 1280/2 Juli 1863. Pernyataan itu diumumkan bersama *farman* yang menyatakan bahwa keputusan telah diambil dalam sebuah rapat dewan pertimbangan agung *(majma'-i shawra-yi kubra)*, di mana Hajji Mirza Muhammad dan Hajji Mulla Ali juga hadir, dan keduanya menyatakan pendapat bahwa persetujuan mengenai masalah ini telah dicapai.
24. F.O. 60:212. Termasuk No. 2 dalam Stevens to Clarendon, No. 32, kamp di dekat Teheran, 4 Juni 1856.
25. Sebagai contoh pada tahun 1851 ketika Nasir al-Din pergi ke Isfahan, ia menetapkan bahwa sejak saat itu persengketaan mengenai masalah warisan antara bangsa Armenia, Yahudi, atau Zoroaster yang berpindah memeluk Islam dengan seseorang dari masyarakat yang dahulu ia termasuk di dalamnya, harus tidak diserahkan kepada peradilan *shar'i* maupun *'urfi* di propinsi, tetapi kedua pihak harus dikirim ke ibu kota dan diperiksa dalam *diwankhaneh* (*Ruznameh-i waqayi'-i ihifaqiyyeh,* No. 43, 3 Safar 1268/28 November 1851).
26. F.O. 60:201 Taylour Thomson to Clarendon, No. 23, Teheran, 18 Pebruari 1855.
27. *Ruznameh-i waqayi'i-i ihifaqiyyeh,* No. 407, 11 Rabiul-akhir 1275/19 November 1858.
28. *Ruznameh-i dawlat-i 'aliyyeh-i Iran,* No. 535, 17 Rajab 1279/8 Januari 1863. Lihat lebih lanjut F. ADAMIYYAT, *Fikr-i Azadi,* Teheran, 1961, halaman 72 dan berikutnya.
29. *Ruznameh-i dawlat-i 'aliyyeh-i Iran,* 28 Jumadialakhir 1280/10 Desember 1863.
30. CURZON, *Persia and the Persian question,* London, 1892, I, 460.

31. Ibid., I, 461-2.
32. Lihat lebih lanjut *Khatirat-i Mirza Ali Khan Amin al-Dawleh,* edisi kedua, Farmanfarmaian, Teheran, 1962, halaman 164 dan berikutnya.
33. F.O. 416:26. No. 9 Hardinge to Grey, London, 23 Desember 1905. Rusia juga menentang rencana itu karena dipandang berlawanan dengan Pakta Turkomanchay.
34. *Ruznameh-i waqayi'-i ittifaqiyyeh,* No. 179, 8 Syawwal 1270/4 Juli 1854.
35. Lihat Artikel "Hukuma". dalam *The Encyclopedia of Islam,* edisi baru, Brill, 1960.
36. *Raznameh-i dawlat-i 'aliyyeh-i Iran,* No. 535, 17 Rajab 1279/3 Januari 1863.
37. F.O. 60:223, Abott to Clarendon, No. 5, Trebizond, 22 Maret 1857.
38. Lihat lebih lanjut artikel saya "The Tobacco regie: prelude to revolution", dalam *Studia Islamica,* XXII dan XXIII.
39. Bandingkan F.O. 65:1544. Hardinge to Salisbury, No. 152, Teheran, 17 November 1897.
40. F.O. 60:698. Laporan tahunan tahun 1904.
41. F.O. 60:698. Ikhtisar bulanan tentang kejadian-kejadian tertanggal 4 Pebruari, termasuk dalam Hardinge to Lansdowne, No. 29, Teheran, 8 Pebruari 1905.
42. Spring Rice yang ditugaskan ke Teheran sebagai sekretaris satu pada Kementerian Inggris pada tahun 1899, dalam surat pribadinya tertanggal 30 November 1899 menggambarkan situasi Teheran setelah penggantian Muzaffar al-Din Shah dengan kata-kata berikut ini: "Ia datang dari Tabreez ke Teheran, di mana ia hidup sebagai putra mahkota, seluruh kelompok anggota istana yang kelaparan mendesaknya memberikan kekayaan ketika ia menjadi raja; dan ia melepaskan sebagian besar tanah-tanah kerajaan kepada mereka, sehingga ia benar-benar miskin dan harus mengemis uang bilamana akan mengadakan suatu perjalanan. Akibatnya adalah tanaman gandum yang ditanam di tanah-tanah kerajaan dahulu dikumpulkan dan disimpan oleh anggota istana, yang juga melakukan monopoli untuk mendapatkan kenaikan harga. Sekarang, setelah panen yang cukup baik, harga roti berlipat dua dibandingkan tahun sebelumnya dan tiga kali lipat dibandingkan dua tahun sebelumnya. Para pejabat tinggi diperintahkan untuk menyediakan kebutuhan roti di kota, tetapi karena mereka sendiri berspekulasi, maka apa yang dikerjakannya adalah memanfaatkan kekuasaannya untuk mencegah biji-bijian masuk ke kota dan menjual simpanannya sendiri dengan harga yang sangat tinggi. Rakyat menjual segala harta bendanya untuk mendapatkan roti; para pembuat roti mencampur berbagai macam kekotoran dalam roti yang dimasaknya —

lumpur jalanan, jerami dan batu-batu – hingga penyakit menyebar luas, terutama di kalangan anak-anak kecil. Orang-orang yang bertemu saling pandang satu dengan lainnya dan mengeluh serta bermaksud akan mengadakan kerusuhan, namun satu-satunya pemimpin mereka adalah para Mullah yang juga berspekulasi biji-bijian. Jalan-jalan dibiarkan tidak terawat dan binatang-binatang beban banyak yang kelaparan. Pada hari berikutnya terjadi huru-hara. Sejumlah wanita menemui Shah ketika ia pulang dari berburu dan memaki-makinya. Hasilnya adalah digantinya Gubernur lama dengan yang baru yang lebih buruk dibanding yang lama ...

"Sedangkan mengenai agama – para pemimpin, para mullah adalah perampok terburuk dalam negara. Sebagai pelaksana hukum, mereka sedikit demi sedikit mendapatkan tanah yang luas, menjalar dari desa yang satu ke desa yang lain. Uang akan membeli semuanya, tetapi mereka tetap merupakan satu-satunya tempat berkumpul dan merupakan pusat bagaimana perasaan massa, dan Sadrazam tahu akan hal ini dan memberikan dukungan. Sementara itu kaum Bab yang berada di tengah-tengah antara Kristen dan Islam – tanpa ajaran tertentu maupun perasaan fanatik – terus-menerus memperoleh kemajuan "(*The letters and friendships of Sir Cecil Spring Rice,* diedit oleh Stephen GWYNN, London, 1930, 1, 296-8).

43. Untuk pembicaraan mengenai masalah pinjaman lihat lebih lanjut R.I., GREAVES, "British Policy in Persia, 1892 – 1903", dalam *Bulletin School of Oriental and African Studies,* XXVIII (1965), bagian 1, halaman 34-60 dan bagian 2, halaman 281-307.
44. Lihat lebih lanjut artikel saya, "Secret societies and the Persian Revolution of 1905-6", dalam *St. Antony's Papers, No. 4, Middle East affairs,* No. 1, 1958, halaman 13-60.
45. Lihat lebih lanjut "Secret societies and the Persian revolution", halaman 52 dan berikutnya.
46. F.O. 60:698. Hardinge to Lansdowne, No. 69, Teheran, 24 Maret 1905, ditandai terbatas.
47. Seperti dinyatakan oleh Spring Rice, yang dikirim ke Persia untuk kedua kalinya pada tahun 1906, untuk kali ini sebagai menteri, dalam surat pribadinya tertanggal 21 Pebruari 1907 bahwa gerakan itu bersifat nasional dan keagamaan. Ini merupakan, ia menulis, "semacam usaha terakhir untuk membuat Persia kembali berdiri di atas kaki sendiri. Perasaan mereka adalah bahwasanya bangsa-bangsa asing *tidak* akan memilikinya, walaupun untuk jangka waktu yang sangat pendek" (*The letters and friendships of Sir Cecil Spring Rice,* II, 91). Dalam surat lainnya terganggal 24 April 1907 ia menulis, "Anda akan saksikan bahwa gerakan yang terjadi di sini bersifat nasional dan sekaligus kea-

gamaan, dan hal ini sangat mudah diatur melalui motif-motif ras maupun keagamaan menentang dinasti asing yang menjadi bayaran kekaisaran asing ... Di sini Anda temui elemen-elemen gerakan reformasi ras-keagamaan yang benar-benar ada. Karena gerakan reformasi bagi mereka adalah protes menentang segala jenis sistem pemerintahan yang dhalim yang pernah ada". (ibid., II, 98).

48. Bandingkan M. MAHDI, "Modernity and Islam", dalam *Modern trends in world religions*, 1959, halaman 16 dan berikutnya.
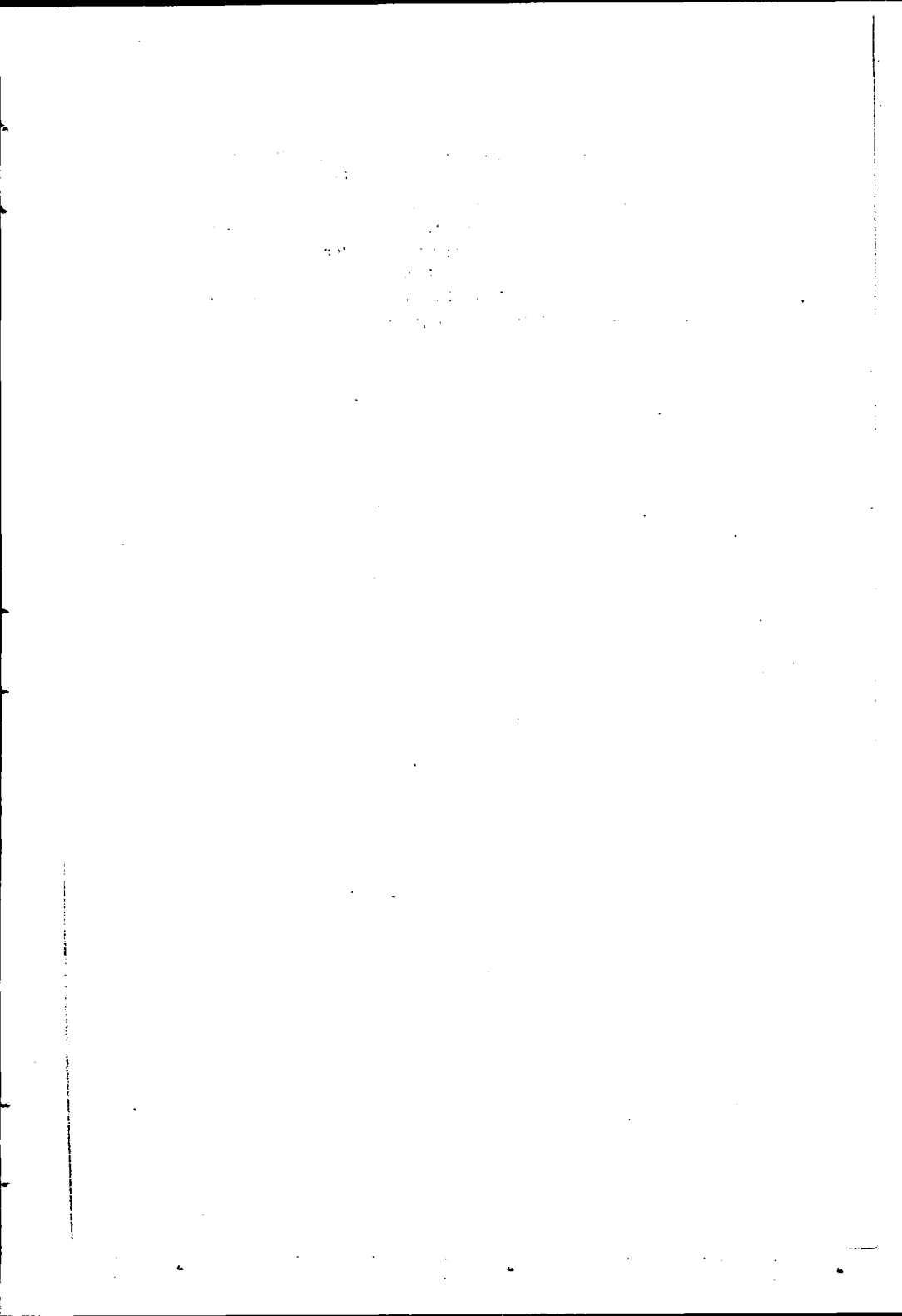
Bab 8.
Sifat Revolusioner Ulama Iran: Antara Khayalan dan Kenyataan

Oleh • Willem M. Floor

UNTUK memahami kedudukan dan peranan ulama dalam masyarakat Iran kita harus menyadari bahwa sampai sekarang Iran merupakan suatu negara praindustri. Masyarakat semacam itu dikuasai oleh suatu elite kekuatan kecil, yang mengontrol fungsi-fungsi penting masyarakat. Para pemegang fungsi-fungsi atau posisi-posisi tersebut, tak peduli apakah fungsi-fungsi tersebut adalah politis, ekonomis, atau relijius, terutama berasal dari keluarga-keluarga penting. Kekuasaan keluarga-keluarga tersebut seringkali berlanjut melebihi kehidupan suatu dinasti[1] meskipun beberapa keluarga bangkit dan jatuh dengan cepat.

Dalam stratum relijius masyarakat, para pemegang fungsi-fungsi relijius yang paling penting terutama juga berasal dari keluarga-keluarga yang berstatus tinggi. Salah satu dari fungsi-fungsi tradisional mereka dalam masyarakat adalah mengesahkan hukum elite politis. Karena fungsi itu mereka bisa mempengaruhi, jika tidak memegang, kekuasaan politis. Meskipun orang-orang yang berasal dari kelas yang rendah mungkin mempunyai kedudukan dalam organisasi keagamaan dan bahkan mencapai fungsi-fungsi yang tertinggi, ini adalah jarang sekali. Bahkan meskipun seseorang dari kelas yang rendah memasuki tingkatan elite, hal ini tidak mengubah jurang kelas yang mendasar.[2]

Karena adanya pengesahan kekuasaan melalui agama, nilai-nilai dan norma-norma adalah sangat penting bagi struktur politis suatu masyarakat praindustri. Sistem keagamaan memberi hampir semua struktur legal formal. Ini berarti bahwa para pemimpin keagamaan, dengan fungsi-fungsi legal, sosial, dan edukasional mereka yang besar, dalam banyak hal menentukan batas-batas kekuasaan kelas yang memerintah. (Fungsi-fungsi yudikatif serta pendidikan didominasi dan dimonopoli oleh kelas keagamaan.)

Perlawanan terhadap negara di Iran abad ke-19 ditandai oleh dua tujuan. Yang pertama adalah suatu tujuan anti-imperialis, dan yang kedua adalah suatu tujuan anti-Qajar. Perlawanan anti-imperialis bersumber dari pelanggaran negara-negara asing non-Islam terhadap wilayah Islam Iran. Perlawanan ini juga ditujukan terhadap penetrasi politis dan ekonomis negara-negara asing non-Islam terhadap Iran. Sebagai akibat dari penetrasi ini, pemerintah Iran terus-menerus berada di bawah pengaruh kekuatan-kekuatan "kafir" asing seperti Rusia dan Britania Raya. Di sini kita mengenali peranan tradisional ulama sebagai para pembela nilai-nilai relijius, yaitu untuk mengembangkan integritas wilayah *Dar ul-Islam* dalam menghadapi *Dar ul-Harb.*[3)]

Tujuan kedua, yaitu perlawanan anti-tiranis yang dipimpin oleh ulama adalah kurang tradisional. Di kalangan ulama Iran kita dapati petunjuk bahwa perlawanan semacam itu dianggap sebagai gerakan minoritas pada masa almarhum Safavid, atau setidak-tidaknya perlawanan ini mungkin disebut suatu kecenderungan anti-dinasti. Meskipun demikian, orang-orang yang menyokong cita-cita peranan anti-tiranis ulama Syi'ah berargumen bahwa selama masa Safavid perjuangan ini terhalang oleh pernyataan Safavid bahwa dia adalah keturunan Imam dan bahwa ini merupakan masa pembentukan Islam Syi'ah di Iran. [4)]

Namun, saya tidak setuju dengan perselisihan ini dan saya akan menyarankan bahwa perlawanan yang dinyatakan sebagai anti-tiranis yang dilakukan oleh ulama di Qajar Iran disebabkan oleh dua faktor. Pertama-tama perlawanan semacam ini seringkali adalah bersifat lokal dan bertujuan

untuk memperoleh pengaruh politis yang lebih besar maupun kontrol politis yang menyeluruh di daerah setempat. Untuk maksud tersebut ulama memiliki pasukan-pasukan pribadi. [5] Kita harus menyadari bahwa meskipun secara formal Iran mempunyai suatu pemerintah pusat, biasanya kekuasaannya tidak jauh melebihi ibu kota. Keluarga-keluarga elite lokal diizinkan untuk mengatur daerah-daerah mereka sendiri sebaik mungkin asalkan mereka mengakui Shah sebagai penguasa sah mereka. Pengakuan ini dibuat menjadi nyata oleh mengalirnya pajak-pajak dan hadiah-hadiah secara teratur dari propinsi-propinsi ke ibu kota. [6]

Pada tahap berikutnya suatu aspek baru dari perlawanan semacam ini menjadi terwujud selama abad ke-19 ketika negara memberlakukan suatu kebijaksanaan yang melanggar kedudukan ulama, baik sosio-ekonomis maupun politis. Negara terus-menerus berusaha membatasi pengaruh pengadilan-pengadilan keagamaan, mengurangi jumlah pensiun negara kepada ulama, bahkan sementara masa-masa awal sekularisasi ilmu pengetahuan sebagai akibat dari hubungan-hubungan dengan Eropa mengancam monopoli ulama dalam bidang pendidikan. [7]

Karena itu, jika ulama Syi'ah nampaknya menganut suatu tujuan umum, yang lebih sering tak lain dan tak bukan adalah suatu paralelisme minat: ulama tidak membela tujuan tersebut demi alasan-alasan yang sama sebagaimana kelompok-kelompok lain terlibat. [8]

Pandangan sebagian besar ulama mengenai struktur politis dan sosio-ekonomis masyarakat Iran secara esensial tidak berbeda dengan pandangan elite sekuler. Kondisi-kondisi kerja para petani yang menggarap tanah, baik yang merupakan harta pribadi pemimpin-pemimpin keagamaan maupun harta wakaf yang diatur oleh para ulama, tidaklah lebih baik (dan sering lebih buruk) daripada kondisi-kondisi para petani yang bekerja di tanah para tuan tanah atau negara. [9]

Lebih jauh dapatlah dikatakan bahwa peranan kelas keagamaan di Iran adalah sebagai para pelindung tatanan yang ada, tetapi hal ini akan memerlukan suatu studi yang terpi-

sah. [10] Untuk maksud-maksud kita garis besar umum yang telah digambarkan di atas adalah mencukupi.

Tidaklah mengherankan bahwa Algar, dalam bukunya tentang ulama di Iran abad ke-19, sampai pada kesimpulan bahwa "segala keinginan untuk membentuk kembali dengan pasti norma-norma kehidupan politis dan dasar-dasar negara adalah asing bagi para ulama di Qajar Iran." [11]

Peranan ulama di Iran abad ke-20 membuat Algar secara sepihak mengubah pendiriannya terhadap kesimpulan bukunya tentang peranan mereka pada abad ke-19. Dengan mengambil peranan Ayatullah Khomeini sebagai poros bagi argumennya, Algar berkata bahwa "permusuhan Khomeini mulai dinyatakan secara terbuka pada tahun 1963" dan "bahwa target-target nyata kritikan Khomeini terhadap rejim tersebut pada tahun 1963 nampaknya adalah sebagai berikut: pemerintahan otokratis, dan penyalahgunaan konstitusi; anjuran untuk memberi hak-hak kapitularis kepada penasehat-penasehat dan personil-personil militer Amerika di Iran dan sekutu-sekutu mereka; adanya kontrak pinjaman 200 juta dollar dari Amerika Serikat untuk pembelian perlengkapan militer; dan pemeliharaan hubungan-hubungan diplomatik, komersial serta hubungan-hubungan lain dengan Israel, suatu negara yang memusuhi orang-orang Islam dan Islam." [12] Algar secara eksplisit menyangkal bahwa agitasi religius adalah ditujukan untuk menentang rencana-rencana pemerintah untuk mengadakan *land reform* dan hak pilih bagi wanita.[13] Di sini akan kita lihat bahwa argumen Algar membuang fakta-fakta penting dan sebagai gantinya dia benar-benar bertumpu pada peristiwa-peristiwa yang terjadi sesudah tanggal-tanggal yang ditunjuk. Dia juga memilih untuk mengabaikan atau mengesampingkan pendapat-pendapat konservatif yang dimusuhi oleh sebagian besar ulama.

Dari tahun 1953 sampai tahun 1962 hanya beberapa masalah merusakkan hubungan yang bisa dikatakan baik yang terjalin antara pemerintah dan sebagian besar ulama. Hubungan ini dalam banyak hal disebabkan oleh sikap diam yang ditunjukkan oleh Ayatullah Burujirdi, *Marja'i taqlid*

tunggal yang terakhir (sumber contoh) bagi kaum Syi'ah. [14] Menurut Muhammad Reza Shah, dia "selama suatu masa yang panjang sering berhubungan dengan Burujirdi..... kepada pemimpin keagamaan inilah dia berpaling untuk berunding selama tahun-tahun Mossadeq, ketika monarki itu sendiri merasakan adanya angin perubahan. Burujirdi, pemimpin agama tertinggi tradisi religio-nasional, mendukung Muhammad Reza Shah." [15] Hal ini juga dijalankan oleh pemimpin keagamaan yang kurang bersikap diam, Ayatullah Kashani, seorang pemimpin nasionalis dan politis yang keras yang memutuskan hubungan dengan Mossadeq dan secara implisit mendukung Shah. Kendatipun demikian, Kashani menentang pemerintah ketika pada tahun 1954 Iran menormalisir hubungan dengan Kerajaan Inggris. Dia, bersama-sama dengan para pemimpin politik yang lain (seperti Dr. Bagha'i dari partai Toilers Iran), memprotes perubahan kebijaksanaan ini dan mencoba meningkatkan kesulitan bagi pemerintah. Dr. Bagha'i, tidak seperti Kashani, pada saat yang sama menggunakan kesempatan ini untuk menyerang sifat otokratis pemerintah. [16]

Pada tahun 1955 para ulama menyebabkan timbulnya demonstrasi-demonstrasi ketika mereka menyerang masyarakat Baha'i di Iran. Kerusuhan-kerusuhan yang terjadi selanjutnya memaksa pemerintah untuk melindungi pusat-pusat keagamaan Baha'i dengan kekuatan militer. [17] Kerusuhan terakhir yang berorientasi keagamaan terjadi pada tahun yang sama ketika Fedayin-i Islam, suatu kelompok keagamaan konservatif ekstremis, mengadakan suatu percobaan pembunuhan yang gagal terhadap perdana menteri pada saat itu yaitu Husain Ala. [18]

Dari tahun 1955 sampai tahun 1961 tak ada perbedaan-perbedaan besar dinyatakan antara para ulama dan pemerintah, meskipun beberapa sarjana telah mencatat tumbuhnya kecenderungan sewenang-wenang dan totaliter dari pemerintah Shah selama masa tersebut. [19]

Tentu saja hal ini tidak berarti bahwa para ulama setuju dengan kebijaksanaan pemerintah selama masa itu. Burujirdi, misalnya, "secara pribadi sama sekali tidak berusaha

menyembunyikan ketidaksetujuannya terhadap beberapa kebijaksanaan rezim tersebut; dia juga menjelaskan bahwa dia sama sekali tidak bersiap-siap untuk mengadakan pemberontakan. Beberapa orang yang tidak puas, melihat ke arah Qum untuk mencari suatu tanda. Apa yang mereka lihat adalah suatu sikap yang benar-benar tidak mau bertindak, yang dijalankan dengan kesopanan yang berlebihan.[20]

Sikap diam Burujirdi, pembatasan-pembatasan yang dikenakan pada kegiatan-kegiatan Kashani, dan perlindungan pemerintah kepada Ayatullah Behbehani [21] dan kelompoknya di Teheran terbukti sangat membantu dalam mendiamkan para ulama yang mungkin berkeinginan untuk berteriak menentang pemerintah.[22] Yang benar-benar penting adalah kedudukan unik Burujirdi sebagai *marja'i taqlid* tunggal, yang harus diikuti oleh semua orang.

Namun, ketika kabinet Manuchehr Eqbal mengajukan, dengan restu Shah, suatu rancangan undang-undang land reform kepada Majelis pada tahun 1960, hubungan dengan para ulama menjadi sangat tegang. Sebenarnya, "perlawanan (Burujirdi) terhadap program Shah mengakibatkan berakhirnya suatu dialog efektif antara rezim tersebut dan para ulama."[23] Ketika menjadi jelas bahwa pemerintah ingin mengajukan rancangan undang-undang land reform, para tuan tanah telah menghimbau Burujirdi dan pemimpin-pemimpin keagamaan yang lain agar berbicara menentang kebijaksanaan ini, yang mereka katakan tidak konstitusional dan bertentangan dengan Syari'at. Burujirdi menyetujui dan menulis surat berikut ini kepada Ayatullah Behbehani pada tanggal 13 Februari 1960.[24]

Atas nama Tuhan, Yang Maha Pengasih, Yang Mahamurah

Kepada Hojjat al Islam-Nya yang Tertinggi Behbehani

Dengan segala hormat saya beritahukan kepada Yang Mulia bahwa ketika beberapa waktu yang lalu terdengar desas-desus sehubungan dengan pembatasan pemilikan (tanah), melalui nasehat dan pelaksanaan kewajiban saya, secara tertulis saya menyatakan kepada Yang Mulia Perdana

Menteri tentang ketidakcocokan hal ini dengan hukum-hukum agama suci Islam. Jawaban-jawaban yang saya terima tidak meyakinkan, dan pada saat ini saya menerima banyak surat dari bermacam-macam orang dan lembaga di berbagai kota yang meminta pandangan-pandangan hamba yang sederhana ini. Karena tidaklah layak untuk menutupi hukum-hukum kudus, saya tak mempunyai pilihan lain selain menjawab pertanyaan-pertanyaan rakyat. Meskipun setiap saat saya telah menyatakan sesuatu kepada para penguasa, jelaslah bagi mereka bahwa saya telah terdorong terutama oleh keinginan untuk melindungi hukum-hukum agama dan kepentingan-kepentingan Negara. Saya merasa heran bahwa dalam hal ini jelas ada bukti ketergesa-gesaan dalam menyetujui Rancangan Undang-Undang dengan tanpa pertimbangan dan studi dan dalam ketidakhadiran Yang Mulia Sri Baginda. Saya memohon kepada Yang Mulia untuk memberitahukan kedua Badan Perwakilan dalam cara yang anda anggap tepat untuk mencegah agar tidak menyetujui (Rancangan Undang-Undang tersebut). Saya berdoa kepada Tuhan Yang Mahabesar demi lebih baiknya kepentingan-kepentingan orang-orang Islam.
Tertanda Husain al-Tabataba'i, al-Burujirdi

25 Sha'ban 1379

Pada hari yang sama ketika dia menerima surat ini, Ayatullah Behbehani menulis surat kepada Sardar Fakhir Hikmat, ketua Majelis, yang antara lain berbunyi:

Rancangan Undang-Undang Land Reform telah mengganggu opini masyarakat dan membuat seluruh orang Islam gelisah ..... karena Rancangan Undang-Undang tersebut berisi pasal-pasal yang bertentangan dengan ajaran dan dasar-dasar agama suci dan Konstitusi; adalah mengherankan ..... bahwa meskipun telah diadakan debat mengenai Rancangan Undang-Undang tersebut ..... Rancangan tersebut adalah tidak sah meskipun Rancangan tersebut akan disetujui.[25)]

Dalam suratnya, Ayatullah Behbehani menunjuk pada

pasal 2 dan 15 Konstitusi. Pasal 2 menyatakan bahwa tidak boleh ada peraturan yang disetujui oleh Majelis yang bertentangan dengan agama dan ajaran Islam. Pasal 15 menyatakan, "Hak milik seseorang tidak boleh dirampas kecuali dengan suatu alasan yang sah."

Kedua surat tersebut mempunyai pengaruh yang diinginkan pada mayoritas wakil-wakil Majelis, yang juga menentang rancangan undang-undang tersebut. Namun, didukung oleh penguasa keagamaan tertinggi, wakil-wakil Majelis bekerja demi perubahan rancangan undang-undang tersebut agar sesusai dengan konstitusi dan Syari'at. Dalam tujuan ini wakil-wakil Majelis berhasil, karena seluruh alenia yang dianggap ofensif oleh para ulama dihilangkan, dan hasilnya mempunyai sangat banyak lubang kelemahan dan perkecualian-perkecualian yang tidak berguna sebagai suatu pembaharuan.[26]

Akan tetapi, bukanlah kemunduran ini yang menyebabkan pengunduran diri Eqbal. Kedudukannya memang telah menjadi tidak aman karena ketidakmampuannya untuk menyeimbangkan budget atau keseimbangan pembayaran-pembayaran, sementara sumbangan Amerika Serikat untuk pemerintahnya juga dianggap tidak mencukupi. Peristiwa-peristiwa yang akhirnya memutuskan perkara tersebut adalah pemilihan umum curang yang telah dia atur, yang menimbulkan perlawanan luas.

Pada tanggal 27 Agustus 1960, Eqbal mengundurkan diri dan digantikan oleh Sharif-Imami sebagai perdana menteri. Karena Shah telah menyatakan ketidakpuasannya dengan pemilihan umum, dia mendesak wakil-wakil yang terpilih untuk mengundurkan diri, yang bertentangan dengan konstitusi. Sharif-Imami harus mengatur pemilihan umum baru, dan dia juga harus mengatasi pengaruh-pengaruh depresi ekonomi yang kejam yang telah melanda Iran. Banyak pedagang mengalami kebangkrutan, sementara daya beli kaum miskin semakin menurun sampai di bawah tingkat pemasukan mereka yang benar-benar sudah rendah.[27] Pemilihan umum-baru diadakan pada awal tahun 1961; pada masa itu partai-partai politik nasionalis seperti Front Nasio-

nal dan Partai Toilers sangatlah aktif. Dr. Bagha'i, dengan Pengawal-pengawal Kemerdekaannya, berusaha untuk memaparkan kecurangan-kecurangan pemilihan umum tersebut.[28]

Pemogokan para mahasiswa pada bulan Januari 1961, yang diorganisir oleh Front Nasional, merupakan suatu tanda tumbuhnya sikap membandel di kalangan lapisan masyarakat yang ikut berpolitik. Suatu pemogokan dan demonstrasi yang dilakukan oleh para guru yang dibayar rendah, yang dimulai pada tanggal 2 Mei 1961, menyebabkan jatuhnya Sharif-Imami. Seorang guru terbunuh oleh polisi, dan para pemimpin pemogokan ditahan.[29]

Di bawah tekanan Amerika Serikat Shah mengangkat Ali Amini, seorang yang beraliran dan berpendirian bebas, sebagai perdana menteri. Karena dia memperoleh dukungan Amerika Serikat dan karena dia ingin melaksanakan suatu kebijaksanaan pembaharuan, dia dapat diterima oleh Shah, yang memerlukan bantuan Amerika Serikat mengingat posisi ekonomi Iran yang sulit. Amini telah setuju untuk menerima jabatan perdana menteri dengan dua syarat: bahwa Shah membubarkan Majelis dan bahwa dia memberi Amini kekuasaan-kekuasaan khusus. Shah setuju dengan kedua tuntutan tersebut, meskipun kekuasaan-kekuasaan khusus tersebut baru diberikan sesudah 6 bulan Amini memegang jabatan.

Pada tanggal 6 Mei 1961, Amini mengajukan kabinetnya, yang di antaranya termasuk Darrakhshsh, pemimpin pemogokan para guru, sebagai menteri pendidikan; seorang bekas anggota Partai Tudeh, Alamuti, sebagai menteri pertanian yang kemudian menjadi pelopor land reform selama dua tahun berikutnya.[30]

Amini segera menghadapi kesulitan dengan para ulama dan oposisi politis, terutama Front Nasional. Meskipun kedua kelompok tersebut mempunyai tujuan yang berbeda, oposisi mereka terutama terpusat pada tuntutan mereka akan pemilihan umum yang bebas.

Untuk menangkal oposisi dari para ulama terutama kelompok Behbehani, Amini berusaha untuk memajukan hu-

bungan-hubungannya dengan para pemimpin keagamaan yang menentangnya. Burujirdi meninggal pada tanggal 30 Maret 1961 dan tak ada seorang calon pun terbukti cukup kuat untuk memenuhi persyaratan sebagai penggantinya sebagai *marja'i taqlid* tunggal. Hal ini bukan berarti tidak adanya calon-calon, karena banyak orang berusaha sebaik mungkin untuk memperoleh kedudukan tersebut. Yang paling menonjol di antara mereka adalah Ayatullah Milani (Mashad), Ayatullah Khunsari (Teheran), Ayatullah Shari'atmadari (Qum), dan Ayatullah Hakim (Najaf). Shah, dengan mengirim sebuah telegram duka cita kepada Ayatullah Hakim pada saat kematian Burujirdi, telah mencoba mempengaruhi pemilihan *marja'i taqlid* dengan berpihak pada Hakim. Ayatullah Hakim tidak hanya seorang warga negara Irak tetapi juga seorang penduduk Najaf, yang sesungguhnya akan mengurangi pengaruh Qum sebagai suatu pusat keagamaan. Namun, dukungan Shah sama sekali tidak berguna.[31)]

Amini, pada kesempatan 40 hari (arba'in) sesudah wafatnya Burujirdi, pergi berkunjung kepada famili-famili Burujirdi di Qum untuk meminta dukungan mereka. Dia nampaknya tidak berbicara kepada pemimpin keagamaan yang lain di Qum pada saat itu.

Pada tanggal 10 Agustus 1961, Ayatullah Behbehani meminta Shah untuk mengadakan pemilihan umum baru. Amini, yang tak mau dikalahkan, mengunjungi lawan dan penentang politik Behbehani, yaitu Ayatullah Kashani di rumah sakit. Foto-foto suratkabar memperlihatkan dia sedang mencium tangan Kashani. Jadi, jelas bahwa Amini mungkin mencari dukungan keagamaan di tempat lain. Beberapa hari kemudian Amini mengunjungi tempat suci Imam Reza di Mashad, berbicara dengan para pemimpin keagamaan di sana, dan menyuruh dirinya difoto ketika sedang menyapu halaman tempat suci tersebut.

Meskipun Amini gagal untuk menarik dukungan dari para pemimpin keagamaan yang lebih penting, bagaimanapun juga dia telah menenangkan sebagian lembaga keagamaan. Amini menggarisbawahi masa suksesnya dengan para ula-

ma dengan mengangkat, untuk pertama kalinya dalam sejarah konstitusional Iran, seorang wakil menteri untuk masalah-masalah keagamaan. Dia juga menyatakan bahwa pembatasan-pembatasan pada upacara-upacara duka keagamaan akan dikurangi dan bahwa penjualan minuman-minuman keras juga akan dikenakan beberapa pembatasan. Semuanya ini berhasil meninggalkan suatu kesan baik di antara kalangan-kalangan keagamaan.[32]

Usaha-usaha Amini untuk memajukan hubungan-hubungan dengan oposisi politis kurang berhasil. Meskipun dia telah mengadakan suatu hubungan dengan Front Nasional sebelum dia menjadi perdana menteri, hubungan-hubungan segera saja mendingin. Sebagai imbalan untuk dukungan Front Nasional Amini telah menjanjikan pemilihan umum yang bebas, di mana Front Nasional mungkin mengambil bagian, dan dia telah memberi Front Nasional kebebasan untuk bertindak. Front Nasional tidak pernah mempunyai rencana untuk menjadi partai tetap, tetapi menjadi suatu gabungan dari beberapa kekuatan oposisi. Selama pemilihan umum untuk Majelis yang ke-20 (1960) Front Nasional telah terpecah: satu kelompok di bawah pimpinan Mehdi Bazargan telah berusaha untuk memboikot pemilihan umum. Akan tetapi, kelompok mayoritas berharap, dengan terpilihnya pemimpinnya Allahyar Salih, untuk mengungkapkan kejahatan-kejahatan pemerintah dan kelas yang berkuasa.

Persahabatan dengan Amini berakhir ketika suatu demonstrasi politis pada tanggal 21 Juni 1961 ditindas oleh tentara, dengan ditahannya para pemimpin Front Nasional pada malam sebelumnya. Ketika pemimpin-pemimpin ini dibebaskan, Front Nasional mencoba menggunakan metode-metode yang kurang demonstratif dengan mengadakan suatu konferensi pers. Namun, tentara menghentikan para wartawan agar tidak mencapai rumah Allahyar Salih, dan dia mengeluarkan suatu komunike tertulis pada tanggal 20 Agustus 1961 [33] sebagai juru bicara Front Nasional.

Alasan yang dikemukakan oleh Dr. Amini bagi ditundanya pemilihan umum bahkan dibuat semakin buruk oleh

pernyataannya bahwa Majelis akan merintangi jalannya untuk mengadakan pembaharuan dan kampanye anti-korupsi. Dalam pesannya pada Hari Konstitusi-konstitusi tersebut telah ditindas oleh Dr. Amini sendiri – Dr. Amini menyatakan bahwa dia telah berusaha menciptakan suatu suasana yang menyenangkan untuk memulai pemilihan umum yang berdasar pada kesetaraan dan keadilan...Jelaslah bahwa suatu Majelis yang benar-benar representatif, yang dipilih berdasar pada kesetaraan dan keadilan, tak akan pernah merintangi jalan bagi pembaharuan-pembaharuan dan kampanye-kampanye anti-korupsi. Tetapi, Majelis ini akan merintangi jalan bagi kediktatoran dan penyalahgunaan hukum-hukum oleh pemerintah. Alasan terakhir inilah yang telah memaksa Dr. Amini untuk menindas Konstitusi dan untuk menolak melaksanakan persyaratan-persyaratannya.

Pemerintah Dr. Amini telah mengirimkan delegasi-delegasi ke negara-negara asing untuk mencari dana pada saat Majelis belum terbentuk, meskipun Pasal 25 Konstitusi menegaskan bahwa segala pinjaman, baik dari sumber-sumber dalam maupun luar, harus mendapat persetujuan Majelis. Berdasarkan Konstitusi kami, Front Nasional memperingatkan semua sumber dalam dan luar negeri bahwa segala pinjaman yang diberikan kepada pemerintah Iran tanpa persetujuan Majelis tidak akan mengikat rakyat Iran dan akan dianggap nol dan tidak sah.[34]

Pernyataan tersebut, antara lain juga menuntut pemilihan umum yang bebas. Front Nasional tidak tinggal diam sebagaimana dalam tahun-tahun sebelumnya dan, sebagai hasil dari suatu organisasi yang lebih baik dan lebih bersatu dalam garis politik yang dianut, Front Nasional dapat bertindak lebih efektif dengan persatuan yang lebih baik. Hal ini menghasilkan suatu pamflet pada tanggal 27 Oktober 1961, yang menggariskan tujuan politis Front Nasional, yang mempunyai tiga tujuan utama.[35]

1. Untuk menjamin hak-hak asasi rakyat sesuai dengan Konstitusi dan Deklarasi PBB mengenai Hak-Hak Asasi Manusia.
2. Untuk mendirikan suatu pemerintah yang sah yang dipi-

lih melalui suatu pemungutan suara yang bebas dan umum.

3. Untuk menganut suatu politik luar negeri yang bebas berdasarkan sikap tidak memihak.

Amini sekarang menuduh bahwa Front Nasional bekerja sama dengan oposisi reaksioner, termasuk golongan sayap kanan seperti ketua SAVAK, Taimur Bakhtiyar, dan Sardar Fakhir Hikmat, bekas ketua Majelis.

Pada tanggal 14 Nopember 1961 Amini mengumumkan bahwa Shah telah memberi dia kekuasaan-kekuasaan eksekutif yang sebelumnya belum pernah diberikan. Sehari kemudian Front Nasional menyatakan oposisinya terhadap kekuasaan-kekuasaan baru tersebut. Hal ini tidak banyak berhasil, karena Amini memerintahkan penangkapan terhadap para pemimpin kelompok-kelompok oposisi sayap kanan maupun kiri. Shah membenarkan tindakannya memberi kekuasaan-kekuasaan ekstensif kepada Amini dengan mengatakan bahwa tindakan semacam itu adalah perlu untuk memperkenalkan beberapa pembaharuan dan untuk memperbaiki undang-undang pemilihan umum.

Meskipun demikian, oposisi terhadap Amini semakin berkembang. Dia mengumumkan apa yang disebut amandemen terhadap undang-undang land reform pada tanggal 7 Januari 1962. Karena Arsanjani, menteri pertanian, mengetahui bahwa kaum oposisi akan menyerang amandemen tersebut, pada tanggal 18 Januari 1962 dia menyatakan bahwa undang-undang yang diperbaharui tidaklah bertentangan dengan konstitusi maupun hukum keagamaan: "Memang benar Burujirdi telah menyatakan bahwa dia menentang Rancangan Undang-Undang tahun 1960, tetapi Majelis telah menyetujuinya. Apabila fatwa tersebut adalah sesuatu yang benar, maka seluruh wakil Majelis yang telah menyetujui fatwa tersebut juga telah bertindak melanggar hukum, karena fatwa tersebut mengikat mereka.....Apa yang sedang kita lakukan adalah memegang teguh fatwa tersebut, yang atas nama Konstitusi perlu saya lakukan, tetapi kita telah memperbaiki undang-undang tersebut....karena (jika tidak demikian) undang-undang itu tidak dapat

dipaksakan."[36]

Sardar Fakhir Hikmat memprotes pernyataan Arsanjani dalam suatu surat terbuka pada tanggal 19 Januari 1962. Dia menuduh bahwa Arsanjani telah memutarbalikkan kebenaran. Pemerintah Eqbal telah mengajukan suatu rancangan undang-undang yang bertentangan dengan hukum Islam. Karena itu, Burujirdi telah berbicara menentangnya. Hikmat kemudian memberitahu Shah tentang keberatan-keberatan Burujirdi. Shah kemudian memerintahkan Hikmat untuk mengusahakan agar rancangan undang-undang tersebut diubah sedemikian rupa sehingga rancangan tersebut sesuai dengan hukum keagamaan dan konstitusi. Rancangan undang-undang tersebut kemudian diubah oleh komite pertanian Majelis sehingga rancangan tersebut sesuai dengan hukum keagamaan. Teks yang baru tersebut kemudian disetujui oleh Burujirdi.[37]

Situasi politik memburuk ketika pada tanggal 22 Januari beberapa pemimpin Front Nasional dan pemimpin sayap kanan ditahan. Para mahasiswa Universitas Teheran, yang telah mengadakan pemogokan sejak tanggal 17 Januari, demi menunjukkan rasa simpati kepada rekan-rekan mereka dari Sekolah Guru Tinggi mengadakan protes. Para mahasiswa tersebut berbentrok dengan pihak militer (di Teheran dan kota-kota universitas yang lain). Akibatnya adalah salah seorang mahasiswa di Teheran meninggal dunia.[38]

Sementara itu Ayatullah Behbehani mempertimbangkan apa yang harus dilakukan. Karena Universitas Teheran masih ditutup dan kemenakannya masih ditahan, pada tanggal 9 Februari 1962 dia mengundang orang-orang penting tertentu di rumahnya untuk membicarakan situasi politik.[39] Dia mengusulkan untuk mengirim sebuah teks, kepada Shah yang isinya disetujui mereka semua:

Saya beranggapan sangatlah perlu bahwa Yang Mulia pertama-tama harus menyelidiki peristiwa-peristiwa yang telah terjadi dan mengetahui seberapa dalamkah hati nurani rakyat Iran, dan juga kemanusiaan, telah dilukai, serta mengungkapkan tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh para penguasa yang bertanggung jawab akhir-akhir ini

dengan dalih untuk menjaga keamanan. Selanjutnya, haruslah dijelaskan dengan segala cara yang mungkin bahwa Yang Mulia tidak setuju dengan peristiwa-peristiwa tragis tersebut. Dengan berkehendak baik saya meminta perhatian Yang Mulia bahwa semua kekejaman ini lagi-lagi mungkin berasal dari keterlambatan pelantikan Majelis dan dari kurangnya kebebasan bagi rakyat, yang sejauh ini belum pernah terjadi, dan yang merupakan pokok-pokok timbulnya protes-protes keras dari seluruh lapisan masyarakat. Karena itu, dengan sejelas-jelasnya harus saya kemukakan bahwa suatu keterlambatan mengenai hal ini akan merusakkan semua aspek kehidupan negara, dan bahwa keterlambatan terus-menerus akan semakin memperbesar kegagalan Yang Mulia dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban Yang Mulia. Saya menganggap adalah tugas saya untuk meminta. Yang Mulia agar sesegera mungkin memerintahkan perintah untuk memulai proses pemilihan anggota-anggota parlemen. Dapatlah dipastikan bahwa wakil-wakil rakyat yang jujur, yang dipilih secara bebas dengan tanpa campur tangan dari pihak mana pun, akan membenarkan segala tujuan yang benar, Insya Allah.[40]

Akan tetapi, Shah berkata kepada Behbehani bahwa dia tidak senang dengan nada telegram tersebut, dan bahwa jika telegram tersebut tidak diubah, dia tidak akan menerimanya. Namun, Behbehani menolak untuk menyerah dan telegram itu dikembalikan kepadanya.

Pada tanggal 23 Februari 1962 sekali lagi Arsanjani menyerang kalangan-kalangan keagamaan yang menentang land reform karena agitasi menentang undang-undang yang diperbaharui tersebut terus berlanjut.[41]

Pada tanggal 18 Juli 1962 Amini mengundurkan diri sebagai akibat dari semakin meningkatnya oposisi terhadap pemerintahnya dan juga sebagai akibat dari adanya fakta bahwa dia telah tidak mampu menyeimbangkan budgetnya; untuk itu dia menyalahkan pemerintah Amerika Serikat, yang telah menarik kembali bantuannya kepada Iran.[42]

Pada tanggal 19 Juli 1962 Asadollah Alam, seorang teman dekat Shah, diangkat sebagai perdana menteri, dan dia

menjanjikan pemilihan umum yang segera untuk menenangkan kelompok oposisi. Pada saat yang sama dia berjanji untuk melaksanakan 6 pokok keputusan kerajaan yang ditujukan kepada kabinet sebelumnya, yang antara lain meliputi reform dan suatu rancangan undang-undang pemilihan umum untuk dewan propinsi dan daerah.

Agitasi terhadap land reform tidak mereda. Alam terpaksa mengadakan kunjungan-kunjungan pribadi kepada Behbehani dan pemimpin-pemimpin keagamaan yang lain untuk membujuk mereka dan untuk meyakinkan mereka bahwa rancangan undang-undang land reform tidaklah bertentangan dengan hukum Islam dan konstitusi. Meskipun demikian, karena jaminan-jaminan tersebut hanya diberikan secara lesan, para pemimpin keagamaan tersebut tidak yakin dan tetap melanjutkan oposisi mereka. Mereka percaya bahwa dengan jatuhnya Amini, ide tersebut akan dihentikan, dan mereka benar-benar merasa terkejut ketika melihat bahwa Arsanjani tetap menjabat sebagai menteri pertanian. Orang-orang yang paling menonjol di antara para ulama yang menentang land reform adalah Ayatullah Behbehani, Ayatullah Golpaygani, dan Ayatullah Khunsari (Teheran), Ayatullah Hakim (Najaf), Ayatullah Shaikh Baha ud-Din (Shiraz), dan Ayatullah Mar' ashi-Najafi (Mashad).[43]

Suatu keputusan lain yang meningkatkan oposisi terhadap pemerintah adalah hak pilih bagi wanita. Kedudukan wanita telah meningkat menjadi suatu perdebatan, karena kelompok modernis telah mendukung suatu sikap yang lebih liberal terhadap peranan wanita dalam masyarakat dan terhadap diberikannya kepada mereka hak-hak yang sama dengan kaum laki-laki. Para pemimpin keagamaan percaya bahwa hak-hak yang diberikan kepada wanita dalam konstitusi dan hukum Islam adalah benar-benar memuaskan. Memberi mereka hak-hak yang sama dengan kaum laki-laki akan menimbulkan korupsi dan kekacauan serta akan menimbulkan kehancuran bagi dasar-dasar pokok kehidupan keluarga di Iran. Dengan melakukan hal itu pemerintah akan bertindak bertentangan dengan Islam.[44]

Karena itu, ketika pemerintah Alam pada tanggal 8 September 1962 menerbitkan teks rancangan undang-undang pemilihan umum untuk dewan propinsi dan daerah yang mengizinkan wanita untuk memberikan suara, para ulama dengan keras berbicara menentang pembaharuan tersebut. Ada dua alasan lain mengapa rancangan undang-undang tersebut ditentang oleh para ulama: rancangan undang-undang tersebut tidak memerinci dengan jelas bahwa para pemberi suara haruslah orang-orang Islam, dan istilah "Kitab Suci" dan bukannya "Qur'an Suci" digunakan untuk mengizinkan orang-orang non-Islam untuk memberikan suara.[45]

Karena pengenalan rancangan undang-undang inilah Ayatullah Khomeini mengadakan pemunculan pertamanya dalam percaturan politik nasional. Khomeini, sebagaimana halnya dengan rekan-rekannya, menentang hak pilih bagi wanita, dan karena itu, dia mendorong perlawanan masyarakat terhadap rancangan undang-undang tersebut. Para pendukungnya menyebarkan desas-desus bahwa wanita akan dipanggil masuk dinas militer dan bahwa pegawai negeri laki-laki akan digantikan oleh wanita.[46] Para ulama, yang sekarang benar-benar bangkit, memberikan tekanan dasyat kepada pemerintah. Beberapa fatwa dan pendapat dikeluarkan oleh para ulama untuk menentang land reform dan hak pilih bagi wanita.

Ayatullah Khunsari, misalnya, menyatakan:

Tujuan pertemuan ini adalah untuk menjawab telegram-telegram dan surat-surat dari Teheran dan bagian-bagian lain negara yang isinya adalah meminta agar pemerintah memberikan perhatiannya demi melindungi hukum-hukum dan ajaran-ajaran suci Islam. Karena itu, sangatlah disesalkan bahwa orang-orang yang demi agama mempunyai jabatan di negeri ini harus melaksanakan keputusan-keputusan yang mengubah ajaran-ajaran Islam dan merongrongnya dengan berkedok pada land reform, atau menentang agama dengan mengizinkan wanita untuk mengambil bagian dalam masalah-masalah sosial.

Karena itu, saya menyatakan pandangan-pandangan

saya tentang:

1. Perampasan hak milik rakyat. Adalah suatu dosa besar untuk merampas harta milik rakyat melalui keputusan-keputusan secara paksa; konsekuensi-konsekuensi mengerikan dari tindakan semacam itu tidak akan terbatas pada individual, tetapi akan mempengaruhi masyarakat luas. Selanjutnya saya menyatakan bahwa tak ada doa-doa maupun penyucian-penyucian yang diadakan di atas tanah-tanah tersebut akan dapat diterima.
2. Campur tangan wanita dalam masalah-masalah sosial. Karena ini akan melibatkan wanita dalam korupsi dan karena bertentangan dengan kehendak Tuhan, hal ini dilarang oleh Islam dan harus dihentikan.[47]

Pandangan-pandangan Khomeini tentang hak suara bagi wanita kita ketahui dari telegram-telegram yang dia kirimkan kepada Shah dan kepada Perdana Menteri Alam. Kepada Perdana Menteri Alam dia menulis:

Sesuai dengan telegram saya sebelumnya, dengan segala hormat saya beritahukan kepada anda bahwa anda tidak memperhatikan nasehat para ulama dan bahwa anda berpendapat bahwa anda mampu bertindak melawan Qur'an Suci, konstitusi, dan perasaan umum masyarakat luas. Para ulama menasehati anda bahwa rancangan undang-undang tidak sah anda adalah bertentangan dengan hukum Islam, konstitusi, dan peraturan-peraturan Majelis. Para ulama menyebarkan kepada masyarakat bahwa hak pilih bagi wanita dan penghapusan persyaratan seorang Islam yang diizinkan untuk memilih dan dipilih adalah bertentangan dengan Islam dan konstitusi. Apabila anda berpendapat bahwa anda dapat menggantikan Qur'an Suci dengan Avesta Zoroastrian, Bibel, dan dengan beberapa buku yang menyesatkan, anda adalah keliru. Apabila anda berpendapat bahwa anda bisa melemahkan konstitusi, yang merupakan jaminan bagi kedaulatan dan kemerdekaan negara, dengan rancangan undang-undang tidak sah anda, anda adalah salah.[48]

Akibat dari protes besar-besaran ini Alam menulis sepu-

cuk surat kepada Behbehani yang isinya adalah menjamin dia bahwa pemerintah tidak akan mengumumkan keputusan tentang hak pilih bagi wanita dan akan menunda Rancangan undang-undang pemilihan umum untuk Dewan Daerah sampai sesudah pemilihan Majelis, yang diadakan pada tanggal 27 Nopember 1962. Pada tanggal 16 Desember pemerintah mengumumkan pembatalan hak pilih bagi wanita.[49)]

Sejauh menyangkut land reform, pemerintah berusaha memenangkan golongan mayoritas. Dalam pertemuan dengan para pemilik tanah kecil, Arsanjani menjamin pendengarannya bahwa mereka tak perlu merasa khawatir. Land reform ditujukan untuk mematahkan kekuasaan para tuan tanah yang besar saja. Dia juga mengeluarkan suatu pernyataan yang memerintahkan para petani untuk membayar bagian-bagian para tuan tanah, dengan ancaman hukuman bagi yang tidak melaksanakannya. Tindakan pemerintah ini mungkin sebagai respons terhadap pengaduan Ayatullah Milani kepada Shah bahwa para pemilik tanah kecil akan dirugikan oleh land reform.[50)]

Pada umumnya dapatlah dianggap bahwa langkah-langkah tersebut merupakan suatu kekalahan bagi pemerintah.

Sangatlah mengherankan semua orang bahwa kebijaksanaan Alam terhadap Front Nasional adalah lebih liberal daripada kebijaksanaan Amini. Front Nasional telah dilemahkan oleh kemunduran-kemunduran yang dialaminya di bawah Amini dan telah memainkan suatu peranan yang agak tidak aktif selama bulan-bulan terakhir masa jabatan Amini. Alam, untuk membujuk kaum nasionalis pada tujuannya, membebaskan semua pemimpin Front Nasional yang telah dipenjara sejak bulan Februari 1962. Jika dia mengharapkan suatu reaksi positif dari kaum nasionalis, pastilah dia kecewa, karena tak seorang pun mau memberikan dukungan. Malahan, para mahasiswa yang berhubungan dengan Front Nasional mengadakan demonstrasi-demonstrasi menentang Alam ketika dia berkunjung ke Tabriz pada bulan September 1962.

Hal ini tidak mengubah sikap Alam terhadap Front Na-

sional, dan dia bahkan mengizinkan wartawan-wartawan asing untuk mewawancarai Dr. Mossadeq. Sementara itu, Front Nasional mereorganisir dirinya dan membuat persiapan-persiapan untuk mengadakan suatu kongres nasional. Front Nasional malah menuntut pemilihan umum yang bebas sebagaimana yang disyaratkan oleh konstitusi. Secara tak terduga-duga Alam kemudian berkunjung kepada Allahyar Salih, pemimpin tidak resmi Front Nasional. Alam menyatakan keinginannya agar Front Nasional mendukung pemerintahnya dan memberi nasehat kepada pemerintahnya bagaimana harus menghadapi kesulitan-kesulitan ekonomi pada saat itu. Dia bahkan menawari Front Nasional beberapa tempat dalam kabinetnya.

Front Nasional bekerja sama dengan Alam dengan 3 persyaratan:

1. Bahwa konstitusi harus ditaati dan dihormati dan bahwa prinsip-prinsipnya yang menjamin suatu monarki konstitusional yang terbatas haruslah benar-benar dijalankan.
2. Bahwa pemilihan umum harus segera diadakan sesuai dengan hukum yang berlaku.
3. Bahwa korupsi harus diperangi dan pembaharuan-pembaharuan harus dilaksanakan, tetapi berdasarkan hukum-hukum yang sah.

Alam tidak ingin membicarakan kekuasaan-kekuasaan Shah, karena dia menganggap pembicaraan semacam itu tidaklah realistis maupun praktis. Akan tetapi, pemimpin-pemimpin Front Nasional menekankan bahwa Shah seharusnya berkuasa dan bukannya memerintah, dan karena tidak demikian dia benar-benar bertindak menyimpang dari konstitusi. Hal ini bertentangan dengan kepentingan-kepentingan monarki dan juga kepentingan-kepentingan negara. Memeritah tanpa suatu Majelis adalah memerintah secara diktator dan lalim, dan hanya akan menjauhkan rakyat dari Shah dan monarki.[51)]

Mengingat adanya perbedaan-perbedaan yang mendasar ini, kedua belah pihak dapat mencapai persetujuan untuk melanjutkan pembicaraan-pembicaraan tersebut. Front

Nasional mengeluarkan pernyataan pada tanggal 28 November 1962, di mana Front Nasional menggariskan sikapnya dalam hubungannya dengan pembicaraan-pembicaraan tersebut dan pemerintah dalam kata-kata yang sangat keras. Adalah menarik bahwa pernyataan itu juga berisi suatu kritikan halus dan tidak langsung terhadap pandangan-pandangan yang dikemukakan oleh para pemimpin keagamaan, seperti hal-hal yang ditunjukkan di atas.
Front Nasional menyatakan:

Ekses-ekses lalim telah mencapai suatu tingkatan yang telah memaksa kelas alim ulama yang biasanya bersikap toleran, yang mendasari salah satu dari dasar-dasar moral negara, untuk menunjukkan tanda-tanda keresahan yang mendalam, sehingga menimbulkan kecemasan masyarakat luas. Front Nasional berharap bahwa orang-orang jahat tidak menerbitkan hal-hal penting atas nama mereka yang mungkin dianggap reaksioner di dunia saat ini, atau mungkin ditafsirkan sebagai oposisi terhadap kepentingan masyarakat.[52]

Bagian pernyataan ini ditujukan kepada kedudukan para ulama dalam hubungannya dengan land reform dan hak pilih bagi wanita, yang keduanya didukung oleh Front Nasional.

Karena Alam telah gagal memperoleh dukungan Front Nasional dan telah membatalkan masalah hak pilih bagi wanita, oposisi keagamaan yakin bahwa mereka mungkin telah menghalangi semua program pemerintah. Ayatullah Behbehani menulis sepucuk surat kepada Alam di mana dia berkata: "Kami telah dan masih menentang land reform. Kami tidak ingin membicarakannya; karena land reform telah mencapai suatu taraf di mana pembatalannya adalah tidak mungkin, tetapi kami tidak dapat tinggal diam mengenai harta waqaf."

Alam kemudian berkunjung kepada Behbehani dan kemudian mengukuhkan isi pembicaraan-pembicaraan mereka secara tertulis di mana dia menyatakan bahwa pembagian hadiah-hadiah keagamaan (waqaf) tidaklah bertentangan dengan hukum Islam maupun dengan kehendak para

pemberi. Pemerintah pada saat yang sama menuduh bahwa beberapa pemimpin keagamaan telah menyalahgunakan harta waqaf yang mereka atur.[53)]

Karena terus berlanjutnya oposisi para pemimpin keagamaan dan juga kelas menengah nasionalis, Shah memutuskan untuk mengatasi mereka dengan mengadakan suatu referendum nasional untuk menunjukkan bahwa rakyat Iran mendukung kebijaksanaan pembaharuan. Front Nasional, partai-partai politik yang lain, dan para pemimpin keagamaan memerintahkan para pengikut mereka untuk memboikot referendum tersebut. Pada tanggal 23 Januari 1963 polisi membubarkan suatu pertemuan di Iran antara para pemimpin keagamaan, tuan tanah, dan pedagang yang disangka sedang membicarakan langkah-langkah apa yang mungkin diambil untuk menentang referendum. Alam menuduh bahwa kelas pemilik tanah bersekongkol untuk menentang pemerintah, dan pada saat yang sama menunjuk pada "dua pemimpin keagamaan" (Ayatullah Khomeini dan Ayatullah Qumi) yang telah memerintahkan pemboikotan terhadap referendum tersebut. Pada hari yang sama Shah menyatakan di Qum selama upacara pembagian tanah bahwa para ulama adalah "kaum reaksioner hitam".[54)]

Pada malam sebelum referendum, yakni pada tanggal 25 Januari 1963, Khomeini dan para pemimpin keagamaan yang lain ditangkap dan tak lama kemudian mereka segera dibebaskan. Akan tetapi, hasil yang gemilang dari referendum tersebut tidak menyebabkan berhentinya gangguan-gangguan politis. Para mahasiswa Universitas Teheran mengadakan suatu demonstrasi pada tanggal 2 Februari 1963 untuk menentang pemerintah.

Pada tanggal 27 Februari 1963 Shah mengumumkan bahwa pemerintah akan memberi wanita hak pilih. Pernyataan ini menimbulkan agitasi dari pihak para pemimpin keagamaan, yang memerintahkan para pengikut mereka untuk menutup bazar mereka di semua kota-kota penting di Iran. Tambahan pula, dengan mengorganisir demonstrasi-demonstrasi, mereka menunjukkan oposisi mereka terhadap peraturan tersebut. Selama masa kacau yang menyusul di

beberapa kota, bentrokan-bentrokan terjadi antara polisi dan para demonstran. Banyak poster yang menentang hak wanita untuk memberikan suara dipasang di gedung-gedung di Qum. Kekacauan tersebut akhirnya menimbulkan suatu serangan oleh pasukan-pasukan pemerintah pada tanggal 23 Maret 1963 di Sekolah Theologi Faidiya di Qum. Banyak mahasiswa telah berkumpul di sana untuk memperingati wafatnya Imam Ja'far. Selama khotbah yang disampaikan oleh Hajji Ansari di mana dia berbicara menentang hak pilih bagi wanita, agen-agen pemerintah mencoba menimbulkan gangguan-gangguan dengan memprotes pendapat-pendapatnya. Kesudahannya mengarah pada campur tangan oleh pasukan-pasukan pemerintah; sangat banyak orang yang terluka selama penembakan yang berlangsung.

Sesudah itu pemerintah melanjutkan serangannya pada para ulama. Dalam suatu pidato di Mashad pada tanggal 1 April 1963 Shah menyebut mereka sebagai "suatu rintangan bagi kemajuan negara". Suratkabar-suratkabar mengekor dan menggambarkan para ulama sebagai unsur-unsur konservatif dan reaksioner yang tidak perlu membawa-bawa rakyat Iran ke dalam konflik dengan agama Islam. Mereka menganjurkan para ulama untuk menjauhi politik, yang merupakan suatu pokok masalah di luar agama.[55]

Para ulama menjawab dengan cara yang sama dengan mencetak dan secara diam-diam membagikan pamflet-pamflet di mana mereka menyerang pemerintah dan Shah. Para ulama yang paling aktif menghimbau rekan-rekan mereka agar menggunakan kesempatan Muharam (bulan berkabung) untuk mengeluarkan pandangan-pandangan mereka tentang kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah. Kegiatan-kegiatan anti pemerintah ini dimulai pada akhir bulan Mei. Pemerintah mengalami kesulitan dan tidak mengizinkan pawai-pawai keagamaan diadakan di beberapa daerah. Akan tetapi, pemerintah tidak melarang mereka sama sekali agar tidak menimbulkan kemarahan terhadap oposisi keagamaan selama masa panas tersebut.

Dalam pamflet-pamflet mereka para ulama terutama menekankan pelanggaran pemerintah terhadap kebebasan

beragama. Ayatullah-Ayatullah seperti Shari'atmadari dan Mar'ashi Najafi mengkritik pemerintah atas serangan di sekolah Theologi Faidiya, atas tindakannya mencegah rakyat agar tidak menghadiri perayaan-perayaan di masjid-masjid, dan atas tidak adanya rasa hormat terhadap agama dan wakil-wakilnya, yakni para ulama. Saya belum menemukan bahan-bahan tertulis yang menyarankan bahwa para ulama bertujuan untuk menggulingkan rezim Shah atau menuntut perubahan-perubahan struktural di bidang sosial, ekonomi dan politik. Sebagaimana yang tercatat, Front Nasional menganjurkan para ulama agar menunjukkan suatu sikap moderat mengenai program pembaharuan yang diusulkan. Front Nasional sendiri telah menyatakan semboyan: "Land reform, ya! Kediktatoran Shah, tidak!" Tetapi semboyan ini tidak dianut oleh para ulama, karena mereka lebih senang bertindak menurut cara mereka sendiri, dan untuk tujuan-tujuan mereka sendiri.[56] Sebagaimana yang tertulis di bawah ini, sepucuk surat penting yang ditulis oleh Ayatullah Milani menyebut-nyebut korupsi dan penindasan terhadap rakyat, tetapi hal ini bukan merupakan alasan-alasan utamanya untuk berbicara menentang rezim Shah.

Timbullah kekacauan di beberapa kota besar, termasuk Mashad. Pada tanggal 3 Juni 1963 seorang polisi terbunuh di Mashad ketika dia mencoba membantu dua orang preman untuk menangkap seorang laki-laki yang dengan keras membaca sepucuk surat dari Ayatullah Milani untuk Ayatullah Khomeini yang telah dipasang pada sebuah dinding dekat Masjid Gawhar Shah. Ketika polisi tersebut mencoba menyingkirkan surat itu, orang banyak menyerang mereka dan seorang polisi terbunuh. Insiden ini merupakan penyebab langsung dari apa yang disebut kerusuhan Muharam di semua kota-kota besar.

Surat yang dipermasalahkan adalah bersifat membakar, dan telah dibagikan secara diam-diam di banyak kota. Isinya adalah:

Saya tidak mempunyai kabar dan saya merasa cemas akan nasib para mahasiswa theologi Qum yang terluka selama terjadinya demonstrasi-demonstrasi dalam bulan Maret

dan yang telah dikeluarkan dari rumah sakit atas perintah-perintah organisasi keamanan. Sebagaimana yang terlihat, masa depan nampaknya gelap dan suram. Badan yang berkuasa, dalam tindakannya menentang kepentingan-kepentingan nasional dan keagamaan, bahkan mungkin meningkatkan jumlah orang-orang yang terluka sedemikian banyak sehingga mereka akan memenuhi dan membanjiri rumahsakit-rumahsakit.

Anda menyadari, dan pasti mengetahui lebih baik daripada saya, bahwa pada saat ini kepentingan-kepentingan keagamaan dan nasional kita terancam dan terlanggar oleh badan penguasa yang korup dan *agen-agen pemerintah yang tidak bertanggung jawab* (cetak miring adalah asli). Adalah aneh bagi seorang Islam untuk membiarkan dirinya sendiri tetap tenang dalam keadaan seperti ini.

Kita telah mentolerir serangan yang bertipe Genghis Khan di atas tanah-tanah suci Sekolah Theologi Qum; kita telah mentolerir pemenjaraan, penyiksaan, dan pengejaran terhadap orang-orang nasionalis dan relijius kita. Kita telah mentolerir serangan terhadap universitas-universitas kita dan tempat-tempat belajar rakyat yang lain. Kita telah memaafkan penindasan terhadap hak dan kemerdekaan setiap individual dan masyarakat; kita tidak menghiraukan kecurangan, korupsi, dekadensi, dan pengkhianatan. Kita telah memaafkan pembunuhan terhadap saudara-saudara kita di berbagai negara ini. Tetapi bagaimana kita bisa mentolerir aib yang mengubah negara Islam kita menjadi basis bagi Israel dan Zionisme? Adalah kewajiban saya dan Anda Yang Terhormat untuk menentangnya! Tentu saja, musuh pasti telah memikirkan kemungkinan untuk mencelakakan kesehatan dan keamanan beberapa pemimpin keagamaan, atau membuat-buat tuduhan untuk menentang mereka. Tetapi dari sisi Tempat Suci Imam Kedelapan, saya menyatakan bahwa anda tidaklah sendiri.

Mengingat adanya penyensoran berat terhadap segala macam publikasi ... semua pengkhotbah terhormat harus menggunakan kesempatan hari berkabung Muharam untuk memberi penerangan kepada orang-orang Islam tentang

masalah tersebut ... untuk memberitahu rakyat tentang kasus-kasus yang berkaitan dengan pemerintah yang korup di muka badan-badan peradilan. Rakyat harus diberitahu bahwa badan yang berkuasa tidak lagi menuntut seorang hakim haruslah seorang Islam karena badan tersebut mengangkat seorang tak bermoral atau seorang komunis sebagai hakim. Rakyat harus diberitahu tentang bagaimana jalan telah dibuka di Iran untuk agen-agen dan mata-mata Israel.[57)]

Pada hari yang sama, di Qum Ayatullah Khomeini menyampaikan suatu pidato pedas menentang Shah dan pemerintahnya. Dia memulai dengan bertanya mengapa Yazid telah bertindak dengan brutal dan tidak manusiawi terhadap Imam Husein, dan menjawab bahwa hal ini adalah karena dia telah menentang hak-hak keluarga nabi. Khomeini kemudian melanjutkan bertanya mengapa pemerintah tiranis Iran menentang para ulama? Mengapa pemerintah memerintahkan serangan di Sekolah Faidiya? Apakah yang telah dilakukan oleh para *Sayyid* tak berdosa, yang terbunuh dalam serangan tersebut, terhadap pemerintah? Khomeini memberitahu pendengarnya bahwa dia telah sampai pada kesimpulan bahwa hal ini adalah karena pemerintah menentang dasar-dasar Islam dan para ulamanya, karena pemerintah tidak ingin lembaga moral ini berdiri. Dia kemudian mengganti kata "pemerintah" dengan "Israel" dan berbicara tentang masalah tersebut. Khomeini memberitahu pendengarnya bahwa Israel menentang Qur'an, menentang Islam, dan karena itu Israel telah memerintahkan serangan di Sekolah Faidiya. "Israel ingin merampas ekonomi kita dalam genggamannya, Israel ingin menghancurkan perdagangan dan pertanian kita. Israel ingin menghancurkan apa yang menghalangi mereka dan dominasi mereka. Penghalang ini dibentuk oleh para ulama yang harus dihancurkan; penghalang ini adalah Sekolah Faidiya dan sekolah-sekolah theologi lain, yang harus dihancurkan; mahasiswa-mahasiswa theologi mungkin menjadi penghalang pada masa yang akan datang dan karena itu mereka harus dibunuh. Dalam hal ini Israel memperoleh apa yang diinginkannya, dan da-

lam hal ini pemerintah Iran memperlakukan kita dengan hina untuk mencapai keinginan-keinginan utamanya."

Khomeini kemudian berbicara tentang serangan-serangan pemerintah yang berteriak pada para ulama dan mahasiswa bahwa mereka adalah parasit. Dia bertanya kepada pendengarnya siapa yang sebenarnya parasit, orang-orang seperti Haji Sheikh Abdu'l-Karim, yang ketika meninggal, keluarganya bahkan tidak mempunyai uang untuk membeli makanan mereka, atau Burujirdi, yang ketika meninggal berhutang 60.000 toman. Bukan, parasit-parasit yang sebenarnya adalah orang-orang yang mengisi bank-bank asing dengan harta-harta tidak sah mereka dan yang membangun istana-istana besar. Adalah kewajiban rakyat untuk memutuskan siapa parasit-parasit yang sebenarnya.

Selanjutnya Khomeini mengingatkan pendengarnya bahwa orang-orang yang cukup tua untuk mengingat mengetahui bahwa rakyat merasa senang ketika pada tahun 1941 Sekutu menyerang Iran dan merampas kekayaannya serta merindas rakyat, karena Pahlevi (Reza Shah) melarikan diri. "Saya tak ingin kalian bertindak seperti ayah kalian; nasehat saya untuk kalian adalah agar kalian mengindahkan para ulama, dan mendengarkan mereka; mereka menginginkan kesejahteraan negara. Jangan dengarkan Israel. Kalian tak memerlukan Israel."

Dia akhirnya bertanya kepada pendengarnya apakah Islam bukan dalam bahaya, karena SAVAK memerintahkan para ulama agar tidak berbicara tentang tiga hal: tidak mengatakan hal-hal yang buruk tentang Shah, tidak menyerang Israel, dan tidak berkata bahwa Islam ada dalam bahaya.[58)]

Serangan-serangan serupa juga disampaikan oleh para pemimpin keagamaan dan pengkhotbah yang lain di kota-kota besar dan kecil di Iran. Pada hari berikutnya, Sabtu tanggal 4 Juni 1963, atau Muharam ke-10, yang merupakan ulang tahun kesyahidan Imam Husein, Khomeini ditahan oleh organisasi keamanan sesaat sebelum fajar sebagaimana juga rekannya Ayatullah Qumi. Alasan penangkapan ini adalah karena peranan yang dituduhkan telah mereka

mainkan dalam merencanakan kerusuhan pada hari itu. Apa pun kebenaran tuduhan tersebut, kerusuhan-kerusuhan benar-benar dimulai pada hari itu juga. Ketika mendengar berita tentang penahanan kedua Ayatullah tersebut, pawai-pawai berkabung berubah menjadi demonstrasi-demonstrasi anti pemerintah. Terjadilah bentrokan-bentrokan selama beberapa hari antara para demonstran dan tentara serta polisi. Tentara dan polisi telah mendapat perintah pada tanggal 5 Juni untuk menembak mati. Banyak orang kehilangan nyawa mereka selama bentrokan-bentrokan tersebut, dan banyak lagi yang terluka, tetapi kerusuhan terus berlanjut sehingga pada tanggal 8 Juni Undang-undang Militer diumumkan di Teheran dan Shiraz, di mana terjadi kerusuhan yang paling buruk.

Pemerintah menuduh bahwa para pemimpin keagamaan telah menyalahgunakan pengaruh mereka dan telah menerima dukungan keuangan dari suatu pemerintah asing yang tidak disebutkan. Alam juga menuduh bahwa para pemimpin keagamaan adalah reaksioner dan menentang land reform serta hak pilih bagi wanita.

Selama masa persidangan yang diadakan sesudah kerusuhan Muharam, orang-orang yang dituduh telah mengorganisir demonstrasi-demonstrasi tersebut dihukum mati. Tak ada penjelasan sama sekali tentang peranan yang telah dituduhkan kepada para ulama dalam mengorganisir kerusuhan-kerusuhan tersebut atau tentang uang yang diterima dari suatu kekuatan asing.

Khomeini, Qumi, dan Mahallati (yang terakhir ini ditahan karena peranan yang dituduhkan kepadanya dalam demonstrasi-demonstrasi di Shiraz) dibebaskan dari penjara pada tanggal 3 Agustus 1963 dengan tanpa melalui persidangan. SAVAK mengeluarkan sebuah pernyataan pada kesempatan itu:

Menyusul tercapainya suatu pengertian antara penguasa-penguasa keamanan dan Yang Mulia Ayatullah Khomeini, Ayatullah Qumi, serta Ayatullah Mahallati bahwa mereka tidak akan campur tangan dalam masalah-masalah politik, dan karena pengertian ini telah memberikan jaminan bah-

wa mereka tidak akan bertindak menentang keamanan atau kepentingan-kepentingan negara, mereka telah dipindahkan ke rumah pribadi.

Akan tetapi, segera sesudah pembebasan dan pemindahannya ke sebuah villa di daerah Qaitiriya di Teheran, sebuah pamflet rahasia yang berasal dari Khomeini menyangkal adanya pengertian semacam itu dengan SAVAK. Khomeini tidak mengakui pengertian semacam itu dengan suatu negara yang dia anggap bukan Islamis. Dia tinggal selama 2 bulan di sebuah villa di Teheran dan kemudian dia diberi lebih banyak kebebasan.[59] Namun, dia ditangkap lagi di rumahnya pada malam sebelum pemilihan umum pada bulan Oktober 1963, setelah dia memerintahkan suatu pemboikotan terhadap pemilihan umum tersebut. Dia tetap berada dalam tahanan rumah di Teheran sampai bulan Mei 1964, ketika perdana menteri baru, Mansur, memerintahkan pembebasannya. Hal ini nampaknya mungkin terjadi melalui suatu pengertian baru dengan SAVAK bahwa Khomeini akan menjauhi politik.

Akan tetapi, lagi-lagi Khomeini tidak menghormati pengertian tersebut, jika pengertian semacam itu memang benar-benar telah dicapai. Dia tetap melanjutkan kegiatan-kegiatan antipemerintahnya, sementara pada saat yang sama dia memperoleh suatu citra publik yang lebih progresif dengan mengizinkan para pengikutnya untuk mendengarkan radio, melihat televisi, dan menyimpan uang di bank-bank pemerintah. Dia juga mempertimbangkan kembali oposisinya terhadap hak pilih bagi wanita. Selanjutnya Khomeini menghimbau kepada kekuatan-kekuatan oposisi agar membentuk suatu front persatuan untuk menentang pengawasan-pengawasan pemerintah dalam kehidupan ekonomi dan untuk menciptakan kebebasan berdagang dan berniaga.[60]

Suatu kesempatan lain untuk serangan-serangan lebih jauh terhadap kebijaksanaan pemerintah diberikan oleh suatu rancangan undang-undang yang memberikan kekebalan diplomatik dan keistimewaan-keistimewaan kepada personil-personil militer Amerika Serikat dan oleh suatu

rancangan undang-undang yang mencari pinjaman sebanyak 200 juta dollar untuk pembelian peralatan militer. Kedua rancangan undang-undang tersebut disetujui oleh Majelis pada tanggal 13 dan 25 Oktober 1964.[61] Pada tanggal 26 Oktober Khomeini dengan keras menyerang pemerintah dalam suatu pidato dan menyatakan bahwa penyetujuan terhadap rancangan undang-undang tersebut adalah sama dengan pengkhianatan. Selanjutnya, Khomeini mencoba membangkitkan pendengarnya untuk menentang pemerintah. Suatu versi singkat dari pidatonya dicetak dan diedarkan secara diam-diam. Namun, hal ini tidak ditolerir dan pemerintah menuduh bahwa dia telah melanggar persetujuannya. Pada tanggal 4 November 1964 SAVAK mengeluarkan sebuah pernyataan:

Karena, berdasarkan informasi yang bisa dipercaya dan bukti-bukti yang memadai, sikap dan provokasi-provokasi Tuan Khomeini telah dianggap bertentangan dengan kepentingan-kepentingan Negara dan dengan keamanan, kemerdekaan serta kesatuan wilayah Negara, dia telah dibuang dari Iran mulai tanggal 4 November 1964.

Khomeini dibawa ke Turki dengan pesawat khusus. Pada mulanya para penguasa menolak untuk memberi informasi sedikit pun tentang di manakah dia. Suatu usaha yang dilakukan oleh beberapa pengikutnya untuk menutup bazar seminggu kemudian gagal mendapatkan dukungan yang mencukupi, yang menunjukkan betapa SAVAK telah menjadi efektif. Hal ini juga menunjukkan bahwa oposisi sedang mencoba untuk bangkit kembali dan tidak mempunyai daya tarik sebagaimana yang pernah dialaminya pada tahun 1963.[62]

Kesimpulan

Kita telah melihat bahwa para ulama membentuk sebagian dari elite kekuatan tradisional Iran. Sistem keagamaan sebagian berfungsi untuk melindungi tatanan yang ada melalui himbauan-himbauan kepada tradisi dan nilai-nilai absolut. Modernisasi dan penetrasi asing (non-Islam) melang-

gar pengaruh kelas keagamaan dalam masyarakat Iran. Oposisi ulama terhadap pelanggaran-pelanggaran Barat dan terhadap pemerintah yang mendukung pelanggaran-pelanggaran tersebut sebagian besar ditujukan untuk menentang perubahan tersebut dan untuk kembali kepada nilai-nilai dan tatanan tradisional. Dalam beberapa kasus, para ulama juga memberikan suara kepada keresahan-keresahan masyarakat, terutama kepada orang-orang dari kelas pedagang, kepada siapa mereka terikat. Oposisi ini tidak berubah selama abad ke-20. Para ulama sebelum tahun 1953 benar-benar mendukung Shah dalam melawan Mossadegh, yang mengajukan perubahan-perubahan yang mendasar dalam masyarakat Iran. Sebelum tahun 1960 para ulama menentang pemerintah hanya dalam hal-hal yang berhubungan dengan kebijaksanaan luar negeri. Antara negara dan para ulama terjalin hubungan-hubungan yang baik. Hubungan-hubungan baik ini menjadi problematis ketika pemerintah ingin memperkenalkan land reform. Hanya pada saat itulah para ulama mulai menentang pemerintah. Kata-kata mereka tidak ditujukan sepenuhnya untuk menentang tumbuhnya sifat kediktatoran rezim tersebut, dan dalam hal ini mereka berbeda dengan oposisi politis. Pada tahun 1962 agitasi yang dilancarkan oleh para ulama meningkat ketika pemerintah ingin memberi hak suara kepada wanita. Ketika pemerintah menyerang para ulama secara langsung dan bahkan menggunakan kekuatan fisik terhadap mereka, para ulama secara langsung menantang pemerintah. Namun, pada saat itu para ulama tetap membatasi tujuan-tujuan mereka, yang terutama dipusatkan pada kedudukan dan pengaruh mereka sendiri. Kegagalan para ulama untuk menggabungkan usaha-usaha mereka dengan usaha-usaha oposisi politis juga menyarankan bahwa oposisi mereka bukanlah ditujukan pada perubahan yang radikal. Meskipun terlalu dini untuk mengatakan, saya mempunyai kesan bahwa skenario peristiwa-peristiwa tahun 1977-1979 pada dasarnya tidaklah berbeda dengan skenario peristiwa-peristiwa tahun 1962-1964. Perbedaan utama nampaknya adalah bahwa seluruh kekuatan oposisi bekerja sa-

ma, karena kepentingan-kepentingan mereka adalah paralel. Jelaslah bahwa pelajaran tahun 1963 tidaklah hilang dari mereka.

Akhirnya, saya mengulangi bahwa peranan oposisional para ulama adalah terbatas pada tujuan-tujuan mereka sendiri. Para ulama tidak menuntut atau memusuhi suatu perubahan struktural masyarakat, yang ditandai oleh eksploitasi dan penindasan terhadap mayoritas masyarakat. Karena itu, para ulama adalah kaum pembaharu dan bukannya kaum revolusioner.

Meskipun sebagian besar ulama pada umumnya adalah konservatif, mereka benar-benar efektif dalam menggulingkan rezim Shah pada tahun 1979. Akan tetapi, hal ini mungkin terjadi antara lain karena adanya kerjasama dengan lawan-lawan mereka, yakni oposisi politis, yang bertujuan untuk menghancurkan rezim yang berkuasa. Kegagalan ulama untuk membentuk suatu front persatuan dengan oposisi politis pada tahun 1963 adalah akibat dari kegagalan mereka untuk mengenali sifat-sifat dari apa yang sedang dituntut dan implikasi-implikasinya bagi Iran dan diri mereka sendiri. ●

Catatan Kaki:

1. Lihat antara lain W.M. Floor, "The Office of Kalantar in Qajar Persia", *Journal of the Economic and Social History of the Orient* (JESHO), nomor 14 (1971), halaman 252–268; Abu 'l-Fazl Qaemi, *Oligarshi ya Khandanha-ye Hukumatgar-e Iran,* I. Khandan-e Firuz Farmanfarma' iyan, (Teheran, 1351/1972), H. Khandan-e Isfandeyari, (Teheran, 1354/1975).
2. Lihat antara lain, Michael M. Fischer, *Iran, from Religious Dispute to Revolution,* (Harvard University Press, 1980).
3. Untuk suatu analisis tentang konflik ini pada abad ke-19 lihat Algar, *Religion and State.*
4. Ibid., halaman 28 dan seterusnya.

5. Ibid., halaman 108 dan seterusnya; Lihat juga W.M. Floor, "The Political Role of the Lutis in Iran", dalam: *Modern Iran: The Dialectics of Continuity and Change,* editor, M. Bonine dan Nikki R. Keddie (Suny Press, Albany, 1981).
6. Lihat Catatan 3.
7. Algar, *Religion and State*
8. *Ibid.*
9. *A. K. S. Lambton, Landlord and Peasant in Persia,* (Oxford University Press, London, 1953).
10. Algar, *Religion and State* halaman 14 dan seterusnya secara singkat menyinggung masalah ini; hal yang sama juga dikemukakan oleh Nikki R. Keddie, "The Roots of the Ulama's Power in Modern Iran", dalam: Scholars, Saints, and Sufis, halaman 211–229.
11. Algar, *Religion and State,* halaman 260.
12. Algar, "The Oppositional Role", halaman 246.
13. Ibid.
14. Ibid., halaman 244.
15. E. A. Bayne, *Persian Kingship in Transition,* (New York, 1968), halaman 48.
16. Algar, "The Oppositional Role", halaman 242, dan terutama kumpulan pidato dan surat Bagha'i yang baru-baru ini diterbitkan, *Doktor Mozaffar Bagha'i Kermani dar Pishgah-e Tarikh* (Kerman, 1358/1979). Meskipun ada fakta bahwa pemimpin keagamaan seperti Kashani mempunyai hubungan baik dengan Shah dan Jenderal Zahedi pada masa itu. Kita merasa heran dengan adanya perlakuan simpatis terhadap Kashani di Iran dewasa ini. Ada cerita, sebagaimana hal ini sekarang diberitakan secara resmi di Iran, bahwa jatuhnya Dr. Mossadeqi disebabkan oleh adanya fakta bahwa dia telah menentang pemimpin-pemimpin keagamaan dan telah menjauhi Kashani. Hal yang cukup aneh adalah bahwa perlakuan yang serupa belum pernah diberikan kepada Dr. Bagha'i, yang didukung oleh Kashani (atau demikian pula sebaliknya). Pembalikan historis ini antara lain berdasar atas sepucuk surat dari Kashani untuk Mossadeq di mana Kashani menawarkan jasa-jasanya kepada Mossadeq, dan pada saat yang sama memperingatkan dia tentang suatu kudeta yang mengancam yang didalangi oleh Amerika. Surat ini tertanggal sehari sebelum tanggal ketika Mossadeqi dijatuhkan oleh Zahedi (lihat Ittela'at, 18 Tir 1359/9 Juli 1980), dan tak diragukan lagi adalah suatu pemalsuan. Beberapa bulan sebelumnya Ittela'at menerbitkan sepucuk surat yang ditulis oleh Kashani di mana dia meminta Shah agar tidak meninggalkan negara. Terlepas dari fakta bahwa Kashani mempunyai hubungan yang sangat baik dengan Shah, keterlibatan para ulama dalam kudeta Zahedi juga ditunjukkan oleh adanya fakta bahwa sebelum terjadinya kudeta, Zahedi telah mendapat perlindungan di rumah Ayatullah Bani Sadr. Falsafi, seorang pengkhotbah terke-

nal yang pada tahun 1963 memberikan pidato-pidato kritis antipemerintah, juga diketahui mempunyai hubungan yang sangat baik dengan Pengadilan dan Zahedi. Sebuah gambar yang memuat Falsafi dan Zahedi baru-baru ini diterbitkan oleh majalah Bamshad (sekarang tidak terbit untuk sementara) nomor 2, 23–30 Tir 1358/14–21 Juli 1979, halaman 48–49. Artikel yang menyertai gambar tersebut juga berisi keterangan menarik tentang peranan Falsafi sebagai pembantu setia Shah.

17. Shahrough Akhavi, *Religion and Politics in Contemporary Iran*, (Albany, 1980), halaman 76 dan seterusnya.
18. P. Avery, *Modern Iran*, (London, 1965), halaman 461.
19. Lihat antara lain, R. W. Cottam, *Nationalism in Iran*, (Pittsburgh, 1965), halaman 286.
20. P. Avery, *Modern Iran*, halaman 481.
21. Ayatullah Muhammad Mosavi Behbehani adalah putera 'Abdullah Behbehani, yang merupakan salah seorang dari para pemimpin gerakan Konstitusional.
22. Adalah karena mungkin sependapat dengan kelompok Behbehani bahwa Avery, *Modern Iran*, halaman 481, menulis: "Sementara itu di Teheran para alim ulama merayakan pesta-pesta hari raya ... Pesta-pesta ini dibiayai oleh pemerintah. Figur-figur berjubah dan bersorban yang duduk di samping makanan-makanan lezat tidak nampak seperti pelopor-pelopor pemberontakan." Tentang kelompok Behbehani lihat: Algar, "The Opposional Role", halaman 224; dan Akhavi, *Religion dan Politics*, halaman 103.
23. Bayne, *Persian Kingship*, halaman 48.
24. *Echo Reports*, sebuah penerbitan mingguan tentang 'Gema Iran', Teheran, 17 Februari 1962, nomor 6 (334), halaman 4.
25. Ibid
26. A. K. S. Lambton, *The Persian Land Reform 1962–1966*, (Oxford, 1969), halaman 56 dan seterusnya.
27. Avery, *Modern Iran*, halaman 490; *Iran Almanac*, 1963, halaman 276 dan seterusnya memberikan data tentang situasi ekonomi Iran yang hancur.
28. Bagha'i, *Dar Pishgah-e Tarikh; Iran Almanac*, 1963, halaman 92.
29. Ibid., halaman 384.
30. Avery, *Modern Iran*, halaman 493.
31. Algar, "The Oppositional Role", halaman 244; Akhavi, *Religion and Politics*, halaman 100. Adalah bukan karena kurangnya usaha bahwa Ayatullah Hakim tidak menjadi pengganti Burujirdi. Bahkan selama masa genting yang semakin memuncak dan masa perlawanan terhadap negara, Ayatullah Hakim mengirim sebuah telegram kepada Ayatullah Mar'ashi Najafi yang isinya adalah mengajak semua ulama untuk berpindah ke tempat suci di Irak (Najaf, Karbala) sebagai suatu protes terhadap serangan pemerintah di Sekolah Theologi Faidiya (tentang hal ini

lihat di bawah). Teks telegram ini yang bertanggal 18 Farvardin 1342/7 April 1963 ada pada saya.

32. Echo Reports, "Prime Minister Ali Amini and the Clergy", Teheran, 17 Agustus 1961, nomor 28 (308).
33. M. Zonis, *The Political Elite of Iran*, (Princeton, 1971), halaman 71–72.
34. Dari sebuah pamflet yang dicetak dan diedarkan secara rahasia yang saya miliki.
35. Ibid.
36. Lihat Catatan 26, halaman 5.
37. Ibid.
38. Zonis, *Political Elite*, halaman 72–73.
39. Orang-orang tersebut adalah Hasan 'I'aqizadeh (bekas presiden Senat); Dr. Matin-Daftari (bekas perdana menteri); Sardar Fakhir Hikmat (bekas Juru Bicara Majelis)); Abdul Rahman Faramarzi (editor Suratkabar the Keyhan); Allahyar Saleh (pemimpin Front Nasional); Muhammad Soruri (seorang ahli hukum terkemuka); Sheikh Bana'ol Din Nuri (seorang pemimpin keagamaan terkemuka).
40. Lihat Catatan 26, halaman 6–7.
41. *Iran Almanac*, 1963, halaman 42.
42. Avery, *Modern Iran*, halaman 495.
43. *Iran Almanac*, 1963, halaman 433; *Echo Reports, "Landlords, Tribal Khans and Clergymen versus the Government", Teheran, 24 November 1962, nomor 360, halaman 4; menurut suatu sumber lain Iran, B. Jazani, An Introduction to the Contemporary History of Iran,* (London, tak bertahun), halaman 117, "para alim ulama, hampir tanpa perkecualian, menentang seluruh rencana land reform." Baik Jazani maupun Akhavi, *Religion and Politics*, halaman 92, segera menolak suatu penjelasan ekonomis sederhana tentang oposisi ulama terhadap land reform. Menurut Akhavi "hal ini hanyalah merupakan berita pertama di mana ketidakpuasan umum mereka terhadap rangkaian peristiwa yang terjadi diungkapkan di hadapan umum," sementara Jazani menekankan pada fakta bahwa tindakan-tindakan pembaharuan adalah "merugikan kedudukan para ulama dalam masyarakat" dan bahwa karena itu, mereka, meskipun ada kontradiksi-kontradiksi dari dalam, harus bersiap menentang pembaharuan-pembaharuan tersebut. Sejak diberlakukannya land reform, tanah-tanah pertanian yang dibagikan dinyatakan oleh para ulama sebagai *Qabsi* (tanah rampasan); tetapi, dihadapkan pada pilihan tanah dan keputusan-keputusan keagamaan, para petani memilih yang pertama. Hal ini merupakan pukulan pertama terhadap kedudukan para ulama." halaman 117.
44. Tentang hal ini lihat, Akhavi, *Religion and Politics*, halaman 95; Jazani menyatakan: "Ketika rezim tersebut mengajukan aspek-aspek tambahan dari pembaharuan tersebut, pemberian hak suara kepada wanita memberi para ulama alasan-alasan yang perlu untuk membangkitkan

masa agar bergerak dan menentang rezim tersebut," Pendahuluan, halaman 117–118.

45. *Iran Almanac*, 1963, halaman 433; untuk analisis yang mendetail tentang seluruh hal ini sebagaimana yang terlihat melalui mata seorang anggota oposisi keagamaan, lihat; Ali Davvani, *Nahdat-i do maheh-yi rowhaniyan-i Iran*, (Qum, 1341/1962). Dari bahan-bahan tembusan yang dikemukakan oleh Davvani (hamnpir semua telegram dipertukarkan antara para ulama dan pemerintah, demikian pula pamflet-pamflet dan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh para ulama tentang hal ini) jelaslah bahwa para pemimpin keagamaan menentang Rancangan Undang-Undang tersebut berdasarkan 3 hal utama:
    1. tidak adanya suatu persyaratan bahwa seorang pemilih atau seorang calon untuk pemilihan umum harus seorang Islam.
    2. tidak adanya kewajiban mengambil sumpah demi Qur'an.
    3. pemberian hak pilih kepada wanita.

    Akan tetapi, kasus yang dikemukakan oleh Davvani dan para pemimpin keagamaan nampaknya terbuka untuk dikritik. Pasal 7 (Bab III) Undang-Undang Pemilihan Umum (1909) menyatakan bahwa calon-calon untuk pemilihan umum harus orang-orang Islam "jika mereka tidak mewaklili masyarakat-masyarakat Kristen, Zoraoastria, atau Yahudi; dalam hal tersebut mereka harus menyuarakan keyakinan-keyakinan mereka masing-masing." Agama sebagai suatu syarat sama sekali tidak disebutkan (Pasal 4). Undang-Undang Dasar 1906 (Pasal II) menuntut bahwa anggota-anggota Majelis harus bersumpah demi Qur'an, tetapi hal ini tentu saja tidak berlaku bagi anggota-anggota Majelis yang bukan Islam. Meskipun undang-undang pemilihan umum (1906 dan 1909) tidak mengizinkan wanita untuk memilih dan dipilih, hal ini tidak dinyatakan sama sekali bahwa undang-undang pemilihan umum, yang secara eksplisit hanya berlaku untuk pemilihan. Majelis dan Senat, harus berlaku juga untuk Dewan Propinsi dan Daerah. Fakta bahwa wanita diizinkan untuk memberikan suara dalam Republik Islam Iran menimbulkan keragu-raguan tentang sifat anti-Islam usul pemerintah untuk memberikan hak suara bagi wanita.

46. *Echo Reports*, 18 Nopember 1964, nomor 457, "The Case of Mr. Khomeini", halaman 2. Khomeini sendiri juga memberikan dukungan kepada kedapatdipercayainya desas-desus tersebut. Misalnya, dia memberitahukan kepada umum bahwa gadis-gadis yang berusia 18 tahun telah dibawa dengan paksa ke barak-barak, yang menurut penglihatannya adalah rumah-rumah pelacuran. Lihat Sayyid Hamid Rowhani, "Barrasi va tahlili az nahdat-i Imam Khomeini", (Qum, 1358/1979) edisi ke-4, halaman 316, 319-324.

47. Ibid., 24 Nopember 1962, nomor 360, "Landlords, Tribal Khans and Clergymen versus the Government", halaman 6.

48. Ibid., halaman 7; terjemahan ringkas dari telegram Khomeini berasal

dari teks yang diterbitkan dalam Davvani, Nahdat.

49. *Iran Almanac*, 1963, halaman 48, 410; Menurut Ahmad Ashraf, *Iran: Imperialism, Class and Modernization from Above*, sebuah disertasi Ph.D. yang tidak diterbitkan, New School for Social Research (New York, 1971), pesan-pesan protes tertulis berikut ini dikirimkan kepada Shah pada bulan November 1962: telegram-telegram dari Ayatullah Shari'atmadari dan Ayatullah Gulpaygani; sebuah deklarasi dari 132 ulama; sebuah deklarasi dari 26 ulama Teheran; sebuah deklarasi dari perkumpulan-perkumpulan keagamaan Mashad dan sepucuk surat dari Ayatullah Milani; dan sebuah deklarasi dari 10 ulama Qum. Untuk suatu pandangan yang lebih mendetail tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kalangan-kalangan keagamaan lihat Davvani, Nahdat.

50. *Iran Almanac*, 1963, halaman 388 dan seterusnya. Dalam hal ini, saya ingin menaruh perhatian pada fakta bahwa dengan menggunakan istilah 'ulama' saya mempunyai kesan bahwa tidak ada perbedaan-perbedaan di antara mereka. Akhavi, *Religion and Politics*, halaman 93, misalnya, memperingatkan bahwa "para ulama tidak bertindak sebagai suatu kekuatan monolitis". Meskipun saya setuju dengan pernyataan ini, pada saat yang sama saya ingin menyatakan bahwa sangatlah sulit untuk membedakan perselisihan-perselisihan di antara para ulama. Akhavi, halaman 100 dan seterusnya, mengemukakan beberapa saran (karena dia membedakan empat kelompok yang berbeda), tetapi hal ini benar-benar berbeda dengan suatu penelitian analitis serupa yang dibuat oleh Ashraf. *Iran: Imperialism*, halaman 220 - 226, yang menyatakan adanya dua kelompok; kelompok yang satu menyuarakan para pemilik tanah, kelompok yang lain menyuarakan para pedagang. Dalam kelompok pertama Ashraf mencatat Ayatullah Burujirdi, Ayatullah Behbehani, Ayatullah Khunsari, Ayatullah Tunekabunin, dan Ayatullah Amuli. Dalam kelompok kedua, yakni kelompok yang lebih progresif, dia mencatat Ayatullah Khomeini, Ayatullah Milani, dan Ayatullah Shari'atmadari. Dua orang yang terakhir ini digolongkan oleh Akhavi sebagai orang-orang konservatif! Pada tanggal 2 Februari 1963 Milani menulis kepada Alam bahwa land reform akan merugikan para pemilik tanah kecil: lihat Michael Fischer, *Iran*, halaman 179. Klasifikasi ketiga tentang para ulama diberikan oleh Dr. Bagha'i dalam salah satu dari pamflet-pamfletnya. Sesungguhnya, dia membedakan tiga kelompok. Kelompok pertama adalah apolitis dan hanya berpegang pada masalah-masalah keagamaan – sejauh ini kelompok ini adalah kelompok yang terbesar. Kelompok kedua adalah yang terkecil, karena kelompok ini terdiri dari pemimpin-pemimpin politik yang sebenarnya di antara para ulama, yang berjuang baik demi kepentingan Islam maupun rakyat. Bagha'i menyatakan bahwa sangatlah sedikit yang tergolong dalam kategori ini dan akhir-akhir ini dia hanya mengetahui dua orang pemimpin keagamaan yang memenuhi syarat: Kashani dan Khomeini. Kelompok

ketiga juga kecil dan terdiri dari para pemimpin keagamaan yang menggunakan agama untuk tujuan-tujuan parokial mereka sendiri. Bagha'i, tanpa menamakan mereka, menyebutkan bahwa ada tiga orang dalam kategori ini selama masa yang menarik kita sampai di sini, *Dar Pishgah-i Tarikh*, halaman 397-398. Sejauh ini Ayatullah-Ayatullah yang saya ketahui tidak menentang land reform secara eksplisit adalah Shari'atmadari dan Rowhani (lihat Cottam, *Nationalism*, halaman 308, Catatan 13) dan Taliqani (lihat Akhavi, halaman 93). Kedudukan Khomeini adalah kurang jelas. Saya belum pernah menjumpai satu pun pernyataan atau pidato di mana dia sendiri menyatakan menentang land reform, meskipun dia benar-benar menentang kebijaksanaan pembaharuan Shah. Hal ini mungkin merupakan alasan mengapa E. A. Doroshenko, *Shi'itskoje Dukhovenstvo v sovrennom Irane*, (Moscow, 1975), halaman 109, menyatakan bahwa Khomeini menentang land reform. Salah seorang penulis biografinya, Rowhani, *Barrasi*, (halaman 170, Catatan 1) menyatakan bahwa dia tidak mengetahui satu pun pemimpin keagamaan yang menentang land reform. Dia menyebutkan fakta bahwa Arsanjani mengirim sebuah telegram kepada Shari'atmadari, Gulpaygani dan Najafi pada bulan Esfand 1340/Desember 1961 untuk mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri kepada mereka dan untuk berterima kasih kepada mereka atas dukungan mereka terhadap land reform. Karena ada bukti-bukti yang saling bertentangan, masalah ini memerlukan penelitian yang lebih jauh.

51. Zonis, *The Political Elite*, halaman 73 dan seterusnya; Cottam, *Nationalism*, halaman 305-306.
52. Dari sebuah pamflet yang dicetak dan diedarkan secara rahasia.
53. *Iran Almanac*, 1963. halaman 394-395, 433.
54. Ibid., halaman 433; *Echo Reports*, Teheran, 8 Juni 1963, nomor 386, "Religious Demonstrations and Clashes", halaman 4.
55. *Iran Almanac*, 1963, halaman 433-434.
56. Berdasarkan pamflet-pamflet yang dicetak dan diedarkan secara rahasia yang saya miliki. Tentu saja oposisi keagamaan menuduh Front Nasional sebagai nonkooperasi dan bahkan bertentangan dengan pemimpin-pemimpin keagamaan, lihat Rowhani, *Barrasi*.
57. *Echo Reports*, Teheran, 26 Agustus 1963, nomor 63, nomor 397, "Tehran Riot Trials", halaman 1-2.
58. Anonim, Zendiginameh-yi Imam Khomeini, (Qum, tak bertahun) volume ke-2, halaman 38-43. (Buku ini memuat banyak pidato Khomeini dan diterbitkan oleh Sekolah Theologi Faidiya).
59. Lihat Catatan 59; Algar, "Oppositional Role", halaman 247-249; Zendiginameh-yi Imam Khomeini, halaman 50-58, 90.
60. Lihat Catatan 48; pada saat itu Khomeini digambarkan dalam sumber tersebut sebagai berikut: "Dia sekarang dianggap sebagai salah seorang yang paling terkenal dan berpengaruh dari antara ulama Syiah di Qum,

dinilai dari begitu banyak calon mahasiswa yang belajar theologi dari dia dan jumlah sumbangan yang dia terima dari para pengikutnya. Diberitahukan bahwa pengikut-pengikutnya di Iran dan Pakistan menyumbang kira-kira satu juta rial setiap bulan kepadanya untuk digunakan dalam tujuan-tujuan keagamaan yang dia pandang berguna. Sebagian besar sumbangan-sumbangan tersebut digunakan untuk pemeliharaan sekolah keagamaan. Setiap mahasiswa theologi menerima sepotong roti untuk dirinya sendiri dan setiap anggota keluarganya ditambah dengan suatu funjangan bulanan kontan."

Suatu detail lain yang menarik dalam kehidupan Khomeini menyangkut masa awalnya yang oleh para penulis biografinya hanya diberi penjelasan secara umum. Pada tahun 1316/1937 Khomeini bekerja di Idara-yi Ma'arif va awqaf-i Qum va Mahallat (kantor pendidikan dan waqaf untuk Qum dan Mahallat) yang merupakan bagian dari Kementerian Pendidikan. Salah satu tugas Khomeini di kantor ini adalah menjadi seorang anggota panitia ujian yang meluluskan calon-calon untuk studi-studi keagamaan. Suatu sertifikat yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh panitia ini membebaskan pemiliknya dari dinas militer. Para mahasiswa dan sarjana keagamaan juga memerlukan suatu izin untuk mengenakan pakaian-pakaian "keulamaan" (misalnya sorban, aba, dan sebagainya) selama masa Reza Shah.

61. Kedua rancangan undang-undang tersebut telah diajukan kepada Majelis pada akhir tahun 1963, tetapi pembicaraan mengenai status diplomatik personil Amerika Serikat telah ditunda hingga benar-benar sampai akhir tahun 1963 dan kemudian hanya dibicarakan dalam suatu rapat tertutup Majelis dan Senat. Untuk suatu pembicaraan mendetail tentang hal ini lihat pamflet Dr. Bagha'i "Hast ya nist?" 1 Aban 1343/23 Oktober 1964, yang diterbitkan kembali dalam "Kapitulasiyun, gunahi ke Hovoida be an I'teraf Kard", Kerman, 1358/1979. Adalah menarik untuk diamati bahwa pamflet Bagha'i, yang diterbitkan tiga hari sebelum pidato Khomeini, tidak menimbulkan suatu reaksi dari masyarakat pada umumnya ataupun dari pemerintah pada khususnya.
(Lihat juga Catatan 64.)

62. Lihat Catatan 48; Zonis, *Political Elite*, halaman 45-46; untuk suatu terjemahan dari pidato penting ini lihat Lampiran. Algar dengan keliru menduga bahwa pidato ini disampaikan pada tahun 1963. Algar, *Oppositional Role*, halaman 246-247; untuk versi Persia dari pidato ini lihat, antara lain, Rowhani, *Barrasi* ●
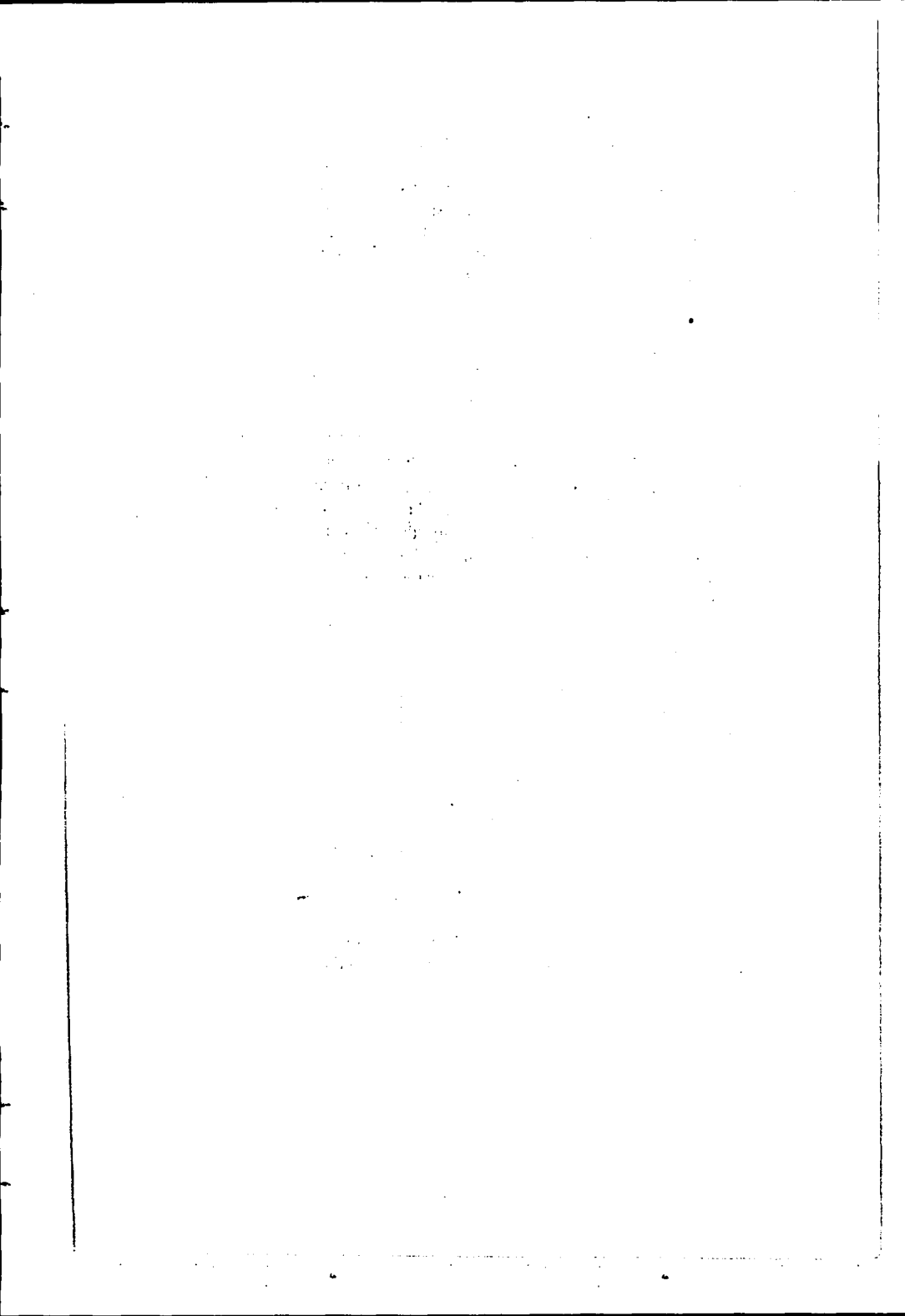
III
PERBINCANGAN TENTANG TOKOH
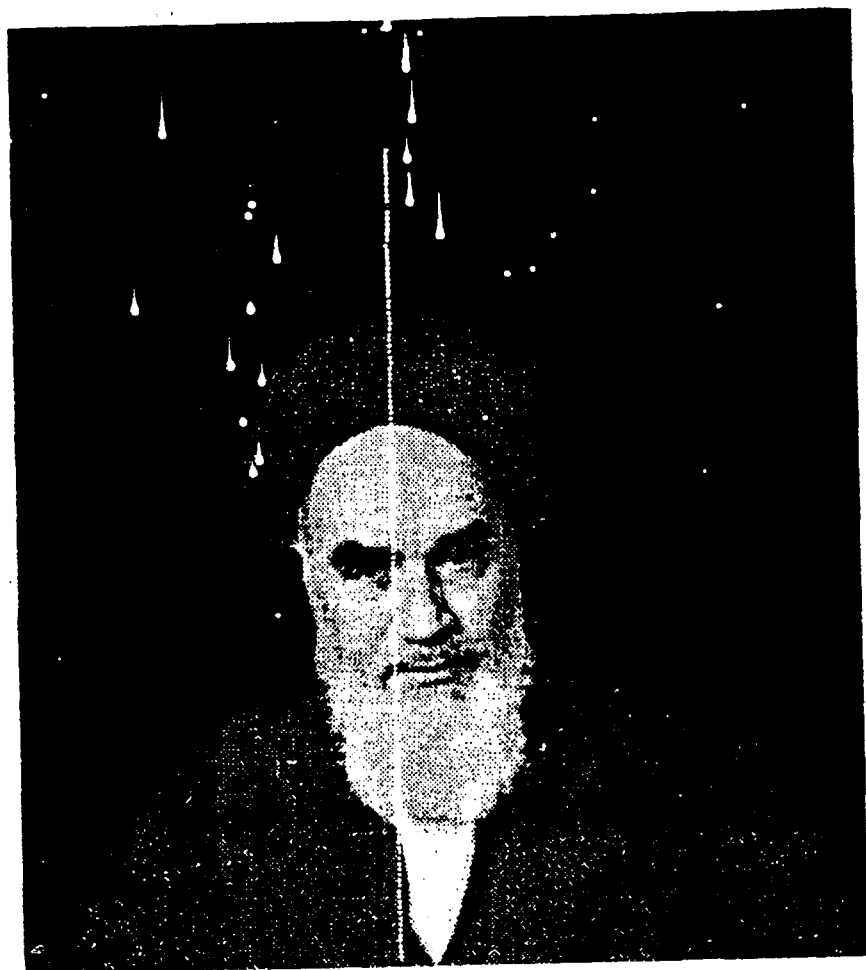
* *Diterjemahkan dari KHOMEINI, THE EMBODIMENT OF A TRADITION, Kuliah Dr. Hamid Algar. Penyunting bahasa Inggris oleh Dr. Kalim Siddiqui. Tanpa keterangan.*

Bab 9. Khomeini Penjelmaan Sebuah Tradisi

Oleh • Dr. Hamid Algar

DALAM kurun waktu selama dua tahun terakhir ini, pidato-pidato Imam Ayatullah Khomeini telah memberikan cakrawala pandangan dunia baru bagi kaum Muslimin dan pergerakan Islam. Cara penyampaiannya mungkin tampak sudah kuno, tetapi pesan yang dikandungnya mempunyai nilai originalitas dan kesegaran yang telah lama hilang dari kancah politik kaum Muslimin. Ia dengan tegas menutup abad apologi, namun demikian sikap kerendahan hati pada puncak prestasi yang dicapainya merupakan pelajaran bagi perilaku pribadi yang hanya sedikit bandingannya dalam sejarah. Pesan-pesan Sang Imam mempunyai relevansi yang sangat tinggi terutama bagi kita yang mengenyam pendidikan barat dan menyerap gaya hidup barat dan bahkan kebudayaan serta pandangan barat. Salah satu sifat dasar pendidikan model barat adalah membuat individu menjadi angkuh dan egosentris. Hal ini tercermin dalam sikap para lulusan baru yang penuh optimistis pada upacara wisuda. Ia mengawang-awang di atas landasan intelektual. Mereka yang berhasil meraih gelar profesi tertinggi, seperti misalnya dalam bidang obat-obatan, hukum dan teknik, sudah merasa tidak manusiawi lagi. Kita sebagai kaum berpendidikan barat hanyalah merupakan bentuk terendah dari apa yang disebut *Ummah.* Kita semua adalah penyebab kemun-

duran dan kehinaan. Kita harus mengkaji kembali norma-norma perilaku Islami; bahkan dari hal-hal yang sangat mendasar sekalipun. Kita harus mengontrol kecongkakan kita. Kita juga harus mengerahkan keahlian kita yang masih ada, kalau kita memiliki keahlian, untuk mengabdi kepada pergerakan Islam. Pelayanan terbaik yang dapat kita sumbangkan adalah menyuarakan secara sistematis, dalam idiom modern, mengenai pandangan dunia tentang Islam. Kita juga dapat memobilisasikan sumber-sumber manusia dan material dari *Ummah* yang sekarang ini terperangkap dalam pengejaran cita-cita yang bertentangan atau tidak selaras dengan cita-cita pergerakan Islam.

Untuk memberikan ikhtisar pada beberapa tema pokok yang saya coba mengungkapnya pekan lalu, Revolusi Islam sangat berbeda dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada abad ini yang sudah berurat berakar dicatat dalam sejarah. Jauh dari sekedar perubahan radikal dengan sifat-sifat dasar dan perkembangan-perkembangan bangsa Iran yang sangat cepat, tetapi sebaliknya, hal ini merupakan kelanjutan dan hasil yang dicapai dari perkembangan-perkembangan politik, spiritual dan intelektual selama bertahun-tahun.

Pekan lalu saya memberikan tekanan pada perkembangan lembaga ulama Syi'ah, mulai dari permulaan masuknya mereka ke Iran pada periode pemerintahan Safavid. Kemudian saya memberikan gambaran tentang munculnya mereka setahap demi setahap sebagai kelompok yang memberikan tidak hanya kepemimpinan keagamaan dalam artian yang sempit dan teknis, tetapi juga kepemimpinan yang menyangkut sifat-sifat dasar nasional dan politik, yang pada gilirannya menggugat legitimasi institusi monarki.

Saya terpaksa harus menghilangkan topik-topik dan nama-nama tertentu, dan melalui pengantar topik hari ini – tokoh yang sedang mencapai puncak dari keseluruhan tradisi ulama, Ayatullah Khomeini – saya akan memberikan keterangan lebih mendetail pada beberapa aspek yang sudah saya singgung serba sedikit pekan yang lalu.

Pertama, akan sangat menyimpang bila kita memandang lembaga ulama hanya dari sudut pandangan yang paling menarik perhatian kita – yaitu dari segi politik. Kita juga harus ingat bahwa ulama, tidak hanya dalam konteks Syi'ah dan Iran, merupakan pelindung dan cermin kesetiaan tradisional yang melandasi gerakan sosial dan politik.

Apabila kita menengok keadaan spesifik aliran pemikiran Syi'ah di Iran, kita dapat melihat bahwa sejak periode pemerintahan Safavid – abad keenam belas pemerintahan Kristen – kaum ulama telah mempelajari dan mengolah berbagai bidang ilmu pengetahuan. Semuanya ini termasuk tidak hanya sekedar ilmu pengetahuan teologi pada umumnya – Qur'an, hadits, tafsir, Fiqih dan sebagainya – tetapi juga filsafat, suatu bentuk filsafat tertentu yang lebih sesuai dengan konteks Islam, dan mistik, juga suatu bentuk mistik yang sesuai dengan konteks Islam, khususnya Syi'ah.

Tentu saja, kalau kita melihat Ayatullah Khomeini dan reputasi yang dicapainya, kita dapati bahwa dialah puncak dari tradisi ulama Syi'ah di Iran, tidak hanya dalam memberikan pengaruh yang begitu luas dan sangat hebat dalam bidang politik dan sosial, tetapi juga berkenaan dengan dimensi yang semata-mata dipelajari dari tradisi. Dalam hal inilah dia juga menjadi tokoh yang tak ada bandingannya.

Inilah salah satu hal yang perlu mendapat perhatian kita. Untuk dapat memperoleh pemahaman tentang Revolusi Islam di Iran dan peranan yang dipegang oleh ulama di dalamnya, terutama Ayatullah Khomeini, kita perlu melihat tidak hanya sekedar teori politik mereka, tidak hanya sekedar sensibilitas dan strategi serta identifikasi mereka dengan aspirasi rakyat banyak, tetapi juga latar belakang pengembangan pemahaman pengetahuan tentang Islam dan kesalehan yang mendasari dari mana mereka muncul.

Kedua, sebagai catatan kaki terhadap kuliah pekan lalu, saya akan membicarakan dua orang tokoh yang secara langsung memberikan latar belakang terhadap munculnya Ayatullah Khomeini. Yang pertama adalah Syaikh Abd Al-Ka-

rim Hairi dan yang kedua adalah Ayatullah Borujerdi. Yang pertama mempunyai peranan yang sangat penting sebagai pendiri lembaga pendidikan agama di Qum, tempat Ayatullah Khomeini menuntut ilmu, dan dalam beberapa hal sebagai benteng utama Revolusi Islam di Iran, dan juga sebagai ibu kota keagamaan yang telah memberikan tempat tinggal bagi Ayatullah Khomeini. Syaikh Abd Al-Karim Hairi hidup antara tahun 1859 sampai tahun 1936. Qum merupakan salah satu pusat aliran pemikiran Syi'ah tertua di Iran. Bukan secara kebetulan, Qum juga sebagai salah satu kota yang didirikan di Iran oleh para penakluk negeri itu, yaitu kaum Muslim Arab. Secara tradisional memang telah menjadi kubu pendidikan Syi'ah. Bahkan sampai dengan abad sekarang ini pusat-pusat pendidikan Syi'ah terpenting yang memegang otoritas terbesar di Iran berada di luar kota, di kota-kota yang dikenal dengan sebutan *'atabat* – yaitu kota-kota Irak, tempat para imam dimakamkan: Karbala, Najaf dan Kazimayu, dan masih ada yang lain. Hampir seluruh imam yang terkemuka memperoleh pendidikannya di sana. Beberapa di antaranya, meskipun dilahirkan di Iran, akan menghabiskan sebagian besar kehidupannya di sana.

Situasi semacam ini hingga pada tingkatan tertentu masih tetap berlangsung, tetapi kota Qum di Iran menjadi terkenal sebagai akibat dari aktivitas ulama penting yang bertutan, yang pertama di antaranya adalah Syaikh Abd Al-Karim Hairi. Pada tahun 1922 ia mendirikan apa yang dikenal sebagai *Hauze-ye Ilmiye,* yang secara kasar dapat diterjemahkan menjadi lembaga pengajaran. Lembaga ini merupakan kumpulan dari berbagai college dan lembaga pendidikan, yang diorganisasikan secara informal dan terdiri dari sejumlah guru, yang menawarkan aneka ragam ilmu pengetahuan agama tradisional, digabung dengan filsafat dan mistik.

Ada sebuah tradisi yang dikaitkan dengan imam keenam Syi'ah, bahwa pada waktu mendatang ilmu pengetahuan akan muncul di Qum dan disebarluaskan dari sana ke selu-

ruh Iran dan ke seluruh dunia Islam. Syaikh Abd Al-Karim Hairi, untuk memenuhi tuntutan tradisi ini, dengan sadar mengambil langkah untuk menciptakan kembali Qum sebagai pusat pendidikan dan pengajaran agama. Hal ini terlaksana pada tahun 1922, hampir bersamaan dengan pendirian diktator Pahlevi. Meskipun Syaikh Abd Al-Karim Hairi buta terhadap masalah politik, dapat dikatakan bahwa prestasi yang dicapainya pada akhirnya memberikan sumbangan secara tidak langsung terhadap penggulingan dan pembinasaan dinasti Pahlevi.

Meskipun ia gagal untuk melakukan oposisi yang efektif terhadap Riza Khan dan institusi diktator Pahlevi, Syaikh Abd Al-Karim Hairi menyesali ketidakaktifannya dalam masalah ini, dan ia dikabarkan meninggal dalam keadaan yang penuh kesedihan.

Tokoh kedua yang langsung memberikan latar belakang terhadap munculnya Ayatullah Khomeini adalah, tentu saja, Ayatullah Borujerdi (1875 – 1961). Ia adalah seorang *mujtahid* terkemuka dan seorang *marja-i taqlid* periode sesudah perang. Ia melanjutkan dua hal yang ditekankan oleh Syaikh Abd Al-Karim Hairi – memperkuat lembaga pengajaran di Qum sebagai pusat arah spiritual dan keagamaan, dan mengutamakan ketenangan dalam kancah politik. Ia mengorganisasi suatu jaringan kerja di seluruh Iran dalam mengumpulkan *zakat, khums* dan pajak-pajak denda karena pelanggaran agama, yang memberikan independensi dan stabilitas finansial bagi lembaga keagamaan di Qum. Jaringan kerja ini, yang didirikan untuk tujuan-tujuan semacam ini, kemudian menjadi sangat bermanfaat selama Revolusi Islam.

Pada waktu yang sama, Ayatullah Borujerdi dalam bidang keagamaan semata-mata, memberikan sumbangan perkembangan yang penting walaupun tidak begitu banyak orang yang memperhatikannya – yaitu usaha perundingan melalui para pemimpin Muslim Syi'ah untuk mengadakan pendekatan dengan dunia Islam Sunni. Melalui usaha-usa-

hanya dan kemudian diteruskan oleh Syaikh al-Azhar, Syaikh Mahmud Shaltut, sebuah lembaga untuk *taqrib* didirikan, pendekatan di antara berbagai aliran dalam Islam.

Tema semacam ini juga ditempuh oleh Ayatullah Khomeini, yang berulang-ulang menyuarakan perlunya menjalin kerjasama dan persatuan di antara golongan-golongan yang berbeda dalam masyarakat dunia Islam.

Secara politis, Ayatullah Borujerdi terbuka menerima kritik yang keras. Selama peristiwa-peristiwa huru-hara pada dasawarsa pertama sesudah perang, tahun-tahun yang menunjukkan munculnya partai komunis Iran yang sangat luas dan menakutkan, Partai Tudeh, nasionalisasi industri minyak Iran, munculnya Dr. Mossadeq, kudeta CIA, kita dapati kebungkaman sama sekali di pihak Ayatullah Borujerdi. Bahkan sesudah kudeta keluarga kerajaan pada bulan Agustus 1953, ia menerima utusan rezim Shah di tempat kediamannya di Qum.

Dalam pandangan sementara orang-orang Iran hal ini menyebabkan mereka mengabaikan peranan ulama, para pemimpin agama, dalam oposisi terhadap rezim Shah yang sekarang semakin intensif setelah jatuhnya rezim Mossadeq. Terutama karena peranan Ayatullah Kashani (meninggal 1962), sebelumnya sebagai salah seorang pendukung Dr. Mossadeq dan kampanye nasionalisasi, dalam beberapa hal juga mendua-arti.

Pada tahun-tahun pertama sesudah tumbangnya Dr. Mossadeq dan institusi diktator raja di bawah perlindungan Amerika, kita dapati suatu arus oposisi yang diilhami oleh semangat agama menentang rezim Shah. Tetapi mereka tidak memiliki tokoh sebagai pemimpin; kekuatannya relatif kecil dan terkalahkan oleh bentuk-bentuk oposisi sekular dan kiri yang menentang rezim Shah.

Bagaimanapun, satu dasawarsa setelah penggulingan Mossadeq pada bulan Maret 1963, muncullah dengan penuh keperkasaan untuk pertama kalinya dalam sejarah Iran seorang tokoh hebat, Ayatullah Khomeini. Ia menengge-

lamkan tidak hanya semua pendahulunya dalam tradisi ulama yang sudah saya coba terangkan kepada anda, tetapi juga menenggelamkan tokoh Mussadeq itu sendiri dan tentu saja semua politisi sekular serta para pemimpin lainnya yang menentang rezim kerajaan.

Kehidupan Ayatullah Khomeini sebelum pemunculannya untuk pertama kali di mata masyarakat luas pada tahun 1963 pantas mendapatkan perhatian di sini. Seperti ditunjukkan oleh namanya, ia dilahirkan di kota kecil Khomein pada tahun 1902, dari keluarga yang dari generasi ke generasi sudah menggeluti pengetahuan dan pendidikan agama. Kakeknya bernama Said Ahmad, yang juga dikenal sebagai Said Ahmad Hindi, karena ia menetap selama beberapa tahun di India.

Sejauh yang dapat saya ketahui, keluarganya adalah asli Iran selama beberapa generasi, meskipun pada asalnya, karena ia seorang sayid – sebagai keturunan Nabi – asal-usul keluarganya berasal dari luar Iran. Hanya karena kakeknya saja yang selama beberapa waktu menetap di India. Rupanya ada sejumlah kerabat, bahkan sampai sekarang, yang masih menetap di India, di daerah sekitar Lucknow.

Ayahnya adalah Sayid Mustafa Khomeini, yang mati dibunuh oleh walikota Khomein pada hari-hari terakhir dinasti Qajar, karena melakukan protes terhadap pemerasan dan pajak yang tidak adil serta praktek-praktek penindasan lainnya yang dilakukan oleh walikota terhadap penduduk lokal.

Karier pendidikan dan keagamaan Ayatullah Khomeini dimulai ketika ia berusia 17 tahun, pada tahun 1919, sewaktu ia pergi belajar di kota Arak. Setelah tinggal beberapa saat di sana, ia meninggalkan kota yang relatif kecil dan tidak penting itu menuju pusat pendidikan agama di Iran, yaitu Qum. Kehadirannya di sana tidak lama sebelum pendirian *Hauzeye Ilmiye* oleh Syaikh Abd Al-Karim Hairi. Ayatullah Khomeini segera muncul sebagai salah seorang muridnya yang paling menonjol dan terpenting. Di bawah bim-

bingannya, Ayatullah Khomeini mempelajari ilmu *Fiqih* dan *Usul al-Fiqih,* dan pada saat yang bersamaan ia juga mempelajari filsafat dan mistik di bawah bimbingan salah seorang gurunya yang cukup terkemuka pada waktu itu, yaitu Mirza Muhammad Ali Shahabadi.

Saya akan menyimpang sedikit untuk membicarakan kedudukan filsafat dan mistik dalam pendidikan dan bahkan karier politik Ayatullah Khomeini. Merupakan salah satu keajaiban yang dimilikinya bahwa peranan politiknya dalam memimpin sebuah revolusi, yang tak tertandingi dalam sejarah dewasa ini, telah menenggelamkan prestasi-prestasinya sebagai seorang pemikir, filosof dan mistikus. Seringkali dalam mentalitas seorang modernis Muslim, filsafat dan mistik dipakai untuk melambangkan pengasingan diri dari dunia nyata, pelepasan secara total dari segala jenis peranan politik maupun sosial, seolah-olah mereka hanyalah sekedar benda abstrak yang tidak mempunyai hubungan nyata dengan masalah-masalah yang timbul di kalangan kaum Muslimin dan dunia Islam. Ayatullah Khomeini membuktikan bahwa kedua hal ini apabila dipahami dan diikuti secara benar, sebaliknya akan menjadi pendorong utama untuk membentuk aktivitas yang begitu jitu, yang dibimbing oleh wawasan yang bersih yaitu tidak sekedar dipandang dari segi politik dan strategi saja, tetapi juga wawasan yang benar secara metafisik dan terkendali secara tepat.

Dalam hal mistik, mungkin dapat dikatakan bahwa justru itulah kualitas moral dan spiritual yang digali Ayatullah Khomeini sehingga menjadikannya seperti apa yang dapat kita saksikan sekarang – perwujudan yang sempurna manusia Islam yang ideal. Inilah pemimpin revolusi yang hidup bukan di apartemen-apartemen mewah, yang melewatkan waktu-waktu malamnya untuk sembahyang dan berdoa, yang menu makanan sehari-harinya sangat sederhana. Tampak pada saya bahwa hal yang sangat mendasar pada dirinya dalam filsafat dan mistik adalah relevansi dan efektivitas politik.

Kemasyhuran Ayatullah Khomeini pertama kali dalam lembaga pengajaran di Qum adalah sebagai eksponen kedua-bidang ilmu pengetahuan ini. Ia memberikan sejumlah ceramah yang dihadiri oleh orang banyak mengenai beberapa persoalan pokok yang menyangkut filsafat Islam dan berhasil membangkitkan semangat serta gaya mengajar yang meyakinkan. Pada masa ini ia juga menulis sejumlah naskah, sebagian asli dan sebagian berupa komentar terhadap teks yang ada, yang sebagian besar tidak diterbitkan atas permintaannya sendiri, karena dia berpendapat bahwa penerbitan pada waktu seperti sekarang ini tidak akan banyak membantu, tetapi bahkan akan membelokkan dari tugas-tugas yang lebih mendesak. Ia juga menulis sejumlah buku tentang Fiqih, dan dipandang sebagai ahli dalam bidang itu. Bila saja hasil karyanya dibatasi hanya dalam bidang-bidang tradisional – Fiqih di satu pihak dan filsafat serta mistik di pihak lain – niscaya tidak dapat diragukan lagi ia akan muncul sebagai pribadi yang hebat dalam sejarah spiritual Iran. Tetapi meskipun dalam beberapa hal ia sebagai pelaksana, sebagai orang yang mencapai puncak dari sebuah tradisi, namun ia juga sebagai seorang pemberontak terhadap tradisi lembaga pendidikan yang ada dengan cara mengolah, sejak dari titik awal, kepentingan-kepentingan politik radikal.

Selama periode pemerintahan Riza Khan, Ayatullah Khomeini menerbitkan sebuah buku yang berisi kritik terhadap diktator Pahlevi, dengan judul *Kashf al-Asrar*, 'Pembongkaran terhadap Rahasia'. Buku ini sangat tidak mengenal kompromi dan sangat blak-blakan, ditulis dengan gaya bahasa yang mencerminkan perasaannya. Ia dengan penuh semangat mengkritik rezim Riza Khas dan membongkar rahasia ketergantungannya kepada kekuatan-kekuatan asing, terutama Inggris pada waktu itu. Ia jelas-jelas melihat bahwa permusuhan rezim Pahlevi terhadap Islam tidak sekedar keinginan yang aneh seorang diktator, tetapi merupakan bagian dari strategi komprehensif usaha meng-

hapuskan Islam sebagai kekuatan sosial dan politik di seluruh dunia Islam, dan seperti yang sudah dirancang oleh pusat-pusat imperialisme besar yang menanamkan kepercayaan kepada berbagai wakil imperialisme lokal.

Dalam *Kashf al-Asrar,* ia menulis, misalnya, dalam mengkritik Riza Khas:

'Semua perintah yang dikeluarkan rezim diktatorial bandit Riza Khan tidak ada nilainya sama sekali. Hukum yang disahkan oleh Parlemennya harus dibatalkan dan dihanguskan. Semua kata-kata tolol yang keluar dari pikiran militer yang buta aksara itu semuanya busuk dan hanya hukum Allah sajalah yang akan dapat melawan kebobrokan dari masa ke masa.'

Bentuk ekspresi semacam ini, semuanya tak kenal kompromi dan ditandai dengan wawasan radikal terhadap realitas politik yang ada, menimbulkan perasaan was-was. Cukup menarik karena perasaan itu timbul bukan hanya dipihak rezim Pahlevi saja, melainkan juga di pihak lembaga keagamaan itu sendiri. Karena seluruh kekuatannya, seperti juga lembaga-lembaga lainnya, adalah mengutamakan pemeliharaan-diri dan usaha yang giat demi kemajuan-kemajuan lembaga.

Pada masa ketika Ayatullah Borujerdi masih menjadi tokoh yang dominan di Qum, Ayatullah Khomeini memperoleh kedudukan yang tinggi, tetapi pandangan orang-orang tertentu di sekitar Borujerdi bertentangan dengan pandangan-pandangannya. Pada periode antara runtuhnya Riza Khan pada tahun 1941 dan penggulingan Mussadeq pada tahun 1953, Ayatullah Khomeini tidak mencela secara terang-terangan terhadap rezim seperti yang dilakukannya pada tahun 1963. Ia akhirnya menyatakan rasa penyesalannya yang dalam mengapa perjuangan ini tidak dilaksanakannya lebih awal hingga bertahun-tahun baru ia menyadari bahwa itulah tugasnya yang nyata-nyata sudah jelas. Harus diakui bahwa selama dalam periode ini ia berusaha mencari langkah-langkah ke arah cita-cita realisme politik dan tanggung

jawab dari Ayatullah Borujerdi. Kalau saja usaha-usahanya dalam hal ini sebagian besar mengalami kegagalan, tidak dapat disangsikan lagi akan mempengaruhi sejumlah ulama muda di Qum dan di tempat-tempat lain yang kemudian menjadi bagian dari kekuatan pengatur dalam Revolusi. Bahkan sebelum pengusiran Ayatullah Khomeini dari Iran, ia telah memperbesar jumlah pengikut-pengikutnya – di antara ulama muda di Qum, beberapa di antaranya sekarang menjadi pemimpin-pemimpin Revolusi yang penting. Kemungkinan besar Dewan Revolusi Islam di Iran sebagian besar, kalau bukan keseluruhan, terdiri dari murid-murid Ayatullah Khomeini. Dengan kata lain, mereka adalah orang-orang yang telah dilatih selama bertahun-tahun, baik dalam ilmu-ilmu agama tradisional maupun dalam tugas-tugas perjuangan dan penasehat politik serta kepemimpinan. Daftar nama-nama murid Ayatullah Khomeini yang menonjol kalau ditulis akan memakan banyak halaman. Kita dapat sebutkan di sini dua orang muridnya yang terlintas dalam pikiran – Imam Musa Sadr, pemimpin masyarakat Syi'ah di Lebanon, dan Ayatullah Montazeri, salah seorang pejuang utama menentang rezim Shah di Iran.

Munculnya Ayatullah Khomeini sebagai tokoh yang menonjol dimulai pada tahun-tahun sesudah penggulingan Mussadeq dan munculnya suatu bentuk diktator yang hebat di Iran. Pada tahun 1963, Shah meresmikan apa yang dikenal dalam pers barat, dan tentu saja dalam propaganda di dalam negeri, yaitu White Revolution (Revolusi Putih). Pada kenyataannya Revolusi Putih ini sama sekali berlawanan dengan arti yang dikandungnya, karena satu-satunya yang putih di sini adalah bahwa Revolusi ini dibentuk di Gedung Putih. Tentu saja bukan putih dalam artian tidak berdarah, bahkan hal ini hampir tidak dapat dikatakan sebagai sebuah Revolusi. Sebaliknya, inilah usaha untuk mencegah timbulnya revolusi dan upaya agar revolusi tidak mungkin terjadi.

Apa yang disebut sebagai Revolusi Putih itu terdiri dari sebuah paket langkah-langkah yang menurut dugaan diran-

cang untuk membangun kembali masyarakat Iran guna mensejahterakan kaum petani dan para pekerja industri serta untuk 'meng-emansipasi' kaum wanita. Di antara berbagai langkah yang termasuk di dalamnya, ada dua butir yang mendapat perhatian khusus dalam propaganda rezim Shah dan para pendukungnya di negara asing – land reform dan hak-hak kaum wanita. Mungkin akan lebih tepat bila kita singgah barang sebentar pada kedua sifat dasar langkah-langkah yang ditempuh ini sebelum kita melangkah pada cerita tentang aktivitas Ayatullah Khomeini.

Semboyan land reform di Iran hanyalah penyamaran dari pengrusakan besar-besaran terhadap ekonomi agraria sebagai upaya agar keuntungan sebesar-besarnya masuk ke keluarga raja dan kepentingan-kepentingan agri-bisnis asing, termasuk perusahaan-perusahaan yang bermarkas di Amerika Serikat, Eropa dan, terutama sekali, Israel. Memang sejumlah tanah dibagi-bagikan kepada para petani, tetapi tanah yang dibagikannya adalah tanah yang hampir tidak dapat ditanami sama sekali dan, lebih-lebih lagi, tanah-tanah ini tidak dibagikan secara cuma-cuma; tanah ini dibagikan tidak menurut pembayaran moneter yang berlaku sehingga harus dibayarkan ke bank-bank yang diawasi oleh keluarga raja. Lebih-lebih lagi, sejumlah besar tanah sama sekali di luar pengawasan hukum dan bahkan sebaliknya diserahkan langsung menjadi hak milik keluarga raja, di bawah Yayasan Pahlevi sebagai pelindung pengoperasian finansial keluarga raja, atau diserahkan kepada kepentingan-kepentingan agri-bisnis tertentu yang menggunakan tanah agraria Iran untuk menanam tanaman-tanaman tertentu yang tidak dibutuhkan di Iran, tetapi terutama ditujukan untuk konsumsi pasaran luar negeri. Misalnya, sejumlah areal tanah yang luas di Iran ditanami asperges, suatu jenis tanaman yang sama sekali tidak termasuk dalam bahan makanan bangsa Iran. Pada saat yang sama, mentega yang dihasilkan Iran semakin langka, sehingga di supermarket di Teheran hanya akan anda jumpai mentega dari Denmark.

Penghancuran ekonomi agraria mengakibatkan depopulasi besar-besaran di daerah pedalaman dan para petani berbondong-bondong menuju kota untuk mencari pekerjaan di sana. Orang-orang yang dulunya menduduki kelas-kelas pemilik tanah diubah menjadi spekulan-spekulan real estate di perkotaan dan juga sebagai pedagang impor-ekspor, dalam istilah finansial murni mereka lebih banyak mendapatkan keuntungan dari transformasi ini daripada kehilangan.

Sedangkan mengenai hak-hak kaum wanita, ini merupakan langkah yang lebih banyak dirancang untuk konsumsi luar negeri daripada untuk tujuan-tujuan dalam negeri, karena para penasihat asing Shah sangat sadar akan kebiasaan prasangka-prasangka bangsa barat mengenai sikap Islam terhadap kaum wanita dan berpendapat bahwa inilah satu-satunya jalan untuk membuat Shah tampak sebagai orang yang senantiasa mendapat penerangan dan penuh kebijakan, bertindak mewakili wanita Muslim Iran yang miskin dan teraniaya. Pada kenyataannya telah terjadi transformasi besar-besaran mengenai peranan kaum wanita Iran dalam bidang sosial-politik dalam kurun waktu dua puluh tahun terakhir ini di Iran – lima belas tahun paling tidak – tetapi tujuannya adalah menentang rezim yang berkuasa. Wanita Iran memperoleh emansipasinya bukan melalui langkah-langkah dekrit yang diambil oleh rezim, tetapi sebaliknya, melalui perjuangan menentang rezim, menderita siksaan, penganiayaan, pemenjaraan dan kesyahidan di tangan rezim.

Dalam pernyataan-pernyataan Ayatullah Khomeini yang dikeluarkan sejak Maret 1963 hingga kemudian menentang Shah dengan usahanya untuk membohongi rakyat Iran melalui apa yang disebut Revolusi Putih, tidak kita dapati penyebutan land reform serta hak-hak kaum wanita secara tegas. Adalah hal yang sangat ajaib bahwa hingga tahun lalu masih ada yang mengatakan, terutama pers Amerika – dan kemungkinan besar pers Inggris juga tidak lebih baik – bahwa

kaum Muslimin Iran yang konservatif, reaksioner, fanatik ini berjuang melawan Shah karena oposisi mereka terhadap land reform dan keinginan mereka untuk merebut kembali apa yang secara aneh mendapat istilah 'tanah-tanah gereja' dan karena mereka menghendaki semua wanita dibungkus dari ujung rambut kepala hingga telapak kaki lagi. Absurditas besar-besaran ini tidak berdasar sama sekali, tidak hanya pada waktu Revolusi tahun lalu tetapi sejak lima belas tahun sebelumnya.

Dalam pernyataan-pernyataan paling awal yang dikeluarkan Ayatullah Khomeini pada tahun 1963, yang masih terus dipelihara dan tersedia bagi siapa saja yang dapat membaca bahasa Parsi, ia memisahkan dengan jelas terhadap sejumlah motif tertentu lainnya. Yang pertama ialah tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Shah terhadap konstitusi Iran dan pelanggaran sumpah yang diucapkannya ketika naik tahta untuk memelihara dan melindungi Islam. Kedua, ia menyerang ketergantungan Shah terhadap kekuatan-kekuatan asing, terutama bisa disebutkan di sini Amerika Serikat, dan kedua Israel.

Masalah Israel dalam hubungannya dengan Revolusi Islam mempunyai arti yang cukup penting. Tidak pernah disadari, karena embargo berita dalam apa yang disebut sebagai kebebasan pers barat, bahwa Israel adalah pendukung kedua setelah Amerika Serikat sebagai salah satu pendukung utama diktator Pahlevi. Sangat terkenal di Iran bahwa ada dua hal yang sama sekali bebas dari segala bentuk komentar publik maupun kritik, yaitu peraturan tentang Savak, polisi rahasia yang dibentuk oleh Amerika Serikat untuk Shah, sehingga ada dua hal yang sama sekali harus bebas dari komentar publik maupun kritik. Yang satu adalah keluarga raja dan yang lain adalah Israel. Adalah sangat menarik bahwa Amerika Serikat pun, pada tingkat tertentu dan dengan dalih tertentu, bisa tunduk kepada kritik, meskipun nama Israel tidak perlu disebut.

Ayatullah Khomeini dengan karakteristiknya yang tidak

mengenal kompromi mendobrak peraturan ini pada tahun 1963 dan ia menunjuk adanya hubungan yang dekat dalam bidang militer, politik, intelijen dan ekonomi antara rezim Pahlevi dengan Israel. Tentu saja, dalam pers barat pada tahun 1963 tidak akan anda jumpai satu kata pun tentang hubungan ini.

Sedangkan yang menyangkut land reform dan emansipasi wanita yang diduga menjadi dasar kemarahan, ternyata dalam pernyataan-pernyataan Ayatullah Khomeini pada tahun 1963 dan sesudahnya membuktikan bahwa semua itu tidak benar sama sekali, bahkan tidak perlu mendapatkan komentar lebih panjang.

Sesudah salah satu dari pidato-pidatonya yang diberikan Ayatullah Khomeini di madrasahnya di Qum bulan Maret 1963, suatu serangan terjadi atas madrasah itu oleh pasukan tentara dan polisi rahasia, yang mengakibatkan jatuhnya sejumlah korban dan penahanan terhadap diri Ayatullah Khomeini. Setelah selesai menjalani masa penahanannya, ia dibebaskan, namun jauh dari perasaan takut karena dipenjara, ia bahkan memperhebat intensitas dan frekuensi kecamannya terhadap pemerintah, sehingga pada bulan Juni tahun itu yang bertepatan dengan bulan Muharram, terjadilah kampanye pencerahan mengenai pendapat umum di seluruh negeri yang dilakukan oleh para ulama di bawah pimpinan Ayatullah Khomeini. Melalui seluruh pernyataannya ini ia melanjutkan kecamannya terhadap ketergantungan Shah kepada kekuatan-kekuatan asing, terutama Amerika Serikat dan Israel, serta pelanggarannya terhadap konstitusi Iran dan Islam.

Suatu topik khusus yang tampaknya menjadi katalisator pemberontakan bulan Juni 1963 adalah bantuan orang-orang Amerika di Iran – para penasihat Amerika, personil militer dan bawahan-bawahannya – yang bebas dari yurisdiksi Iran sedemikian rupa, sehingga, seperti dikatakan oleh Ayatullah Khomeini, mereka menjadi anjing-anjing militer Amerika yang setiap saat siap melahap Shah sendiri,

dan ia tak akan memperoleh perlindungan hukum. Persoalan ini, dibarengi dengan kontrak pinjaman dari Amerika Serikat untuk perlengkapan militer, memberikan gambaran yang jelas betapa rezim Shah sama sekali bergantung pada kekuatan-kekuatan asing. Ayatullah Khomeini dengan lantang mengatakan bahwa pengambilan suara oleh Majelis yang telah memberikan persetujuan terhadap semua ini dan langah-langkah yang sejenis adalah haram dan bertentangan dengan Qur'an. Ia menyeru angkatan bersenjata Iran untuk bangkit menggulingkan rezim, dan kepada rakyat juga diserukan agar tidak lagi membiarkan tirani yang 'bekerja menuju perbudakan total terhadap Iran'.

Pada tanggal 15 Khurdad menurut kalender Iran, bertepatan dengan tanggal 15 Juni 1963, pemberontakan secara luas terjadi di berbagai kota di Iran, yang kemudian dipadamkan secara keji dengan menggunakan tindak kekerasan. Bukan untuk pertama kalinya dalam karier Shah, ia memerintahkan polisi rahasianya dan pasukannya untuk menembak mati. Diperkirakan pada hari itu dan pada peristiwa-.peristiwa sesudahnya terdapat paling tidak sejumlah 15.000 orang terbunuh.

Ayatullah Khomeini dijebloskan ke penjara kembali, kemudian selang beberapa waktu ia diasingkan ke Bursa di Turki. Cukup menarik bahwa, tidak menurut hukum yang berlaku di Turki, ia disekap dengan pengawasan ketat di sebuah rumah yang dijaga oleh anggota polisi rahasia Iran. Perdana Menteri Turki pada waktu itu adalah Sulaiman Demirel yang dikenal sebagai seorang freemason.

Pada bulan Oktober 1965, Ayatullah Khomeini diperbolehkan meninggalkan tempat pengasingannya di Turki menuju lingkungan yang lebih cocok, yaitu Najaf, salah satu kota di Irak yang secara tradisional menjadi pusat tidak hanya pendidikan Syi'ah, tetapi juga sebagai tempat pengasingan para pemimpin agama Iran. Inilah perkara yang terjadi, misalnya, pada abad kesembilan belas dan permulaan abad kedua puluh ketika sejumlah pemimpin agama yang

mendukung revolusi konstitusi, atau sebelum itu, pergerakan pemboikotan tembakau. Mereka mengeluarkan instruksi-instruksinya melalui perlindungan *atabat,* yang terletak di luar Iran.

Di sini pun Ayatullah Khomeini tidak mendapatkan tempat perlindungan yang bebas dari gangguan sama sekali. Perlu dijelaskan dengan sungguh-sungguh bahwa, meskipun diberitakan oleh pers barat dengan tidak benar selama bertahun-tahun, kedatangan Ayatullah Khomeini di Irak sama sekali tidak ada hubungan persekutuan, walau sekecil apa pun, antara dirinya dengan rezim Ba'ath di negeri itu. Bahkan sebaliknya ia kerap kali mendapatkan usikan dari kaum Ba'ath, dalam hubungannya dengan penindasan massal yang dilakukan oleh rezim yang sedang berkuasa di Irak, yang berlangsung secara terus menerus.

Dari Najaf, Ayatullah Khomeini secara periodik terus mengeluarkan pernyataan-pernyataannya mengenai masalah Iran. Shah berharap dengan cara mengasingkannya diri negerinya, maka pengaruhnya akan berakhir dan popularitasnya akan surut. Dikatakan bahwa Ayatullah Khomeini muncul sebagai tokoh yang menonjol dalam Revolusi sebagai akibat dari kevakuman, karena tidak hanya adanya alternatif lain yang tampak. Namun pendapat ini adalah akibat dari ketidaktahuan mengenai perkembangan peranan Ayatullah Khomeini sedikit demi sedikit selama lebih dari empat belas tahun dalam pengasingan. Sepanjang pengasingannya di Najaf ia sama sekali tidak tinggal diam. Bahkan sebaliknya kita dapati dia mengeluarkan berbagai pernyataan tentang masalah Iran, semuanya masuk ke negeri itu dan disebarluaskan yang mengakibatkan dampak yang sangat besar dalam pembentukan opini publik rakyat Iran.

Sebagai contoh, pada bulan April 1967, Ayatullah Khomeini mengirimkan sepucuk surat terbuka kepada Perdana Menteri Iran pada waktu itu, Amir Abbas Hoveyda. Dalam suratnya itu ia mengecam Hoveyda dan Shah karena pelanggaran yang terus-menerus dilakukannya terhadap Is-

lam dan konstitusi. Ia meneliti secara komprehensif semua kebijaksanaan Pemerintah, mengkritiknya satu demi satu, memperingatkan Hoveyda bahwa pada suatu saat nanti ia harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Orang dapat membayangkan bagaimana mungkin Hoveyda dapat percaya dengan surat yang diterimanya dari seseorang dalam pengasingan yang para pengikutnya telah dibunuh secara besar-besaran di jalan-jalan, sebuah surat yang ditujukan kepada Perdana Menteri sebagai salah seorang aparat penindas dalam dunia modern. Namun demikian ini adalah satu keajaiban Ayatullah Khomeini yang mendukung keberhasilan kepemimpinannya bahwa setiap perkataan yang diucapkannya benar-benar mengandung makna. Peringatan ini, yang dikeluarkan pada bulan April 1967, membuahkan hasilnya dengan diseretnya Hoveyda ke meja eksekusi oleh Pengadilan Revolusioner Islam tahun ini (1979), di ujung akhir Revolusi.

Contoh lain dari pernyataan-pernyataan Ayatullah Khomeini selama tahun-tahunnya dalam pengasingan dapat kita ambil dari serangkaian kejadian pada bulan Mei 1970, ketika konsorsium investor Amerika mengadakan pertemuan di Teheran guna memperbincangkan cara-cara untuk menebus dan mengekploitasi ekonomi Iran secara lebih effektif. Terhadap kejadian ini, salah seorang pengikut Ayatullah Khomeini, Ayatullah Saidi, memberikan khotbah di mesjidnya di Teheran yang berisi kecaman terhadap konperensi ini dan menyerukan kepada rakyat Iran untuk bangkit dan protes menentangnya. Ia kemudian ditahan dan disiksa oleh pasukan Savak, polisi rahasia Shah. Ayatullah Khomeini kemudian mengeluarkan pernyataan menyuruh rakyat agar memperbaharui perjuangannya menentang rezim Pahlevi.

Kemudian, kita ketahui Ayatullah Khomeini mengecam penghambur-penghambur belanja negara oleh rezim guna kepentingan perayaan ulang tahun ke-2500 berdirinya kerajaan, suatu perayaan yang dirancang oleh penasihat rezim

bangsa Israel. Ia kemudian juga mempersalahkan peresmian sistem partai tunggal di Iran dengan mengatakan bahwa siapa saja yang bergabung dalam partai ini secara suka rela, tanpa tekanan, berarti pengkhianat terhadap bangsa dan Islam. Ia juga mengeluarkan pernyataan tentang keadaan Islam pada umumnya dan peranan Israel pada khususnya.

Pantas untuk dicatat di sini bahwa dalam dua kesempatan, sekali pada tahun 1971 dan sekali selama Revolusi, Ayatullah Khomeini juga mengeluarkan seruan kepada dunia Muslim pada umumnya, seruan yang diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dan dibagi-bagikan selama musim Haji. Dalam kedua pernyataannya itu ia menghendaki solidaritas di antara sesama Muslim dan kerja sama untuk menyelesaikan masalah-masalah umum yang dihadapi mereka. Menarik juga untuk dicatat bahwa apa yang disebut *champion of Islam,* rezim Saudi, berusaha menahan dan menyiksa sejumlah orang yang bertanggung jawab terhadap penyebaran pernyataan-pernyataan ini untuk jangka waktu yang cukup lama. Makanya, tidak mengherankan bagi siapa saja bahwa rezim Saudi, walaupun mengaku setia kepada Islam, berdiri berjajar dengan Israel, Amerika Serikat dan Uni Sovyet menentang Revolusi Islam. Ini merupakan sejarah oposisi yang panjang terhadap pergerakan Islam revolusioner yang dipimpin oleh Ayatullah Khomeini.

Selama pengasingannya di Najaf, Ayatullah Khomeini menerima tamu-tamu dari Iran dan membuat pernyataan ini itu mengenai masalah Iran dan Islam pada umumnya. Sementara itu di Iran terjadi perkembangan yang cukup berarti yang mendorong timbulnya Revolusi. Yang terpenting di antaranya adalah kegiatan serangkaian ceramah dan tulisan-tulisan Dr. Ali Shariati, yang akan menjadi pokok bahasan dalam kuliah saya kemudian. Dapat saya katakan sebagai permulaan mengenai apa yang akan saya bicarakan tentang dirinya yaitu bahwa pengaruhnya dalam bidang yang berbeda membawa hasil yang saling melengkapi dengan Ayatullah Khomeini. Respon yang begitu hebat dari

rakyat Iran selama Revolusi terhadap pernyataan-pernyataan dan kepemimpinan Ayatullah Khomeini sebagian adalah disebabkan oleh pengaruh Dr. Ali Shariati yang luar biasa pentingnya selama Ayatullah Khomeini berada dalam pengasingan.

Sedangkan peranan Ayatullah Khomeini dalam Revolusi itu sendiri sangat langsung, dalam artian pada permulaan terjadinya Revolusi ia langsung berhubungan dengan para pendukungnya. Pers yang mendapat pengawasan dari Pemerintah pada bulan Januari 1978 menerbitkan artikel yang berisi penghinaan terhadap Ayatullah Khomeini dengan kata-kata yang sangat merendahkan dan cabul. Hal ini segera mengakibatkan kemarahan di kota Qum. Setelah pemberontakan pertama di Qum yang kemudian ditumpas dengan taruhan jatuhnya banyak korban, sejumlah demonstrasi dan protes berlangsung di seluruh Iran dengan kecepatan yang semakin bertambah, hingga bulan Desember tahun lalu (1978) ketika terjadi demonstrasi yang barangkali tersebar tidak hanya dalam sejarah Iran tetapi dalam sejarah modern pada umumnya, memaksa pengasingan Shah sehingga meratakan jalan bagi keberhasilan Revolusi.

Ayatullah Khomeini menambah kecepatan pernyataan-pernyataannya sementara pergerakan melaju dengan begitu cepatnya di Iran. Bulan Oktober tahun lalu ia diusir dari Irak sebagai hasil dari sebuah persetujuan antara rezim Shah dan rezim Ba'ath. Pantas untuk dicatat bahwa Ayatullah Khomeini mempertimbangkan berbagai alternatif negara mana yang akan ditempati. Ia sebenarnya lebih menyukai tinggal di negara Muslim, tetapi seperti yang pernah dikatakannya kepada publik, dan seperti yang pernah saya dengar sendiri darinya, tak ada suatu negara Muslim pun yang menawarkan kemungkinan tempat tinggal kepadanya yang cukup aman dan mengizinkannya untuk melanjutkan kegiatannya. Kenyataan yang sepele ini cukup memberikan penjelasan yang cukup mengesankan bagaimana sifat-sifat dasar rezim-rezim yang memerintah negara-negara Muslim

pada saat ini. Al Qur'an memerintahkan kaum Muslimin memberikan perlindungan bahkan kepada orang-orang musyrik dengan harapan kemungkinan mereka dapat menerima Al Qur'an dan kemudian dapat menerima agama (Islam). Namun kenyataannya, para penguasa pemerintahan negara-negara Muslim sekarang ini yang memberikan dana guna mendirikan masjid-masjid, terutama di tempat-tempat seperti London, New York dan sebagainya; yang mengadakan berbagai konperensi di hotel-hotel Hilton dan Sheraton, menolak memberikan bantuan bahkan hak yang paling asasi, yaitu keamanan dan perlindungan kepada seseorang yang harus dipandang oleh pengamat Muslim secara obyektif sebagai seorang *mujtahid* terbesar zaman sekarang.

Seperti halnya berbagai tipu muslihat dilakukan oleh rezim-rezim yang memerintah Iran sebelumnya, yang satu ini juga berbalik menentangnya pada akhirnya, karena, dihadapkan pada ketidakmungkinan memperoleh perlindungan dari negara Muslim manapun setelah Irak, Ayatullah Khomeini pindah ke Paris. Di sana ia secara bebas lebih mudah didatangi oleh bangsa Iran dari Amerika, Eropa dan Iran sendiri. Ia kemudian juga segera mudah dijangkau dunia pers – tentu saja bukan dunia pers yang cenderung atau bahkan secara intelektual maupun mental ditugaskan untuk mewakili pesan ataupun aspirasi yang benar dari Ayatullah Khomeini. Namun demikian, hubungannya dari Paris dengan Iran jauh lebih mudah dan jangkauan penglihatannya jauh lebih luas dibandingkan dengan sewaktu ia berada di Najaf.

Pembicaraan tentang pernyataan-pernyataan Ayatullah Khomeini selama Revolusi tentu saja akan merupakan topik yang sangat menarik. Orang melihat sepanjang tahun itu, ketika Revolusi mencapai puncak-puncaknya yang baru terdapat beberapa gaya evolusioner dari pernyataan-pernyataannya. Sebagai contoh, bilamana seseorang memperhatikan pernyataannya yang dikeluarkan pada malam hari

menjelang bulan Muharram tahun lalu (1399 H), ia akan melihat ekspresi yang sangat menggugah semangat sehingga dari sudut pandangan literer murni akan mengatakan kurang selaras dengan ungkapan bangsa Iran pada waktu itu. Ketika ia kembali ke Iran dari pengasingannya awal Februari tahun ini (1979), Ayatullah Khomeini tanpa sumber material dari manapun, tanpa susunan partai politik, tanpa gaji dari perang gerilya, tanpa bantuan kekuatan asing manapun, menjadikan dirinya sebagai pemimpin pergerakan revolusioner yang tidak diperselisihkan lagi.

Bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi? Saya akan mencoba memberikan sebagian jawaban-jawabannya dalam kuliah saya yang keempat nanti. Di sana akan saya uraikan peristiwa-peristiwa dan kronologi Revolusi serta kesimpulan umum yang dapat ditarik darinya. Sekarang, dalam hubungannya dengan Ayatullah Khomeini, berikut saya akan membeberkan hal-hal mengenai pentingnya dia sebagai pemimpin revolusioner.

Pertama, 'Revolusi' baginya – saya mempergunakan tanda petik di sini karena kata revolusi mempunyai berbagai konotasi yang tidak selamanya cocok dengan konteks Iran – sebagai pemimpin revolusioner ia tidak hanya terlibat secara intelektual maupun emosional terhadap perkara tertentu, tetapi mengidentifikasikan diri dengan secara total. Ia sama sekali tidak bersedia berkompromi. Mengapa? Sebab ia bukanlah seorang politikus sembarangan yang masih mengharapkan keuntungan politik pribadi. Sebaliknya ia berusaha untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya dengan cara yang sesuai dengan kehendak-Nya.

Salah seorang kenalan saya yang pergi ke Paris untuk menjenguk Ayatullah Khomeini bertanya kepadanya: 'Apakah menurut pendapat anda keadaan kita sekarang ini cukup baik? Apa yang akan terjadi bila angkatan bersenjata terus menerus membunuh rakyat secara massal? Tidakkah rakyat secara cepat ataupun lambat akan merasa bosan dan putus asa?' Ia menjawab dengan tenang bahwa ini adalah

tugas kita untuk berjuang dengan cara yang demikian, sedangkan hasilnya ada di tangan Allah. Justru karena kurangnya strategi, penolakan untuk melaksanakan perhitungan secara matang strategi politik normal, merupakan bentuk tertinggi strategi revolusi dalam konteks Islam.

Kedua. dapat kita katakan bahwa Ayatullah Khomeini telah memungkinkan memenuhi peranan yang besar dan tak tertandingi yang dimilikinya lewat kualitas spiritual dan moralnya, kualitas yang tidak dapat diragukan lagi bahkan oleh mereka yang secara ideologis tidak mempunyai komitmen terhadap Islam. Salah satu hal yang luar biasa adalah bahwa selama Revolusi, orang-orang yang tidak memiliki komitmen terhadap Islam secara ideologis mulai menemukan Islam kembali, dan pada saat yang sama mengakui Islam sebagai kekuatan revolusioner lewat bukti nyata kebajikan moral dan spiritual Ayatullah Khomeini. Tampak begitu jelas di sini bahwa inilah manusia yang berjuang tanpa pamrih untuk memperoleh keuntungan dan kepentingan pribadi maupun golongan, tetapi dialah manusia yang berjuang membawa aspirasi terdalam bangsa Iran ●
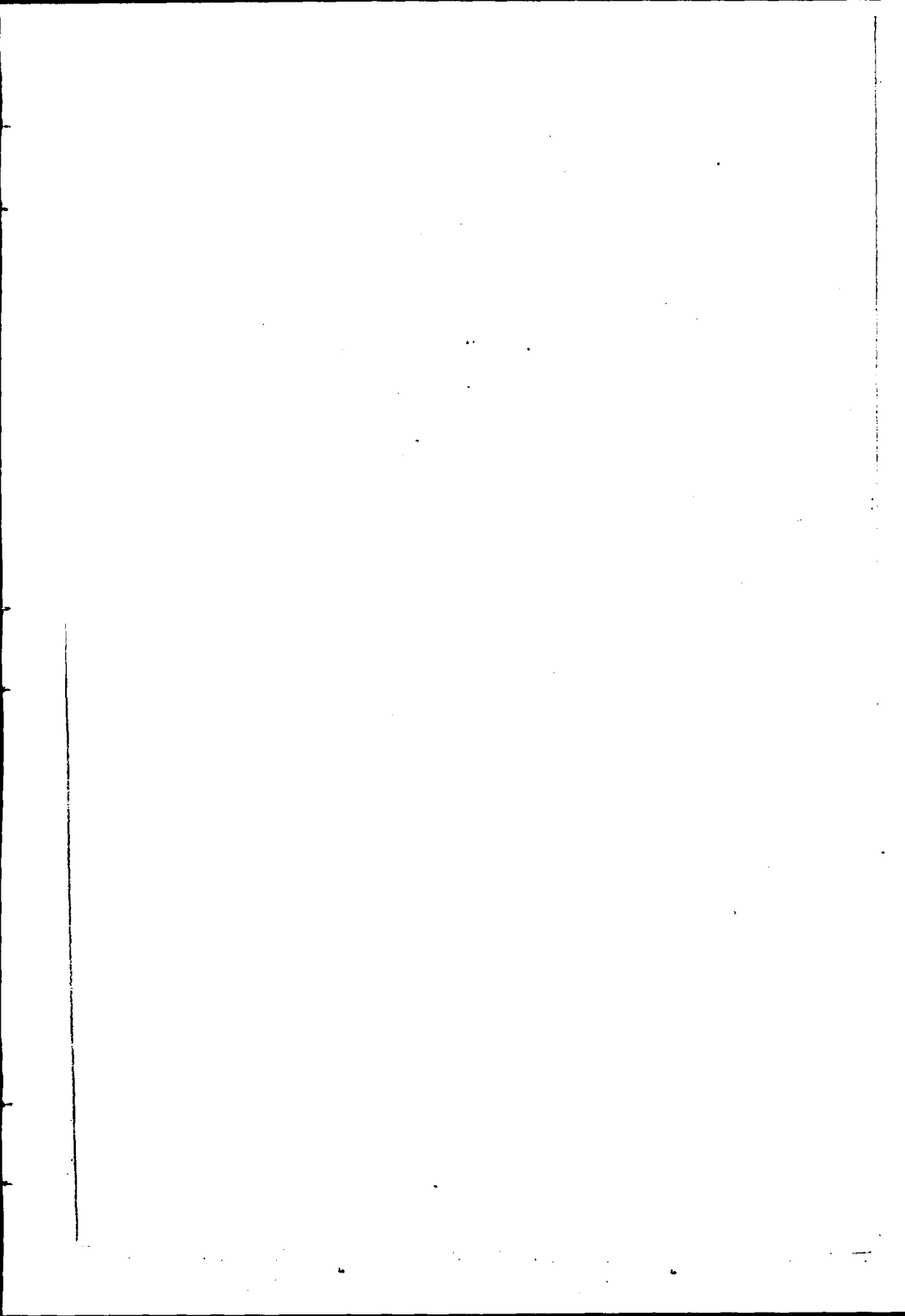
Bab 10.
DISKUSI

Dr Salman: Anda telah menyinggung peranan penting dari filsafat dan mistikisme. Dapatkah anda menguraikannya sepintas kilas saja, tegasnya yang berkaitan dengan sufisme? Saya tidak tahu apakah dalam aliran pemikiran Syiah, sufisme di organisasi seperti dalam dunia muslim Sunni, jika benar maka usul yang diajukan Ayatullah Khomeini mengenai affiliasi perlu diperhatikan.

Profesor Algar: Kata 'mistikisme' masih sedikit diragukan. Saya gunakan kata ini sebetulnya hanya untuk mudahnya saja dalam mencari padanan katanya dalam bahasa Inggris. Sufisme sebagai suatu badan yang terorganisasi hanyalah mempunyai suatu eksistensi periferal saja dalam aliran Syiah. Sebenarnya kami benar-benar mengetahui kaidah-kaidah sufi, namun biasanya kaidah-kaidah ini ditolak oleh ulama Syiah. Apa yang saya maksudkan dengan mistikisme yang berkenaan dengan Ayatullah Khomeini adalah apa yang dikenal sebagai *irfan,* yang merupakan suatu bentuk yang berbeda dari mistikisme yang sesuai dengan konteks Syiah. Hal ini merupakan suatu masalah yang harus berlandaskan pada Qur'an, ajaran Ibnu Arabi dan juga kedua belas Imam kelompok Syiah. Hal inilah yang saya maksudkan sebagai mistikisme dalam konteks ini – suatu bentuk ketaqwaan mistis yang memberikan suatu kontur tertentu terha-

dap kehidupan spiritual. Dengan jelas mistikisme ini telah memberi Ayatullah Khomeini – saya sebetulnya tidak suka menggunakan ekspresi ini, namun terpaksa karena tidak ada ekspresi yang lebih tepat – suatu keduniawian lain yang nyata. Adalah merupakan suatu paradoks bahwa seseorang mempunyai tokoh yang tidak mempunyai ambisi keduniawian sama sekali namun dalam taraf keduniawian dia telah begitu jelas berhasil. Dengan melihat permasalahannya pada tingkat yang lebih dalam lagi, dari sudut pandang Islam, kami lihat bahwa hal ini bukanlah merupakan suatu paradoks sama sekali. Penolakan sepihak terhadap semua bentuk-bentuk keduniawian atas dunia ini memungkinkan mistikisme secara ekstrim menjadi efektif serta aktif di dunia ini.

Di dalam pengertian hadits, seseorang yang merendahkan dirinya dihadapan Tuhan maka dia akan diangkat oleh Tuhan. Hal inilah yang saya maksudkan dengan menyinggung mistikisme pada diri Ayatullah Khomeini.

Pertanyaan: Dapatkah anda memberikan suatu penjelasan tentang konsep imam serta konsep khalifah, sekaligus hubungan antara keduanya, dengan tekanan khusus pada dua point – kesatuan ulama dan, yang kedua, dalam kaitannya dengan situasi di Iran dewasa ini?

Profesor Algar: Pertanyaan tersebut sangat luas, tidak secara langsung berkaitan dengan pembicaraan hari ini. Saya yakin bahwa sebagian besar audience tahu apa yang dimaksudkan dengan istilah 'imam' dan 'khalifah'. Seorang imam dalam aliran Syiah adalah seorang pemimpin keagamaan yang terpilih dari masyarakatnya, Imam yang pertama adalah Ali dan yang terakhir adalah Imam kedua belas, yang dianggap dalam keadaan ghaib, terlepas dari realitas *jamaniah,* meskipun demikian, namun, tetap menjalankan wewenangnya.

Kejadian ini berlangsung terus secara turun-temurun. Lebih-lebih lagi, hak-hak istimewa yang dimiliki para pengganti Nabi Muhammad saw melebihi semua kewajiban kha-

lifah dalam pemikiran Sunni dalam hal militer, administratif maupun politik.
Saya tidak yakin diluar hal itu apakah mungkin untuk membicarakannya tanpa memulai suatu ceramah terperinci yang tidak semestinya. Mungkin yang lebih menarik adalah pertanyaan anda yang kedua – relevansi perbedaan tersebut terhadap keadaan dunia Islam dewasa ini. Saya berpendapat bahwa hal ini adalah minimal, jika tidak non eksisten, sebab kami dalam negara-negara Muslim Sunni tidak mempunyai khalifah, demikian pula dewasa ini kami tidak mempunyai suatu sarana maupun proses yang memungkinkan untuk memilih seorang khalifah. Sepanjang pendapat saudara-saudara Syiah kami, Imam juga dalam keadaan ghaib maka masalah ini tidak akan merupakan suatu problem.

Apa yang perlu diperhatikan baik oleh kaum Muslim Sunni maupun Syiah adalah suatu kerjasama pada semua masalah terpokok yang telah mereka setujui bersama. Sudah jelas bahwa Revolusi Islam, dan telah mencapai pada beberapa taraf, bisa merupakan suatu peristiwa penting bagi adanya suatu penghapusan secara bertahap terhadap rasa prejudis yang telah berabad-abad serta permusuhan antara kaum Sunni dan Syiah.

Imam Khomeini sendiri, ketika saya mendapat kehormatan untuk bertatap muka dengan beliau di Paris, menunjukkan rasa kesedihan yang mendalam ketika kaum Muslim Syiah Iran melakukan syahid di jalan-jalan Teheran selama bulan Muharram tahun lalu, untuk kepentingan pendirian suatu republik Islam, kaum Muslim Syiah dan Sunni yang ada di India pada bulan yang sama yaitu Muharram terlibat dalam suatu pembunuhan antara mereka sendiri, hanya disebabkan oleh permasalahan tazi'ah. Untunglah, sebagai akibat dari Revolusi tersebut, seseorang dapat melihat perkembangan-perkembangan yang mendorong dalam jumlah besar. Sebagai contohnya, di Afganistan, sebuah negara di mana permusuhan antara Sunni dan Syiah telah begitu dalam dan lama – mungkin kira-kira tujuh puluh persen dari

penduduknya adalah Sunni dan tiga puluh persen sisanya Syiah – seseorang dapat melihat segera sesudah Revolusi Islam di Iran, serta selama perlawanan menentang rezim Marxis yang didirikan Soviet, bahwa kebencian historis telah tertanggulangi sampai pada derajat yang memuaskan sekali. Mereka bersama-sama berjuang melawan imperialisme Soviet.

Di Turki, lagi sebuah negara di mana terdapat rasa prejudis yang telah mengakar terhadap aliran Syiah yang disebabkan karena adanya peperangan yang telah berabad-abad antara orang-orang Ottaman dan Safavid, suatu interes positif telah muncul sebagai akibat adanya Revolusi tersebut. Dalam majalah-majalah Islam yang terbit di negara ini sekarang seseorang dapat menemukan artikel-artikel tentang hubungan Sunni-Syiah, suatu hasrat untuk mencapai sasaran, informasi yang tepat mengenai aliran pemikiran Syiah dan di atas semuanya itu untuk menciptakan suatu kerja sama efektif antara gerakan Islam di negara ini serta Revolusi Islam di Iran. Oleh karenanya, daripada mengungkit-ungkit kembali cerita lama mengenai pertanyaan tentang imam dan khalifah, ataupun mengenai perbedaan apa saja yang pernah ada, maka jauh akan lebih bermanfaat bagi kaum Muslim untuk menggunakan energinya untuk menciptakan suatu hubungan kerja sama yang lebih erat. Akhirnya, janganlah kita lupakan bahwa Revolusi Islam telah merupakan satu-satunya penawar utama terhadap permasalahan yang ditimbulkan Zionisme di Timur-Tengah – lebih jauh lagi daripada semua usaha militer yang telah dicoba oleh negara-negara Arab, bahkan lebih jauh lagi daripada semua aktivitas bangsa Palestina itu sendiri, betapapun heroiknya semua ini. Tidaklah dapat dipungkiri lagi bahwa satu-satunya kemunduran fatal yang diderita oleh Zionisme dan imperialisme Amerika di seluruh wilayah Timur-Tengah – atau, jika anda suka lain istilah, di wilayah Muslim – adalah Revolusi Islam di Iran.

Revolusi tersebut merupakan suatu Revolusi yang mem-

punyai potensial dalam kebaktiannya terhadap semua kaum Muslim. Adalah merupakan tanggung jawab semua kaum Muslim dari negara-negara Muslim Sunni – negara-negara Arab, Turki, Afganistan dan semuanya saja – untuk menyatukan diri mereka dengan Revolusi ini dan memberikan setiap bentuk dukungan serta kerja sama yang memungkinkan.

Pertanyaan: Anda menyinggung masalah Israel. Apa peranan minoritas Yahudi di Iran dalam kerja samanya dengan Israel, dipandang dari sudut eksekusi salah satu dari pemimpin-pemimpin mereka?

Profesor Algar: Kita seharusnya tidak mengambil anggapan dengan begitu saja dengan mengatakan bahwa semua minoritas Yahudi di Iran adalah Zionis dalam aspirasinya atau bersekutu dengan rezim sebelumnya, rezim Pahlevi. Tentu saja ada diantaranya yang Zionis. Orang-orang milyuner seperti Elghanian, yang telah dihukum mati, mempunyai kaitan erat dengan Israel juga dengan rezim tersebut.

Tetapi terlepas dari eksistensi masyarakat Yahudi di Iran, negara Israel mempunyai ikatan sangat erat dengan rezim Pahlevi, tidak harus melalui masyarakat Yahudi Iran. Semua ikatan pertalian itu dilakukan, saya kira, pada tahun 1947, tidak begitu lama setelah pendirian Negara Zionis di Palestina, ketika pengakuan de facto disampaikan kepada Israel oleh pemerintah Iran pada waktu itu. Hal ini dicabut kembali oleh Mossadeq.

Kemudian suatu hubungan yang lebih menyeluruh lagi antara Israel dan Pemerintah Iran dilakukan kembali setelah terjadi kudeta pada tahun 1953. Kerja sama dilaksanakan hampir pada semua tingkatan, tapi khususnya pada apa yang dinamakan kerja sekuriti serta intelegensi. Sesudah melewati suatu point nampaklah bahwa tugas staffing dan training Savak diambil alih oleh Mossad, Sekuriti Israel, dari CIA, meskipun CIA senantiasa memegang hak supervisi atas semua operasi Savak. Saya tahu dari beberapa orang yang mengatakan telah diintrogasi dan disiksa oleh orang-

orang Israel, mereka merupakan orang-orang tahanan Savak. Masalah ini merupakan suatu keterlibatan yang sangat dalam. Sebagai imbalannya, Israel memperoleh proporsi minyak yang besar – antara tujuh puluh dan sembilan puluh persen – dari Iran. Mereka bekerja sama pula di bidang militer. Perwira-perwira Iran memperoleh latihan pendidikan di Israel. Dalam kuantitas tertentu ekonomi Iran mengalami tekanan-tekanan, sebagian melalui orang-orang Yahudi di Iran, tetapi tidak meliputi semua masalah.

Terdapat kesamaan besar antara keduanya dalam hal ketergantungan total mereka kepada Amerika Serikat atau dalam keselarasannya dengan Amerika Serikat. Israel hampir tidak pernah lepas dari Amerika Serikat – atau tepatnya keadaan tersebut merupakan kebalikannya. Israel dengan jelas mempunyai suara lebih banyak di Senat daripada yang dimiliki Gedung Putih.

Teranglah bahwa di sini terdapat hubungan yang sangat erat antara Israel dengan Amerika Serikat serta antara Shah dengan Amerika Serikat.

Kerja sama ini tidaklah selalu diterima masyarakat Yahudi. Kerja sama yang demikian ini pun juga memperoleh persetujuan dari masyarakat Bahai. Jika seseorang berbicara masalah minoritas relijius, salah satunya yang sangat penting yang berkaitan dengan staffing rezim Shah, staffing birokrasi serta polisi rahasia, adalah orang-orang Bahai, sebagian besar dari kelompok ini bagaimanapun juga merupakan orang-orang asli Yahudi. Sejumlah besar kasus dapat disebutkan, termasuk bekas wakil kepala Savak, Sabeti. Dia adalah seorang Yahudi asli dan memperoleh pendidikan cara-cara penyiksaan di Israel. Bersama-sama dengan sebagian besar para perwira lainnya dia sekarang tinggal di Israel setelah Revolusi. Dalam hal ini orang-orang Bahailah yang harus dituntut dan bukannya orang-orang Yahudi sebagai suatu masyarakat.

Israel, dengan penelusurannya terhadap immigran-immigran secara terus menerus, pernah berpikiran bahwa si-

tuasi yang ideal sedang berlangsung di Iran dengan adanya Revolusi tersebut. Tetapi terlepas dari suatu minoritas yang memperoleh keuntungan besar selama di bawah rezim Pahlevi, bagian terbesar golongan Yahudi Iran tidak menunjukkan suatu interes untuk meninggalkan negara ini dan pergi ke Israel. Golongan minoritas ini sangatlah menarik. Sejumlah kecil di antaranya ada yang duduk sebagai ekonom , yang hampir tidak bisa dituduh sebagai anti-Semitik, yang menggambarkan tentang tibanya para immigran Yahudi Iran di Israel. Begitu mereka membuka gulungan permadani mereka di airport Tel Aviv, emas kencana pun jatuh berhamburan di atas landasan beraspal itu. Hal ini merupakan suatu demonstrasi yang menarik, bahwa dengan jalan ini oligarki Yahudi bisa mengeduk keuntungan selama rezim Pahlevi berkuasa. Namun demikian, bagian terbesar Yahudi-Yahudi Iran telah memutuskan untuk tetap tinggal, sangat merasa tidak puas dengan Perwakilan Yahudi, yang oleh karenanya, mulai menemukan jalan lain dalam taktik sejenis seperti yang telah diterapkan dalam negara-negara Arab sebelumnya, khususnya Irak. Orang-orang ini bergerak terus sembari menulis slogan-slogan anti-Semitik, melemparkan bom ke dalam synagogue-synagogue dan tindakan menentang lainnya. Semua taktik ini terbongkar dan dipublikasikan oleh suatu organisasi di Teheran yang menamakan dirinya Masyarakat Intelektual Yahudi, dan memperingatkan semua anggota masyarakat Yahudi Iran ini menentang taktik-taktik Zionis yang dijalankan ini.

Ketika saya sedang berada di Paris pada bulan Desember dan awal Januari, mengunjungi Ayatullah Khomeini, suatu delegasi orang-orang Yahudi Iran datang berkunjung pada beliau, dan pada kesempatan itu beliau memberi jaminan kepada mereka bahwa tidak hanya orang-orang Yahudi Iran saja yang harus tinggal di negara ini tapi mereka semua yang telah diperdayakan oleh Zionisme serta yang telah bermigrasi ke Palestina – di mana mereka diperlakukan sebagai warga negara kelas kedua sebab asal-usul Asiatik ser-

ta non-Eropa Timur mereka – harus kembali ke Iran, di mana sebagai warga negara republik Islam mereka akan memperoleh hak-hak yang lebih luas daripada yang mereka peroleh di negara Yahudi Israel.

Pertanyaan: Kedudukan apa yang dipegang Ayatullah Khomeini setelah beliau tamat dari institut Qum? Apakah beliau memperkenalkan perubahan-perubahan dalam kurikulum serta methodologi? Saya juga ingin mengetahui apakah kecaman beliau yang secara blak-blakan ditujukan terhadap rezim Shah atas nama para ulama atau atas nama suatu golongan yang telah didirikannya.

Profesor Algar: Mengenai metodologi pengajaran, saya kira benarlah untuk mengatakan bahwa dalam kenyataannya Ayatullah Khomeini telah menghasilkan suatu pembaharuan dalam hal ini beliau menciptakan suatu hubungan rapat antara semua subyek yang diajarkannya serta urusan sehari-hari yang praktis. Untuk sebab ini, beliau memperoleh perhatian yang jauh lebih besar daripada sebagian besar guru-guru lainnya di Qum. Suatu interes yang merupakan buntut Revolusi itu adalah bahwa setelah sekembalinya beliau ke Qum untuk pertama kalinya sistematik pengajaran keempat madzab aliran Sunni dalam Islam telah dimasukkan ke dalam kurikulum, untuk menciptakan kesadaran yang lebih mendalam di antara kaum Muslim Syiah akan potensialitas tradisi-tradisi Sunni dan untuk mengambil, jika ternyata sesuai dan dirasakan perlu adanya potensialitas-potensialitas tersebut sebagai jalan pemecahan masalah yang dihadapi Iran.

Nampaklah sejumlah besar orang-orang yang telah mencapai kedudukan penting di Qum dalam hal pembaharuan, pengokohan lembaga pendidikan. Baik Khomeini maupun Ayatullah Shariatmadari telah menunjukkan suatu jasa besar dengan menyusun sillabus pengajaran yang sangat cocok untuk penerapannya pada semua masalah dewasa ini.

Untuk pertanyaan anda yang kedua, saya tidak yakin apakah Ayatullah Khomeini pada tahun 1963 dan seterusnya

berbicara untuk golongan ulama atau atas nama suatu golongan yang lebih sempit. Sebaliknya, beliau melihatnya sebagai suatu kewajiban, sebagai seorang cendekiawan Islam dan sebagai warga negara Iran, untuk berbicara secara bebas atas semua masalah ini. Salah satu motif dari semua pernyataan beliau yang dikumandangkan terus adalah bahwa seorang ulama mempunyai suatu martabat serta kepentingan besar dalam Islam dan bahwa dia tidak bisa memenuhinya hanya dengan membaca ataupun juga mengajarkan teks-teksnya, bahwa dia mempunyai suatu kewajiban yang jauh lebih komprehensif, ditunjukkan dalam tradisi yang ada, dan bahwa dia adalah ahli waris Nabi Muhammad saw yang juga secara efektif tidak mungkin hanya meneruskan semua ajaran Nabi dengan jalan menyuguhkannya kembali di madrasah-madrasah kemudian membaca kemudian mengomentari teks-teks tersebut. Dia mempunyai suatu kewajiban untuk membimbing umat yang jauh lebih komprehensif. Beliau, Khomeini, berbicara sebagai seorang alim, sadar akan sifat tanggung jawab yang komprehensif, namun hal ini berbeda dengan pidatonya atas nama ulama sebagai suatu golongan. Sebaliknya, beliau memusatkan perhatiannya pada kesatuan bangsa Iran dan di luar itu pada kaum Muslim secara luas.

Pertanyaan: Anda menunjukkan rasa kesangsian anda tentang peranan Ayatullah Borujerdi, dan anda menyinggung-nyinggung Ayatullah Kashani. Dalam penglihatan saya anda mengambil suatu pandangan yang unidireksional atas ulama Iran. Anda tentunya telah menjelaskan hal ini dalam ceramah anda yang terakhir – bahwa kesulitan yang ditimbulkan oleh suatu kenyataan akan adanya berbagai interpretasi yang memungkinkan terhadap peranan seorang ulama selama dalam keghaiban. Seperti yang jelas pada kerja Ayatullah Naini (1860 - 1936), seseorang dihadapkan pada suatu pertanyaan untuk meninggalkan bidang politik sama sekali dan menanti datangnya kembali Sang Imam dalam realitas fisik atau memikirkan suatu sistem yang sedikit pun

tidak akan pernah sempurna. Jika anda mengambil kedua perbedaan besar tersebut, anda dapat melihat bahwa berbagai ulama telah menetapkan pendirian mereka di antara kedua perbedaan yang ada ini, dan oleh karenanya, mereka melakukan aktivitas mereka dalam bidang politik sesuai dengan interpretasi mereka terhadap ghaib. Nampaknya Ayatullah Borujerdi sangat setuju dengan sikap diam diri tidak mengambil tindakan, meskipun dalam situasi dewasa ini dengan jelas sikap ini nampaknya sangat kurang mendapat perhatian. Tetapi jika sikap ini dipandang dalam konteks tanggung jawab seorang ulama selama keghaiban imam maka sikap ini akan lebih terjelaskan lagi. Saya menginginkan komentar-komentar anda mengenai ini.

Profesor Algar: Saya tidak bermaksud untuk mengkritik Ayatullah Borujerdi atau Kashani mengenai peranan-peranan yang mereka jalankan. Saya hanya berharap bisa menunjukkan dalam konteks historis pengaruh dari sikap-sikap mereka, atau paling tidak persepsi dari sikap-sikap mereka itu. Memang benar bahwa diantara para ulama Syiah terdapat perbedaan-perbedaan pendapat mengenai implikasi-implikasi politik keghaiban. Tetapi kepercayaan umum yang telah memperoleh kekuatan yang semakin menanjak sejak masa Ayatullah Borujerdi adalah apa yang oleh Ayatullah Khomeini digambarkan dalam bukunya sebagai vilayat seorang cendekiawan, selama kewajiban untuk memimpin serta membimbing masyarakat ada padanya.

Saya merasa kurang senang bahwa dalam ceramah-ceramah ini saya diharuskan menggeneralisasikan dan menyederhanakannya secara berlebih-lebihan. Walaupun hal ini merupakan ujud pokok persoalannya, namun harus dijelaskan paling tidak bahwa posisi Ayatullah Khomeini telah berkembang selama bertahun-tahun. Meskipun beliau mempunyai sifat yang sangat berbeda dari semula, saya berpendapat bahwa sikap politiknya – saya tidak akan meggunakan kata 'filsafat' – telah berubah serta berkembang.

Akhirnya pada tahun 1963 beliau menghendaki adanya

pelaksanaan konstitusi yang ada, yang mendukung suatu monarkhi, namun terbatas dalam pelaksanaan kekuatan, bukannya menghendaki institusi suatu republik Islam di Iran. Beliau menghendaki agar Shah yang sedang berkuasa mematuhi serta memenuhi sumpah yang telah diambil untuk tunduk pada konstitusi dan setia terhadap Islam. Saya kira suatu radikalisasi progresif telah mengambil posisi Ayatullah Khomeini selama tahun-tahun pengasingannya, dan lebih teristimewa lagi selama Revolusi.

Banyak hal yang bisa dibicarakan di sini, dan saya berharap telah bisa mendapatkan waktu yang lebih lama. Tetapi seperti yang telah anda ajukan pertanyaan ini mengenai teori politik, yang merupakan masalah penting, saya kira dapatlah dimaklumi untuk mengatakan bahwa menurut pemakaian istilah yang digunakan Ayatullah Khomeini terdapat perbedaan, paling tidak ternyatakan secara tidak langsung, antara republik Islam dan negara Islam. Dalam satu pihak, republik Islam diharapkan menjadi suatu bentuk transisional pemerintah dengan semua kebijaksanaan negara yang ada didalamnya segera disesuaikan dalam suatu kebiasaan umum terhadap semua tujuan Islam dan administrasi urusan negara akan dipercayakan kepada orang-orang Muslim yang ditunjuk. Namun begitu tidak akan terdapat suatu pelaksanaan hukum Islam secara total dalam setiap bidang kehidupan.

Pada waktu yang sama begitu bentuk pemerintahan sementara ini, yang akan menyandang nama republik, berdiri, suatu proses pendidikan serta pencerahan akan berlangsung, berkenaan baik dengan mereka yang telah terasing dari Islam maupun dengan mereka yang Islamnya hampir merupakan suatu tipe tradisional – yaitu, hanya berdasarkan pada doa, puasa dan sejenisnya, tanpa kesadaran penuh akan masalah-masalah politik dan sosial.

Bila proses tersebut telah tersempurnakan, maka republik Islam ini akan digantikan oleh suatu negara Islam. Tidak ada pernyataan eksplisit terhadap akibat ini yang dikeluar-

kan oleh Ayatullah Khomeini, tetapi gagasan tersebut di atas merupakan suatu pengaruh yang dapat dirasakan dari adanya bacaan mengenai semua pernyataan beliau selama tahun Revolusi serta setelah sekembali beliau. Pengaruh tersebut diperkuat lagi oleh pokok-pokok pikiran dari konsep konstitusi yang ada. Salah satu hal yang menarik mengenai konstitusi ini adalah bahwa konstitusi ini tidak mempunyai suatu pernyataan eksplisit yang mengatakan bahwa undang-undang negara harus merupakan hukum Islam. Tentu saja, konstitusi ini masih berupa konsep, dan mungkin perlu direvisi sebelum akhirnya disyahkan, tetapi selama konstitusi ini berlaku maka tidak akan ada suatu ketentuan pun yang menyatakan bahwa undang-undang negara harus merupakan hukum Islam. Bahkan, terdapat suatu ketentuan yang kami lihat dalam konstitusi sejumlah besar negara-negara Muslim lainnya bahwa tidak ada perundang-undangan yang dibuat yang bertentangan dengan Islam, hal ini merupakan suatu perbedaan yang sangat mencolok.

Saya kira dalam konteks Iran hal ini dimasukkan sebagai suatu taraf transisional, suatu taraf yang memuakkan Islam yang kemudian sedikit demi sedikit akan tumbang dan suatu usaha yang bergerak ke arah Islam yang benar-benar utuh akan dilakukan. Di mana permasalahan mengenai akibat tersebut bisa dilihat dalam konstitusi-konstitusi lain, khususnya permasalahan yang timbul di Pakistan, maka hal ini hanyalah merupakan sebagian dari penghasutan rakyat. Tetapi dalam kasus Iran – saya harap saya benar, hanya peristiwa-peristiwa penting yang akan membuktikannya – inklusi ketentuan ini harus dilihat sebagai suatu ukuran sementara. Bahwa sekarang segala sesuatunya sesuai dengan syaria' dan secara spektakuler menerapkan hukum pemotongan tangan serta hal lain sejenisnya akan merupakan suatu hal yang mudah untuk dibuat sebuah deklarasi dalam waktu semalam saja. Namun saya kira hal ini merupakan suatu ukuran keseriusan Revolusi serta kebenaran proses tahapan liberal yang sedang dimulai. Kami dapat menyimpulkan ta-

hapan ini sebagai dalam konsep suatu republik Islam yang akan merupakan pengantar adanya sebuah negara Islam.

Pertanyaan: Bolehkah saya mengajukan sebuah pertanyaan tambahan? Dalam perkembangan pemikiran Ayatullah Khomeini ini, dari teori pelaksanaan konstitusi sebuah negara Islam, apakah anda berpendapat bahwa beliau telah bergerak dalam suatu posisi seperti yang pernah ditempuh oleh Ayatullah Nuri selama revolusi konstitusional pada perputaran abad ini, dan sama sekali tidak sejalan dengan para konstitusionalis?

Profesor Algar: Saya tidak yakin bahwa seseorang dapat menyamakan posisi Ayatullah Khomeini dengan posisi Syaikh Fazlullah Nuri, yang merupakan pemimpin para ulama selama revolusi konstitusional di Iran dalam dekade pertama abad ini. Tidak seperti kolega-koleganya, beliau menentang konstitusi yang ada, mungkin karena alasan-alasan relijius meskipun terdapat suatu kemungkinan yang telah pasti bahwa beliau rupa-rupanya bersedia menerima suap. Akhirnya beliau dianggap bersekutu dengan kerajaan dan di luar itu dianggap bersekutu dengan Rusia. Beliau mengemukakan bantahan-bantahan yang kuat melalui sejumlah besar karya tulis teoritis beliau yang menentang konstitusi yang ada. Sebuah slogannya berbunyi 'Kami menginginkan masyru'a (pemerintahan syaria') bukan masyru'ta (pemerintahan konstitusional)'. Meskipun selama bertahun-tahun sudah kedengaran biasa di Iran dalam perkumpulan-perkumpulan Islam untuk mencemohkan Nuri dan semua demonstrasi-demonstrasi penting. Mereka menderita siksaan, dipenjarakan, dan mendapat perlakuan kejam. Semenjak kemenangan Revolusi mereka tetap mempunyai peranan yang penting.

Adalah merupakan sesuatu hal yang menarik bahwa Revolusi semacam ini, menurut image populer dalam pers Barat, yang dimaksudkan untuk mereduksi kaum wanita ke dalam suatu status inferioritas total harus melihat suatu keunikan atas potret kaum wanita Muslim dalam busana

mereka berdiri di jalan-jalan ikut berpartisipasi dan mengawasi jalannya demonstrasi, seraya menyandang senjata-senjata mesin. Cukuplah untuk berbicara mengenai bukti peranan mereka bahwa pada Hari Jum'at Hitam, tanggal 8 September 1978, ketika lebih dari 4000 orang dijagal di Teheran atas applause Presiden Carter, di antara mereka yang dijagal itu minimum 600-nya adalah kaum wanita.

Ketua diskusi: Para penulis buku tentang kaum wanita dalam Islam masing-masing haruslah dilontari sebuah pertanyaan: 'Dimanakah mereka kaum wanita yang berada diluar Islam?'

Pertanyaan: Dalam outline ceramah anda, sebagai headingnya anda pilih 'Ayatullah sebagai Tokoh Penguasa'. Dapatkah anda menguraikannya lebih panjang lagi?

Profesor Algar: Setelah mempertimbangkan kembali permasalahannya, saya tidak yakin bahwa kata 'penguasa' ada lah tepat dalam konteks ini. Apa yang telah beliau kerjakan sebagai kelanjutan Revolusi adalah tetap melanjutkan peranan yang sama seperti yang telah beliau ramalkan sebelum kemenangan Revolusi – kemenangan seorang penunjuk jalan kebenaran yang berbicara bebas kapan saja dia merasa perlu dalam semua urusan kebijaksanaan. Sebab seorang Ayatullah mempunyai sifat kepemimpinan yang tak pernah diperdebatkan, kapan saja dia berbicara dia pasti muncul sebagai 'pemenang' dalam setiap keputusan.

Sifat-sifat kepemimpinan yang ada dalam diri Ayatullah Khomeini semenjak kemenangan Revolusi pada bulan Februari (1979) telah merupakan suatu pedoman yang meyakinkan bahwa semua tujuan fundamental Revolusi tetap terjaga utuh dan tidak pernah ada deviasi politik yang terjadi. Tentu saja, terdapat suara-suara keluhan dari golongan kiri Iran beserta sekutu-sekutunya, pers golongan kanan Inggris dan Amerika Serikat, yang mengatakan bahwa kediktatoran lama telah lenyap kini telah muncul yang baru menggantikannya. Dalam perbandingan yang menilai ke dua bentuk pemerintahan ini timbullah salah faham yang

meluas. Kita harus bisa menunjukkan bahwa wewenang Ayatullah Khomeini diperoleh sepenuhnya dari kemauan rakyat serta pilihan rakyat. Jika 'beliau mencampuri' semua pekerjaan pemerintah serta mengeluarkan instruksi-instruksi, hal ini janganlah ditafsirkan sebagai keterlibatan yang tidak syah. Sebaliknya, pemerintahan Bazargan mendapatkan wewenangnya sebab telah ditunjuk oleh Ayatullah Khomeini. Massa Muslim Iran menginginkan institusi republik Iran di bawah kepemimpinan Ayatullah Khomeini. Oleh karena itu, wewenang yang beliau pegang justru tepatnya merupakan wewenang yang diwujudkan oleh kemauan rakyat. Hal ini merupakan suatu jabatan yang berada diluar ketentuan umum sekaligus merupakan jabatan. Dapatlah dikatakan bahwa jabatan ini bukanlah sesuatu yang akan dilembagakan pada masa yang akan datang.

Oleh karena itu, saya tidak yakin bahwa kata 'penguasa' yang terdapat dalam sinopsis yang saya siapkan dengan terburu-buru ini tepat. Beliau tetap menjadi seorang tokoh pimpinan. Saya yakin bahwa ini hanyalah masalah sebuah kata yang mempunyai konotasi yang kurang menguntungkan dari berbagai konteks yang berbeda, tetapi seseorang mempunyai pilihan yang sempit. Beliau tetap menjalankan jabatannya sebagai tokoh pimpinan Revolusi Islam tersebut dalam artian apa pun juga.

Pertanyaan: Anda menggunakan kata 'imam' ketika anda berbicara mengenai Ayatullah Khomeini, apakah hal ini terdapat dalam konteks tersebut?

Profesor Algar: Benar. Dalam menunjuk beliau sebagai 'imam' janganlah kita mengasosiasikan pengetrapan kata ini dalam arti yang sama sebagai Kedua belas Imam dalam keyakinan ajaran Syiah. Saya sendiri tidak mengetahui kapan tepatnya istilah ini dipergunakan oleh rakyat Iran untuk beliau. Mungkin beberapa saudara kita dari Iran yang hadir di sini bisa memberikan kejelasan mengenai hal ini. Saya kira gelar ini dihadiahkan kepada beliau selama Revolusi. Gelar ini telah menempel terus pada beliau dan semakin

melekat sesudah Revolusi serta menggantikan gelar yang telah mulai akrab di telinga pers Barat – yaitu, 'Ayatullah'.

Pemakaian kata 'imam', bagaimanapun juga, bisa dibenarkan dengan ketentuan bahwa kita tidak mengacaukannya dengan konsep imam Syiah, sebab wewenang beliau, kepemimpinan beliau, telah berjalan jauh melebihi kepemimpinan yang secara tradisional dijalankan oleh seorang ayatullah. Salah satu hal yang belum pernah saya singgung adalah bahwa, tentu saja, Ayatullah Khomeini dilihat dari sudut pandang seorang mujtahid. Orang-orang tunduk sebagai pengikutnya sebab beliau seorang mujtahid. Tetapi wewenang beliau telah melebihi batas-batas keyakinan marja-i taqlid atau mujtahid. Beliau dita'ati tidak hanya dalam arti keyakinan taqlid, tetapi dalam arti yang jauh lebih komprehensif. Sifat-sifat kepemimpinannya, yang tentu saja berdasarkan pada seluruh konsep taqlid namun bahkan telah melebihinya, terrefleksi dalam penggunaan kata 'imam'. Tentu saja saya ingin mengetahuinya dengan pasti apakah saudara-saudara kita dari Iran benar-benar memahami kata itu ketika mereka menggunakannya untuk Ayatullah Khomeini.

Ketua diskusi: Sudikah saudara Dabbagh memberikan penjelasan kepada kami?

Hussein Dabbagh: Kata 'imam' tersebut baru saja diperkenalkan dalam bahasa kami. Kami sebelumnya tidak pernah menggunakan kata semacam itu bagi seseorang mujtahid. Hal ini merupakan suatu refleksi dari pengajaran Islam, yang berarti seorang pemimpin, politik dan juga spiritual. Tetapi hal ini masih merupakan hal yang baru. Masalah ini biasanya hanyalah disebabkan adanya rasa kurang puas terhadap penggunaan kata mujtahid.

Profesor Algar: Dalam beberapa edisi terbitan Iran, saya ketahui beliau digambarkan sebagai *Naib al-imam,* wakil wali imam yang belum timbul. Apakah hal ini terlalu dibesar-besarkan?

Hussein Dabbagh: Ya. Kata ini memang digunakan oleh be-

berapa orang akhir-akhir ini untuk mengindikasikan terhadap lainnya bukannya untuk mengacaukan arti kata 'imam' yang sebenarnya.

Dr Ezzati: Ayatullah Khomeini adalah seorang mujtahid bukan seorang imam. Penggunaan istilah dalam bahasa Persi sebenarnya dimulai semenjak beliau tinggal di Paris. Mulai saat itu orang-orang kemudian memanggil beliau imam. Dan hal ini sebenarnya bukanlah merupakan hal yang baru. Sebelumnya pernah terjadi hal yang sama, ketika beliau tinggal di Irak, sebab beliau tinggal di lingkungan Arab, dan kata 'imam' dalam literatur Arab berarti 'pemimpin', bukan 'imam' dalam arti 'pemimpin suci' dalam keyakinan Syiah. Istilah yang sama pernah pula digunakan untuk Musa Sadr, dengan panggilan Imam Musa Sadr, karena beliau tinggal di Libanon, dalam lingkungan Arab. Sedangkan menurut istilah Syiah-nya disebut mujtahid.

Profesor Algar: Saya kira hal ini benar. Dalam beberapa literatur yang menggunakan bahasa Arab seseorang akan menemukan penggunaan kata ini yang berkaitan dengan Ayatullah Khomeini jauh hari sebelumnya. Namun pengenalannya dalam penggunaan bahasa Persi di Iran nampaknya masih belum lama.

Ketua diskusi: Kira-kira delapan belas bulan yang lalu kami mengadakan diskusi mengenai pemikiran politik Islam, dan, sebagaimana dalam diskusi-diskusi kita, kami mempunyai partisipan-partisipan baik dari Sunni maupun dari Syiah. Secara individual, kita merupakan orang-orang golongan Sunni dan Syiah, tetapi sebagai suatu institusi kita adalah orang-orang Muslim. Selama diskusi tersebut berlangsung, timbullah suatu pemikiran yaitu jika atau bila orang-orang Muslim sependapat untuk mendirikan sebuah negara Islam modern, maka semua posisi Syiah dan Sunni akan sama, dalam bentuk operasional serta praktisnya tidak akan ada perbedaannya. Apakah anda setuju dengan gagasan pemikiran ini?

Profesor Algar: Saya kira secara umum hal ini sudah pasti

benar. Andaikan seseorang diminta untuk membuat daftar semua perbedaan pokok mengenai keyakinan atau pandangan-pandangan yang ada antara kaum Muslim dan Syiah, maka akan terlihat bahwa awal hal yang paling mendasar yang berkaitan dengan semua permasalahan ini tidak mempunyai aplikasi praktis yang erat. Semua pertanyaan tentang imamah, sesungguhpun pertanyaan ini merupakan kepentingan besar bagi saudara-saudara Syiah, selama kegaiban tetap berkelanjutan tidak akan menimbulkan masalah kolaborasi politik dengan golongan Sunni.

Jika seseorang memandang perbedaan-perbedaan suatu keanekaragaman minor lain yang berkaitan dengan detail-detail fiqih, maka akan nampaklah bahwa beberapa perbedaan antara keempat madzab Sunni tersebut lebih besar daripada perbedaan-perbedaan yang memisahkan madzab-madzab tersebut dari Ja'fari fiqih.

Oleh karena itu, sebagaimana anda utarakan, dalam semua detail operasional dari fungsi negara Islam tidak akan dibutuhkan adanya perbedaan fundamental antara Sunni dan Syi'ah. Jika memang ada, perbedaan-perbedaan itu hanya akan timbul dari adanya ketetapan-ketetapan yang berbeda tidak hanya antara Sunni dan Syi'ah namun juga dari keempat aliran Muslim Sunni, sebegitu jauh pilihan kita adalah mengikatkan diri dengan keempat aliran tersebut.

Dr Ezzati: Meskipun dengan pasti terdapat suatu perbedaan ideologi dan historis antara imamah dan kekhalifahan, antara aliran Syiah dan Sunni, sepanjang menyangkut situasi modern tersebut saya tidak merasa pasti bahwa di antara keduanya terdapat perbedaan ideologi. Soal kepemimpinan merupakan pokok persoalan yang paling penting dalam kaitannya dengan semua masalah politik sebuah negara Muslim. Dasar kepemimpinan dalam yurisprondensi Syi'ah adalah tanggung jawab sosial relijius (wajib al-kifai), yang dewasa ini diikuti pula oleh aliran Sunni. Kedua aliran ini meletakkan dasar wewenangnnya pada doktrin 'Amr bi al-Ma'ruf Wa al-Nahi an al-Munkar'.

Ketua diskusi: Hal ini merupakan suatu point yang biasanya kurang dipahami, dan perlu disadari secara jelas.
Dr Ezzati: Saya setuju, masalah ini harus dijelaskan. Namun kesulitan yang ada adalah bagaimana kita bisa memperkenalan suatu kepemimpinan tipe-Khomeini ke dalam masyarakat Sunni?
Ketua diskusi: Semenjak Revolusi di Iran saya telah pergi berkeliling mengunjungi beberapa negara Muslim Sunni – beberapa negara Muslim Sunni yang paling reaksioner, jika boleh saya menyebutnya demikian. Saya dapat meyakinkan anda bahwa rakyat di negara-negara ini sama sekali telah tergembleng dan imajinasi mereka telah tertambat pada Revolusi di Iran. Beberapa di antara mereka tidak suka membicarakan hal ini dengan mengunci pintu mereka rapat-rapat. Jika semua perbatasan nasional dihapuskan adanya, kemungkinan Ayatullah Khomeini akan ditunjuk dengan aklamasi oleh Ummah secara keseluruhan sebagai pimpinan dunia Muslim dewasa ini. Saya kira semua perbedaan antara Sunni dan Syi'ah akan hilang dalam waktu yang dekat. Perbedaan-perbedaan ini secara artifisial dipertahankan oleh dunia tempat kita berpijak ini. Setujukah anda dengan pandangan ini?
Profesor Algar: Jelas, dengan pasti setuju.
Jamil Sharif: Dapatkah anda mengatakan bahwa menetapnya Ayatullah Khomeini di Paris akan mempunyai suatu impak nyata pada orang-orang Muslim di Francophone Afrika?
Profesor Algar: Saya sebenarnya tidak berwenang untuk berbicara apa pun juga mengenai subyek ini. Semua yang saya ketahui adalah bahwa kira-kira selama sepuluh hari selama saya tinggal di Paris saya lihat serombongan besar orang-orang Muslim dari berbagai negara datang mengunjungi Imam Khomeini. Saya tidak ingat benar apakah di antara mereka terdapat orang-orang Muslim dari Francophone Afrika. Mereka datang berduyun-duyun dari Afrika Utara, Mesir tidak khusus untuk keperluan pembicaraan tetapi ju-

ga bersembahyang bersama beliau. Saya dengar telah timbul pengaruh Revolusi Islam ini di Nigeria, bahwa di sana di antara kaum Muslim Nigeria telah muncul gema Revolusi ini. Nampaknya hal yang sama akan terjadi pula di negara-negara Francophone, namun apakah hal ini sebagai akibat dari pengaruh Ayatullah Khomeini selama pengasingannya di Paris, saya tidak tahu pasti.

Jamil Sharif: Apakah para cendekiawan Muslim lainnya, teristimewa Maulana Maududi, mempunyai pengaruh kuat terhadap Ayatullah Khomeini atau bahkan sebaliknya? Apakah beliau mempunyai pengaruh terhadap para cendekiawan Muslim yang cukup ternama juga terhadap para pemimpin Muslim dewasa ini?

Profesor Algar: Saya tidak tahu apakah beliau pernah membaca karya Maududi. Tetapi saya tahu dengan pasti bahwa pesan-pesan dukungan Maududi kepada Ayatullah Khomeini, sudah menjadi kebiasaan datangnya sangat terlambat, telah sampai pada awal bulan Januari tahun ini. Dan Ayatullah Khomeini memperlihatkan rasa penyesalannya pada saya tidak hanya dikarenakan adanya penolakan dari negara-negara Muslim pengakuan dalam suatu kebiasaan yang mengena pada bulan Oktober 1978, tapi juga dikarenakan tidak adanya satu pernyataan dukungan efektif pun dari gerakan Islam yang beliau miliki.

Bahwasanya beliau seharusnya telah mencurahkan seluruh perhatiannya pada karya-karya Maududi rupa-rupanya merupakan kesempatan yang memungkinkan dalam situasi seperti ini. Secara umum, seseorang dapat berkata bahwa terjemahan dari beberapa karya Maududi dalam bahasa Persi tentu akan mempunyai pengaruh terhadap rakyat Iran setelah hasil terjemahan tersebut beredar. Mungkin beberapa di antaranya telah menimbulkan beberapa pengaruh, namun siapa yang bersedia mengatakan tentang besarnya pengaruh ini? Apakah Ayatullah Khomeini mempunyai pengaruh atas Maududi dalam jalur yang berbeda atau atas para pemimpin Muslim, saya tidak tahu. Sialnya, memang

tidak ada petunjuk terang mengenai hal ini. Sebaliknya, Maududi hampir tidak akan menerima apa yang dinamakan hadiah Raja Faisal dari Studi-Studi Islam.

Pertanyaan: Saya tahu anda telah menyelesaikan suatu karya tentang freemasonry di Iran dan Turki. Adakah bukti-bukti yang menunjukkan hubungan antara Shah dan Zionisme yang ditempa melalui medium freemasonry?

Profesor Algar: Saya kira terdapat banyak saluran komunikasi, perhubungan, kepentingan yang sama dan sejenisnya, dan mungkin freemasonry adalah salah satunya. Sebagai akibat dari Revolusi Islam ini semua pesanggrahan masonik di Iran telah ditutup serta semua arsip-arsip mereka telah pula disita. Suatu seleksi preliminer dari dokumen-dokumen telah diterbitkan. Dokumen-dokumen itu segera membuktikan apa yang telah lama dicurigai. Banyak pesanggrahan-pesanggrahan tersebut yang ada di Teheran maupun di manapun juga di Iran yang berada di bawah pengawasan orang-orang Yahudi atau orang-orang Bahai asli Yahudi, yang memuluskan jalan komunikasi lain dengan Israel dan Zionisme pada umumnya. Tetapi seseorang tidak seharusnya memberi tafsiran ekstrim atas kepentingan satu medium komunikasi ini, ketika begitu banyak tersedia medium sejenis ini. Freemasonry memainkan suatu peranan penting dalam bidang domestik, namun tidaklah perlu dikaitkan dengan zionisme.

Abdullah Ahmed: Saya ingin kembali pada soal kaum wanita. Sebagai Muslimin, seseorang percaya akan komunitas dan bahwa seseorang pertama-tama bertanggung jawab pada komunitas. Apakah anda pernah mengadakan kontak dengan Kate Millet, yang telah ditendang keluar dari Iran dan siapa yang berkata bahwa dia pergi ke sana dalam suatu missi wanita? Apakah missi tersebut?

Profesor Algar: Saya belum mengadakan komunikasi dengan Kate Millet. Saya tidak tahu apa yang dia pikirkan tentang missinya di Iran. Tetapi, terlepas darinya, saya akan mencoba berbicara sedikit mengenai apa yang disebut de-

monstrasi-demonstrasi wanita di Iran yang berlangsung selama empat atau lima hari secara berturut-turut. Sebab yang didesas-desuskan dari demonstrasi ini adalah masalah pembatasan hak-hak wanita oleh rezim Revolusioner. Dalam peristiwa tersebut mereka membuat sebuah slogan yang cukup bagus mengena: 'Dalam musim kebebasan ini tidak terdapat kebebasan'. Ayatullah Khomeini, saya kira dalam amanat terakhirnya yang beliau sampaikan di hadapan khalayak ramai sebelum meninggalkan Teheran untuk kembali ke Qum, dalam pidato yang menyentuh banyak pokok persoalan yang dihadapi Iran, berkata 'Sejak kita di Iran mempunyai sebuah pemerintahan Islam, maka kaum wanita harus menta'ati kriteria Islam dalam hal berbusana, khususnya bagi mereka yang bekerja di kementerian-kementerian! Di sini ada dua hal yang harus diperhatikan. Pertama, hal ini merupakan suatu rekomendasi. Kedua, pidato tersebut ditujukan khususnya kepada kaum wanita yang bekerja di dinas pertanian. Pidato ini haruslah ditafsirkan sebagai suatu perintah yang harus dilaksanakan dengan sarana paksaan jika perlu dan sebagai pengertiannya semua wanita Iran harus segera mengenakan cadar. Kriteria Islam dalam soal berbusana tidaklah ditunjukkan dengan pemakaian cadar, yang sebenarnya hanyalah merupakan tradisi dalam kriteria Islam di Iran. Dengan mengambil beberapa ucapan pidato Ayatullah Khomeini yang disimpangkan, suatu persekutuan gila-gilaan mengorganisasi serentetan demonstrasi-demonstrasi di Teheran. Dalam satu pihak di sana terdapat orang-orang dari golongan kiri, yang, seperti sebagian besar orang-orang yang berbicara masalah persamaan hak mempunyai mentalitas yang sangat elitis. Mereka, karena kurang mendapat dukungan dari kaum buruh, telah berusaha mencomot sejumlah persoalan-persoalan pokok yang sebenarnya kurang berarti dan digunakannya sebagai sarana usaha mereka untuk memperoleh kekuatan. Salah satunya dari sarana ini adalah demonstrasi-demonstrasi wanita tersebut.

Mereka yang ikut ambil bagian dalam demonstrasi-demonstrasi ini antara lain masyarakat Teheran dari eselon tingkat atas. Sangatlah mengasyikkan melihat demonstrasi ini melalui layar televisi. Mereka semua terdiri dari kaum wanita yang mengenakan pakaian model terakhir dari Perancis. Sebagian besar dari demonstran-demonstran ini mengecat rambut mereka, yang dalam hal ini merupakan kepentingan yang berarti. Hal ini menunjukkan semacam kebencian pada diri sendiri. Hal serupa pernah pula terjadi di Amerika Serikat, di mana orang-orang Afro-Amerika mencoba meluruskan rambut mereka. Orang-orang ini berparade di sepanjang jalan, dipimpin oleh Kate Millet dan meneriakkan tuntutan emansipasi wanita. Demonstrasi-demostrasi yang jauh lebih besar yang mendukung Ayatullah Khomeini serta mencela semua intrik-intrik golongan kiri ini dalam satu pihak dan mencela kelas-kelas atas dalam pihak lainnya tidak pernah dimuat dalam pers Barat. Hal ini merupakan sebuah gagasan yang lenyap dengan sangat cepatnya •